



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENANG DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta masih terdapatnya dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
29. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19, 20 dan 24 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/ Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ nvestor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Indikator Tujuan adalah indikator yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
26. Indikator Sasaran adalah Indikator yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
27. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 31. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd
H.TATANG

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/15/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, terdapat dinamika perkembangan daerah, provinsi maupun nasional dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 mempengaruhi beberapa sektor perencanaan yang telah disusun.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain menimbulkan korban jiwa dan juga mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Pemerintah Pusat kemudian berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Hal ini kemudian mempengaruhi *refocussing* anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dapat dicapai, dengan tetap menjaga sinkronisasi dan sinergi pembangunan pusat, provinsi dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 sedang diimplementasikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahannya, serta Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 101

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAN DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN CIAMIS TAHUN
2019-2024

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-9
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-15
1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat	I-16
1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Kabupaten Ciamis	I-18
1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RTRW Kabupaten Ciamis	I-19
1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	I-20
1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar	I-23
1.4. Maksud dan Tujuan	I-29
1.4.1 Maksud.....	I-29
1.4.2 Tujuan	I-29
1.5. Sistematika Penulisan	I-30
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Adminstratif	II-1
2.1.1.2. Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.3. Jenis Tanah	II-4
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi	II-5
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi	II-6
2.1.1.6. Tutupan Lahan	II-6
2.1.1.7. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-7
2.1.1.8. Geostrategis	II-11

2.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
2.1.2.1	Potensi Pertanian.....	II-14
2.1.2.2	Potensi Pertambangan.....	II-18
2.1.2.3.	Potensi Industri.....	II-20
2.1.2.4.	Potensi Pariwisata	II-20
2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana	II-24
2.1.4.	Demografi	II-26
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-30
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-30
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB	II-30
2.2.1.2.	PDRB per Kapita	II-35
2.2.1.3.	Laju Inflasi	II-36
2.2.1.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-37
2.2.1.5.	Kemiskinan.....	II-38
2.2.1.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-39
2.2.1.7.	Indeks Gini.....	II-40
2.2.1.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	II-41
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-43
2.2.2.1.	Pendidikan.....	II-43
2.2.2.2.	Kesehatan.....	II-47
2.2.2.3.	Pengangguran	II-49
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-49
2.2.3.1.	Seni dan Budaya.....	II-50
2.2.3.2.	Pemuda dan Olahraga	II-50
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-52
2.3.1.	Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-52
2.3.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-52
2.3.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-60
2.3.2.	Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan	II-74
2.3.3.	Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-79
2.3.4.	Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan ...	II-83
2.3.5.	Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-84
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-85
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-85
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	II-85

2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	II-85
2.4.1.3.	Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan)	II-86
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-86
2.4.2.1.	Infrastruktur Wilayah	II-87
2.4.2.2.	Kemantapan Jalan	II-87
2.4.2.3.	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum.....	II-88
2.4.2.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.....	II-88
2.4.2.5.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.....	II-88
2.4.2.6.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	II-89
2.4.2.7.	Luas Wilayah Produktif.....	II-90
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-90
2.4.3.1.	Jumlah Investasi.....	II-90
2.4.3.2.	Angka Kriminalitas.....	II-91
2.4.3.3.	Desa Swasembada.....	II-92
2.4.3.4.	Angka Demonstrasi	II-92
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-93
2.4.4.1.	Kualitas Tenaga Kerja	II-93
2.4.4.2.	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).....	II-94
2.5.	Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020.....	II-95
2.6.	Kondisi dan Dampak Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis.....	II-98
2.6.1.	Sektor Pariwisata.....	II-101
2.6.2.	Sektor Industri (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah)	II-103
2.6.3.	Sektor Pertanian.....	II-103
2.6.4.	Investasi dan Perizinan.....	II-104
2.7.	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	II-105
2.8.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).....	II-112
2.9.	Kerja Sama Daerah.....	II-113
2.10.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-141
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3

	3.1.2. Neraca Daerah.....	III-12
	3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD.....	III-18
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020.....	III-21
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-24
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-28
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-29
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-30
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-32
3.4.	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	III-35
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
	4.1.1. Permasalahan Daerah.....	IV-1
	4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-5
4.2.	Isu-Isu Strategis.....	IV-16
	4.2.1. Isu Global	IV-16
	4.2.2. Isu Kebijakan Nasional	IV-22
	4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat 2018-2023.	IV-24
	4.2.4. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024	IV-26
	4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ciamis	IV-32
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi	V-2
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-4
5.4.	Prioritas Pembangunan Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019 – 2024	V-23
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1
6.2.	Kebijakan Pengembangan Wilayah	VI-8
6.3.	Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.....	VI-11
6.4.	Rencana Proyek Strategis.....	VI-50
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis	VIII-1

BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi.....	IX-1
9.1.1.	Masa Transisi Tahun 2021	IX-1
9.1.2.	Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024) ..	IX-2
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-3

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	I-17
Tabel 1.2 Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	I-18
Tabel 1.3 Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar	I-23
Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis	II-2
Tabel 2.2 Ketinggian di Kabupaten Ciamis	II-3
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis	II-3
Tabel 2.4 Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis	II-7
Tabel 2.5 Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-8
Tabel 2.6 Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2015	II-10
Tabel 2.7 Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis Tahun 2015	II-10
Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis	II-13
Tabel 2.9 Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-24
Tabel 2.10 Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020	II-25
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHB (Tahun Dasar 2010)	II-30
Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHK Tahun 2016-2020 (Tahun Dasar 2010)	II-31
Tabel 2.16 Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis (Persen)	II-32
Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)	II-33
Tabel 2.18 <i>Range</i> Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014	II-42
Tabel 2.19 <i>Range</i> Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017	II-42

Tabel 2.20	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.21	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.22	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.23	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.24	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019	II-58
Tabel 2.25	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019	II-59
Tabel 2.26	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019	II-60
Tabel 2.27	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.28	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.29	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.31	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.32	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.33	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.34	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-68
Tabel 2.35	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.36	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.37	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-70

Tabel 2.38	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.39	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.40	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.41	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.42	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.43	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.44	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.45	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.46	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019	II-76
Tabel 2.47	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.48	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.49	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.50	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-78
Tabel 2.51	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.52	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.53	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.54	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.55	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.56	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020	II-82

Tabel 2.57	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.58	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.59	Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.60	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.61	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Melalui Terminal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.62	Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.63	Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.64	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-93
Tabel 2.65	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...	II-94
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020 Kabupaten Ciamis	II-95
Tabel 2.67	Data Tenaga Kerja Yang Di-PHK di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020.....	II-99
Tabel 2.68	Data Tenaga Kerja Dirumahkan Dampak Covid-19 Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020	II-100
Tabel 2.69	Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	II-101
Tabel 2.70	Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2021	II-101
Tabel 2.71	Data Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020	II-102
Tabel 2.72	Data Produksi Peternakan dan Perikanan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Tahun 2020	II-103
Tabel 2.73	Data Investasi dan Perizinan	II-104
Tabel 2.74	Capaian TPB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020	II-105
Tabel 2.75	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.76	Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja	II-113
Tabel 2.77	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019-2020	II-140
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Ciamis.....	III-4

Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	III-12
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	III-17
Tabel 3.4	Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.5	Perkembangan Pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	III-20
Tabel 3.6	Perkembangan Pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	III-20
Tabel 3.7	Proporsi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	III-26
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.11	Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis.....	III-29
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis.....	III-29
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024	III-30
Tabel 3.14	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	III-32
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024	III-32
Tabel 3.16	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.....	III-33
Tabel 3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024	III-35
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Daerah	IV-1
Tabel 4.2	Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan.....	IV-27
Tabel 4.3	Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	IV-28
Tabel 4.4	Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	IV-29
Tabel 4.5	Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.....	IV-30

Tabel 4.6	Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 15 Ekosistem Daratan	IV-31
Tabel 4.7	Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-37
Tabel 5.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	V-8
Tabel 5.2	Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Ciamis Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (sampai dengan tahun 2023)	V-9
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	V-11
Tabel 5.4	Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	V-20
Tabel 5.5	Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional	V-25
Tabel 5.6	Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Kebijakan	V-26
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Selama Periode Tahun 2019-2024	VI-7
Tabel 6.3	Konsep Pengembangan KSK di Kabupaten Ciamis	VI-10
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	VI-12
Tabel 6.5	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis	VI-48
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Ciamis	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	VIII-4

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2030 II-8
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020..... II-26
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2020 II-28
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-28
Grafik 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-29
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 II-35
Grafik 2.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020..... II-36
Grafik 2.8	Laju Inflasi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 II-37
Grafik 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 II-38
Grafik 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 II-39
Grafik 2.11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 II-40
Grafik 2.12	Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-40
Grafik 2.13	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2017 II-41
Grafik 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-43
Grafik 2.15	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-43
Grafik 2.16	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-44
Grafik 2.17	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-45
Grafik 2.18	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-45
Grafik 2.19	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020..... II-46
Grafik 2.20	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-46

Grafik 2.21	Angka Kematian Bayi/1.000 KH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-47
Grafik 2.22	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-48
Grafik 2.23	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020	II-48
Grafik 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-49
Grafik 2.25	Perkembangan Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-50
Grafik 2.26	Perkembangan Jumlah Gedung dan Klub Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-51
Grafik 2.27	Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019	II-85
Grafik 2.28	Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-86
Grafik 2.29	Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....	II-87
Grafik 2.30	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Elektrifikasi) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019.....	II-88
Grafik 2.31	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-88
Grafik 2.32	Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-90
Grafik 2.33	Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-91
Grafik 2.34	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	II-92
Grafik 2.35	Realisasi Nilai Investasi Tahun 2016-2020	II-104
Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	III-7
Grafik 3.2	Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020	III-8
Grafik 3.3	Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 - 2020	III-8
Grafik 3.4	Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016 - 2020	III-9
Grafik 3.5	Rata - Rata Proporsi Komponen Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 - 2020	III-9
Grafik 3.6	Perkembangan Realisasi Kemampuan Belanja Daerah	III-11

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	I-8
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-16
Gambar 1.3 Substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2018	I-21
Gambar 1.4 Integrasi KLHS dalam RPJMD	I-22
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Ciamis	II-1
Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis.....	II-4
Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis	II-5
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis.....	II-6
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis	II-9
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Ciamis Tahun 2015	II-11
Gambar 2.7 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat	II-12
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-12
Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis	II-14
Gambar 3.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	III-2
Gambar 4.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	IV-17
Gambar 4.2 Pondasi Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-19
Gambar 4.3 Perkembangan Revolusi Industri	IV-19
Gambar 4.4 Making Indonesia 4.0.....	IV-20
Gambar 4.5 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	IV-21
Gambar 4.6 Agenda Pembangunan	IV-24
Gambar 4.7 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023	IV-25
Gambar 5.1 Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	V-3
Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis	VI-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan Daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Selanjutnya diamanatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-5873 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat, pasangan Dr. H. Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra telah

dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 April 2019, dan telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dalam periode awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Memasuki akhir tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD, karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga memenuhi ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD tersebut dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan

perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini merupakan ketentuan implementatif yang mendukung penerapan SIPD dan juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam

menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini

memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilaksanakan sebelum penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan sebelum penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, sehingga di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 hanya menetapkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, setelah melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2021, maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan rumusan awal prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sinkronisasi dengan agenda nasional dan prioritas daerah perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Prioritas Daerah Kabupaten Ciamis yang utama adalah peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan dampak pandemi *Covid-19*. Selengkapnya mengenai Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dimuat dalam BAB V Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat

dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi *Covid-19* dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.

Substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun lalu, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi *Covid-19*, target indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya, IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya serta indikator kinerja program.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

1. **Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Politik** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, menggunakan pendekatan:

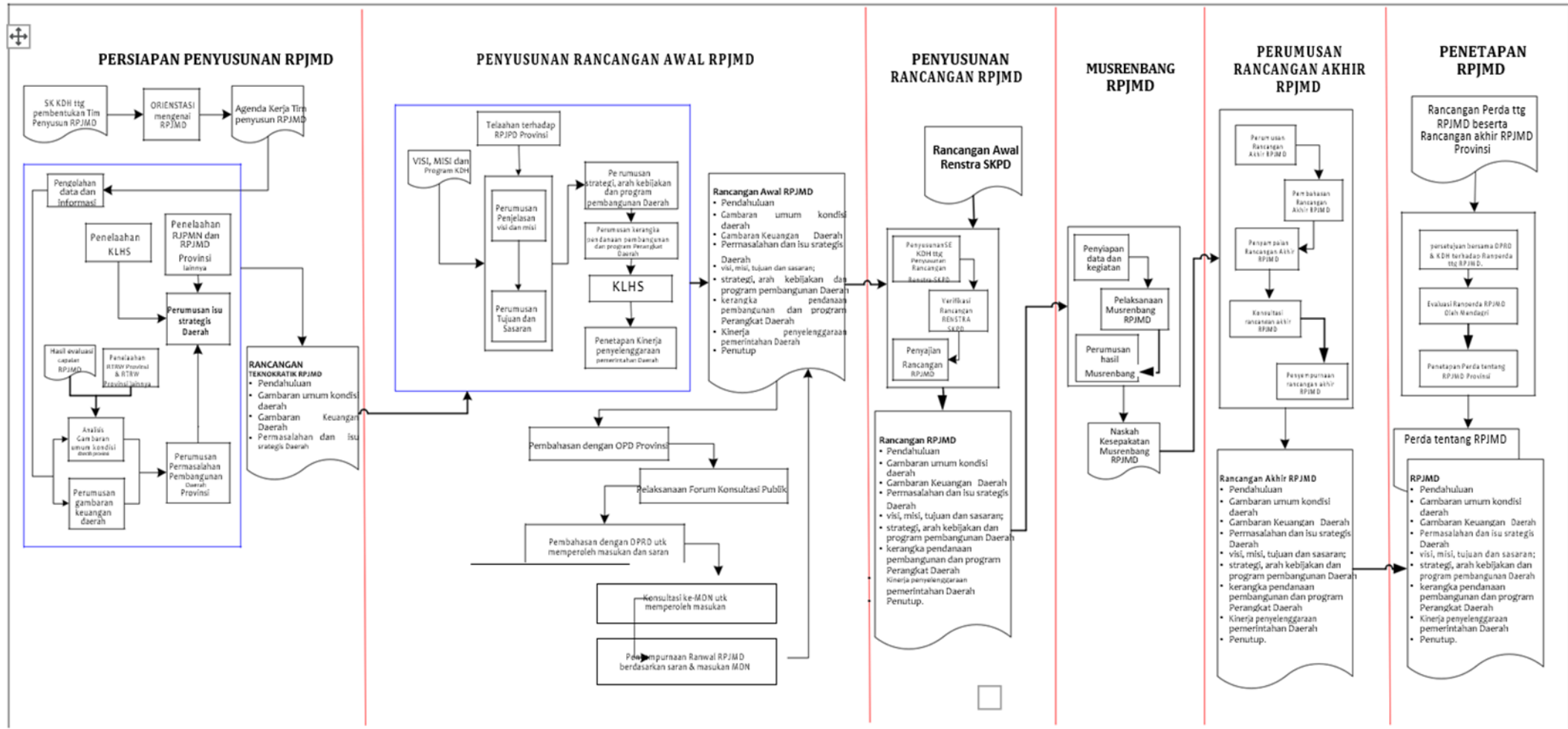
1. *Holistik-Tematik*, adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan penentuan tema-tema prioritas dalam satu jangka waktu perencanaan. Pendekatan

holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

2. *Integratif*, adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3. *Spasial*, adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD tentang rancangan awal, evaluasi dari Gubernur Jawa Barat tentang rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
 Tahapan dan Tatacara Penyusunan
 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (Diolah)

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat.
2. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
3. Media untuk mengimplementasikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
4. Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Ciamis.
5. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.
6. Pedoman penyusunan RPJM Desa se-Kabupaten Ciamis.
7. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
8. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
9. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 sampai dengan 2024, yang selanjutnya RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

23. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

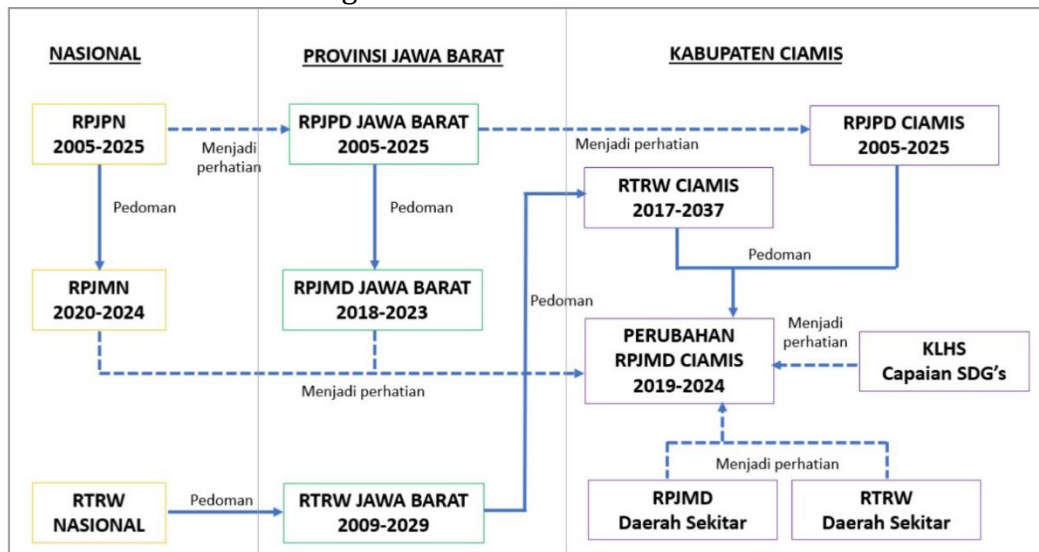
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236).
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88).
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-**2023**.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 81).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mempedomani RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 serta RTRW Kabupaten Ciamis 2017-2037. Selain itu, Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga mengacu terhadap dokumen KLHS dan juga memperhatikan capaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* di Kabupaten Ciamis. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Diolah)

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Misi daerah yang mendukung Misi pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	RPJMN 2020-2024	Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024
1	VISI		
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua
2	MISI		
	Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil	Misi 3: Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
	Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Misi 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
	Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		Misi 4: Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

No	RPJMN 2020-2024	Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024
	Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 6: Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa
	Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 (Diolah)

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Kabupaten Ciamis

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan Perubahan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025	Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024
1	VISI	VISI
	Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025	Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua
2	MISI	MISI
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa
	Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk

No	RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025	Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024
		mendukung pembangunan berkelanjutan
	Misi 4 : Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 (Diolah)

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RTRW Kabupaten Ciamis

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis

Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Lingkungan Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

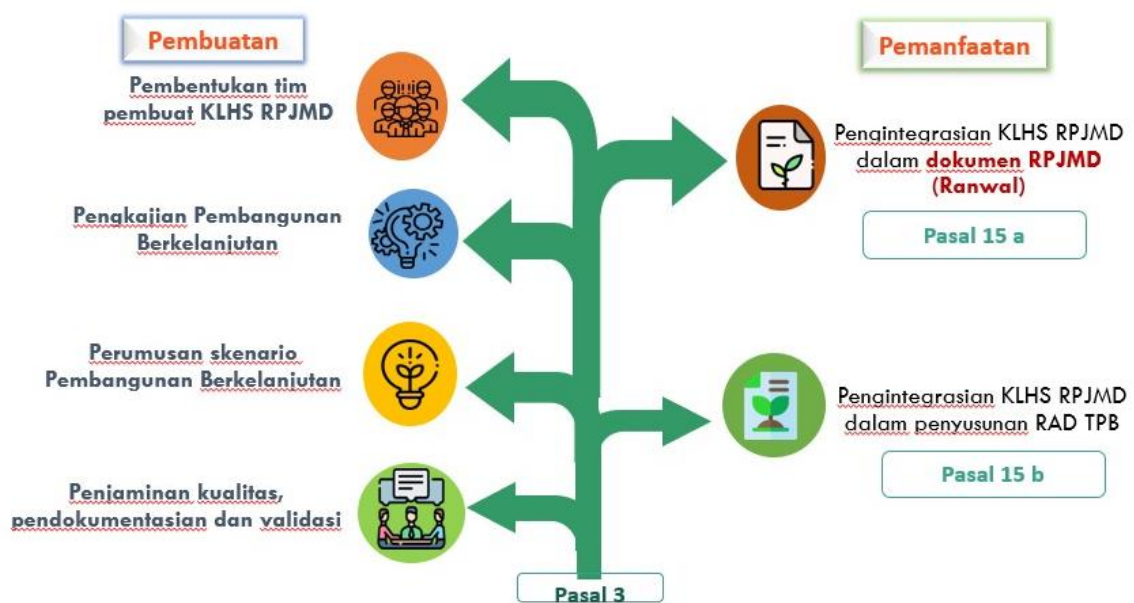
- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.

- b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. Validasi KLHS.

Gambar 1.3
Substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2018



Sumber: Paparan Sub Direktorat Lingkungan Hidup Kemendagri, 2020

Penyusunan Perubahan RPJMD memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Untuk dapat mencapai hasil tersebut, maka diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi tersebut, dimana fokus utamanya adalah mengintegrasikan pertimbangan kondisi lingkungan hidup yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Gambar 1.4
Integrasi KLHS dalam RPJMD



Sumber: Paparan Direktorat Bina Bangda Kemendagri, 2019

KLHS sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD Teknokratik dan Rancangan Awal RPJMD. KLHS memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perumusan kebijakan pembangunan daerah juga menjadi partisipatif dengan adanya KLHS, dikarenakan KLHS membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan berbagai pihak lain dalam proses penyusunannya. Selain itu, KLHS menjadi instrumen yang dapat mensinkronkan berbagai kebijakan dan regulasi baik pusat maupun daerah, serta sebagai fungsi kontrol pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Substansi KLHS yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dapat berupa kebijakan umum, gambaran kondisi umum daerah, isu pembangunan berkelanjutan, hasil perekapan hasil capaian TPB, maupun hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar

Penyusunan Perubahan RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun daerah sekitar Kabupaten Ciamis antara lain Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 1.3.
Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
1.	Kabupaten Majalengka	2018-2023	Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama 2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat. 3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya. 4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing 2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Pembangunan Kertajati <i>Aerocity</i> dan Segitiga Rebana 4. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
				5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	5. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR 6. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup 7. Kemandirian Desa
2.	Kabupaten Kuningan	2018-2023	Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023	1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati. 2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan. 3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati. 4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat. 5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.	1. Pengurangan Pengangguran 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan investasi daerah 4. Penerapan <i>E-Government</i> 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Alam 6. Pengembangan Pariwisata berbasis komunitas dan Desa serta Ekonomi Kreatif 7. Peningkatan Ketahanan Pangan
3.	Kabupaten Tasikmalaya	2016-2021	Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, Dan	1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.	1. Penanggulangan kemiskinan

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
			Berdaya Saing Di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya 3. Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar 4. Ketahanan Pangan 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi 7. Pengembangan destinasi wisata 8. Peningkatan daya saing produk pertanian 9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Perlindungan perempuan dan anak
4.	Kota Tasikmalaya	2017-2022	Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal. 2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah 2. Penanggulangan kemiskinan 3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup 4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
				5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	5. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar 6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
5.	Kota Banjar	2018-2023	Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan secara Profesional untuk Menjamin Terciptanya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Governance</i>	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Daya Beli Masyarakat 4. Meningkatkan Kemandirian Pangan 5. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin 6. Meningkatkan Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
					7. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Hukum 8. Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Semakin

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
					Profesional dan Akuntabel
6.	Kabupaten Pangandaran	2016-2021	Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. 2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. 3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. 4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal. 5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. 	-
7.	Kabupaten Cilacap	2017-2022	Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata - Bangga Mbangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>. 3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia 2. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan akuntabel. 3. Pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. 5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. 5. Kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah

No	Daerah Sekitar	Periode RPJMD	Visi	Misi	Isu Strategis
				pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.	6. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 7. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam
					8. Pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan, 9. Penataan/ pengembangan wilayah

Sumber: - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel di atas, maka perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis sehingga tercipta sinergitas antar daerah, antara lain:

- a. Menyiapkan dan memastikan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah selalu dalam kondisi prima.
- b. Meningkatkan kualitas atau intensitas kerjasama antar daerah, dengan mengedepankan asas kolaborasi dibandingkan dengan asas kompetisi untuk menangkap peluang di era *revolusi industry 4.0*.
- c. Memperjelas kerjasama pembangunan pendukung pariwisata, untuk saling mendukung sehingga terbangun kolaborasi antar wilayah. Hal tersebut sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat Kabupaten Ciamis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Jawa Barat.
- d. Optimalisasi kerjasama antar daerah, mengingat terdapat bandar udara berskala internasional, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis hingga tahun 2024 yang *holistik*-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD, penyesuaian kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional serta percepatan penanganan pandemi *Covid-19* dan dampak yang ditimbulkannya.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 antara lain:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
3. Pedoman untuk penyusunan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD;
4. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
5. Tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis ini ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
6. Instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
7. Instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024 terdiri atas 9 (sembilan) BAB, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi Kabupaten Ciamis dan memuat informasi yang relevan dan penting dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi Bupati Ciamis, dan kebutuhan perumusan strategi yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis daerah memerhatikan isu internasional, nasional, regional Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Ciamis, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, termasuk target tahun 2020 dan realisasinya. Selain itu, bab ini juga memuat arahan target indikator kinerja hasil (*outcome*) program dari seluruh Perangkat Daerah untuk pencapaian target indikator kinerja program prioritas Kabupaten Ciamis.
- BAB IX : PENUTUP**
Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

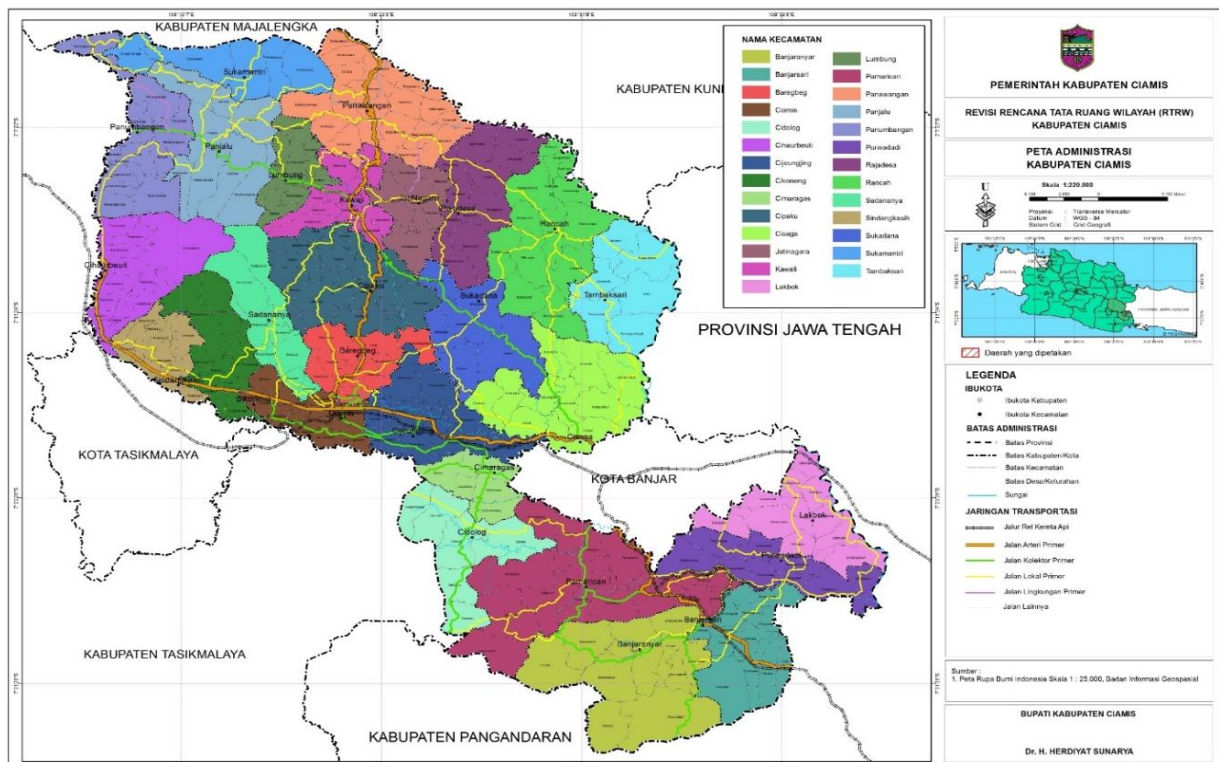
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 19' sampai dengan 108° 43' Bujur Timur dan 7° 03' 39" sampai dengan 7° 39' 36" Lintang Selatan, berada di ujung Tenggara Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km dari ibukota provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan provinsi lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan

Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 159.785,37 Ha dan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.277 dusun, 3.019 Rukun Warga (RW) dan 9.674 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	%
1	Banjaranyar	10.996,56	6,88
2	Banjarsari	5.806,18	3,63
3	Baregbeg	3.828,45	2,4
4	Ciamis	3.384,22	2,12
5	Cidolog	5.638,82	3,53
6	Cihaurbeuti	6.416,07	4,02
7	Cijeungjing	6.074,01	3,8
8	Cikoneng	4.712,64	2,95
9	Cimaragas	2.646,20	1,66
10	Cipaku	7.865,95	4,92
11	Cisaga	8.015,23	5,02
12	Jatinagara	3.416,49	2,14
13	Kawali	3.627,48	2,27
14	Lakbok	5.768,35	3,61
15	Lumbung	2.790,68	1,75
16	Pamarican	12.444,86	7,79
17	Panawangan	8.236,53	5,15
18	Panjalu	7.359,28	4,61
19	Panumbangan	6.322,47	3,96
20	Purwadadi	5.094,55	3,19
21	Rajadesa	6.166,42	3,86
22	Rancah	8.670,73	5,43
23	Sadananya	4.623,91	2,89
24	Sindangkasih	2.989,21	1,87
25	Sukadana	5.795,81	3,63
26	Sukamantri	5.062,45	3,17
27	Tambaksari	6.031,82	3,77
Jumlah		159.785,37	100

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 – 1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.330,59 Ha atau 75,30%.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	%
1	0 – 500	120.334,23	75,31
2	500 – 1000	32.672,13	20,45
3	1000 – 1500	6.325,76	3,96
4	1500 – 1775	453,25	0,28
Jumlah		159.785,37	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

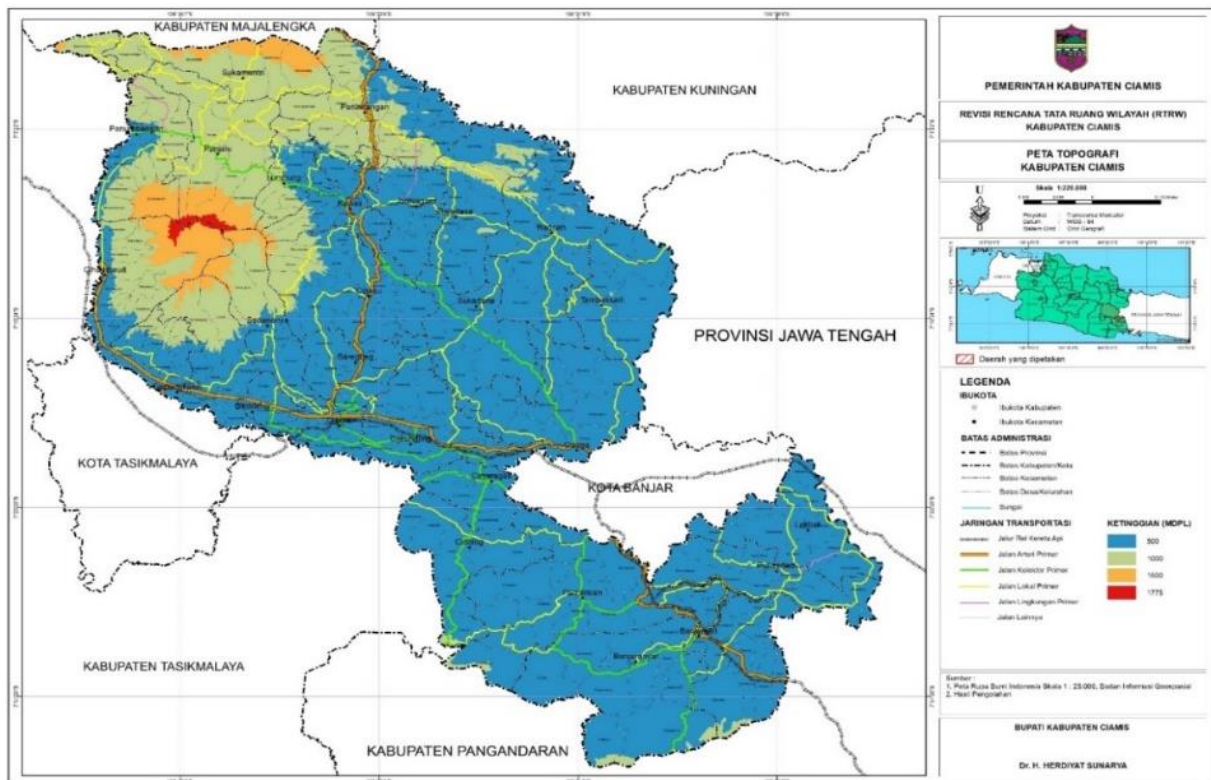
Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, berdasarkan tabel 2.3 Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	%
1	0-2 %	37.606,14	23,54
2	2-8 %	49.026,48	30,68
3	8-15 %	39.744,65	24,87
4	15-25 %	25.244,48	15,80
5	25-40 %	7.301,85	4,57
6	>40 %	861,77	0,54
Jumlah		159.785,37	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan

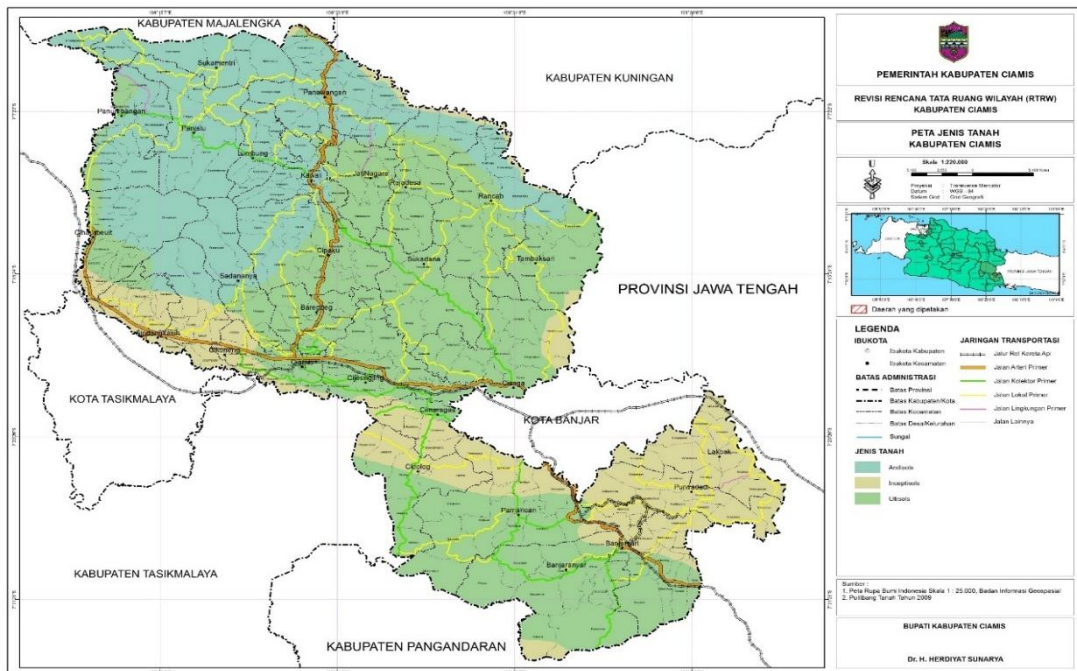
2.1.1.3 Jenis Tanah

Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andisol, inceptisol, dan ultisol. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan vulkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “*short-range-order*” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolit, ferihidrit, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral “*short-range-order*” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andisol.

Tanah inceptisol memiliki kadar fosfor rendah, sedangkan kadar aluminium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, orange kemerahan dengan terang-menyilaukan, untuk oranye pucat kekuningan-dan bahkan beberapa nada kekuningan-coklat tenang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk, komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis



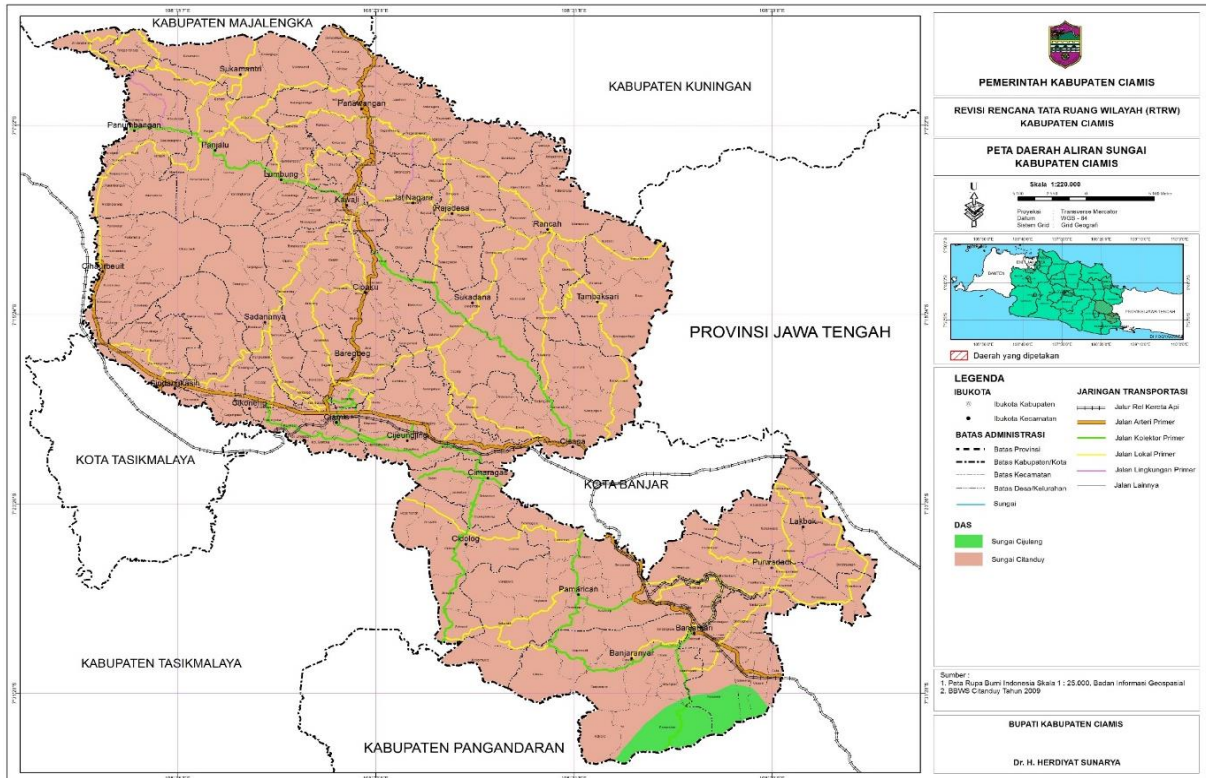
Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijulang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijulang, yaitu Kecamatan Banjaranyar ($\pm 1.786,22$ Ha) dan Kecamatan Banjarsari ($\pm 1.320,16$ Ha).

Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2020 sebesar 3.334 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 202 hari.

2.1.1.6 Tutupan Lahan

Tutupan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki tutupan lahan yang bervariasi, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Danau/Situ	112,31	0.07
2	Kolam	5,44	0.00
3	Padang Rumput	118,96	0.07
4	Permukiman/Tempat Kegiatan	29.079,61	18.20
5	Sawah Tadah Hujan	21.288,33	13.32
6	Sawah	16.214,60	10.15
7	Perkebunan	10.771,60	6.74
8	Sungai	1.165,15	0.73
9	Semak Belukar	169,58	0.11
10	Kebun Campuran	66.242,85	41.46
11	Tegalan Ladang	36,95	0.02
12	Lahan Terbuka	86,29	0.05
13	Hutan	14.493,69	9.07
Jumlah		159.785,37	100

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh kebun campuran dengan luas 66.242,85 Ha atau sebesar 41,46% dari luas Kabupaten Ciamis.

2.1.1.7. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan lingkungan Kabupaten Ciamis dalam menyediakan dan mendukung kebutuhan hidup penduduk dihitung sebagai daya dukung pangan dan daya dukung air. Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi daya dukung lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar manusia. Ambang batas daya dukung pangan dan air dihitung dengan membandingkan jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Jika jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan maka ambang batas daya dukung telah terlampaui dan membutuhkan intervensi untuk tetap dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Dalam perhitungan daya dukung diasumsikan tidak terdapat aliran materi air dan pangan atau *closed system*.

a. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan

ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Dalam perhitungan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan komoditi pangan. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

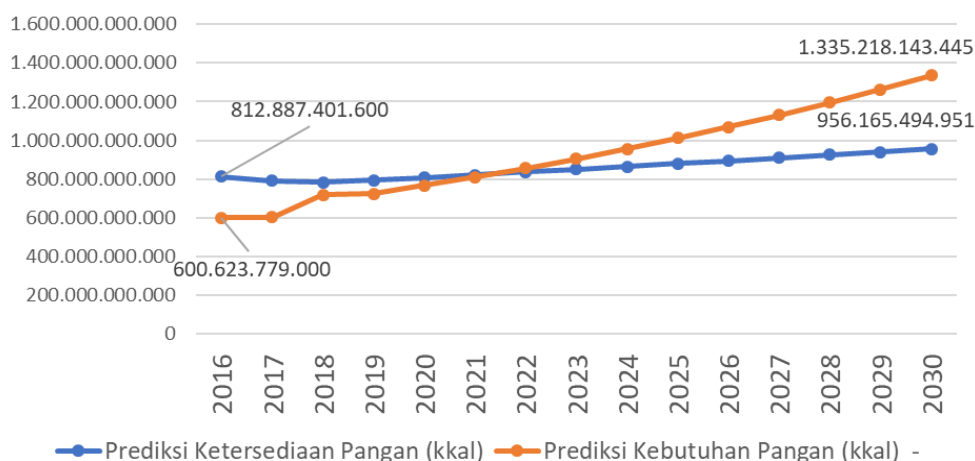
No	Uraian	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi sawah	530.168	526.462	472.021	447.801	458.988
2	Padi ladang	328	283	85	988	2.390
3	Jagung	36.022	26.739	44.838	35.980	45.433
4	Ubi kayu	50.426	42.354	61.468	55.824	32.788
5	Ubi jalar	6.619	3.632	2.993	2.363	2.659
6	Kacang Tanah	3.204	1.502	1.238	1.493	1.489
7	Kacang Kedelai	1.245	1.830	3.214	1.063	45
8	Kacang Hijau	13	1.422	4.452	179	6
Total		628.025	604.224	590.309	545.701	543.798

Sumber: Kabupaten Ciamis Dalam Angka, 2017-2021

Dari hasil analisis status daya dukung pangan Kabupaten Ciamis melampaui ambang batas atau defisit pada tahun 2023. Pada tahun 2030 Kabupaten Ciamis defisit pangan.

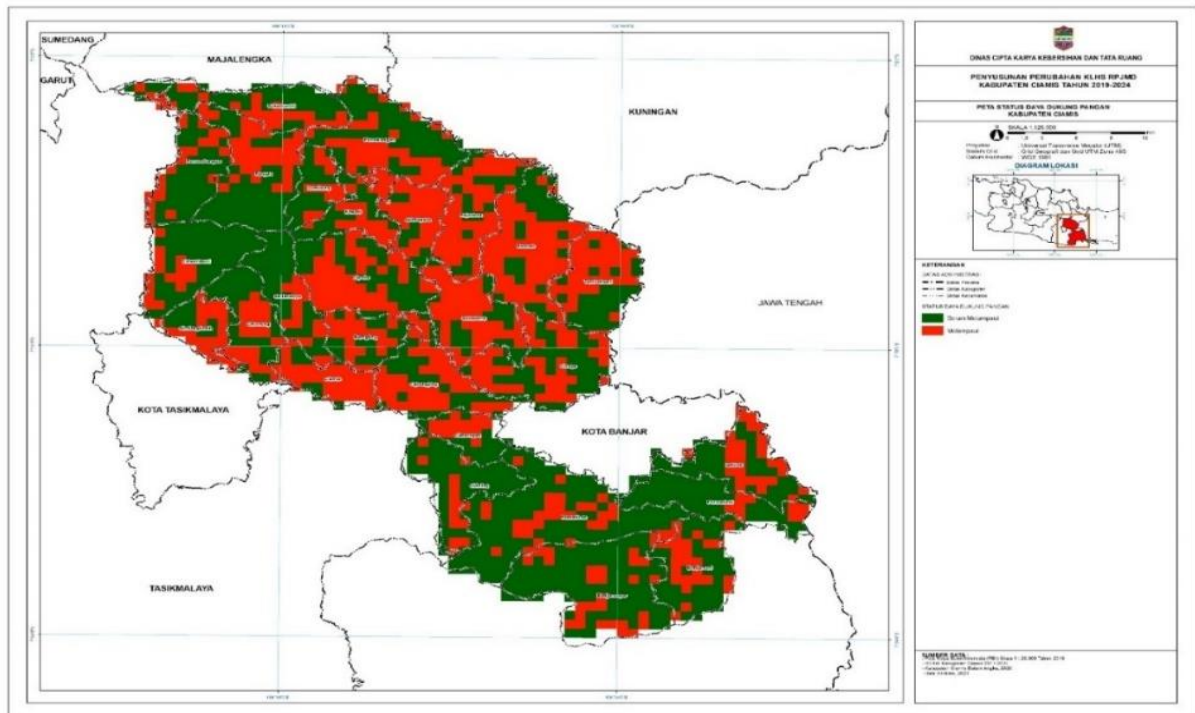
Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan ketersediaan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya lahan produksi pangan pada rencana pola ruang RTRW Kabupaten Ciamis tahun 2017-2037. Namun peningkatan jumlah pangan tersebut belum mencukupi kebutuhan pangan hingga tahun 2030. Analisis daya dukung pangan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2030



Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Hasil analisis, 2021

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis



Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Hasil analisis, 2021

b. Daya Dukung Air

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar untuk hidup (*basic need*). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m³/kapita/tahun.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 adalah 3.575 mm/tahun maka dengan kondisi tutupan lahan terakhir ketersediaan air larian sepanjang Tahun 2015 mencapai 1,81 Milyar m³. Potensi mata air di Ciamis memberikan kontribusi penyediaan air sebesar 0,0024 Milyar m³/tahun sehingga jumlah ketersediaan air secara keseluruhan mencapai 1,81 Milyar m³.

Tabel 2.6
Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2015

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
Danau Wisata Air	58,96	-	0,00
Danau/Telaga Alami	56,22	-	0,00
Hamparan Batuan/Pasir Lain	7,99	0,20	1,60
Hutan	50.485,54	0,18	9087,40
Kolam Ikan Air Tawar	33,21	-	0,00
Ladang/Tegalan	3.994,79	0,35	1398,18
Padang Rumput	141,41	0,35	49,49
Perkebunan	39.522,11	0,30	11856,63
Permukiman	29.291,85	0,60	17575,11
Sawah	28.767,13	0,30	8630,14
Semak Belukar	6.224,73	0,35	2178,65
Sungai	1.184,72	-	0,00
Total	159.768,66	0,32	50.777,20

$$\begin{aligned}
 SA &= 10 \times C \times R \times A \\
 &= 10 \times 0,32 \times 3.575 \times 159.768,66 \\
 &= 1.815.284.956 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Perhitungan Kabupaten Ciamis berdasar Permen LH Nomor 17 Tahun 2009

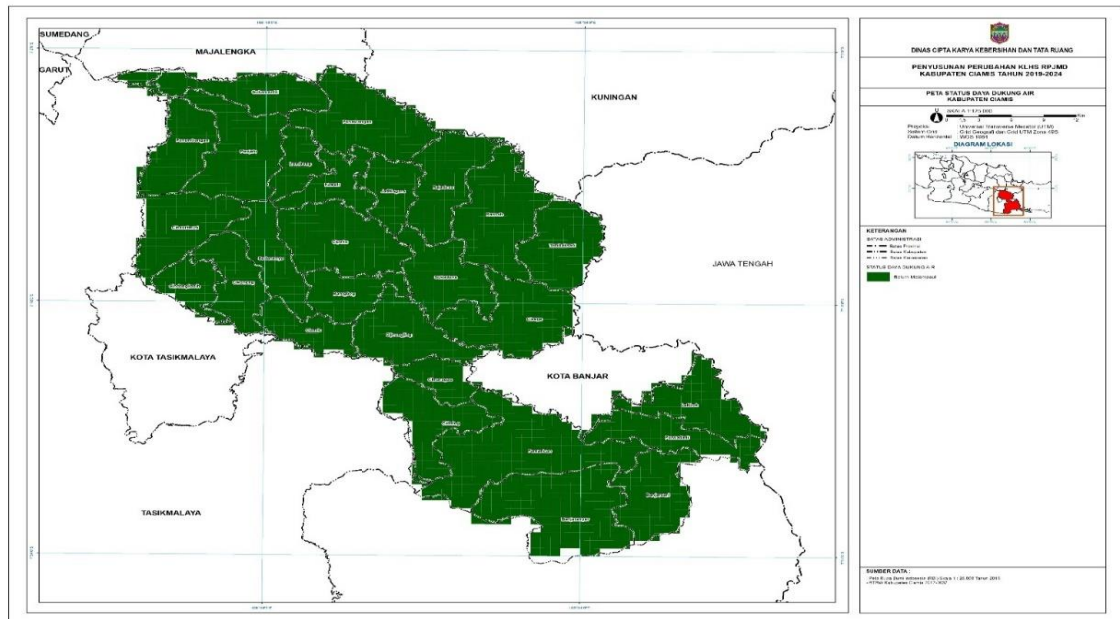
Potensi mata air yang ada di Kabupaten Ciamis dengan jumlah mata air 25 buah mencapai 2.377.026 m³/tahun. Dengan demikian jika digabungkan maka potensi air permukaan mencapai 1.817.661.982 m³/tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Kabupaten Ciamis belum melampaui. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis Tahun 2015

No	Uraian	Milyar m ³
Ketersediaan		
1	Ketersediaan Air larian	1,81
2	Potensi Mata Air	0,0024
3	CAT	0,0005
Jumlah		1,8129
Kebutuhan		
1	Domestik (43,8 m ³ /kapita/tahun)	0,006
2	Kebutuhan air untuk lahan	1,67
Jumlah		1,736

Sumber: Hasil analisis, 2021

Gambar 2.6
Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Ciamis Tahun 2015



Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis
Hasil analisis, 2021

2.1.1.8. Geostrategis

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.

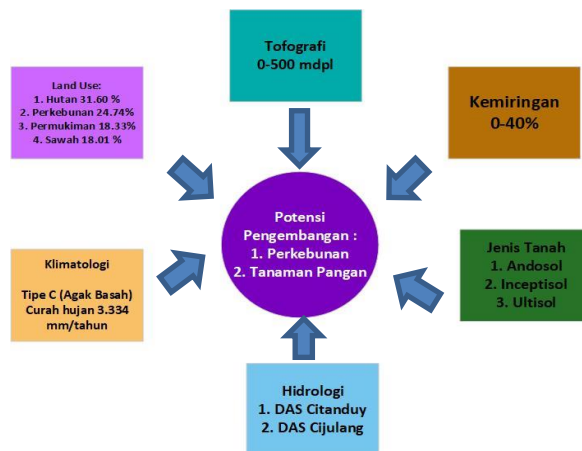
Gambar 2.7
Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Dari gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kabupaten Ciamis mulai dari topografi, kemiringan, jenis tanah, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan dan aspek fisik lainnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki pengembangan potensi paling dominan yaitu perkebunan dan tanaman pangan.

Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Hasil Analisis, 2021

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

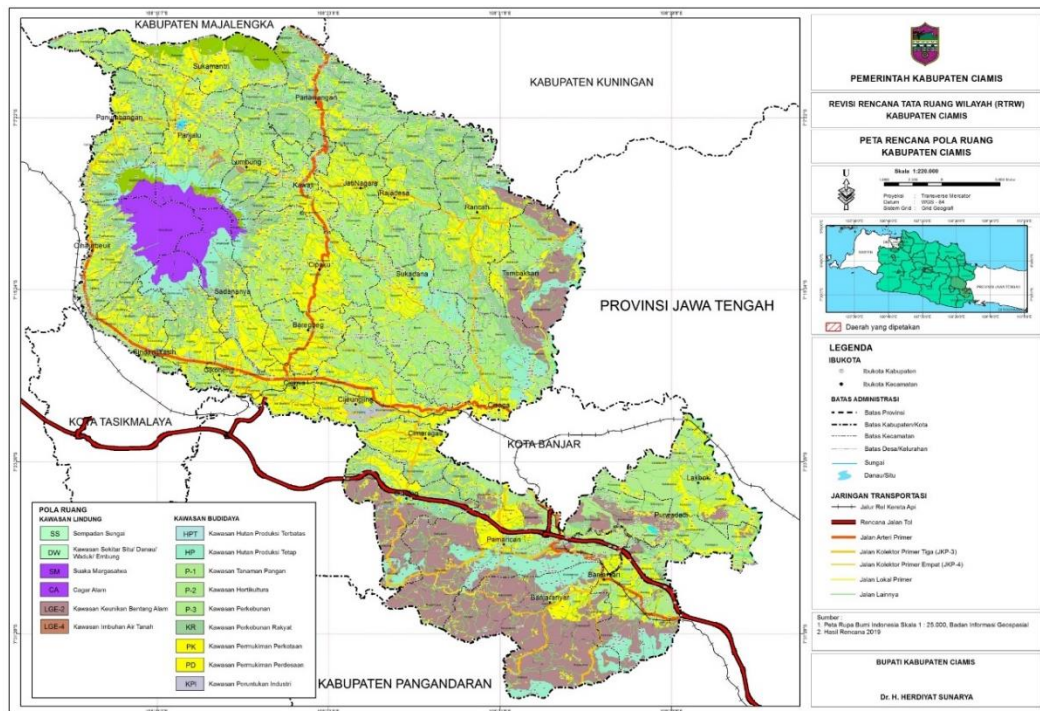
Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas 29.403,40 Ha dan Kawasan budidaya seluas 130.381,94 Ha. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2,456.26	1.54
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	10,336.65	6.47
3	Kawasan Perkebunan Rakyat	20,412.42	12.77
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	13,101.63	8.20
5	Kawasan Permukiman Perkotaan	31,496.28	19.71
6	Kawasan Hortikultura	3,416.57	2.14
7	Kawasan Perkebunan	17,269.69	10.81
8	Kawasan Tanaman Pangan	31,441.32	19.68
9	Kawasan Peruntukan Industri	451.12	0.28
B	Kawasan lindung		
1	Cagar Alam	8.64	0.01
2	Suaka Margasatwa	5,540.50	3.47
3	Kawasan Keunikan Bentang Alam	21,721.71	13.59
4	Kawasan Imbuhan Air Tanah	256.82	0.16
5	Kawasan Sekitar Situ/ Danau/ Waduk/ Embung	19.34	0.01
6	Sempadan Sungai	580.88	0.36
7	Danau/Situ	113.50	0.07
8	Sungai	1,162.01	0.73
	Jumlah	159,785.37	100.00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039

2.1.2.1. Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar disektor pertanian sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Untuk kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau *spot partial* (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.

Berdasarkan komoditasnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ciamis berupa pertanian lahan basah. Sesuai potensi yang ada, pertanian lahan basah yang akan dikembangkan di Kabupaten Ciamis berupa komoditas tanaman padi. Deliniasi pertanian lahan basah untuk komoditas tanaman padi berdasarkan sebarannya bisa sebagian bisa dikategorikan sebagai *spot partial* (luasan terpisah) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis.

Kawasan Tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 33.071,95 Ha (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 27.962,19 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan belas) hektar meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.
2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 5.109,76 Ha (lima ribu seratus sembilan koma tujuh puluh enam) hektar meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.

b. Kawasan Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat.

Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan panen untuk komoditi hortikultura terbesar di Kabupaten Ciamis, yaitu untuk komoditi aneka cabai, mentimun dan tomat. Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura. Produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis.

Kawasan hortikultura memiliki luas kurang lebih 3.416,587 Ha (tiga ribu empat ratus enam belas koma lima ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:

1. Kecamatan Cihaurbeuti;
2. Kecamatan Cikoneng;
3. Kecamatan Lumbung;
4. Kecamatan Panawangan;
5. Kecamatan Panjalu;

6. Kecamatan Panumbangan;
7. Kecamatan Sindangkasih; dan
8. Kecamatan Sukamantri.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang perkebunan.
2. Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana produksi pertanian, dan industri pengolahan hasil, dan lain- lain) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
3. Pengembangan sumberdaya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan kelembagaan agribisnis.
4. Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian subsektor perkebunan/tanaman tahunan.
5. Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.

6. Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau).

Perkebunan seluas kurang lebih 17.269,69 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam puluh sembilan) meliputi semua kecamatan.

d. Kawasan Peternakan

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:

1. Budidaya Ayam Ras Pedaging *Close House System*;
2. Pembibitan Ayam Ras Pedaging;
3. Budidaya Ayam Ras Petelur;
4. Budidaya Ayam Bukan Ras;
5. Pembibitan Ayam Bukan Ras;
6. Pengembangan Sapi Perah;
7. Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;
8. Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;
9. Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;
10. Budidaya Sapi Potong Penggemukan;
11. Pembibitan Sapi Potong;
12. Pasar Hewan Terpadu;
13. Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.

e. Kawasan Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari:

1. Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
2. Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
3. Pasar Ikan Bersih;
4. Pengembangan Benih Ikan;
5. Pengembangan *Restocking*;
6. Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.

2.1.2.2. Potensi Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (*environmental friendly*).

Upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada harus memenuhi kriteria kawasan peruntukan pertambangan yang meliputi:

1. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan berkelanjutan.
2. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
3. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.
4. Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air.
5. Tidak terletak di daerah banjir dan rawa.
6. Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (longsor, gempa bumi dan lain-lain).
7. Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat.
8. Pengaturan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi pelayaran.
9. Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat.
10. Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
11. Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung.
12. Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air.

13. Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan longsor.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan kawasan pertambangan meliputi:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi yang ada.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada para penambang agar kelestarian lingkungan tetap dapat terpelihara dan keselamatan para penambang dapat terjamin serta kesejahteraannya dapat meningkat.
3. Setiap kegiatan pertambangan dan penggalian harus bermuara kepada prinsip menekan seminimal mungkin dampak negatif yang timbul dengan memperbesar dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terutama sekitar lokasi bahan galian.
4. Promosi yang lebih intensif dan lebih luas terhadap potensi bahan galian yang mempunyai nilai jual, dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan daerah disamping juga pendapatan para penambang dapat lebih ditingkatkan.
5. Identifikasi dan inventarisasi potensi secara bertahap melalui kegiatan penyelidikan pendahuluan, penyelidikan lanjutan/ semi rinci dan penyelidikan detail/ rinci. Hal ini sangat berguna untuk menentukan jenis bahan tambang unggulan, zonasi-zonasi pertambangan untuk pengembangan wilayah, bahan galian yang layak tambang dan yang siap untuk dieksploitasi dan diproduksi.

Kawasan pertambangan dan energi berupa potensi mineral dan batubara.

1. Kawasan potensi mineral, meliputi:
 - a. Tras di Kecamatan Cihaurbeuti.
 - b. Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti.
 - c. Lempung meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.
 - d. Mangan di Kecamatan Cimaragas.
 - e. Batu pasir meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.
 - f. Andesit meliputi:
 - ❖ Kecamatan Panjalu.
 - ❖ Kecamatan Cihaurbeuti.
 - g. batu bara meliputi:
 - ❖ Kecamatan Lakbok.
 - ❖ Kecamatan Purwadadi.

2. Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan meliputi:
 - a. Wilayah usaha pertambangan.
 - b. Wilayah pertambangan rakyat.
 - c. Wilayah kerja pertambangan panas bumi.
3. Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3. Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis meliputi:

1. Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 451,12 Ha, yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra industri kecil dan menengah.
2. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan
3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan.

2.1.2.4. Potensi Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
2. Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
5. Meningkatkan kesempatan kerja;

6. Melestarikan budaya lokal; dan
7. Meningkatkan perkembangan masyarakat.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan potensi wisata meliputi:

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata.
3. Pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan.
4. Penataan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata.
5. Pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.
6. Peningkatan manajemen kepariwisataan yang terintegrasi.

Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi:

- (1) Objek wisata budaya, meliputi:
 - a. Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
 - b. Cipanjalu desa bahara di Kecamatan Panjalu;
 - c. Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu;
 - d. Astana Gede di Kecamatan Kawali;
 - e. Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
 - f. Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
 - g. Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;
 - h. Kampung Adat Kuta di Kecamatan Tambaksari;
 - i. Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
 - j. Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;
 - k. Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;
 - l. Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
 - m. Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;
 - n. Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;
 - o. Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
 - p. Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
 - q. Wisata Ziarah di Kecamatan Jatinagara;
 - r. Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok;

- s. Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican;
 - t. Situs Panghulu Gusti di Kecamatan Panjalu;
 - u. Situs Danuwarsih di Kecamatan Rajadesa; dan
 - v. Objek wisata budaya lainnya.
- (2) Objek wisata alam meliputi:
- a. Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;
 - b. Curug Cekong di Kecamatan Sukamantri;
 - c. Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih;
 - d. Sungai Cireong di Kecamatan Sindangkasih;
 - e. Situ Wangi di Kecamatan Kawali;
 - f. Curug Tujuh Cibolang di Kecamatan Panjalu;
 - g. Curug Panganten di Kecamatan Cisaga;
 - h. Situ Cekdam Kadupundak di Kecamatan Tambaksari;
 - i. Curug Cipatahunan di Kecamatan Cidolog;
 - j. Curug Gambir Santolok di Kecamatan Banjarsari;
 - k. Curug Kayu Putih di Kecamatan Banjarsari;
 - l. Curug Batu Ampar di Kecamatan Banjarsari;
 - m. Gunung Pangalusan di Kecamatan Banjarsari;
 - n. Air Panas Ciulu di Kecamatan Banjarsari;
 - o. Curug Cigumawang di Kecamatan Banjaranyar;
 - p. Curug Panganten di Kecamatan Banjaranyar;
 - q. Air Panas Cikupa di Kecamatan Pamarican;
 - r. Cadas Ngampar di Kecamatan Sadananya;
 - s. Curug Cingembat di Kecamatan Sadananya;
 - t. Wisata Rahong atau Puncak Upsa di Kecamatan Rajadesa;
 - u. Gunung Sawal;
 - v. Curug Salosin di Kecamatan Cihaurbeuti.
 - w. Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - x. Batu Ampar di Kecamatan Panumbangan; dan
 - y. Objek wisata alam lainnya.
- (3) Objek wisata khusus atau minat meliputi:
- a. Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing;
 - b. Batucakra di Kecamatan Cikoneng;

- c. Penangkaran Rusa Darmacaang di Kecamatan Cikoneng;
 - d. Pendakian Puncak Karantenan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Kecamatan Panjalu;
 - e. Pendakian Puncak Puspa di Kecamatan Panumbangan;
 - f. Wisata Tapos di Kecamatan Sadananya;
 - g. Desa wisata di Kecamatan Cidolog, Kelurahan Cigembor, Benteng dan Linggasari Kecamatan Ciamis;
 - h. Wisata edukasi dan agro durian di Kecamatan Sadananya dan Ciamis;
 - i. Wisata agro dukuh Cililitan di Kecamatan Cijeungjing; dan
 - j. Objek wisata khusus atau minat lainnya.
- (4) Objek wisata buatan meliputi:
- a. Wahana wisata tirta meliputi:
 - ❖ Bendungan Manganti di Kecamatan Purwadadi;
 - ❖ Bendungan Leuwikeris di Kecamatan Cijeungjing;
 - ❖ Bendungan Matenggeng di Kecamatan Tambaksari;
 - ❖ Waterboom Sukahaji di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - ❖ Waterboom Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cipaku; dan
 - ❖ Normalisasi Embung Rancabungur.
 - b. Wahana wisata flora;
 - c. Wahana wisata fauna;
 - d. Wahana permainan modern meliputi:
 - ❖ Fasilitas Olahraga di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cijeungjing;
 - ❖ Wahana permainan di Kecamatan Baregbeg;
 - ❖ Tirta Pasir Raya di Kecamatan Panjalu;
 - ❖ Pasirjati Groundhill di Kecamatan Pamarican;
 - ❖ Grand Sayang Kaak di Kecamatan Cijeungjing; dan
 - ❖ Gentarasa di Kecamatan Cidolog;
 - ❖ Pengembangan off road dan Gantole di Kecamatan Jatinagara dan Sukamantri;
 - ❖ Wisata air buatan di Kelurahan Linggasari.
 - e. Tempat-tempat hiburan dan atau plaza;
 - f. Museum meliputi:
 - ❖ Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari;
 - ❖ Museum Galuh Imbanagara di Kecamatan Ciamis
 - ❖ Museum Pakuan di Kecamatan Ciamis; dan
 - ❖ Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu.
 - g. Objek wisata buatan lainnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dilihat dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana. Potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, serta bencana non alam yang terdiri dari epidemik, wabah penyakit dan KLB serta kebakaran hutan/lahan/rumah.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah rawan bencana kategori tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Tanah longsor meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Cijeungjing dan Lakkok.
- b. Banjir bandang meliputi seluruh kecamatan.
- c. Cuaca ekstrim meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ciamis, Lakkok, Purwadadi.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana multi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 141,57 yang termasuk kelas risiko sedang.

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Kelas Risiko
1	Cianjur	215,08	Tinggi
2	Garut	205,52	Tinggi
3	Kab. Tasikmalaya	203,01	Tinggi
4	Kab.Sukabumi	190,75	Tinggi
5	Karawang	174,43	Tinggi
6	Kab. Bandung	174,00	Tinggi
7	Kota Cirebon	172,76	Tinggi
8	Subang	171,91	Tinggi
9	Kab. Cirebon	160,63	Tinggi
10	Kota Banjar	152,80	Tinggi
11	Pangandaran	145,44	Tinggi
12	Majalengka	143,43	Sedang
13	Sumedang	142,15	Sedang
14	Ciamis	141,57	Sedang
15	Purwakarta	137,31	Sedang
16	Kab. Bogor	136,88	Sedang
17	Indramayu	136,79	Sedang
18	Kab. Bekasi	132,89	Sedang
19	Kota Bekasi	131,60	Sedang

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Kelas Risiko
20	Kuningan	131,13	Sedang
21	Kota Bandung	122,32	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	119,20	Sedang
23	Kota Sukabumi	114,40	Sedang
24	Kab. Bandung Barat	110,22	Sedang
25	Cimahi	105,41	Sedang
26	Depok	89,63	Sedang
27	Kota Bogor	75,75	Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, BPBD Provinsi Jawa Barat.

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Ciamis per Kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.10
Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

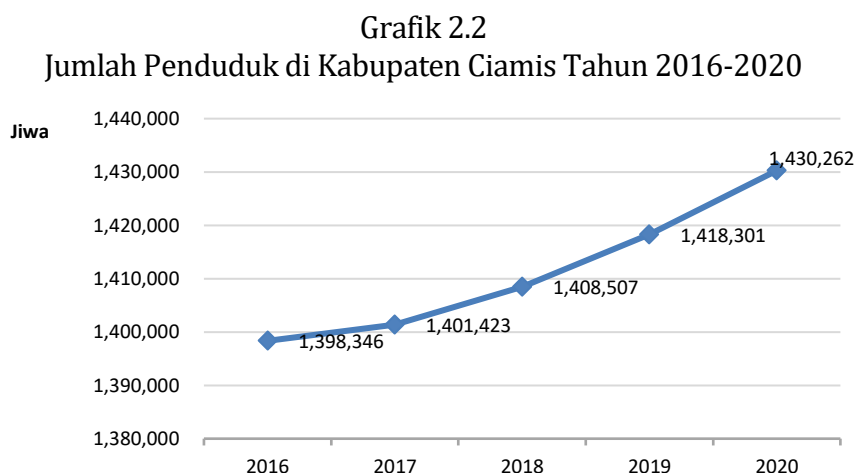
No	Kecamatan	Kejadian Bencana				
		Gempa	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Rumah	Kekeringan
1	Pamarican	1	15	4	4	-
2	Banjaranyar	1	6	1	1	-
3	Rancah	-	29	2	1	-
4	Panawangan	-	23	1	1	-
5	Cisaga	-	1	1	1	-
6	Cipaku	-	18	-	1	-
7	Panjalu	-	8	1	1	-
8	Cihaurbeuti	-	2	-	1	-
9	Rajadesa	-	5	-	-	-
10	Cijeungjing	-	3	1	4	-
11	Tambaksari	-	13	-	1	-
12	Panumbangan	-	4	5	5	-
13	Banjarsari	-	2	6	-	-
14	Sukadana	-	5	1	2	-
15	Lakbok	1	-	-	1	-
16	Cidolog	-	2	-	1	-
17	Purwadadi	-	2	2	1	-
18	Sukamantri	-	7	-	-	-
19	Cikoneng	-	6	-	3	-
20	Sadananya	-	19	-	1	-
21	Baregbeg	-	11	-	1	-
22	Kawali	-	10	-	2	-
23	Jatinagara	-	1	-	1	-
24	Ciamis	1	13	-	4	-
25	Sindangkasih	-	2	-	3	-
26	Lumbung	-	5	-	1	-
27	Cimaragas	-	2	-	9	-
Jumlah		4	214	25	51	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis

2.1.4. Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 0,58%, seperti terlihat dari grafik di bawah ini:



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjasari	80.325	80.564	80.930	81.119	81.543
2	Banjaranyar	46.444	46.241	46.247	46.504	47.016
3	Lakbok	63.520	63.844	64.093	64.633	64.937
4	Pamarican	77.341	77.153	77.494	78.096	78.877
5	Cidolog	21.738	21.598	21.777	21.827	21.840
6	Cimaragas	17.849	18.108	18.185	18.326	18.528
7	Cijeungjing	57.067	57.231	57.811	58.532	59.204
8	Cisaga	41.590	41.045	41.251	41.536	41.720
9	Tambaksari	24.504	24.679	24.728	24.719	24.791
10	Rancah	63.188	62.776	62.791	63.044	63.205
11	Rajadesa	61.793	62.200	62.443	61.929	62.741
12	Sukadana	26.616	26.729	26.981	27.184	27.604
13	Ciamis	107.037	107.673	108.235	109.318	109.839
14	Cikoneng	60.844	61.122	61.527	62.333	62.601
15	Cihaurbeuti	58.678	58.413	58.769	59.248	59.877

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Sadananya	41.781	42.254	42.734	43.099	43.755
17	Cipaku	74.348	74.201	74.641	75.141	75.729
18	Jatinagara	30.480	30.820	31.103	31.410	31.664
19	Panawangan	60.211	59.843	60.046	60.271	60.660
20	Kawali	46.306	46.744	46.957	47.269	47.761
21	Panjalu	55.795	55.691	55.867	56.200	56.713
22	Panumbangan	67.710	68.040	68.243	68.886	69.475
23	Sindangkasih	56.971	57.282	57.682	58.377	58.980
24	Baregbeg	46.785	47.183	47.631	48.139	48.724
25	Lumbung	35.134	35.368	35.577	35.808	36.234
26	Purwadadi	45.417	45.714	45.670	46.106	46.552
27	Sukamantri	28.874	28.907	29.094	29.247	29.692
JUMLAH		1.398.346	1.401.423	1.408.507	1.418.301	1.430.262

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 berada di Kecamatan Ciamis, yaitu sebanyak 109.839 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 3.245 orang/km², sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cimaragas yaitu sebanyak 18.528 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 700 orang/km².

Berdasarkan struktur umur penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 didominasi oleh kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 68,44%, sedangkan kelompok (umur 0-14) hanya sebesar 18,29% dan kelompok (umur 65 tahun keatas) hanya sebesar 13,26%. Secara lebih rinci adalah seperti dalam tabel berikut:

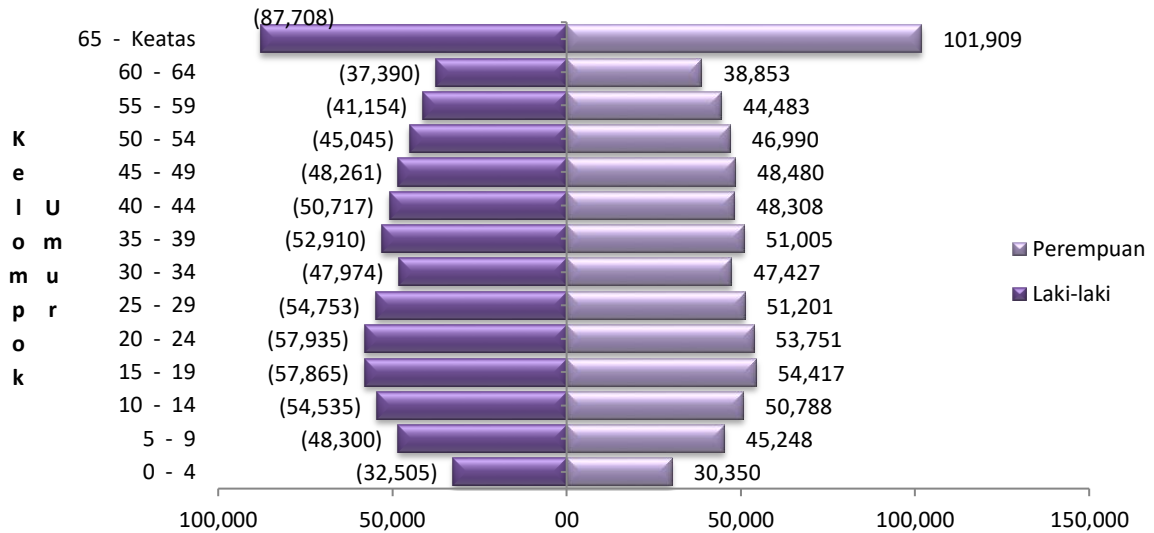
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur (jiwa)
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	59.536	59.753	57.877	59.946	62.855
5-9	102.582	100.231	98.178	95.752	93.548
10-14	111.384	108.885	106.702	106.202	105.323
15-19	114.731	116.265	116.172	112.826	112.282
20-24	111.662	111.670	111.539	112.366	111.686
25-29	102.030	101.771	101.568	103.527	105.954
30-34	101.260	98.702	96.873	95.733	95.401
35-39	105.748	107.569	108.010	105.214	103.915
40-44	95.494	95.031	96.704	98.531	99.025
45-49	98.163	97.887	96.351	94.632	96.741
50-54	87.612	89.259	91.296	91.184	92.035
55-59	82.609	83.395	84.269	83.589	85.637
60-64	66.713	69.140	70.406	76.787	76.243
65-Keatas	158.822	161.865	172.562	182.012	189.617
Jumlah	1.398.346	1.401.423	1.408.507	1.418.301	1.430.262

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Komposisi penduduk tahun 2020 menunjukkan populasi penduduk Kabupaten Ciamis terus berkembang, hal ini ditunjukkan dengan bentuk piramida sebagaimana grafik berikut.

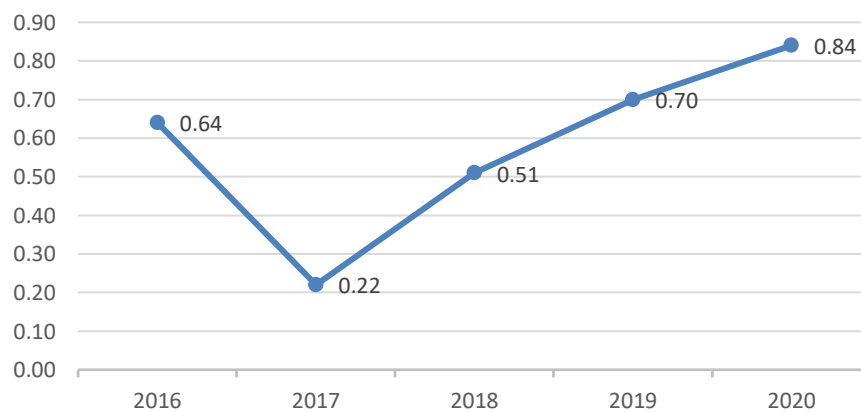
Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus mamacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

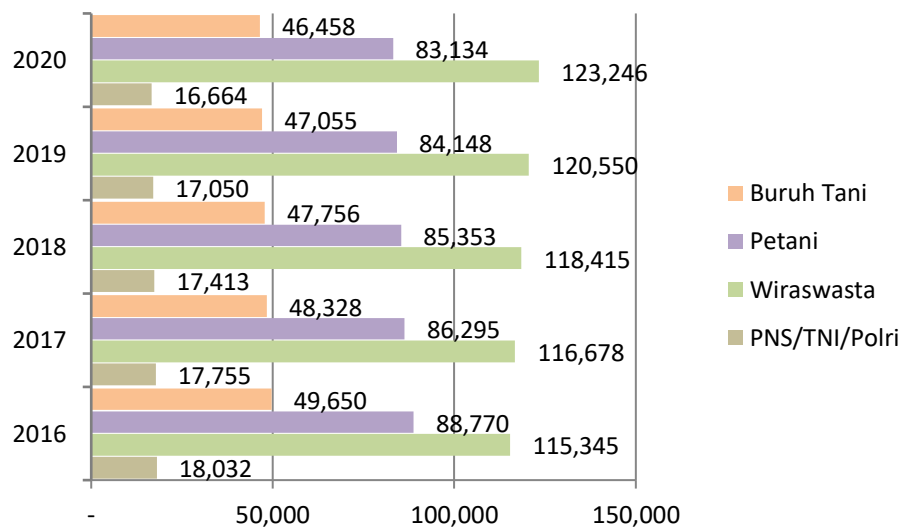


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diolah

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis periode Tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,84% pada tahun 2020.

Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain migrasi dan fertilitas. Migrasi keluar Kabupaten Ciamis dikarenakan salah satu faktor minimnya lapangan pekerjaan, penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Faktor lainnya yang mempengaruhi migrasi keluar adalah melanjutkan pendidikan keluar Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk mengendalikan fertilitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan program KB sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali.

Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Dapat dilihat pada grafik tersebut, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di bidang wiraswasta dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kategori pekerjaan petani, buruh tani dan PNS/TNI/Polri setiap tahunnya berkurang. Pengurangan jumlah PNS/TNI/Polri dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Sedangkan pengurangan pekerjaan kategori petani dan buruh tani karena semakin tidak menariknya lapangan usaha pertanian, bagi kalangan generasi muda.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/Sederajat	307.359	587.183	583.762	578.706	573.692
2	SMP/Sederajat	104.728	213.890	214.837	215.302	216.249
3	SMA/Sederajat	66.982	150.926	152.206	154.765	159.008

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	D-I/D-II Sederajat	3.640	6.232	6.055	5.889	5.718
5	D-III/Sederajat	4.399	8.744	8.858	9.030	9.211
6	D-IV/Sederajat dan S-1	13.267	27.779	29.247	30.980	32.613
7	S-2	544	1.912	2.005	2.116	2.189
8	S-3	57	151	159	165	173
Jumlah		500.976	996.817	997.129	996.953	998.853

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Dikelola dalam SIPD

Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis berpendidikan SD/ sederajat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis masih rendah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan masyarakat, pembahasan difokuskan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Ciamis adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHB
(Tahun Dasar 2010)

Kategori	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.970.068,70	6.275.293,91	6.871.780,33	7.412.341,87	7.545.446,25
B	Pertambangan dan Penggalian	50.112,86	48.668,95	50.303,70	50.013,41	51.358,26
C	Industri Pengolahan	1.890.569,21	2.027.492,51	2.221.217,70	2.351.619,64	2.348.430,42

Kategori	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.545,61	21.558,89	23.737,80	25.195,98	25.698,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.394,34	9.836,10	11.596,91	13.329,21	14.688,48
F	Konstruksi	2.145.662,77	2.358.352,85	2.651.168,30	2.903.977,65	2.700.373,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.158.731,40	5.598.020,87	6.058.070,70	6.608.815,41	6.371.489,89
H	Transportasi dan Pergudangan	3.206.374,15	3.477.854,07	3.761.950,80	4.008.472,17	4.185.223,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.005.105,58	1.108.003,08	1.234.668,10	1.389.999,40	1.351.325,92
J	Informasi dan Komunikasi	777.032,74	885.158,48	958.928,60	1.039.411,88	1.380.607,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	880.906,26	946.176,91	1.023.213,20	1.050.529,33	1.107.700,27
L	Real Estate	737.891,21	817.077,95	908.244,70	1.003.794,97	1.093.788,99
M,N	Jasa Perusahaan	210.440,88	232.282,71	262.427,70	322.386,07	288.748,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	752.602,65	782.598,48	827.014,00	841.914,20	839.695,43
P	Jasa Pendidikan	1.074.331,69	1.235.315,18	1.428.325,20	1.627.633,90	1.797.152,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.233,52	239.001,02	263.648,60	293.052,57	284.524,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	423.447,83	481.785,08	534.165,50	593.616,35	588.152,33
	PDRB	24.524.451,40	26.544.477,04	29.090.461,84	31.536.104,02	31.974.405,03

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHK Tahun 2016-2020
(Tahun Dasar 2010)

Kategori	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.075.074,06	4.165.067,75	4.234.706,85	4.356.420,05	4.420.522,35
B	Pertambangan dan Penggalian	38.177,87	38.228,50	39.370,90	38.367,92	38.585,47
C	Industri Pengolahan	1.477.353,32	1.553.859,24	1.664.729,90	1.748.889,96	1.720.352,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.282,19	13.557,61	14.746,20	15.429,81	15.817,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.386,10	6.840,88	7.518,01	8.230,03	9.030,40

Kategori Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
F Konstruksi	1.732.764,84	1.857.993,73	2.029.803,60	2.156.546,24	1.996.808,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.187.447,32	4.396.181,47	4.615.621,20	4.885.267,76	4.620.386,26
H Transportasi dan Pergudangan	2.245.125,15	2.362.848,78	2.498.027,20	2.661.209,17	2.650.256,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	775.854,47	829.535,04	886.759,47	959.691,05	884.121,23
J Informasi dan Komunikasi	782.919,01	875.396,58	955.362,05	1.043.444,02	1.385.806,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	704.166,77	724.512,08	753.863,60	759.469,89	800.614,10
L Real Estate	588.081,87	642.533,05	704.323,80	771.602,86	835.150,45
M,N Jasa Perusahaan	169.079,45	183.217,28	199.693,90	217.880,35	189.316,23
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	670.885,42	677.214,93	677.877,40	685.868,14	678.833,60
P Jasa Pendidikan	859.606,75	933.246,89	989.158,60	1.040.270,93	1.093.664,81
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.009,42	188.546,95	203.797,50	220.493,57	208.666,72
R,S,T,U Jasa lainnya	344.759,53	377.967,14	403.329,10	432.158,17	422.476,88
PDRB	18.844.973,53	19.826.747,90	20.878.689,28	22.001.239,95	21.970.410,39

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp31,97 Triliun, dan Atas dasar Harga Konstan adalah Rp21,97 Triliun.

Struktur Ekonomi Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2016-2020 Atas dasar Harga Berlaku didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selanjutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,34	23,64	23,62	23,50	23,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
C	Industri Pengolahan	7,71	7,64	7,64	7,46	7,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	8,75	8,88	9,11	9,21	8,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,04	21,09	20,82	20,96	19,93
H	Transportasi dan Pergudangan	13,07	13,10	12,93	12,71	13,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,10	4,17	4,24	4,41	4,23
J	Informasi dan Komunikasi	3,17	3,33	3,30	3,30	4,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	3,56	3,52	3,33	3,46
L	Real Estate	3,01	3,08	3,12	3,18	3,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,86	0,88	0,90	1,02	0,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,07	2,95	2,84	2,67	2,63
P	Jasa Pendidikan	4,38	4,65	4,91	5,16	5,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,90	0,91	0,93	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,73	1,82	1,84	1,88	1,84
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,99	2,21	1,67	2,87	1,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,71	0,13	2,99	-2,55	0,57
C	Industri Pengolahan	6,74	5,18	7,14	5,06	-1,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,04	2,07	8,77	4,64	2,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	7,12	9,90	9,47	9,72

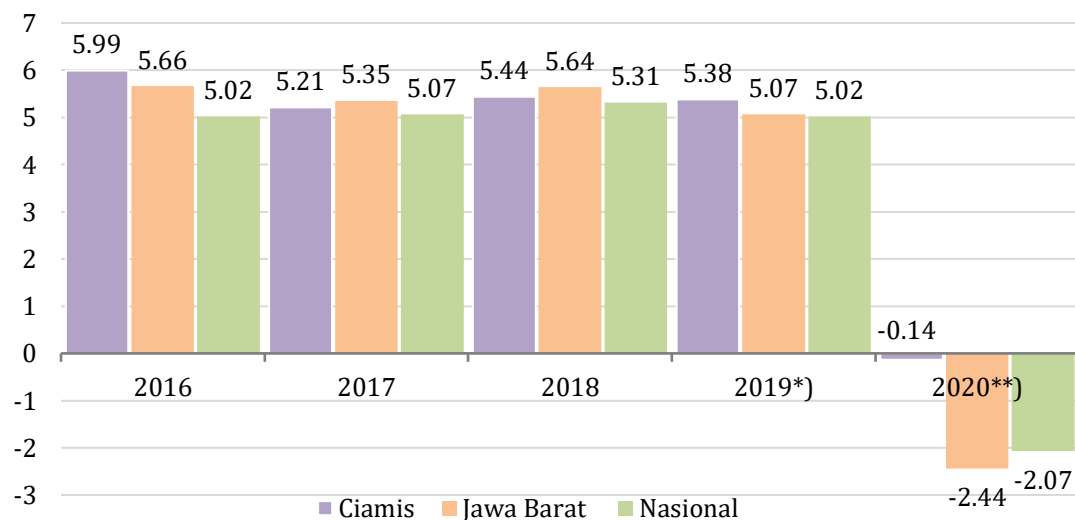
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
F	Konstruksi	4,50	7,23	9,25	6,24	-7,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	4,98	4,99	5,84	-5,42
H	Transportasi dan Pergudangan	6,23	5,24	5,72	6,53	-0,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,92	6,90	8,22	-7,87
J	Informasi dan Komunikasi	12,92	11,81	9,13	9,22	32,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	2,89	4,05	0,74	5,42
L	Real Estate	5,02	9,26	9,62	9,55	8,24
M,N	Jasa Perusahaan	7,12	8,36	8,99	9,11	-13,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	0,94	0,10	1,18	-1,03
P	Jasa Pendidikan	6,10	8,57	5,99	5,17	5,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	8,35	8,09	8,19	-5,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,48	9,63	6,71	7,15	-2,24
PDRB		5,99	5,21	5,31	5,38	-0,14

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Faktor melambatnya LPE Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 dipengaruhi oleh menurunnya produksi tanaman pangan dibandingkan dengan Tahun 2016. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2018 mengalami percepatan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi di sepuluh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44% dan LPE Kabupaten Ciamis tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,14%. Walaupun demikian, LPE Kabupaten Ciamis tahun 2020 dianggap lebih baik dibandingkan LPE Provinsi Jawa Barat yang terkontraksi sebesar 2,44% dan nasional yang terkontraksi sebesar 2,07%. Keadaan ini merupakan dampak *Covid-19* yang menyebabkan hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami kontraksi yaitu pada sektor jasa perusahaan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya; industri pengolahan; administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib; serta transportasi dan pergudangan akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Sektor yang tumbuh positif diantaranya informasi dan komunikasi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; real estate; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; pengadaan listrik dan gas; pertanian, pertambangan dan penggalan.

Grafik2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



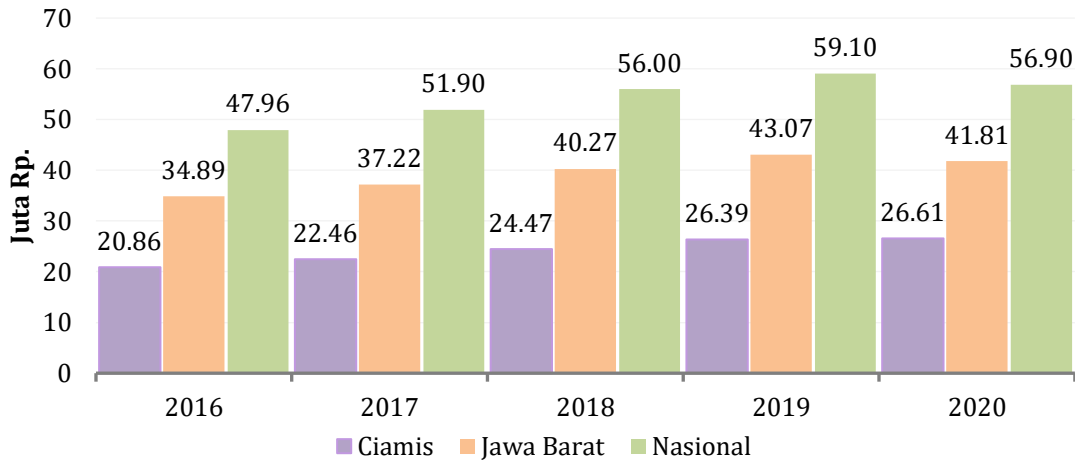
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional
*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

2.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per Kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2016 sebesar Rp20,86 juta dan Tahun 2020 sebesar Rp26,61 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,84% dari tahun 2019 yang semula Rp26,39 juta, meskipun kenaikan tahun 2020 tidak sebesar tahun sebelumnya yang mencapai 7,85%. Peningkatan yang dapat di katakan rendah, meskipun levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 2,02% yang terjadi sepanjang tahun 2020. Namun demikian, peningkatan yang rendah tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat, karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Ciamis tidak mutlak merata. PDRB per Kapita AdHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Ciamis per penduduk selama satu tahun. Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Perbandingan dengan provinsi terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.7
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional
 *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

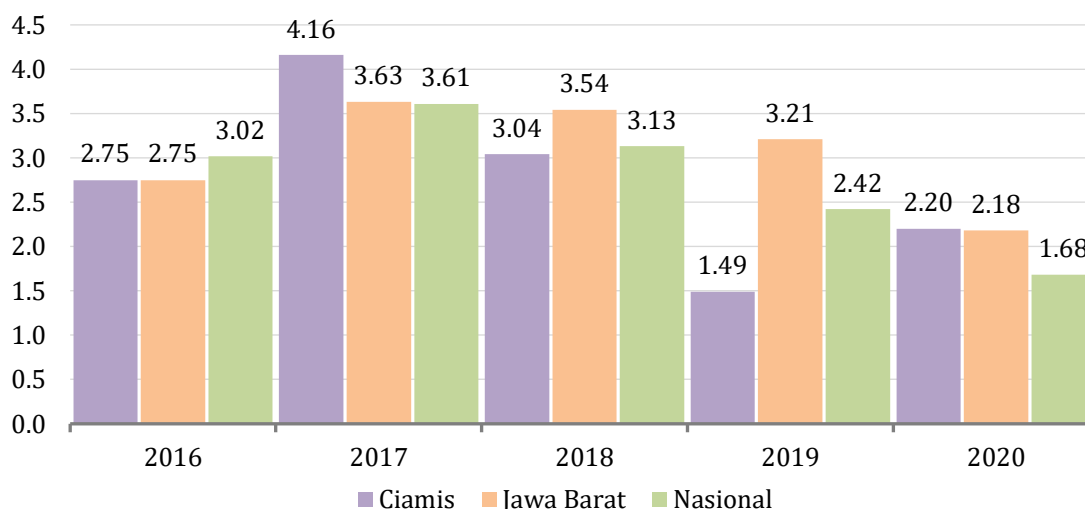
Apabila dibandingkan dengan capaian PDRB Per Kapita AdHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, PDRB Per Kapita AdHB Kabupaten Ciamis berada jauh di bawah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata peningkatan PDRB Per Kapita AdHB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 hanya sebesar Rp1,44 juta, sedangkan rata-rata peningkatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,73 juta dan peningkatan rata-rata nasional sebesar Rp2,23 juta.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Angka inflasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tercatat sama dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 2,75%, dan angka Inflasi Kabupaten Ciamis tahun berikutnya cenderung terkendali, meskipun capaian Inflasi Tahun 2020 posisinya lebih tinggi dari angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Secara umum, inflasi di Kabupaten Ciamis pada Bulan Desember 2020 terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau; dan kesehatan. Di kelompok makanan dan minuman dipicu oleh kenaikan harga komoditas tomat, cabe rawit dan beberapa jenis buah-buahan. Sedangkan di kelompok kesehatan dipicu oleh naiknya komoditas obat-obatan. Sedangkan kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran sisanya tidak mengalami gejolak harga.

Grafik 2.8
Laju Inflasi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan RPJMD Prov. Jabar Tahun 2018-2023

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

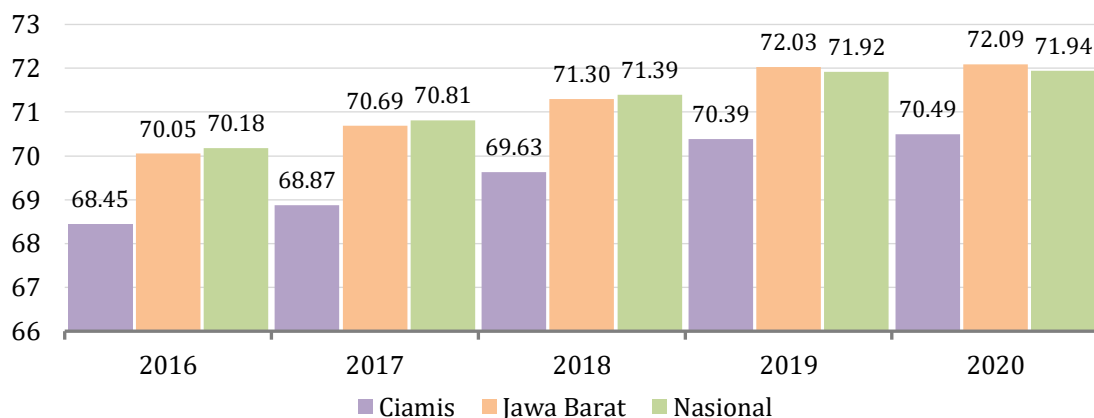
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Mulai Tahun 2010, *United Nations Development Programme (UNDP)* melakukan perubahan indikator IPM, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan metode perhitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Kualitas hidup manusia di Kabupaten Ciamis masih mengalami kemajuan, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 menjadi 70,49 poin atau meningkat 0,10 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 70,39 poin. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan RPJMD Prov. Jabar Tahun 2018-2023

Capaian IPM Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, namun posisinya masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 1,60 poin, tahun 2017 sebesar 1,82 poin, tahun 2018 sebesar 1,67 poin, tahun 2019 sebesar 1,64 poin dan tahun 2020 sebesar 1,60 poin.

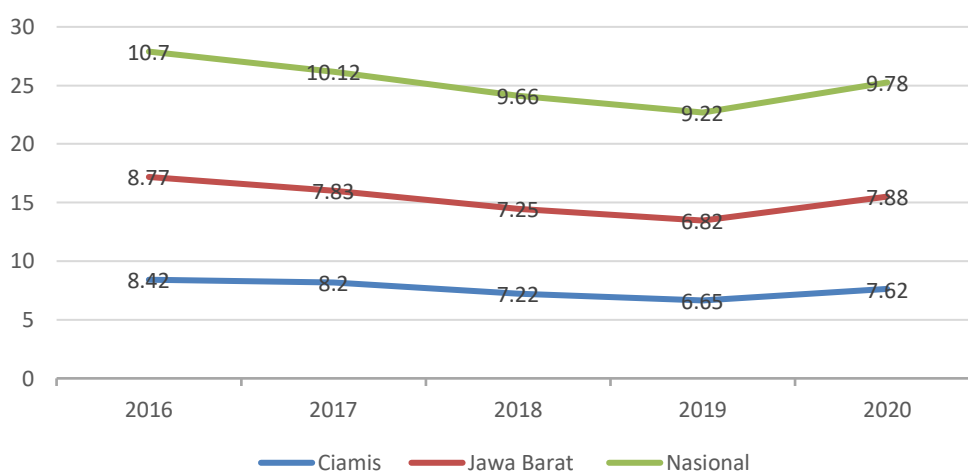
Capaian pembangunan manusia selama tahun 2020 di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IPM beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan (sumber data: <http://bps.go.id>). Kemajuan capaian pembangunan manusia selama tahun 2020 di Kabupaten Ciamis tercatat paling tinggi didorong oleh perbaikan pada Dimensi Pengetahuan khususnya capaian angka Harapan Lama Sekolah, dengan pertumbuhan sebesar 1,96%, dan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang ditunjukkan dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan pertumbuhan sebesar 0,36%. Sedangkan Dimensi Standar Hidup Layak mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,81%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 sampai sekarang, paling berat dirasakan pada sektor ekonomi, dan mengakibatkan penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.2.1.5. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 sebanyak 98,77 ribu jiwa atau sebesar 8,42% dan tahun 2019 menurun menjadi sebanyak 79,41 ribu jiwa atau sebesar 6,65%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,62% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 91,39 ribu jiwa, hal

tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan adanya pandemi *Covid-19*. Keadaan ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (sumber data: <http://bps.go.id>). Oleh karena itu, perlu penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dari tingkat Pusat dan Daerah agar dapat diatasi bersamaan dengan penanganan Pandemi *Covid-19*. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional sebagai berikut.

Grafik 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020



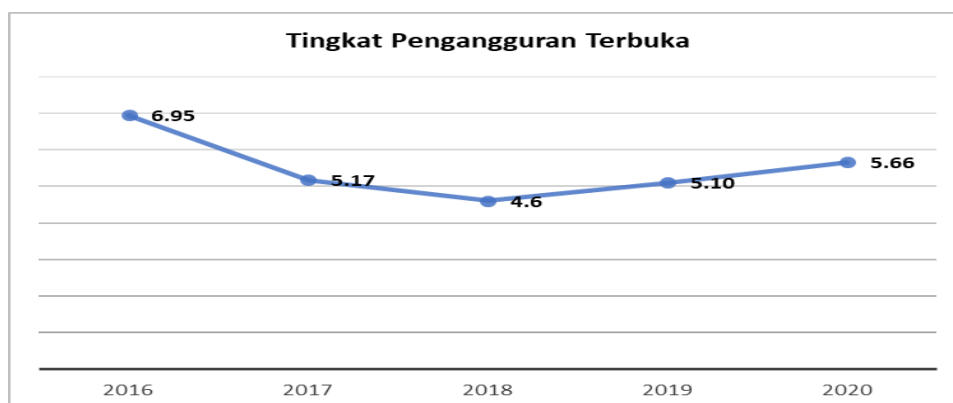
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional

Persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Ciamis, secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 posisinya berada di bawah Provinsi dan Nasional.

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Grafik 2.11
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



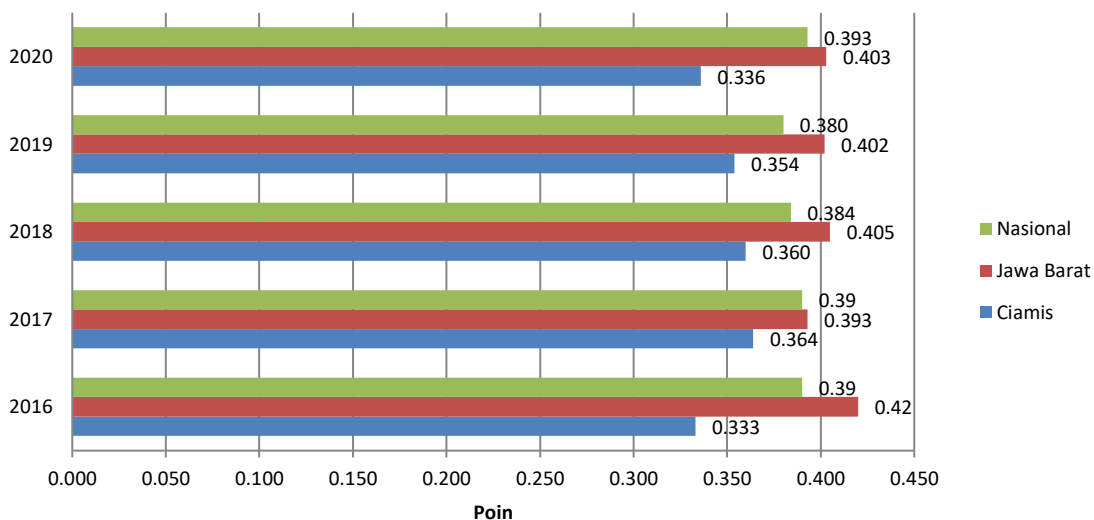
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

2.2.1.7. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Selama periode tahun 2016-2020 indeks gini Kabupaten Ciamis berada pada posisi 0,3 poin atau stabil di kategori tingkat ketimpangan ringan karena berada pada angka di bawah 0,4, akan tetapi selama kurun waktu tersebut masih terjadi adanya distribusi pendapatan yang cenderung tidak merata diantara masyarakat Kabupaten Ciamis.

Grafik 2.12
Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional

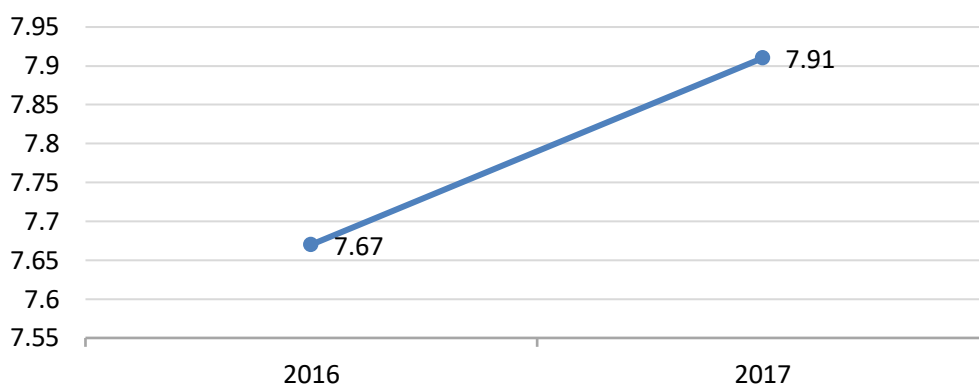
Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, indeks gini Kabupaten Ciamis memiliki angka lebih rendah dari indeks gini Provinsi Jawa Barat. Artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ciamis masuk kategori rendah atau kesenjangan diantara masyarakat kurang sejahtera tidak begitu jauh. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan indeks gini nasional, posisi indeks gini Kabupaten Ciamis berada di bawah posisi nasional.

2.2.1.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2016-2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 A Tahun 2015 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil SKM tahun 2016 sampai dengan 2017, IKM di Kabupaten Ciamis berada pada kisaran 7 (Sangat Puas), sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Indeks Kepuasan Masyarakat
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2017



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 22 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 3 pilihan jawaban (a, b atau c). *Range* nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM
Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014

No	<i>Range</i> Nilai IKM	<i>Range</i> Nilai Mutu Pelayanan	Interpretasi
1	≤ 2,98	≤ 33,11	Tidak Puas
2	2,99 – 6,02	33,22 - 66,89	Cukup Puas
3	6,03 – 9,00	67,00 - 100	Sangat Puas

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan 2020, kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 9 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 4 pilihan jawaban (a, b, c atau d). *Range* nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

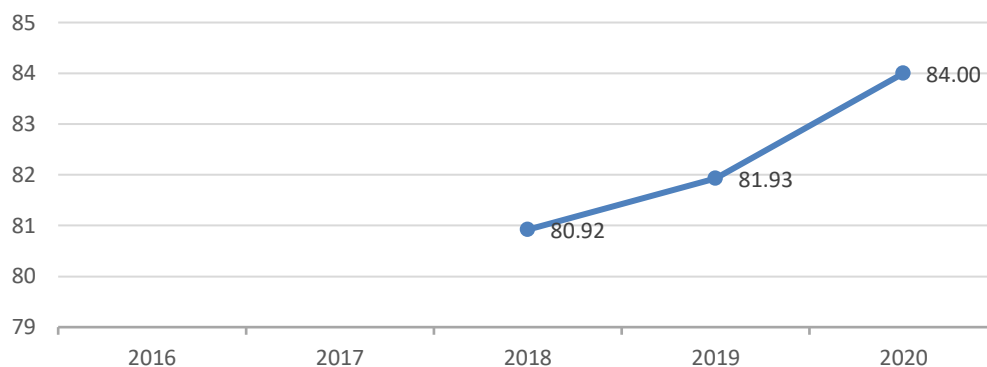
Tabel 2.19
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM
Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

IKM di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 sampai dengan 2020 termasuk pada kategori Baik, yaitu pada tahun 2018 mencapai 80,92, kemudian meningkat menjadi sebesar 81,93 pada tahun 2019, dan 84,00 pada tahun 2020, sebagaimana pada Grafik 2.12 berikut:

Grafik 2.14
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial diuraikan dalam 3 (tiga) bidang antara lain pendidikan, kesehatan dan pengangguran.

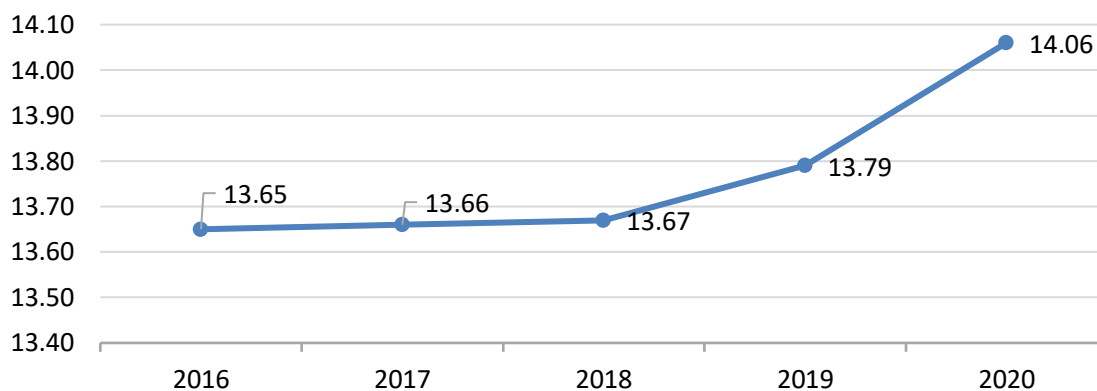
2.2.2.1. Pendidikan

Capaian kinerja pendidikan diukur antara lain dengan Angka Melek Huruf, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen IPM dari unsur pendidikan, HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Grafik 2.15
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



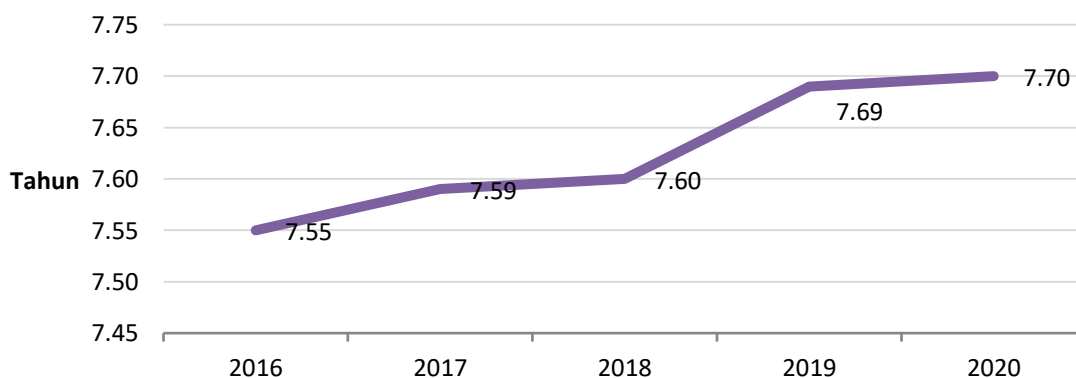
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 adalah sebesar 14,06 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,06 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatnya kuliah semester IV).

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Capaian RLS di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar 7,70 tahun berarti rata-rata penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Ciamis menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP.

Grafik 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



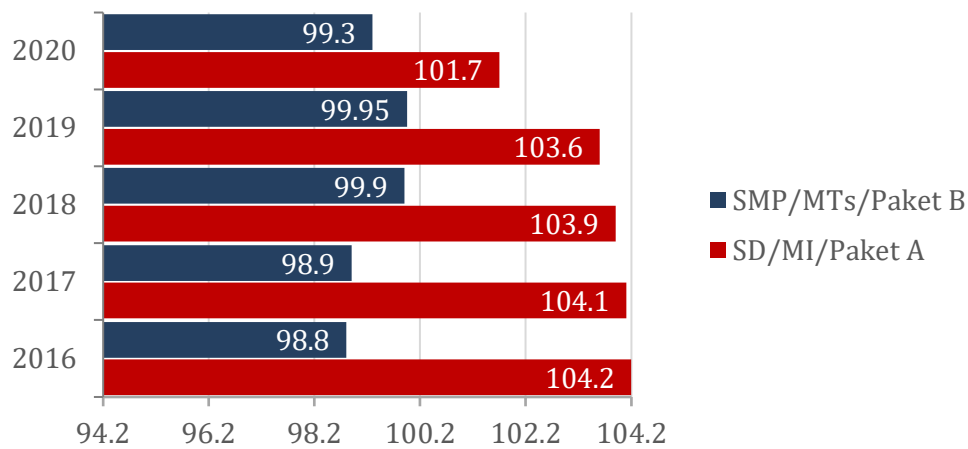
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Capaian APK jenjang SD/MI di Kabupaten Ciamis periode 2016-2020, cenderung stabil diatas 100% dan jenjang SMP/MTs diatas 98%.

Grafik 2.17
 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
 di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

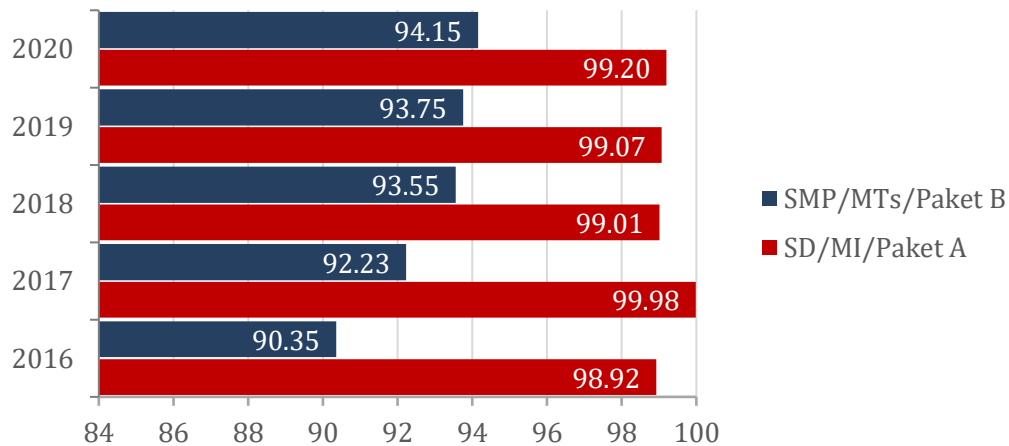


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

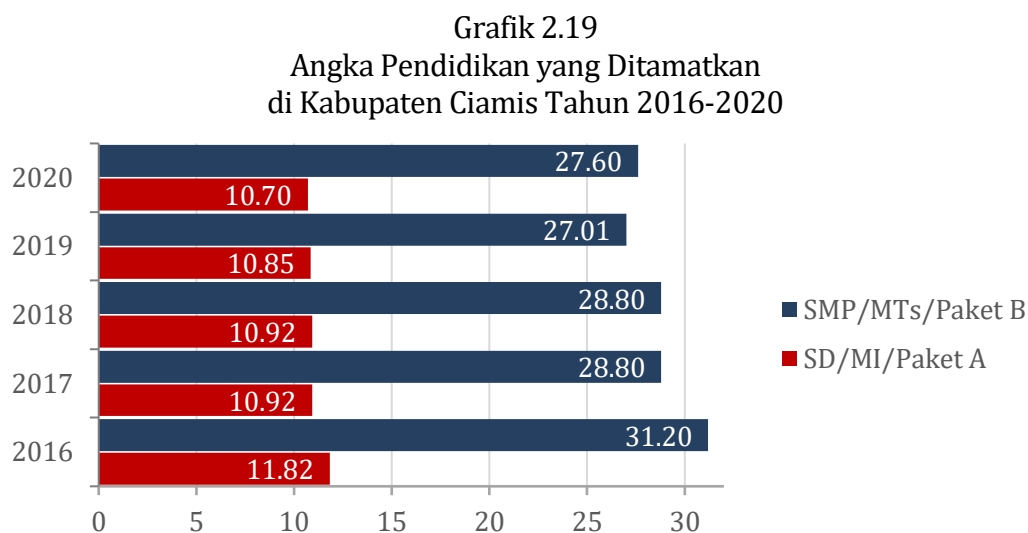
Grafik 2.18
 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
 di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

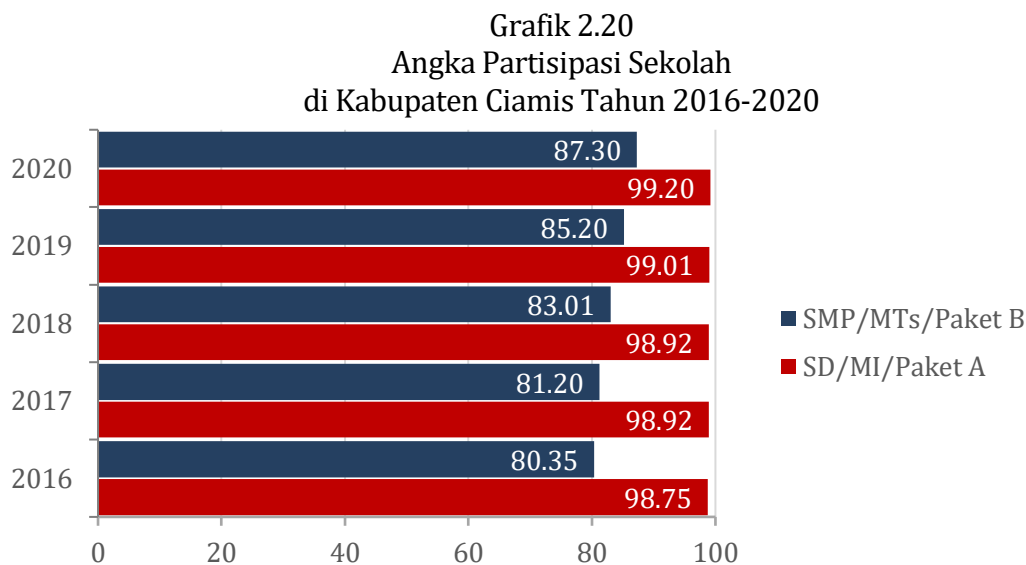
Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk suatu wilayah. Capaian Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

f. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan SD/MI/Paket A maupun APS SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan setiap tahunnya.

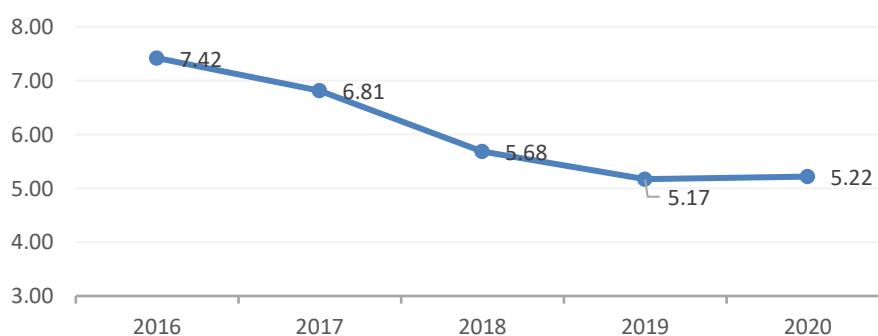
2.2.2.2. Kesehatan

Capaian kinerja Kesehatan diukur antara lain dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase Balita Gizi Buruk dan Angka Harapan Hidup (AHH).

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. AKB merupakan indikator derajat kesehatan yang sangat penting karena kelompok bayi merupakan kelompok yang sangat rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Grafik 2.21
Angka Kematian Bayi/1.000 KH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



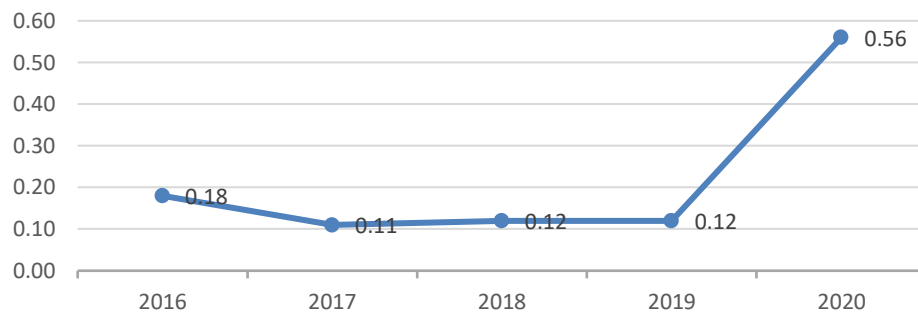
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Angka Kematian Bayi terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dan penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2018 sebesar 1,13/1.000 KH. Hal tersebut merupakan salah satu dampak pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), dimana program tersebut mampu mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga kesehatan terampil, termasuk skrining status imunisasi pada ibu hamil, serta melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilanjutkan memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain.

Grafik 2.22
 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



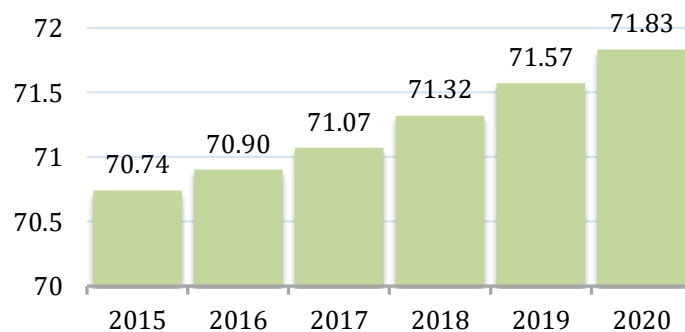
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

c. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut gambaran perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.

Grafik 2.23
 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020



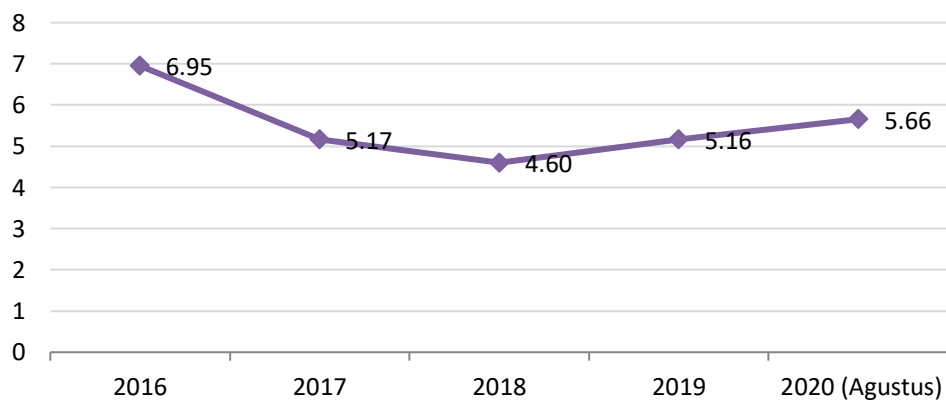
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimana pada tahun 2020 telah mencapai 71,83 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2020 yang sudah mencapai 73,04 tahun, maka AHH Ciamis masih terput 1,21 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

2.2.2.3. Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Grafik 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Dari grafik tersebut terlihat bahwa perkembangan TPT di Kabupaten Ciamis periode tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis tahun 2020 tercatat sebesar 5,66%, terjadi peningkatan sebesar 0,50% dibanding capaian tahun 2019 sebesar 5,16%. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa selama tahun 2020, penduduk Kabupaten Ciamis yang termasuk angkatan kerja yang dapat diserap pasar kerja mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebanyak 8.587 jiwa.

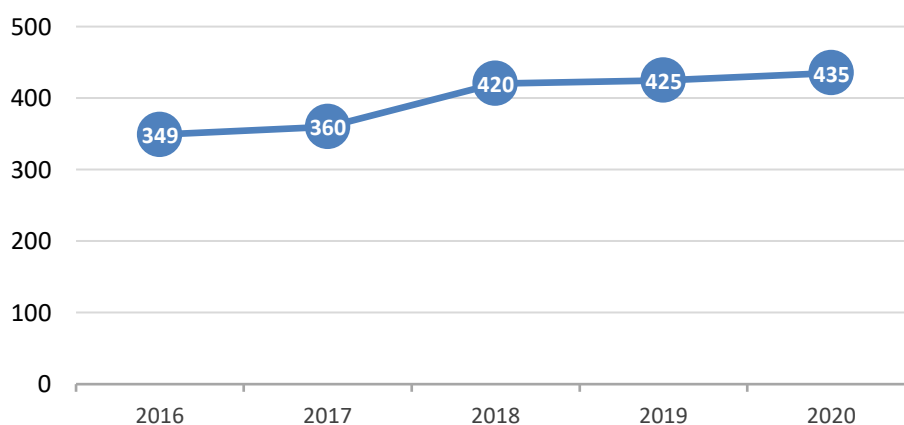
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga.

2.2.3.1. Seni dan Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Ciamis seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, masih perlu terus ditingkatkan dengan mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Grafik 2.25
Perkembangan Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis
Dikelola dalam SIPD

Perkembangan jumlah grup kesenian di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana jumlah pada tahun 2017 sebanyak 360 grup meningkat pada tahun 2018 menjadi 420 grup dan terus meningkat sampai tahun 2020 sebanyak 435 grup. Selain itu Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 telah mempunyai Gedung Kesenian, sebagai ruang yang cukup representatif bagi para penggiat seni untuk menggelar kegiatan seni dan budaya.

2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga

Pembinaan generasi pemuda dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan upacara bendera,

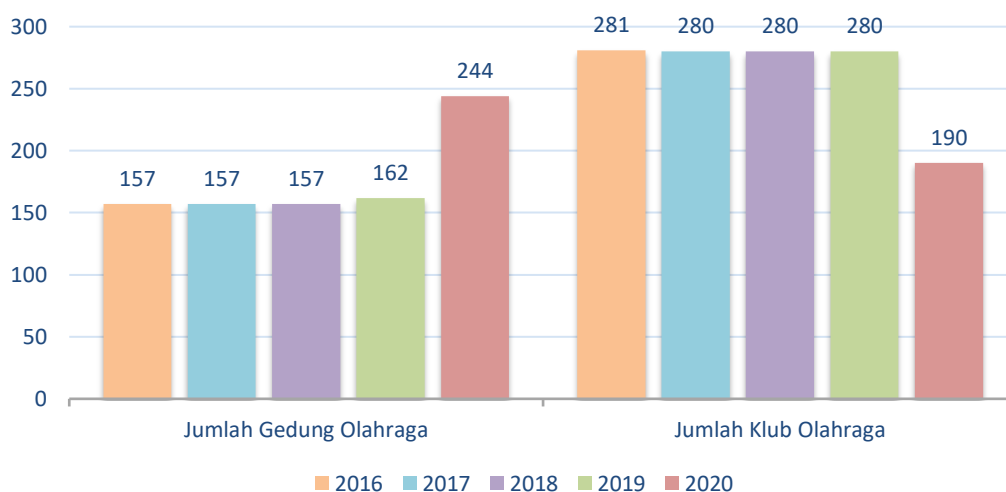
penyelenggaraan pemuda produktif dan kegiatan pemuda pelopor. Seiring perkembangan lokal dan regional, tren yang berkembang di masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi, generasi pemuda banyak yang membangun kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta memanfaatkan teknologi digital, berkembang bersama dan membentuk komunitas-komunitas.

Selanjutnya, pembinaan olahraga dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan olahraga dengan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi.

Perkembangan jumlah gedung olahraga di Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2020 menunjukkan peningkatan, namun untuk jumlah klub olahraga justru berkurang. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan juga peran serta masyarakat guna mengimbangi peningkatan prestasi olahraga.

Grafik 2.26
Perkembangan Jumlah Gedung dan Klub Olahraga
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikelola dalam SIPD)

Secara prestasi olahraga, Kabupaten Ciamis belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini terlihat pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Provinsi Jawa Barat yang merupakan ajang olahraga tingkat regional yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali dan

diikuti oleh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dimana hasil keikutsertaan Kabupaten Ciamis pada PORDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada di peringkat 25. Hal ini harus menjadi pemacu agar pada pelaksanaan PORDA berikutnya, Kabupaten Ciamis terus bisa memperbaiki peringkat dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum di Kabupaten Ciamis merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini dibahas mengenai capaian kinerja aspek pelayanan umum terdiri atas Fokus Urusan Pemerintahan Wajib dan Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan persentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing merebut pasar kerja di Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan dan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	Angka partisipasi kasar PAUD	Persen	55,20	71,01	72,60	73,85	88,70
2	Angka Partisipasi Kasar						
	- SD/MI/Paket A	Persen	104,20	104,1	103,9	103,6	101,66
	- SMP/MTs/Paket B	Persen	98,75	98,85	99,91	99,95	99,30

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Angka pendidikan yang ditamatkan						
	- SD/MI/Paket A	Persen	11,82	10,92	10,92	10,85	10,70
	- SMP/MTs/Paket B	Persen	31,20	28,80	28,80	27,01	27,60
4	Angka Partisipasi Murni						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	98,92	98,98	99,01	99,07	99,20
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	90,35	92,23	93,55	93,75	94,15
	Angka Partisipasi Sekolah						
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	98,75	98,92	98,92	99,01	99,20
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	80,35	81,20	83,01	85,20	87,30
5	Angka Partisipasi Sekolah						
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	98.75	98.92	98.92	99.01	99.20
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	80.35	81.20	83.01	85.20	87.30
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	79.20	alih kelola	alih kelola	alih kelola	alih kelola
6	Angka Putus Sekolah						
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,016	0,019	0,018	0,018	0,520
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,021	0,026	0,024	0,023	1,730
7	Angka Kelulusan						
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,98	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM)						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	99,82	99,83	99,83	99,90	99,91
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	74,02	79,81	Alih kelola	Alih kelola	Alih Kelola
	Fasilitas Pendidikan:						
9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Sekolah	876	878	875	877	878
10	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Sekolah	231	231	231	233	233
11	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:160	1:161	1:161	1:163	1 : 162
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	1 : 22	1:21	1:21	1:21	1 : 21
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 17	1:18	1:19	1:19	1 : 19
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99,53	99,55	99,60	99,75	99,78
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,39	Alih Kelola	Alih Kelola	Alih Kelola	Alih Kelola
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,11	99,17	99,20	99,22	99,30
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Orang	6.921	7.033	8.812	9.628	9.757

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Pada tahun 2019 persentase penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara mencapai 99,22% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,30%. Perkembangan indikator kinerja urusan pendidikan tersebut didukung oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan keberadaan murid itu sendiri.

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan karena sangat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia. Pembangunan kesehatan merupakan nilai investasi pembangunan sumber daya manusia. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio posyandu persatuan balita	Permil	12,02	19,45	20,40	24,43	26,06
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Permil	0,12	0,120	0,131	0,131	0,13
3	Rasio RS per satuan penduduk	Permil	0,00	0,003	0,004	0,004	0,003
4	Rasio dokter per satuan penduduk	Permil	0,08	0,04	0,16	0,14	0,15
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Permil	0,59	0,09	0,18	1,23	2,01
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	136,14	115,51	86,77	94,26	100
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94,2	93,75	86,14	97,70	94,27
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	90,57	93,58	93,58	94,34	81,13
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
10	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	138,92	109,05	98,85	91,33	91,18
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	71,16	65,37	63,47	71,00	47,48
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	104,30	99,20	101,68	96,35	91,65
14	Jumlah Puskesmas	Persen	37,00	37,00	37,00	37	37
15	Cakupan puskesmas	Persen	142,31	137,04	137,04	137,04	137,04
16	Jumlah Puskesmas Pembantu	Persen	85,00	85,00	85,00	86	86
17	Cakupan Puskesmas Pembantu	Persen	32,08	32,08	32,08	32,08	32,45
18	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	136,14	115,51	86,77	94,26	100
19	Angka Kesakitan penderita DBD yang ditangani	Persen	749	47	84	404	1468
20	Persentase penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,48	99,42	102,16	103,70	94,8
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	/100.000	2	2	3	2	2
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	138,92	109,05	98,85	91,33	91,18
25	Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	Persen	133,57	148,22	128,63	107	114
26	Tingkat kematian karena TBC (per 100.000 penduduk)	Persen	2,04	2,28	1,43	2	2,27
27	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	44	64,21	64,91	55	59
28	Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam penanganan DOTS	Persen	95	88,7	21,4	90	94
29	Angka kejadian malaria	Kasus	7,00	3,00	8,00	3,00	1
30	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
33	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
34	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	Kondom	14670	2030	2077	804	370
35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	7.069	9.683	18.084	27.170	29.081
36	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	92,33	90,60	95,70	88,66	92,31
37	Cakupan kunjungan bayi	Persen	104,30	99,20	101,68	96,35	91,65
38	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	32,08	32,08	32,08	32,08	32,45
39	Cakupan pelayanan nifas	Persen	97,30	93,60	96,90	99,40	93,75
40	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	92,90	106,10	92,60	86,14	100
41	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	90,50	81,00	104,80	98,86	95,88
42	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	32,55	10,29	22,94	32,99	51,22
43	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100,00	75,92
44	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	pelayanan	10.008	23.702	32.952	67.548	94.013
45	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100
46	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
47	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100
48	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Permil	7,42	6,81	5,68	5,17	5,22
49	Angka kelangsungan hidup bayi	Absolute	-6,4	-6	-4,6	-4,1	-4,2
50	Angka kematian ibu/100.000 KH	Per serratus ibu	81,4	72,2	77,4	73,1	82,9
51	Angka kematian balita/1.000 KH	Per serratus ibu	0,92	0,75	0,67	0,83	0,36
52	Angka kematian neonatal /1.000 KH	Per serratus ibu	5,48	5,29	4,23	3,92	3,41

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Berkeanaan dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun demikian jumlah masyarakat miskin yang terlayani semakin meningkat. Hal tersebut karena akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin baik, ditunjang dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah terintegrasi serta pelayanan kesehatan tidak hanya di dalam gedung tetapi sudah dilaksanakan juga pelayanan di luar gedung.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pekerjaan Umum							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	66,787	68,719	70,826	71,716	72,41
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.0007217	0.0007177	0.000714	0.000710	0.000706
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	66,787	68.719	70.826	71.716	72,41
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	0	0	0	0	0
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	70	70,11	72,98	73,06	73.17
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	31.450	34.520	37.940	41.470	46.090
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	0	0	0	0	0
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	49,63	49,83	49.50	49.87	50.55
13	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	M/ha	29,554	29,780	29,950	34,561	38.920
14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	100	100	100	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	80,06	81,02	81,08	89,12	89,77
16	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,045	0,061	0,032	0,024	0,017
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	31.90	37.84
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	5,14	5,11	5,08	5,06	5,03
Penataan Ruang:							
20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	20	20	20	20	20
22	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
23	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	57
25	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	n/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	Persen	0,06738	0,06756	0,06792	0,06831	0,06873
2	Rasio permukiman layak huni		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	n/a	n/a	89,06	88,94	88,02
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	0,56	0,41	0,35	1,74	1,83
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,045	0,061	0,032	0,024	0,017
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	n/a	12,14	54,24	65,49	32,96
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	2,81	2,81	3,62	4,43	6,44

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diperlukan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ciamis. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	44,10	39,06	39,06	40,14	62,80
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	98	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	12,29	12,29	12,29	11,06	93,94

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	78,125	81,08	75,71	66,18	71,21
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	134	146	137	117,7	118,6

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Kabupaten Ciamis sudah memiliki 3 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diantaranya di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Rancah dan Kecamatan Kawali yang dibentuk pada tahun 2020.

6. Urusan Sosial

Pembangunan Urusan sosial merupakan salah satu pelayanan dasar yang menitikberatkan pada penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perkembangan capaian indikator kinerja urusan sosial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	104	91,67	99,94	78,62	123,40
2	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	-	-	100,00	100,00	129,82
3	Persentase PPKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	Persen	100	91,58	99,94	0	0
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0	0	0	0	0
5	Persentase panti sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	Persen	100	98	98	0	0
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	13	38	38	0	0
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	Persen	100	100	100	0	0
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	Persen	100	1,82	80	0	0
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	Persen	100	75,86	91,00	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	24,37	20,19	8,94	14,71	23,47
2	Keselamatan dan Perlindungan (K3)	Persen	71,11	72,00	92,76	Alih Kelola	Alih Kelola
3	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan	Kasus	0	2	0	1	1
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0	0	1	1	1
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	0	1	0	0	0
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	Orang		5537	5500	8687	9596
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	Persen	249	252,00	70	3,2	54,3
8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	Persen	0	0,00	0	9,9	11,3
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen		82,35	66,05	63,47	64
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0	0	72	64	61,44
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0	67,80	80	84,7	76,47
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Poin	n/a	11,76	14,41	11,61	5,29

Sumber : Dinas Tenaga Kerja (Dikelola dalam SIPD)

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,9	49,9	50,36	51,25	51,26
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	10	8,70	10	12	12
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Rasio KDRT	Persen	0,006	0,0005	0,0005	0,0008	0,0001
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai Dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
18	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Kasus KDRT terhadap ibu dan anak masih terjadi namun seluruhnya dapat tertangani karena adanya pendampingan dalam penanganan kasus yang dilaporkan. Selain itu dengan adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT akan semakin menurun.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD belum mencapai 30%, hal ini masih merupakan tantangan kedepan agar proporsi tersebut bisa terus meningkat agar memenuhi ketentuan.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah melakukan pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan beberapa regulasi terkait ketahanan pangan, diantaranya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor 520/Kpts.21A-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pangan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	191.83	174.54	149.64	141.94	143.66
2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	3,550	3,531	3,592	2,455	2,723
3	Ketersediaan protein perkapita	Gram/kap/hr	99.3	95.77	101.5	84.09	93.84
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	76.2	76.7	89.8	89.4	91.5
5	Penguatan cadangan pangan	Persen	60	70	66	70	90
6	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	45	50	55	60	65
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	52,38	53,00	69,4	70	73

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Produksi padi tahun 2016-2019 cenderung menurun karena berbagai faktor antara lain masih rendahnya produktivitas lahan sawah, pengaruh perubahan iklim dan serangan hama dan penyakit. Sedangkan produksi jagung cenderung meningkat, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan daerah khususnya untuk pakan ternak unggas (sekitar 300 ton/minggu), hal tersebut mengakibatkan ketersediaan pangan yang fluktuatif. Namun untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,80% menjadi sebesar 461.378 ton.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah, penguatan cadangan pangan daerah dan masyarakat terus ditingkatkan selama tahun 2016-2019 tetapi belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Urusan Pertanahan

Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan sebagai indikator kinerja urusan pertanahan pada 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 100 %. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

5. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Terselenggaranya KLHS	ada/tidak ada	n/a	n/a	n/a	Ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	poin	54,80	56	59,60	59,60	59,67
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	poin	90,78	75,81	77,79	78,35	79,99
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	poin	n/a	33,50	33,42	34,57	32,84
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Persen	0	37	50	31	32
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten / Kota	Orang	0	0	0	0	0
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	1	1	1
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	2	2	2	2	2
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	2	2	2	2	2
12	Penetapan hak MHA	Kelompok	2	2	2	2	2
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA	Persen	0	0	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100	100	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	5,07	14,93	22,93	74,82	76,20
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	39,38
20	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	64,29	64,29	64,47	64,47	67,63
21	Persentase jumlah sampah yang	Persen	5,07	4,99	6,88	6,79	89,88

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	tertangani						
22	Operasionalisasi TPA/ TPST/SPA di kabupaten/ kota	Persen	100	100	100	100	100
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.31

Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	85,5:100	86:100	89,86:100	96,11:100	95,40:100
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	2,87:10	1,5:10	2,15:10	2,12:10	4,250:10
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Cakupan penerbitan KTP	Persen	131,3	153,21	125,16	85,55	126,97
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	102,47	102,74	115,11	46,32	63,82
6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Rasio Ketergantungan	Rasio	0,38	0,51	0,46	0,49	0,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP sudah 126,97%. Begitu pula Kepemilikan akte kelahiran, pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya kegiatan pelayanan keliling ke desa-desa dan

adanya target nasional cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun sampai dengan akhir 2018.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para *stakeholder* di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	86.0	87.2	88.4	89.9	94.2
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	1	1	1	1	1
4	Persentase LPM Aktif	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase LPM berprestasi	persen	0	0	0	0	0
6	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	persen	100	100	100	100	100
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100
9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100
10	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa	persen	2.71	22.87	26.36	26.36	30.62

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu tujuan program KB untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan reproduksi sehat, ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	orang	2,030	2,0562	2,056	2,055	2,050
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ Perbup	0	0	0	0	0
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Persen	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0	2	2	2	2
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,4	2,4	2	2	2
8	Rasio Akseptor KB	Persen	77,55	80,68	78,82	79,11	80,22
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Akseptor	166.320	181.505	184.923	188.489	191.004
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	4.428	4.409	4.551	3.600	3.600
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	15.642	15.998	32.074	31.269	28.988
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20,84	21,63	21,61	21,62	21,8
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77,55	80,68	78,82	79,19	80,22
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	86,68	79,57	78,48	84,86	85,41
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	80,04	77,48	80,11	78,86	81,68
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	75,42	75,19	76,41	69,23	64,36
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kelompok	2	2	2	2	2
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	0,94	1,08	1,09	1,10	1,10
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	21,97	21,21	19,70	17,14	17,14
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	39,29	39,02	37,38	36,57	36,38

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100
26	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0	0	0	N/A	N/A
27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	100
28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	83	85	86	86	86
29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	19,6	19,7	19,8	19,76	19,77
30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	n/a	n/a	0,98	1,01	1,01
31	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	Persen	20,40	18,33	17,20	16,25	16,25

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Rata-rata jumlah jiwa per keluarga pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,03 jiwa, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis telah memahami konsep keluarga kecil dengan rata-rata satu keluarga hanya memiliki satu anak. Demikian juga untuk jumlah peserta KB pria semakin meningkat jumlahnya, dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan peran pria dalam ber-KB.

9. Urusan Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu berbasis pengembangan wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, serta mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	11.810.827	9.583.465	7.289.950	6.847.228	4.073.201
2	Rasio izin trayek	%	0,000140881	0,000127727	0,000114305	0,000108581	0,000096486
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	5.332	5.026	5.094	5.760	5.014
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	32,22	32,41	32,27	32,10	30,91
5	Pemasangan rambu-rambu	Unit	396	512	650	797	850
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	n/a	n/a	n/a	0,002801796	0,003050053
7	Jumlah terminal bis	Unit	3	2	2	2	2
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	11.810.827	9.583.465	7.289.950	6.847.228	4.073.201
9	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	Orang	11.810.827	9.583.465	7.289.950	6.847.228	4.073.201
10	Persentase layanan angkutan darat	%	8,83	9,29	11,48	12,88	14,23

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	14,81	14,81	37,04	44,44	51,80
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah KIM pada tahun 2020 adalah 14 KIM yang tersebar di beberapa desa di beberapa kecamatan, yaitu : 1)KIM Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican, 2)KIM Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican, 3)KIM Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican, 4)KIM

Desa Bangunharja Kec Cisaga 5)KIM Bermanfaat Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara 6)KIM Bewara Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara, 7)KIM Indrajaya Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara, 8)KIM Sukamitra Desa Sukanagara Kecamatan Jatinagara, 9)KIM Cintelaksana Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara, 10)KIM Baktilaksana Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara, 11)KIM Kelurahan Linggasari, 12)KIM Meralaya Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari, 13) Cieurih, 14) Ciomas.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif dan sehat, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	persen	35,71	53,21	54,14	55,07	56,18
2	Persentase UKM non BPR /LKM aktif	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase BPR/LKM aktif	persen	100	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	persen	87,68	99,85	99,08	99,05	99,08

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Bagian Perekonomian Setda Kab. Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Ciamis dilihat dari persentase pertumbuhan koperasi aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun baru Perkembangan mencapai 56,18% pada tahun 2020 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 350 unit.

12. Urusan Penanaman Modal

Iklim usaha investasi yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna menjangkau penanaman modal. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	70	44	61	40	93
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	178,000	187,734	206,574	221,284	199,591
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Miliar Rp	44.725	9,734	18.842	14.708	(21.693)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset yang akan melanjutkan *estafet* pembangunan di masa yang akan datang. Organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan merupakan wadah para generasi muda untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat positif. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	66	55	55	80	81
2	Persentase wirausaha muda	Persen	52	49	49	50	85
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	85	85	85	85	92
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	65	65	67	70	75
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	80	80	82	85	86
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	21	14	4	20	17
7	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	38	38	25	14	19

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 81% organisasi pemuda yang aktif, demikian juga dengan persentase wirausaha muda yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2020.

14. Urusan Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

berkesinambungan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan statistik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

15. Urusan Persandian

Sampai dengan tahun 2019 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dikarenakan belum adanya NSPK. Namun pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi keamanan informasi dan telah mencapai 100% perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Sebagian besar perangkat daerah telah menggunakan email resmi pemerintah yang dikelola oleh admin serta menggunakan sistem keamanan yang cukup baik. Dalam hal ketersediaan, keutuhan dan keamanan informasi telah dibangun website pemerintah Kabupaten Ciamis yang keamanannya ditunjang oleh beberapa fitur sistem keamanan yang cukup memadai. Sebanyak 55 (lima puluh lima) OPD di Kabupaten Ciamis telah menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (interkoneksi) antar OPD melalui jaringan tertutup yang terintegrasi di Diskominfo.

16. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang dianugerahi kekayaan budaya dan keragaman budaya. Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	32	38	45	46	50
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Benda/Situs/ Kawasan	570	570	772	812	1018
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	2	2	3	6	16
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

17. Urusan Perpustakaan

Minat baca merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan. Urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	21.621	44.870	47.217	66.673	78.346
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	26.319	31.720	37.903	51.999	64.079
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	57.375	58.372	71.371	74.651	83.622
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	28.425	28.708	30.045	30.163	33.325
5	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Unit/1.000 penduduk	0,243	0,243	0,243	0,277	0,281
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah perpustakaan tahun 2020 sebanyak 401 unit, terdiri dari perpustakaan desa sebanyak 201 unit, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 69 unit, perpustakaan pontren sebanyak 126 unit, perpustakaan keliling sebanyak 4 unit dan 1 unit perpustakaan daerah. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang cukup signifikan sejalan

dengan telah selesainya pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Ciamis pada tahun 2016.

18. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kearsipan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	5	5	5	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Penerapan pengelolaan arsip secara baku sudah tercapai 100% dimana semua OPD sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, dan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, fungsi lembaga kearsipan sebagai pembinaan dan pengolahan arsip. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan rutin melaksanakan pembinaan kearsipan pada setiap OPD dan Desa di Kabupaten Ciamis.

2.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan modal strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal termasuk potensi-potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pariwisata dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan	Orang	640.941	410.970	506.151	697.782	616.643
2	Lama kunjungan Wisata	hari	n/a	n/a	n/a	n/a	3
3	PAD sektor pariwisata	%	0.32	0.12	0.14	0.30	0.18

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebanyak 616.643 orang, menurun sebesar 11,63% atau sebesar 81.139 orang dibandingkan tahun 2019. Beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya kunjungan wisatawan ini sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

2. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ciamis. Pembangunan pada urusan pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	Persen	24,34	23,64	23,62	23,50	23,60
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	KU/Ha	66,00	64,38	66,47	66,74	65,53
6	Cakupan bina kelompok petani	Persen	8	8	13,17	25	46
7	Produksi sektor perkebunan Keseluruhan	Ton	21.831,65	21.148	21.485	21.309,56	19.035,43

Sumber : Badan Pusat Statistik; dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, serta dikelola dalam SIPD

Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Ciamis. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini berkembang dan mempunyai prospek serta peluang pasar yang cukup baik adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah, tomat, duku, manggis dan pisang. Pemasaran komoditi ini sudah mampu menembus pasar di luar Kabupaten Ciamis. Produktivitas padi yang menurun pada tahun 2020 karena banyaknya serangan OPT (wereng batang coklat dan tikus).

3. Urusan Kehutanan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pusat, berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kehutanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Hektar	2.287	791,00	841,50	420,00	n/a
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	4	4	3	n/a	n/a
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	42,50	42,50	42,50	44,92	n/a

Sumber: Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat(Dikelola dalam SIPD)

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, komoditi kehutanan mengalami perkembangan. Di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019, potensi kehutanan berupa hutan negara seluas 17.952,51 Ha, terdiri dari hutan konservasi seluas 5.576,01 Ha (terdiri dari cagar alam Panjalu dan Suaka Margasatwa), dan hutan produksi seluas 12.376,50 Ha, sedangkan luas hutan rakyat/kebun rakyat adalah seluas 50.192,19 ha, terdiri dari 20.419,30 ha pada Kawasan Budidaya dan 29.772,89 ha pada

Kawasan Lindung. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis setiap tahunnya semakin menurun, hal tersebut sejalan dengan semakin menurunnya kerusakan Kawasan lahan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi, kewenangan kabupaten/kota hanya pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan energi sumber daya mineral dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	82,17	96,78	97,02	99,90	n/a
2	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pertambangan tanpa izin	Persen	n/a	n/a	n/a	1 (Habis masa berlaku)	n/a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis Tahun 2016* dan UPTD ESDM Prov. Jabar Wilayah Tasik, Ciamis, Banjar dan Pangandaran (Dikelola dalam SIPD)

5. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor, pengembangan dan perluasan perdagangan, akselerasi perdagangan dan memperkuat serta memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perdagangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.47
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$ _{umus} : Ekspor-impor *)	U\$	93.451	231.178,94	264.905,64	264.905,64	9.146.355,45
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang dibina	Kelompok	5	5	9	5	5

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2020 mencapai US\$ 9.146.355,45. Adapun produk yang diekspor adalah jenis kayu olahan, kerajinan dari bambu/asesoris dan kerajinan kayu (meubeler, interior dan asesoris) sedangkan ekspor komoditi hasil industri agro meliputi sale pisang, keripik pisang dan kue tambang.

6. Urusan Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor dalam perekonomian daerah yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perindustrian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen		-	-	-	
2	Pertumbuhan Industri	Persen	3,98	3,98	1,53	1,32	3,10

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

7. Urusan Transmigrasi

Pemerintah terus mengawal program transmigrasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan transmigrasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

8. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas usaha tani yang berbasis

perikanan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan	Ton	51.921,10	64.517,10	80.318,02	97.403,68	24.029,08
2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	17,72	18,11	18,62	18,82	18,86
3	Nilai Tukar Petani	Persen	105,61	112,01	112,76	113,07	112,80

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Kegiatan perikanan yang banyak diusahakan di Kabupaten Ciamis adalah budidaya perikanan air tawar (kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan jaring apung), dengan komoditi unggulan yang diusahakan antara lain ikan gurame, nila, mas, tawes dan nilem.

Peningkatan produksi sektor perikanan pada Tahun 2020 mengalami Penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 75,3%. Rendahnya produksi ikan tersebut tidak berbanding lurus dengan konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, dimana konsumsi ikan setiap tahun meningkat dan telah memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Kabupaten Ciamis dari konsumsi ikan pada tahun 2016 sebesar 17,72 kg/kapita/tahun, pada tahun 2017 sebesar 18,11 kg/kapita/tahun, pada tahun 2018 sebesar 18,62 kg/kapita/tahun, tahun 2019 sebesar 18,82 kg/kapita/tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 18,86 Kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis masih belum mencapai angka konsumsi ikan menurut WHO yaitu 29,5 Kg/Kapita/Tahun. Peningkatan konsumsi ikan yang telah melebihi kebutuhan ideal ditunjang dengan adanya budaya Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN).

2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan perencanaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	94.67	100
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	94	89.38	91.57
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100
7	Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda ataupun Perkada. Sedangkan dokumen Perubahan RTRW yang kegiatannya terdapat di Dinas PUPRP, sampai dengan saat ini belum ditetapkan dengan Perda.

2. Keuangan

Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020 Unaudit ed
1	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,36	1,83	0,27	0,25	2,97
2	Persentase SILPA terhadap Pengeluaran	Persen	0,35	1,87	0,26	0,27	3,10
3	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	6,02	3,49	0,97	13,12	8,17
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	36	34	37,32	31,88	31,52
5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	13	15	14,61	27,97	15,07
6	Persentase Belanja langsung	Persen	62,78	56,62	54,22	60,92	62,69

No	Indikator	Satuan	Tahun					2020 Unaudit ed
			2016	2017	2018	2019		
	dengan Belanja tidak langsung							
7	Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa	Persen	0,24	0,23	0,26	0,12	0,15	
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	11	11	11	11	11
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,44	1,19	2,19	27,04	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	64,43	66,6	40	34,47	49,84
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	4	32	27	24	26
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.038	1.018	1.018	1.018	1.108
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	8.410	7.622	7.024	6.768	6.210

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dikarenakan pejabat yang mengisi jabatan struktural tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi.

4. Penelitian dan Pengembangan

Layanan penunjang urusan penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sejak tahun 2019 walaupun belum ada program dan kegiatan khusus terkait penelitian dan

pengembangan. Namun demikian, layanan penunjang urusan kelitbangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis dan menghimpun hasil-hasil kajian. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan penelitian dan pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.54
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Capaian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	n/a	n/a	n/a	60	16,67
Penerapan SIDA							
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	n/a	n/a	n/a	71,43	57,14
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Pada tahun 2020, layanan penunjang urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui program penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dengan kegiatan koordinasi kegiatan kelitbangan. Lomba Inovasi Daerah tahun 2020, menjadikan Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Sangat Inovatif dan mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 2.145.

5. Pengawasan

Layanan penunjang urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis yang ditujukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan pengawasan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.55
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	96,67	95,75	93,33	90,32	93,1
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,18	0,55	0,43	0,54	0,00
3	Jumlah temuan BPK RI	Jumlah Temuan	9	15	12	13	9

Sumber : Inspektorat Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Inspeksi mendadak GDN terhadap ASN pada tahun 2020 di tempat keramaian tidak dilaksanakan karena pandemi *Covid-19*, sehingga persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2020 tidak ada capaian persentase pelanggaran pegawai.

2.3.4. Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan layanan pendukung urusan pemerintahan yang ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Perkembangan capaian indikator kinerja pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kerjasama	Buah	5	11	19	28	40
2	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis yang ditujukan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Perkembangan capaian indikator kinerja pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.57
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada (9 Dokumen)	Ada (9 Dokumen)	Ada (9 Dokumen)	Ada (9 Dokumen)	Ada (9 Dokumen)
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada/Tidak	Ada (6 Dokumen)	Ada (6 Dokumen)	Ada (6 Dokumen)	Ada (6 Dokumen)	Ada (6 Dokumen)

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)						
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada (285Kali)	Ada (300 Kali)	Ada (295 Kali)	Ada (381 Kali)	Ada (434 Kali)

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.3.5. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.58
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	4	4	6	0
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	5	4	4	10	0
3	Kejadian Unjuk Rasa / Demonstrasi	kejadian	18	24	19	17	4
4	Kasus berlatar belakang sara	kasus	0	0	0	0	0
5	Tingkat partisipasi dalam pemilu :						
	- Pemilu Legislatif	persen	-	-	-	80	-
	- Pemilu Presiden	persen	-	-	-	80,63	-
	Pemilu Kepala Daerah Gubernur	persen	-	-	78,43	-	-
	Pemilu Kepala Daerah Bupati	persen	-	-	78,40	-	-
6	Fasilitasi Kominda	kegiatan	1	1	1	0	0
7	Terfasilitasinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	kali	4	3	13	13	
8	Partisipasi perempuan dalam Partai Politik	Orang	5	5	5	6	6
9	Kasus Pemogokan kerja	kali	0	0	0	0	0
11	Jumlah LSM	Ormas	246	258	283	296	317

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2020 tidak dilaksanakan sehubungan dengan pandemi *Covid-19*, demikian halnya dengan kejadian unjuk rasa yang menurun cukup signifikan dikarenakan adanya larangan berkerumun pada saat pandemi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi daerah Kabupaten Ciamis terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya Tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk kesuatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing. Untuk menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui total pengeluaran rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tangga Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Pengeluaran Rumah Tangga
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Pengeluaran Rumah Tangga (Miliar Rp)	Miliar Rp	17.078,94	18.530,50	20.254,65	21.897,73	n/a
2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB	Persen	69,64	69,81	69,53	69,33	n/a

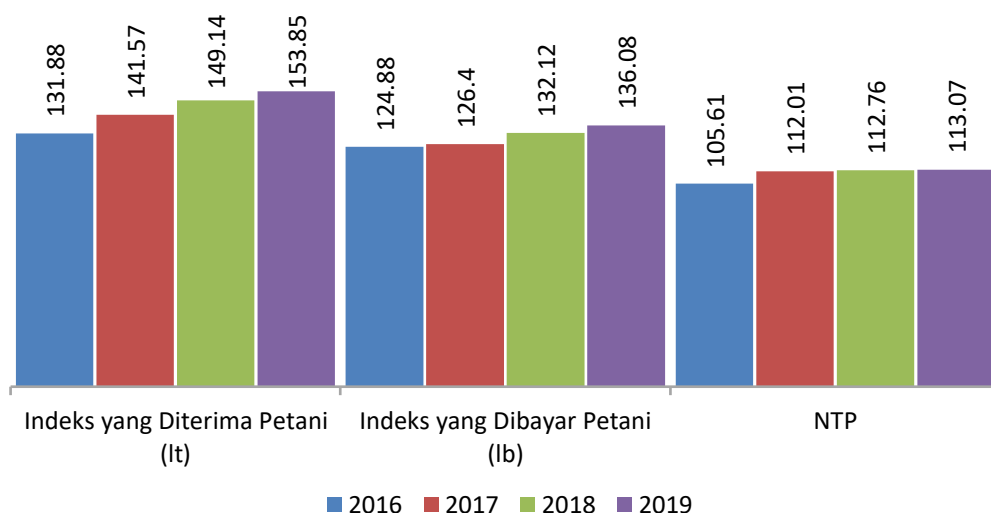
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara

konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 2.27
Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara, dan dikelola dalam SIPD

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan)

Pola pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa kebutuhan makanan telah terpenuhi dan kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan.

Tabel 2.60
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Per Kapita Sebulan	Rp	642.949	802.447	944.298	1.001.390	1.010.334
	-Konsumsi Non Makanan	Rp	286.981	344.227	412.026	461.103	563.382
	-Konsumsi Makanan	Rp	355.968	458.220	532.272	540.287	446.952
2	Rasio		80,62	75,12	77,41	85,34	126,05

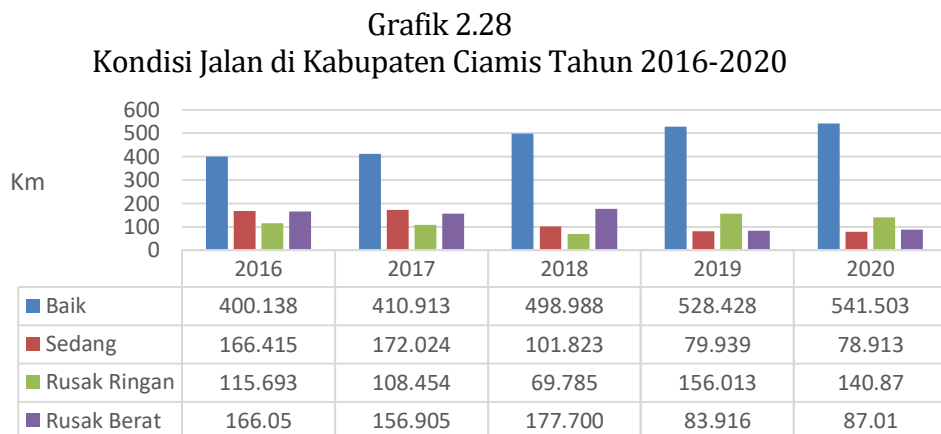
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

2.4.2. Fokus Fasilitas Wiyah/Infrastruktur

Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

2.4.2.1. Infrastruktur Wilayah

Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

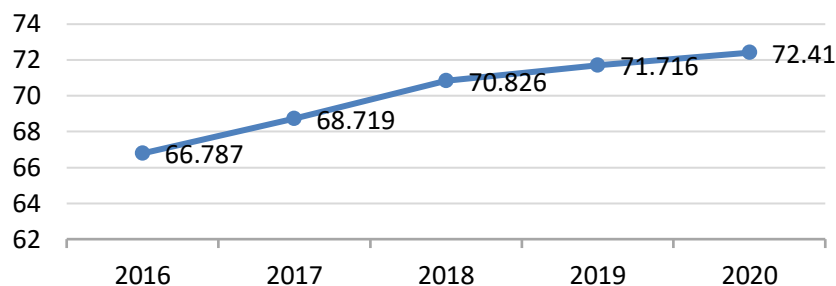


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.4.2.2. Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan maksimum terhadap pengguna jalan.

Grafik 2.29
Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

Kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang merupakan usaha untuk mempertahankan kondisi mantapnya jalan agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.4.2.3. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.61
Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Melalui Terminal
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	11.810.827	9.583.465	7.289.950	6.847.228	4.730.201

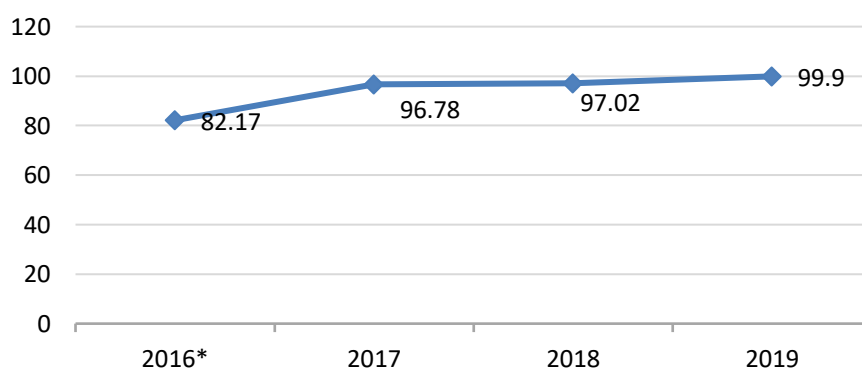
Sumber : Dinas Perhubungan (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah arus barang dan penumpang angkutan umum mengalami penurunan sejak tahun 2017, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pengguna sepeda motor, dan kendaraan pribadi roda empat.

2.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik.

Grafik 2.30
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Elektrifikasi) di Kabupaten Ciamis
Tahun 2016-2019



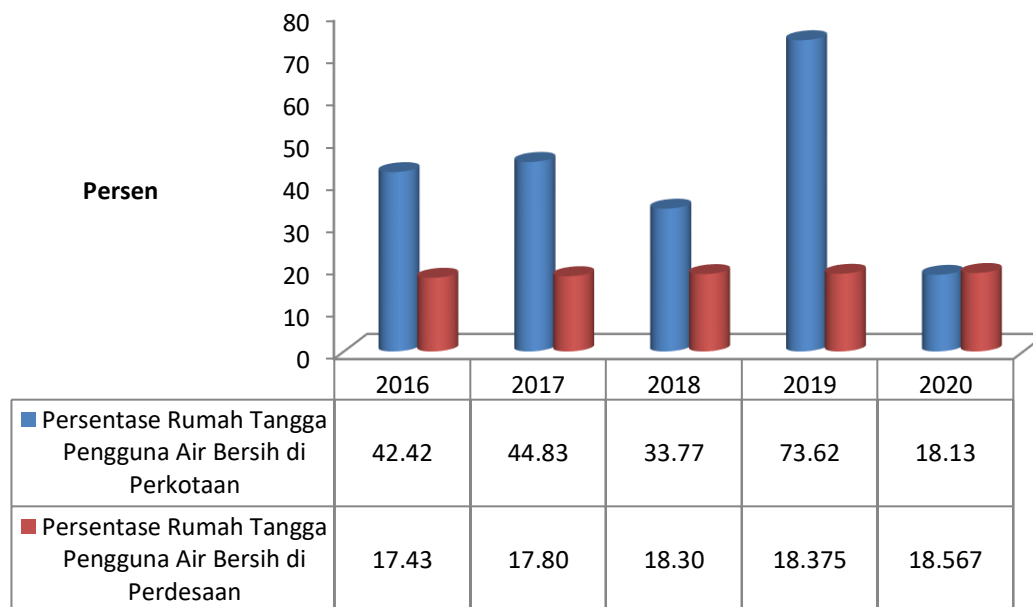
Sumber : Dinas PUPRP Kab. Ciamis*),
UPTD ESDM Prov. Jabar Wilayah Tasik, Ciamis, Banjar dan Pangandaran

2.4.2.5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air bersih menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Cakupan layanan air bersih yang dikelola secara kelembagaan terus meningkat

meskipun belum optimal dibandingkan dengan kebutuhan layanan. Gambaran mengenai capaian kinerja layanan air bersih dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.31
 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.4.2.6. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (*main entrance*) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah sebesar 85 persen.

2.4.2.7. Luas Wilayah Produktif

Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil bagi penduduknya. Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif tersebut, yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi, yang akan memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya.

Tabel 2.62
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah budidaya	Hektar	140.563,06	140.563,06	140.563,06	144.008	130.381,96
2	Luas wilayah produktif	Hektar	102.362,06	102.362,06	102.362,06	114.554	114.457,39
3	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	Persen	72,80	72,80	72,80	79,55	87,70
4	Luas wilayah industri	Hektar	381,98	381,98	381,98	381,98	451,12
5	Luas wilayah banjir	Hektar	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052
6	Luas wilayah perkotaan	Hektar (Ribu)	19,205	19,205	19,205	59.9235	31.496,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

2.4.3.1. Jumlah Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Bagi pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2016-2020 masih belum optimal, kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis guna meningkatkan iklim usaha dan investasi

serta mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga akan lebih mempermudah investor di dalam pengurusan proses perizinan, bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Berikut perkembangan nilai investasi PMDN di Kabupaten Ciamis.



Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.4.3.2. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Ciamis pada khususnya. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya adalah minimnya jumlah kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah. Angka kriminalitas mempengaruhi investor yang akan masuk ke suatu wilayah. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Ciamis disajikan pada tabel berikut:

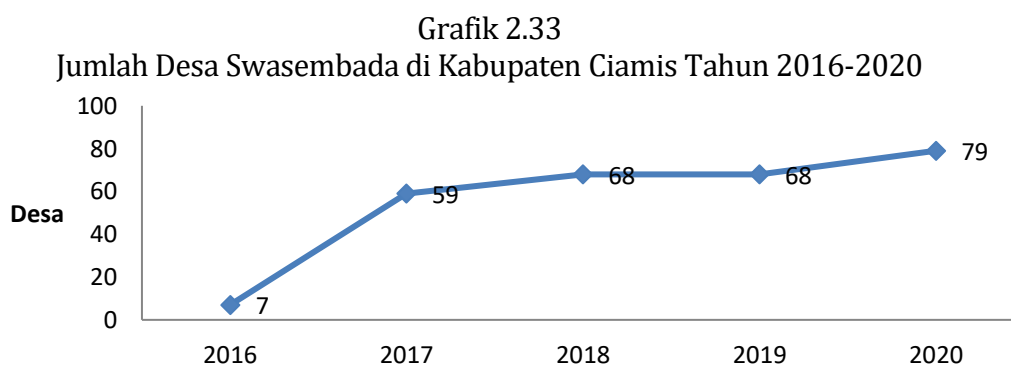
Tabel 2.63
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	Kasus	495	375	339	276	

Sumber: Polisi Resort Ciamis dan Dinas Perhubungan Kab. Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

2.4.3.3. Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada antara lain produktivitas tinggi, terlepas dari adat istiadat, sarana dan prasarana memadai, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen serta teknologi dan pendidikan yang relatif tinggi.



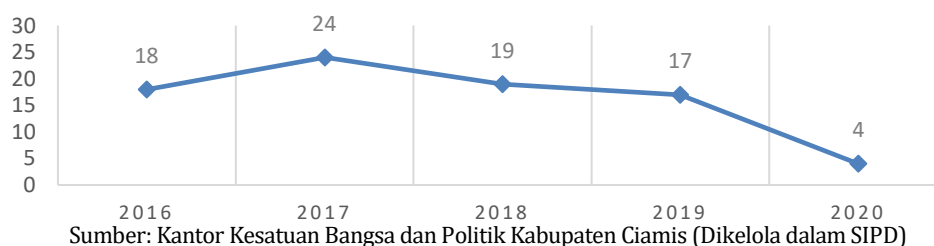
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis semakin meningkat setiap tahunnya, peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 bertambah sebanyak 52 desa menjadi 59 Desa Swasembada dan tahun 2020 menjadi sebanyak 79 desa. Hal tersebut karena adanya pembinaan yang terus menerus dilakukan sehingga memacu desa menjadi desa swasembada.

2.4.3.4. Angka Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Frekuensi demonstrasi di suatu daerah akan sangat berpengaruh kepada tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Grafik 2.34
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Menurunnya kejadian unjuk rasa, menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin baik.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.64
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/Sederajat	jiwa	307.359	587.183	583.762	578.706	573.692
2	SMP/Sederajat	jiwa	104.728	213.890	214.837	215.302	216.249
3	SMA/Sederajat	jiwa	66.982	150.926	152.206	154.765	159.008
4	D-I/D-II Sederajat	jiwa	3.640	6.232	6.055	5.889	5.718
5	D-III/Sederajat	jiwa	4.399	8.744	8.858	9.030	9.211
6	D-IV/Sederajat dan S-1	jiwa	13.267	27.779	29.247	30.980	32.613

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	S-2	jiwa	544	1.912	2.005	2.116	2.189
8	S-3	jiwa	57	151	159	165	173
	Jumlah	jiwa	500.976	996.817	997.129	996.953	998.853

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama periode tahun 2016-2020, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan yaitu penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat serta D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terdapat penduduk yang pindah.

Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, D-III, D-IV sederajat serta S-1 dan S-2serta S-3 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.65
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	Jiwa	273.502	268.869	262.757	261.900	261.726
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	Jiwa	158.822	161.865	172.562	182.012	189.617
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	Jiwa	432.324	430.734	435.319	443.912	451.343
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	966.022	970.689	973.188	974.389	978.919
5	Rasio Ketergantungan	Persen	0,45	0,44	0,45	0,46	0,46

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Ciamis sebesar 0,46% artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Salah satu faktor untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana.

2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kontinyu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dengan Visi "Mantapnya kemandirian ekonomi, Sejahtera untuk Semua" terdapat 25 indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Dari 25 indikator kinerja sasaran yang terdapat pada RPJMD tersebut terdistribusi pada Misi Pertama, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia" sebanyak 8 (delapan) indikator; Misi Kedua, "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah", sebanyak 2 (dua) indikator; Misi Ketiga, "Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal" sebanyak 6 (enam) indikator; Misi Keempat, "Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan" sebanyak 2 (dua) indikator; Misi Kelima, "Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien", sebanyak 6 (enam) indikator; dan Misi Keenam, "Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa", sebanyak 1 (satu) indikator.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya pengaruh situasi dan kondisi nasional dan regional yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2024. Secara keseluruhan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020, dari 25 IKU Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu sebanyak 19 IKU telah mencapai target di tahun 2020 dan sebanyak 6 IKU belum dapat mencapai target di tahun 2020. Adapun capaian target IKU tersebut adalah Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,70 tahun (100%), Harapan Lama Sekolah sebesar 14,06 tahun (100,72%), Usia Harapan Hidup sebesar 71,83

tahun (100%), Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 64,66 poin (100%), Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,05 (100%), kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sebesar 72,41% (101,26%), persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 50,55% (102,02%), Indeks Gini sebesar 0,336 poin (104%), Indeks Daya Saing Pariwisata sebesar 93,05 poin (109,47%), skor PPH sebesar 91,5 (118,06%), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 62,13 poin (112,98%), Indeks Resiko Bencana sebesar 141,6 poin (115,71%), hasil evaluasi SAKIP mendapatkan predikat B (100%), hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapatkan predikat sangat tinggi (100%), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan predikat WTP (100%), Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendapatkan level 3 (100%), indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2,64 poin (159,04%), Indeks Desa Membangun sebesar 0,6887 (109,32%), persentase penduduk miskin sebesar 7,62% (93,22%), Nilai Tukar Petani sebesar 100,19 (88,82%), kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar -9,18% (-178,18%), Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 0,557 poin (99,82%), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,66% (98,20%), dan LPE sebesar -0,15% (-8,48%). Selengkapnya data capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut ini:

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020
Kabupaten Ciamis

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	
VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA								
1.	Misi 1 : Mewujudkan Kualitas sumber Daya Manusia	Terwujudnya peningkatan daya saing sumber daya manusia		1 Indeks Pendidikan	poin	63,94	64,72	
				2 Indeks Kesehatan	poin	79,34	79,74	
			1	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah	tahun	7,69	7,7
					2 Harapan lama sekolah	tahun	13,79	14,06
			2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	3 Usia Harapan Hidup	tahun	71,57	71,83
		3	Meningkatnya prestasi olahraga, apresiasi seni dan budaya daerah	4 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	orang	20	17	
				5 Jumlah kelompok seni budaya yang berprestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	kelompok	8	8	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020		
				6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	812	815	
			4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat	7	Indeks Pembangunan Pemuda	poin	0,537	0,557
			5	Meningkatnya peran dan pemenuhan hak perempuan dan anak	8	Indeks Pemberdayaan Gender	poin	64,54	64,66
					9	Tingkat Kabupaten Layak Anak	peringkat	Pratama	n/a
			6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	10	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,055	2,050
			7	Menurunnya tingkat kemiskinan	11	Persentase penduduk miskin	persen	6,65	7,62
			8	meningkatnya daya saing tenaga kerja	12	tingkat pengangguran terbuka	persen	5,01	5,66
2	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata		1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Mutu	N/A	Baik	
			1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	persen	76.955	77.862
			2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	Indeks keselamatan lalu lintas	poin	89.135	93.716
			3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata	3	Persentase Rumah Layak Huni	persen	68,31	68,73
3	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing		1	PDRB AdHB	(triliun rupiah)	31,536	31,974	
			1	Kabupaten Ciamis sebagai daerah pertanian, peternakan dan perikanan yang mandiri	1	Skor PPH	poin	89,4	91,5
					2	Nilai Tukar Petani	poin	113,07	111,93
					3	Cadangan pangan	ton	85	88
			2	Terwujudnya Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	4	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	6,3	6,1
			3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian di Kabupaten Ciamis	5	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	5,06	-1,63
					6	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor	persen	5,84	-5,42
			4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	7	Persentase peningkatan investasi	persen	7,12	-9,80

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020						
4	Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				61,71	62,13				
				1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Udara			poin	78,35	79,99	
						2	Indeks Kualitas Air			poin	59,60	59,67	
						3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			poin	33,57	33,34	
					2	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	4			Indeks Risiko Bencana	poin	156,23	141,57
					3	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	5			Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	persen	100	100
5	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1	Indeks Reformasi Birokrasi				N/A	C				
				1	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	1	Hasil Evaluasi SAKIP			predikat	B	B	
						2	Hasil Evaluasi LPPD			predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
						3	Opini BPK			predikat	WTP	WTP	
						4	Indeks Kepuasan Masyarakat			mutu	Baik	Baik	
						5	Level Maturitas SPIP			level	3	3	
						6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik			poin	2,35	2,64	
2	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum	7	Indeks ketenteraman dan ketertiban	poin	n/a	67,5							
6	Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	1	Indeks Desa Membangun				0,688	0,713				
				1	Meningkatnya kemandirian desa	1	Persentase desa mandiri			persen	3,10	7,36	

Sumber: Bappeda Kab. Ciamis (Data Diolah)

2.6. Kondisi dan Dampak Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sejak dilaporkannya kasus infeksi Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 1 April 2020, kinerja pembangunan makro di seluruh dunia secara umum mengalami penurunan, demikian pula di Kabupaten Ciamis. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pembangunan makro tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, kondisi ketenagakerjaan, dan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan

negatif sebesar -0,14 %. Capaian IPM tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk komponen Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan mengalami penurunan. Sementara kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Berbagai upaya di bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah *Covid-19* telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala antara lain minimnya fasilitas kesehatan yang tentunya akan memperlambat penanganan wabah. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Ciamis masih terbatas. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit (TT) menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1.000 penduduk. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sekurangnya 1.418 Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas di Kabupaten Ciamis. Sementara itu dari 4 Rumah Sakit dan 14 Puskesmas Perawatan yang ada di Kabupaten Ciamis hanya memiliki total 949 tempat tidur. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 469 Tempat Tidur. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat 37 unit Puskesmas di Kabupaten Ciamis dimana 14 unit (37,4 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap, dan 23 unit (62,16%) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap.

Dampak pandemi *Covid-19* mulai terlihat pada Triwulan II tahun 2020, dimana pertumbuhan PDRB AdHK hanya mencapai 1,47%, melambat dibanding triwulan yang sama pada tahun 2019. Pada Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi cukup besar sebesar 5,53%, selanjutnya pada Triwulan III kinerja perekonomian mulai membaik meskipun masih berkontraksi sebesar 3,5%. Kinerja perekonomian sepanjang tahun 2020 berkontraksi sebesar -0,14% dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,38%.

Dampak pandemi *Covid-19* juga berimbas pada aspek pembangunan manusia, hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020. IPM Kabupaten Ciamis tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 70,39 menjadi 70,49. Pada periode 2015-

2019 rata-rata pertumbuhan mencapai 0,86% sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun 2019 hanya sebesar 0,14 % Pelambatan pertumbuhan IPM Kabupaten Ciamis disebabkan karena komponen Pengeluaran per Kapita yang pada tahun 2019 mencapai Rp.9.557 ribu, menurun sebesar Rp. 269 ribu Menjadi Rp. 9.288 ribu pada tahun 2020. Penurunan komponen Pengeluaran per Kapita pada tahun 2020 terjadi di semua daerah.

Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi *Covid-19*. Jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 38.425 orang, sebanding dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,50 persen. Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 mengindikasikan terdapat 2 (dua) kelompok penduduk bekerja yang terdampak pandemi *Covid-19* yaitu kelompok penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau yang sementara tidak bekerja dan kelompok yang berhenti bekerja (Pemutusan Hubungan Kerja). Data ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel. 2.67
Data Tenaga Kerja Yang Di-PHK di Kabupaten Ciamis
sampai dengan Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Jml Pekerja Yang Di PHK
1.	PT. KBN Indonesia	111 orang
2.	Hotel Tyara Plaza	1 orang
3.	PT Condan Eco	61 orang
4.	PT. Akur Pratama	15 orang
Jumlah		188 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020 (Data Diolah)

Tabel 2.68
Data Tenaga Kerja Dirumahkan Dampak *Covid-19*
Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Jml Tenaga Kerja Yg Dirumahkan	Jml Tenaga Kerja Yang Mulai Kerja Kembali	Keterangan
1.	Pabrik Wajan Bintang Satu	40 orang	40 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
2.	Pabrik Wajan Sinar Bintang	15 orang	15 orang	Masuk kerja mulai tanggal 8 Juni 2020
3.	Dua Unta	32 orang	32 orang	Masuk kerja mulai tanggal 8 Juni 2020
4.	Rajawali Mas	42 orang	42 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
5.	Makroni Ikan Tawes	48 orang	48 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
6.	CV. Cahaya Palstik	76 orang	76 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 2 Juni 2020
7.	Makroni Madani	107 orang	107 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 2 Juni 2020

No	Nama Perusahaan	Jml Tenaga Kerja Yg Dirumahkan	Jml Tenaga Kerja Yang Mulai Kerja Kembali	Keterangan
8.	Sale Sukasenang	34 orang	34 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 26 Mei2020
9.	Green Hotel	6 orang	6 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 28 Mei2020
10.	RM Mergosari Putra Bolenglang	21 orang	21 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
11.	RM Mergosari Putra Pamalayan	21 orang	21 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
12.	RM Mergosari Putra Cireong	20 orang	20 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
13.	Wajan Matahari	63 orang	63 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
14.	PD Rasa Asli	31 orang	31 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
15.	PT. Rona Niaga Raya	45 orang	- orang	Masih dirumahkan sampai situasi normal
16.	Resto Samara Binangkit	36 orang	18 orang	Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020 yang dipekerjakan 18 orang
JUMLAH		637 orang	592 orang	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020 (Data Diolah)

Jumlah perusahaan yang melaporkan PHK tenaga kerja sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 4 perusahaan dengan jumlah yang di PHK total 188 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja yang dirumahkan pada awal pandemi sejumlah 637 orang dari 16 perusahaan yang melaporkan. Sampai dengan bulan Desember 2020, dari 637 orang yang dirumahkan sudah mulai dipekerjakan kembali sejumlah 592 orang, sehingga sisa yang masih dirumahkan sejumlah 45 orang.

Dampak pandemi *Covid-19* juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya sektor Pariwisata, Industri (UMKM), Pertanian, Investasi dan Perizinan.

2.6.1. Sektor Pariwisata

Diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada awal pandemi *Covid-19* telah membatasi mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Di Kabupaten Ciamis terdapat 144 obyek wisata berdampak terhadap 2.000 orang pelaku wisata, usaha ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata sejumlah 50 berhenti produksi/tutup berimbas terhadap 1.500 tenaga kerja.

Tabel 2.69
Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	% Kenaikan/ Penurunan
1	Jumlah Pengunjung	697.782 Orang	616.643 Orang	(11,63)
2	Tingkat Penghunian Kamar	5,32 %	14,85 %	179

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	% Kenaikan/ Penurunan
3	Rata-rata lama menginap	1,05 Hari	1,3 hari	23,80
4	Realisasi PAD	Rp. 790.050.400	Rp. 451.133.000	(42,89)

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020 (Dikelola dalam SIPD)

Jumlah pengunjung pada Tahun 2020 sebanyak 616.643 orang atau mengalami penurunan sebesar 11,63% dari jumlah pengunjung pada periode yang sama pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 697.782 orang. Tingkat Penghunian Kamar mengalami kenaikan 179% yaitu dari 5,32% pada Tahun 2019, menjadi 14,85% pada Tahun 2020. Rata-rata lama menginap pada Tahun 2020 menjadi 1,3 hari yang pada Tahun 2019 1,05 hari atau naik sebesar 23,80%. Realisasi PAD sektor pariwisata mengalami penurunan 42,89%, dari Rp790.050.400 pada Tahun 2019 menjadi Rp451.133.000 pada Tahun 2020.

Tabel 2.70
Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis
Triwulan I Tahun 2021

No	Uraian	Triwulan I 2021
1	Jumlah Pengunjung	49.835 Orang
2	Tingkat Penghunian Kamar	18,2%
3	Rata-rata lama menginap	1,15 hari
4	Realisasi PAD	Rp168.715.500

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021 (Dikelola dalam SIPD)

Pada Triwulan I Tahun 2021, dengan diberlakukannya PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) pada masa pandemi *Covid-19* telah membatasi mobilitas masyarakat serta dibatasinya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Di Kabupaten Ciamis terdapat 147 obyek wisata berdampak terhadap 2.000 orang pelaku wisata, usaha ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata sejumlah 53 mengurangi hasil produksi berimbas terhadap penghasilan 1.500 tenaga kerja.

Jumlah pengunjung pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 49.835 Orang. Tingkat Penghunian Kamar Triwulan I adalah 18,2 %. Rata-rata lama menginap pada Triwulan I Tahun 2021 1,15 hari. Realisasi PAD sektor pariwisata Triwulan I 2021 sebesar Rp168.715.500,00.

2.6.2. Sektor Industri (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah)

Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di Kabupaten Ciamis sejumlah 15.165 yang tersebar di 27 Kecamatan. Berdasarkan hasil survey dengan 155 responden diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Sejumlah 145 UMKM atau 96,7% mengalami penurunan omset, sisanya 5 UMKM atau 3,3% mengalami kenaikan. Penurunan disebabkan karena tidak ada pembelian/pesanan dan juga banyak yang dibatalkan karena pemasarannya masih dengan cara *offline* baik di pasar, warung, toko, supermarket/toko modern, dan juga pengiriman ke luar Ciamis. Sedangkan yang mengalami kenaikan karena telah melakukan pemasarannya dengan cara *on line* baik melalui Tokopedia, Bukalapak, Medsos dan *website*.
- b. Jumlah tenaga kerja yang terdampak dari 155 UMKM sebanyak 1.500 orang
- c. Potensi kerugian yang diakibatkan dampak Pandemi *Covid-19* sebesar Rp2.150.000.000,00.

2.6.3. Sektor Pertanian

Dilihat dari produksi pertanian, sektor pertanian terutama padi tetap mengalami kenaikan yang signifikan ditengah pandemi *Covid-19*. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian ditengah pandemi tidak dapat ditunda, sehingga tetap memutar roda perekonomian pada sektor pertanian.

Tabel 2.71
Data Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Di Kabupaten Ciamis
sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	Triwulan IV Tahun 2019 (Ton)	Triwulan IV Tahun 2020 (Ton)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Produksi padi	448.799	461.378	2,80
2	Produksi jagung	35.980	45.433	26,27
3	Produksi kacang tanah	1.493	1.489	(0,27)
4	Produksi kedelai	1.063	45	(95,77)
5	Produksi kacang hijau	179	6	(96,65)
6	Produksi ubi kayu	55.824	32.788	(41,26)
7	Produksi ubi jalar	2.363	2.659	(12,53)
8	Produksi cabe besar	4.806	3.010	(37,37)
9	Produksi tomat	1.893	776	(59,01)
10	Produksi duku	2.827	839	(70,32)
11	Produksi manggis	3.594	1.807	(49,72)

No	Uraian	Triwulan IV Tahun 2019 (Ton)	Triwulan IV Tahun 2020 (Ton)	% Kenaikan/ Penurunan
12	Produksi pisang	71.599	92.800	29,61

Sumber: Dinas Pertanian dan KP, 2020

Di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020 komoditi yang mengalami kenaikan produksi yaitu padi sebesar 2,80%, jagung sebesar 26,27%, dan pisang sebesar 29,61% dibanding produksi pada periode yang sama pada Tahun 2019. Sedangkan untuk komoditi kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan, hal ini karena disebabkan oleh musim kemarau tahun 2020 tidak terlalu panjang karena biasa ditanami di lahan sawah dengan pola padi-padi-palawija, sedangkan tahun 2020 polanya padi-padi-padi. Sedangkan untuk produksi cabe besar dan tomat mengalami penurunan karena distribusi tidak lancar akibat pandemi *Covid-19* dan banyak penggunaan lahan yang beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan. Produksi duku dan manggis mengalami penurunan karena musim kemarau tahun 2020 tidak terlalu panjang.

Tabel 2.72
Data Produksi Peternakan dan Perikanan Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2019 (Kg)	Tahun 2020 (Kg)	% Kenaikan/ Penurunan
1.	Produksi daging ternak	1.594.251	1.672.566	4,91
2.	Produksi daging unggas	122.310.754	130.499.563	6,7
3.	Produksi telur	43.412.138	49.599.522	14,25
4.	Produksi ikan	98.196.860	99.296.311	1,12

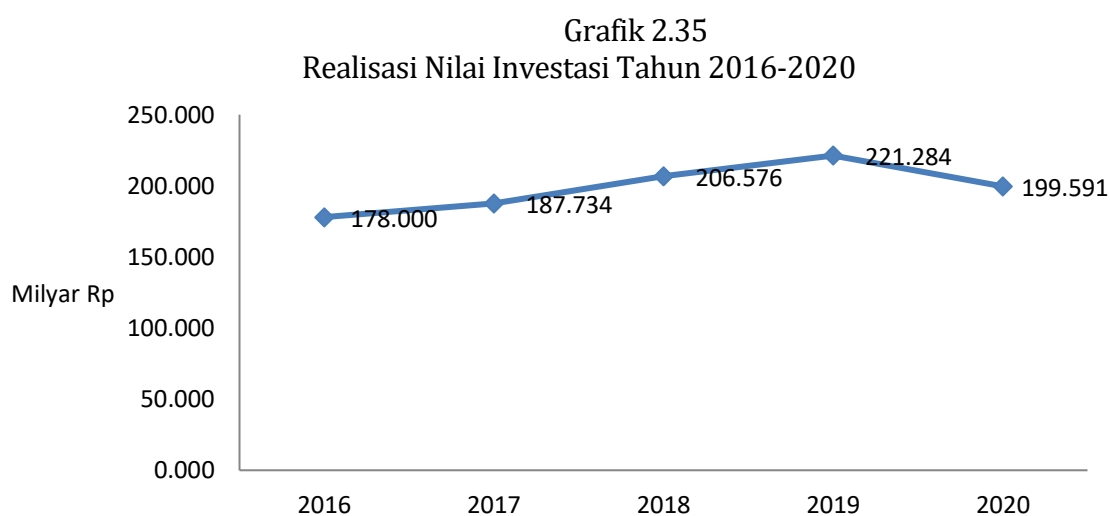
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2020

Komoditi peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis pada akhir Triwulan IV 2020 mengalami peningkatan, meskipun pada Triwulan II dan III mengalami penurunan akibat terganggu oleh Pandemi *Covid-19*. Hal ini terjadi karena adanya kucuran dana dari pemerintah melalui beberapa instansi, untuk meningkatkan kembali produksi peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis.

2.6.4. Investasi dan Perizinan

Dari sektor Investasi dan Perizinan mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19* yang mulai masuk pada bulan maret tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan

menurunnya angka realisasi investasi pada tahun 2020 di Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Tabel 2.73
Data Investasi dan Perizinan

No	Uraian	Triwulan IV Tahun 2019	Triwulan IV Tahun 2020	% Kenaikan/ Penurunan
1	Jumlah investasi	221.284.820.261	199.590.582.491	-9,8
2	Jumlah perusahaan	847	331	-60,92
3	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses	3.279	4.943	50,75
4	Jenis pelayanan yang dimohon	24	24	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

2.7. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan dengan kewenangan Kabupaten Ciamis hasil analisis keterkaitan dengan 319 indikator TPB Nasional adalah sejumlah 207 indikator. Dari 207 indikator TPB di Kabupaten Ciamis tersebut hanya 80 indikator yang data nya tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.74
Capaian TPB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan				
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsilaki-laki, perempuan dan anak-anakdari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,65	7,62
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	87,46	99,18
	1.3.1.(d)	Jumlah rumahtangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	52.594	44.614
Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanahdan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	89,12	89,77
	1.4.1.(e)	Persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73,06	73,17
	1.3.1.(d)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,07	99,20
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	93,75	94,15
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	N/A	N/A
Pada tahun 2030,membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan,dan bencana	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	N/A	N/A
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	N/A	N/A
Menjamin mobilisasiyang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	N/A	N/A
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan				
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang,khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	6,3	6,4
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	8,10%	7,3%

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	4,5	4,44
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	10,22	10,35
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	82,67	78,22
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan tingkat konsumsi ikan.	89,4	91,5

Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	73,12/100.000 KH	82,6/100.000 KH
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	99	94,71
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	98,71	94,58
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	0,83	0,36
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3,92	3,41
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	5,17	5,22
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,04	0,04
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	3	1
	3.3.3.(a)	Jumlah Puskesmas yang mencapai eliminasi malaria.	100	100
	3.3.4.(a)	Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100	100
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	1	12
	3.3.5.(a)	Jumlah Puskesmas dengan eliminasi Kusta.	100	100
	3.3.5.(b)	Jumlah Puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	232	241
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	7	7
Target 3.7 Pada tahun 2030,menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	188.489	191.004
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	21,62	21,8
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	2,0551	2,050
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal,termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman,efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	67.437	94.013
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas				
Target 4.1 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97,05	97,17
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85,9	87,02
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	103,6	101,66
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	99,55	99,30
Target 4.2 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	86,55	88,70
Target 4.6 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksarapenduduk umur ≥15 tahun.	99,25	99,30
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksarapenduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Alih Kelola	Alih Kelola

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: a) listrik b) internet untuk tujuan pengajaran, c) komputer untuk tujuan pengajaran, d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, e) air minum layak, f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	h) 90 i) 80 j) 85 k) 11,9 l) 100 m) 100 n) 100	a) 100 b) 100 c) 100 d) 11,9 e) 100 f) 100 g) 100
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	TK : 89,99 SD : 87,73 SMP : 49,60	TK : 90,99 SD : 59,80 SMP : 57,30
Target Pencapaian Tujuan 5 : Persamaan Gender				
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,0004	0,0001
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	100
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	12	12
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak				
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	89,12	89,77
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	73,06	73,17
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	47	92
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	44	45

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahankimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsirumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	74,24	87,05
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	59,60	59,67
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau				
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	99,9	
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	26,39	26,61
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,16	5,66
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	697.782	651.358
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	0	0
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	0	0
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	0	0
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	0	0
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan				
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,354	0,336
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,65	7,62
	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	11	0
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	8	19
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan				
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	156,23	141,57
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	-	-
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Pencapaian 2019	2020
target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	6,79%	63,36
target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	-	-
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	74,82	
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim				
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahayaterkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	-
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakanantisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas RumahKaca (GRK).		
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh				
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B	B
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12	12

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

2.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2019 terdiri dari 2 jenis pelayanan, yaitu pelayanan air bersih (PDAM Tirta Galuh) dan pelayanan jasa keuangan (PD BPR BKPD Lakbok, PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis dan PT. BPR Artha Galuh Mandiri).

A. Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Galuh

PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis resmi berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1988 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 1988. Perda tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

Penilaian Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, selama Tahun 2014-2018 mendapat penilaian baik, dimana pada Tahun 2018 mendapat nilai sebesar 61,07. Adapun pelanggan aktif sampai 31 Desember 2019 adalah sebanyak 28.844 SR, dengan jumlah air yang pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar 14,34 m³/bulan.

Kontribusi PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah Ciamis Tahun 2019 hanya sebesar Rp27.341.400,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

B. Pelayanan Jasa Keuangan

Pelayanan jasa keuangan BUMD di Kabupaten Ciamis mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dan memberikan kredit kepada masyarakat serta pengusaha kecil dan menengah.

1) PD BPR BKPD Lakbok

Pendirian PD BPR BKPD Lakbok dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Penghimpunan dana tabungan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp4.251.255.000,00. Sedangkan jumlah penyaluran kredit Tahun 2019 sebesar Rp13.842.323.716,00.

2) PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis

PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis (PT. LKM Ciamis) merupakan BUMD jasa keuangan non perbankan hasil perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan

Daerah Perkreditan Kecamatan Cidolog. Penghimpunan dana tabungan selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.821.178.505,-. Sedangkan jumlah penyaluran kredit tahun 2019 adalah sebesar Rp6.119.669.177,-.

3) PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar

Pada Tahun 2019 penghimpunan dana tabungan PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar adalah sebesar Rp7.937.265.210,-. Sedangkan jumlah penyaluran kreditnya sebesar Rp15.401.285.923.

2.9. Kerja Sama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Penyelenggaraan kerja sama antar daerah bersifat wajib dan sukarela. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi.

Tabel 2.75
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kerjasama antar Daerah	1	4	6	7	7	25
2	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1	7	13	21	30	72

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)

Tabel 2.76
Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
2.1.1	Kondisi geografi daerah						
2.2.2	Demografi Penduduk	Jiwa	1.398.346	1.401.423	1.408.507	1.418.301	1.430.262
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
a	Jumlah grup kesenian	Buah	349	360	420	425	435
b	Jumlah gedung kesenian	Tempat	1	1	1	1	1
c	Jumlah klub olahraga	Buah	157	157	157	280	190
d	Jumlah gedung olahraga	Buah	281	281	281	162	244
2.2	ASPEK PELAYANAN UMUM						
2.2.1	Fokus layanan urusan pemerintah wajib						
2.2.1.1	Fokus Pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar						
1	Urusan Pendidikan						
A	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan	Orang	1,000,201	996,817	997,129	996,953	998,853
B	Angka Melek Huruf	%	99.11	99.17	99.20	99.22	99.30
C	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.65	13.66	13.67	13.79	14,06
D	Angaka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.55	7.59	7.60	7.69	7,70
E	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	%	104.2	104.1	104	103.6	103.6
F	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	%	98.75	99	100	99.95	99.3
G	Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	%	98.92	98.98	99	99.07	99.2
H	Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	%	90.35	92.23	94	93.75	94.15
I	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD Sederajat	%	11.82	10.92	10.92	10.85	10.7
J	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP Sederajat	%	31.2	28.8	28.8	27.01	27.6
K	Angka Partisipasi Sekolah SD Sederajat	%	98.75	98.92	98.92	99.01	99.2
L	Angka Partisipasi Sekolah SMP Sederajat	%	80.35	81.2	83.01	85.2	87.3
M	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI)	Orang	116,028	119,789	115,509	124,976	122,507
N	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SD/MI	Rasio	1:160	1:161	1:161	1 : 163	1 : 162
O	Jumlah gedung sekolah	Unit	237	237	238	242	915
P	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (SMP)	Orang	61,828	64,580	56,293	63,488	64,826
Q	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SMP/MTs	Rasio	1;261	1;272	1 : 259	1 : 262	1 : 265
R	Jumlah siswa PAUD	Orang	34,440	36,355	37,406	37,552	37,642

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
S	Jumlah Guru SD/MI	Orang	SD = 4.978	SD = 4.856	SD = 4.284	SD = 4.359	SD = 5.721
T			MI = 2.184	MI = 1.791	MI = 1.791	MI = 1.803	MI = 1.739
U	Jumlah Murid SD/MI	Orang	SD = 96.049	SD = 93.854	SD = 93.849	SD = 91.212	SD = 89.830
v			MI = 25.718	MI = 22.962	MI = 22.815	MI = 24.339	MI = 20.754
w	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	Rasio	1:17	1 : 18	1 : 19	1:19	1:19
x	Jumlah Guru SMP/MTS	Orang	SMP = 1.412	SMP =1.439	SMP = 1.491	SMP = 1338	SMP = 1398
y	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	21,621	44,870	47,217	66.673	78,346
z	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	26,319	31,720	37,903	51.999	64,079
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	57,375	58,374	71,371	74.651	83,622
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	28,425	28,708	30,045	30.163	33,325
	Mobil Perpustakaan Keliling	Buah	4	3	4	393	
	Jumlah Perpustakaan	Buah	341	342	393	402	341
	SD/Sederajat	Jiwa	334,683	587,183	583,762	578,706	573,692
	SMP/Sederajat	Jiwa	212,887	213,890	214,837	215,302	216,249
	SMA/Sederajat	Jiwa	149,194	150,926	152,206	154,765	159,008
	D-I/D-II Sederajat	Jiwa	6,460	6,232	6,055	5,889	5,718
	D-III/Sederajat	Jiwa	8,711	8,744	8,858	9,030	9,211
	D-IV/Sederajat dan S-1	Jiwa	26,326	27,779	29,247	30,980	32,613
	S-2	Jiwa	1,802	1,912	2,005	2,116	2,189
	S-3	Jiwa	154	151	159	165	173
	Indeks Pendidikan	%	62.58	63.08	63.24	63.31	64,72
	RLS	Tahun	7.45	7.55	7.59	7.69	7,70
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	13.59	13.65	13.66	13.67	14,06
2	Urusan Kesehatan						
a	Angka Kematian Bayi	%	7.42	6.81	5.68	5.17	0
b	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Tahun	0	19.76	19.05	18.43	0
c	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.18	0.11	0.12	0.12	0
d	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.9	71.07	71.32	71.57	
e	Rasio posyandu persatuan balita	Persen	12.02	19.45	20.4	24.43	26.06
f	Rasio puskesmas persatuan penduduk	Persen	0.031	0.0264	0.0263	0.0261	0.02587
g	Rasio poliklinik per satuan penduduk	Persen	0.019	0.033	0.043	0.045	0.0461
h	Rasio pustu per satuan penduduk	Persen	0.073	0.0614	0.0611	0.0599	0.0601
i	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persen	0.12	0.12	0.131	0.131	0.132
j	Rasio RS per satuan penduduk	Persen	0	0.003	0.004	0.004	0.003

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
k	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0.08	0.04	0.16	0.14	0.15
l	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Persen	0.59	0.09	0.18	1.23	2.01
m	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.2	93.75	86.14	97.7	94.27
n	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	90.57	93.58	93.58	94.34	81.13
o	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
p	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	71.16	65.37	63.47	71	56
q	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
r	Cakupan kunjungan bayi	Persen	104.3	99.2	101.68	96.35	91.65
s	Jumlah Puskesmas	Persen	37	37	37	37	37
t	Cakupan puskesmas	Persen	142.31	137.04	137.04	137.04	137.04
u	Jumlah Puskesmas Pembantu	Persen	85	85	85	85	86
v	Cakupan Puskesmas Pembantu	Persen	32.08	32.08	32.08	32.08	32.45
w	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	136.14	115.51	86.77	94.26	100
x	Angka Kesakitan penderita DBD yang ditangani	Persen	749	47	84	404	1468
y	Persentase penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
z	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.2.1.1.2.1	Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96.48	99.42	102.16	103.7	94.8
a	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	2	2	3	2	2
b	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	138.92	109.05	98.85	91.33	91.18
c	Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	Persen	133.57	148.22	128.63	107	114
d	Tingkat kematian karena TBC (per 100.000 penduduk)	Persen	2.04	2.28	1.43	2	2.27
e	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	44	64.21	64.91	55	59
f	Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam penanganan DOTS	Persen	95	88.7	21.4	90	94
g	Angka kejadian malaria	Persen	7	3	8	3	1
h	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0
i	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	0	0	0	0	0
j	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0
k	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0.03	0.03	0.04	0,04/1000 penduduk	0.04
l	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	Persen	14670	2030	2077	804	370

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
M	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	64.07	n/a	n/a	0	n/a
N	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	92.33	90.6	95.7	88.66	92.31
O	Cakupan pelayanan nifas	Persen	97.3	93.6	96.9	99.4	93.75
P	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	92.9	106.1	92.6	86.14	100
Q	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	90.5	81	104.8	98.86	95.88
R	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	32.55	10.29	22.94	32.99	51.22
S	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	75.92
T	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		10,008	23,702	32,952	67,548	94,013
U	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	114.66	101	88.85	100	100
V	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100
W	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100
X	Angka Gizi Buruk	Persen	0.18	0.11	0.12	0.12	0.56
Y	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	Persen	7.42	6.81	5.68	5.17	5.22
Z	Angka kelangsungan hidup bayi	Persen	18.43	18	19.36	-4.17	n/a
2.2.1.1.2.2	Jumlah Kematian Ibu	Persen	15	13	15	14	16
A	Angka kematian ibu/100.000 KH	Persen		70.3	77.47	73.12	82.632
B	Jumlah Kematian Bayi	Persen	136	126	110	99	90
C	Jumlah Balita Gizi Buruk	Persen	135	100	106	97	434
D	Persentase balita gizi buruk	Persen	0.18	0.11	0.12	0.12	0.56
E	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	45.48	5.36	4.79	4.08	6.19
F	Angka kematian balita/1.000 KH	Persen	0.92	0.75	0.75	0.83	0.36
G	Angka kematian neonatal /1.000 KH	Persen	5.48	5.29	4.23	3.92	3.4
h	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	35	38	44	48	58
i	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Persen	13.21	14.34	16.6	18.11	34.71
j	Kepuasan pengunjung puskesmas	Persen	85.53	86	n/a	80.19	60
k	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persen	37	37	37	37	37
l	Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0-28 hari)	Persen	103.63	106.09	104.57	102.71	95.84
m	Kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) (SPM)	Persen	18817	18223	18737	17836	19672
n	Persentase Kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) (SPM)	Persen	106.8	99.2	101.68	96.35	91.68

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
O	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil (SPM)	Persen	98.96	100	100	100	75.92
P	Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	Persen	37	37	37	37	37
Q	Surveilans penyakit menular dan tidak menular	Persen	265	265	265	265	265
R	Akses air bersih	Persen	81.15	89.02	89.12	82.2	68
S	Pengadaan obat untuk 37 PKM	Persen	80	85	100	100	100
T	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas	Persen	3	10	12	14	0
U	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
V	Akses jamban	Persen	62.4	67.38	73.06	72.61	80.09
W	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	Persen	123	91	143	180	265
X	Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	Persen	46.49	34.4	54	67.9	100
Y	jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar	Persen	146	101	150	97	123
Z	Jumlah penerima Kartu Waluya (kumulatif)	Persen	12187	23,702	32,952	67,548	94,013
2.2.1.1.2.3	Jumlah Kunjungan Pasien Umum dan BPJS	Kunjungan	157,895	142,764	178,284	178,804	176,668
a	Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik	Dokter Spesialis	6	8	8	13	13
b	Jumlah Kunjungan BPJS	Kunjungan	82,426	124,980	134,202	133,571	132.061
c	Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	Orang	2,310	2,543	701	521	419
d	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	persen	100	100	100	100	100
e	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Jenis Pelayanan	15	15	15	15	15
f	Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit	persen	100	100	100	100	100
g	Cakupan pemerliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	100	100	100	100	100
h	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100
i	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (BPJS)	Persen	100	100	100	100	100
j	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS pasca perawatan di rumah sakit	Persen	100	100	100	100	100
k	Jumlah Kasus <i>Multidrug Resistance</i> (MDR) pada Penderita TB Paru	Kasus	503	0	0	0	0
l	Angka Harapan Hidup;	Tahun	70.9	71.07	71.32	71,57	71,83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
m	Jumlah kasus kematian ibu	Orang	15	13	15	14	16
n	Jumlah kasus kematian bayi	Bayi	136	126	110	99	90
o	Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik	Dokter Spesialis	6	8	8	13	13
p	Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	Orang	2,310	2,543	701	521	419
q	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	persen	100	100	100	100	100
r	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Jenis Pelayanan	15	15	15	15	15
s	Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit	persen	100	100	100	100	100
t	Cakupan pemerliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	100	100	100	100	100
u	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100
v	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (BPJS)	Persen	100	100	100	100	100
w	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS pasca perawatan di rumah sakit	Persen	100	100	100	100	100
x	Jumlah Ruang Rawat Inap Kelas I dan II bagi Pasien Umum/Peserta JKN yang dikelola BPJS	Ruang	48	11	13	15	15
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
a	Panjang Jalan Kabupaten	km	848,296	848,296	848,296	848,296	848,296
b	Jalan Hotmix	km	95,379	76,116	138,322	203,854	80,460
c	Jalan Lapen dan Rigid	km	71,78	33,933	24,291	15,286	0
d	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	persen	49,63	49,83	49,50	49,87	50,55
e	Irigasi yang dikelola Pemerintah	buah	296	296	296	296	296
	- Irigasi teknis	buah	13	13	13	13	13
	- Irigasi semi teknis	buah	283	283	283	283	283
f	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (teknis dan semi teknis)	ha	16.350,29	16.350,29	16.350,29	16.350,29	16.350,29
g	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (luas sawah)	ha	38.420,75	38.420,75	38.420,75	38.420,75	38.420,75
h	Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi	jaringan/ DI	166	83	72	118	0
i	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	persen	88,89	88,89	88,90	88,90	88,9
j	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	m	4.166,0	5.624,7	1.542,0	1.647	8.554,07
k	Panjang bangunan proteksi sungai	m	5.404,6	2.296,0	517,2	385,7	457,03
l	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	persen	31,450	34,520	37,940	41,470	46,090

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
m	Panjang Drainase yang Belum Terbangun	m	24.869,770	23.806,970	22.566,720	21.731,720	19,968.22
n	Panjang Drainase yang Dipelihara	m	734,900	1.062,800	1.923,750	835,000	1,763,500
o	Panjang Jalan Desa di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kawasan Agropolitan dalam Kondisi Baik	km	222,775	226,495	228,622	237,567	n/a
p	Panjang Jalan Desa di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam Kondisi Baik	km	230,014	239,104	246,439	254,969	n/a
q	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal dalam Kondisi Baik	km	282,593	307,453	329,189	399,354	422.328
r	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	70	70,11	72,98	73,06	73.17
s	Akses Air Bersih	Persen	80,60	81,02	81,08	89,12	89.772
t	Akses Jamban	Persen	70,00	70,11	72,98	73,06	73,17
u	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
v	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,045	0,061	0,032	0,024	0,017
w	Jumlah Rencana Tata Ruang	Dokumen	7	3	8	3	1
x	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	10	0	0	0	0
y	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persen	n/a	100	100	100	100
z	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya		30	35	43	100	17
aa	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	Persen	45,12	44.83	54.34	46.64	n/a
bb	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	Persen	17.43	17.91	18.30	18.375	n/a
cc	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	100	100	100	100	100
dd	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	80,06	81,02	81,08	89,12	89,77
ee	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0.048	0.048	0.048	0.043	0.043
4	Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH)						
a	Persentase Rumah Layak Huni	persen	67.38	67.56	67.92	68.31	68.73
b	Rasio rumah layak huni	persen	0.067	0.0675	0.0679	0.0683	0.6873
c	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	0.56	0.41	0.35	1.74	1.83
d	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	0.045	0.078	0.078	0.078	0.078
e	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	n/a	12.14	54.24	65.49	32.96
f	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	2.810	2.81	3.62	4.43	6.44
5	Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
a	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	persen	6.18	5.474	5.474	5,741	4,027
b	Jumlah pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Unit	4,756	4,756	4,756	4,756	9,172

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
c	Persentase Penegakan PERDA	persen	134	146	134	117.7	118.6
d	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perkada	kasus	4.043	3.515	3.032	2,608	2,181
e	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	persen	98	98	98	1,65 (7 kasus)	3,38 (16 kasus)
f	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Ciamis	orang	6.18	5.474	5.474	5,741	5,760
g	Cakupan petugas Linmas	persen	44,09	39,06	39,06	0.62	0,40
h	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda	kasus	482	528	483	424	427
i	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten	persen	12,29	12,29	12,29	11.06	93.94
j	Tingkat waktu tanggap Daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (response time rate)	persen	78,125	81,08	75,71	66.18	71.21
k	Jumlah Petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	persen	13,04	10,34	9,67	10.34	10.34
l	Persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar layak pakai	persen	11,11	11,11	11,11	33.19	44.44
m	Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	kelompok	12	8	13	12	12
n	Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih	orang	1.17	3.23	3.375	3,600	5,070
o	Penertiban/penanganan PGOT	kali	60	65	120	192	180
p	Kegiatan Operasi Pekat	kali	44	44	44	44	44
q	Sumber Daya Aparatur PNS Satpol PP	orang	56	60	53	46	56
6	Urusan Sosial						
a	Persentase PPKS yang tertangani	persen	0	0	100	100	129
b	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	29.138	27.841	136,398	141,326	221,805
c	Persentase panti sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100	98	116	0	0
d	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	13	38	100	0	0
e	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	0	0
f	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	100	1,82	80	0	0
g	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	100	75,86	91	0	0
h	Persentase PPKS skala Kabupaten Ciamis yang menerima program	Persen	0,46	0,33	0,43	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya						
i	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos Rutilahu)	KK/KPM	488	311	382	383	328
j	Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)		68	68	71	62	39
2.3.1.2	Fokus Pelayanan Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar						
1	Urusan Tenaga Kerja						
a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,43	70,10	66,85	67,56	71,41
b	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	N/A	2.591	1.129	1917	2016
c	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	11.943	12.832	12.624	13035	8587
d	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	24,37	20,19	8,94	14.70655926	23,47
e	Keselamatan dan Perlindungan (K3)	persen	71,11	72,00	92,76	Alih Kelola	Alih Kelola
f	Angka Perselisihan Pengusaha Pekerja	persen	0	0	1	1	
g	Angkatan Kerja	orang	543.369	634.932	612.055	924,956	679,192
h	Upah Minimum Kabupaten	rupiah	1.363.319	1.475.792	1.604.334	1.880.655	1,880,654.54
i	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	93,05	94,83	95,40	130,72	
j	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan	kasus	-	2	0	1	
k	Jumlah Pencaker Terlatih	persen	83,59	74,13	67,03		51,95
l	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	persen	0	0	1	1	
m	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	0	1	0	0	0
n	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	orang	N/A	5537	5500	8687	9596
o	Besaran pemeriksaan perusahaan	persen	249	252	70	3,2	54,3
p	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	N/A	82,35	66,05	63,47	64
q	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	0	0	72	64	61,44
r	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen	0	67,80	80	84,7	76,47
s	Jumlah KLK	persen	1	1	1	1	1
t	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	orang	16	50	65	195	65
u	Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek	orang	3.617	7.401	11.118	11,118	9,695
v	Jumlah tenaga instruktur pelatihan keterampilan kerja		2	0	0	0	0
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan						
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah		49,90	49,90	50,36	51,25	51,26
b	Rasio KDRT		0,006	0,005	0,001	0,0008	0,0001
c	Persentase penanganan KDRT dan Trafficking		100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
d	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		100	100	100	100	100
e	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak		20	30	5	31	28
f	Partisipasi angkatan kerja perempuan		3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
g	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		10,00	8,70	10,00	12	12
h	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		0,33	0,31	0,31	0,31	0,31
i	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100	100	100	100
j	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS		100	100	100	100	100
k	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibertikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		100	100	100	100	100
l	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100	100	100	100	100
m	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	100	100	100	100
n	Indeks Development Gender			63,67	64,54	64,60	64,66
o	Desa Layak Anak		8	11	16	18	19
p	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		0	1	1	1	1
q	Jumlah OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender		0	1	11	11	15
3	Urusan pangan						
a	- Beras	Ton	356,444.83	379,612.61	329,143.11	280,950.35	287,779.00
b	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	52.38	53	69.4	70,0	73,0
c	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	76.2	76.7	89.8	89,4	91,5
d	Penanganan daeran rawan pangan	Persen	45	50	55	60	65
e	Cadangan pangan daerah dan masyarakat	Ton/Tahun	59.61	70.53	66.42	70.62	89.89
f	- Cadangan pangan daerah	Ton/Tahun	18.00	22.00	15.20	21.00	29.96
g	- Cadangan pangan masyarakat	Ton/Tahun	41.61	48.53	51.22	49.62	59.93
h	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Persen	90	90	90	89.9	88.9
i	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persen	104.5	102.9	114.8	107.7	104.6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
j	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Persen	100	100	100	100	100
k	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	LPM	259	221	222	224	224
l	Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras	Persen	9.33	9.77	20.41	61.24	63.12
m	Penurunan rumah tangga rawan pangan	Persen	74.07	50	55	60	96
4	Urusan pertanian						
2.3.1.2.5	Urusan lingkungan hidup(Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH)						
a	Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R	Unit	20	23	31	157	190
b	Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan	Kampung	10	14	18	14	3
c	Jumlah lubang resapan biopori	Unit	60,549	61,549	61,549	62,549	62,649
d	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata	Sekolah	13	24	29	19	12
e	Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Persen	41.55	41.55	41.63	41.63	41.63
f	Persentase Penanganan Sampah	Persen	5.07	4.99	6.88	6.79	83.88
g	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	39,38
h	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	52.85	52.94	54.99	61,71	62.13
i	Indeks Kualitas Air	Poin	54.8	56	59.6	59.60	59.68
j	Indeks Kualitas Udara	Poin	76.75	75.81	77.79	78.35	79.99
k	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	33.46	33.5	34.42	34.57	33.34
l	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina	Orang	60	60	60		
m	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah lebih atau sama dengan 50 %	Persen	75	75	74		
n	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100
o	Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka	hektar	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
p	Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan	kampung	10	14	18	14	3
q	Pelayanan pencegahan pencemaran air	persen	100	100	100	100	n/a
r	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	persen	100	100	100	100	n/a
s	Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	persen	0	n/a	n/a	n/a	n/a
t	Jumlah lubang resapan biopori	unit	60,549	61,549	61,549	62,549	62,649
u	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/ berwawasan adiwiyata	sekolah	13	24	20	19	12
v	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi	buah	2	2		3	2
w	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
x	Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Persen	41.55	41.55	41.63	41.63	41.63

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
y	Persentase Penanganan Sampah	persen	5.07	6.73	6.88	6.79	89.88
z	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	ada/tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
a	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	ada/tidak ada			n/a		ada
b	Hasil pengukuran indeks kualitas air	point	54.8	56	59.60	59.60	59.67
c	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	point	90.78	75.81	77.79	78.35	79.99
d	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	point	n/a	33.50	33.42	34.57	32.84
e	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemda	persen	0	37	50	31	
f	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten	orang	0	0	0	0	0
g	Jumlah PPLHD yang dilatih/ dibina	orang	0	0	0	0	0
h	Jumlah sarpras PPLHD yang memenuhi standar minimum		0	0	0	0	0
i	Jumlah MHA yang diakui	kelompok	2	2	2	2	5
j	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	kelompok	2	2	2	2	2
k	Jumlah penetapan hak MHA	kelompok	2	2	2	2	2
l	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA	persen	0	0	0	0	0
m	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana MHA	persen	0	0	0	0	0
n	Jumlah pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan	orang	2	2	2		1
o	Terlaksananya pemberian/ penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
p	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda, lokasi usaha dan dampaknya	persen	2	2	4	5	4
q	Timbulan sampah yang ditangani	persen		14.93	22.93	74.82	
R	Persentase cakupan area pelayanan	persen	64.29	64.29			
S	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	5.07	4.99	6.88	6.79	89.88
t	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	persen		70.03	71.70	55.21	62.13
6	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil						
a	Rasio bayi berakte kelahiran			1,5:10	2,15:10	2,12:10	4,325
b	Kepemilikan KTP	Persen		86	89.86	96.11	95.4
c	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Jiwa		439	478	542	553
d	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Ada					
e	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
f	Jumlah Penduduk yang Datang	Jiwa	21,868	7,709	11,343	33.633	13,116
g	Jumlah Penduduk yang Pindah	Jiwa	15,249	13,529	15,651	21.462	15,590
h	Cakupan penerbitan KTP	Persen		153.21	125.16	85.55	126.97
7	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa						
a	Jumlah kantor Pemerintahan desa yang baik	Unit	86.43	225	228	232	243
b	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	0	87.2	88	90	91
c	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	100	1	1	1	1
d	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	265	1	1	1	265
e	Jumlah LPM aktif	kelompok	265	265	265	265	265
f	Persentase LPM Aktif	persen	0	100	100	100	100
g	Persentase LPM berprestasi	persen	0	0	0	0	0
h	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100
i	Pos yandu aktif	unit	1,595	1.6	1.601	1.603	1,606
j	Persentase Posyandu Aktif	persen	100	100	100	100	100
k	Jumlah Swadaya masyarakat	rupiah	60,187,321,102	213,818,690,000	4,790,637,020	1,132,848,200	8,192,819,013
l	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100
m	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100
n	Jumlah Desa Tertinggal	desa	0	36	27	11	0
o	Jumlah UPK yang dibina	kelompok	26	26	26	26	26
p	Terwujudnya desa sadar hukum	desa	258	258	258	258	258
q	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	desa	74	0	39	143	143
r	UPK yang dibina	Kelompok	26	26	26	26	26
s	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	persen	100	100	100	100	100
t	Jumlah pembinaan di tingkat desa	Kali	774	774	1032	1032	1032
u	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kali	4	4	4	4	4
v	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Lembaga	265	265	265	265	265
w	Jumlah BUMDes yang terbentuk	BUMDes	37	19	60	0	0
x	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	orang	2,401	1.032	1.246	1.203	1,290
y	Pembinaan dan Pelatihan BPD	orang	0	0	40	297	258

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
z	Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS	Rp	400,000,000	100,000,000	563,547,100	276,250,000	11,595,000
2.3.1.2.7.1	Terfasilitasinya BBGRM	Rp	0	0	178,547,100	100,000,000	11595000
a	Terfasilitasinya TMMD	Rp	30,000,000	0	260,000,000	0	0
b	Terfasilitasinya BSMSS	Rp	100,000,000	100,000,000	125,000,000	176,250,000	0
c	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	persen	97	100	100	100	100
d	Jumlah ADD	Rp	126,847,105,200	126,867,167,000	217,285,506,000	136,174,259,886	144,724,222,290
e	Kader Posyandu	Orang	9,564	9.78	10.164	10.35	10,350
f	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0	0	0.6187	0.6887	0.7130
8	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
a	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	jiwa	3,06	3,06	3,03	3,03	3,03
b	Jumlah peserta KB aktif	akseptor	166.32	180.277	184.923	188,489	191,004
c	Peserta KB Pria	akseptor	2.161	2.692	2.972	3,302	3,61
d	Pasangan Usia Subur (PUS)	keluarga	214.463	232.954	234.617	238,011	238,105
e	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	persen	77,55	80,63	78,82	79.19	80.22
f	PUS Peserta KB	pasangan	166.32	180.277	184.923	188,489	191,004
g	PUS Bukan Peserta KB	pasangan	48.143	43.299	49.694	49,522	47,101
h	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	77,55	80,63	78,82	79.19	80.22
i	Realisasi Peserta KB Baru	akseptor	31.69	24.289	36.48	30,584	32,021
j	Pelayanan KB Medis operasi	akseptor	8.051	8.415	8.593	8,615	8,657
k	Total Fertility Rate (TFR)	orang	2,03	2,03	2,06	2.0551	2.05
l	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2,4	2,4	2	2	2
m	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	akseptor	166.32	181.505	184.923	188,489	191,004
n	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	pasangan	4.428	4.409	4.551	3,600	3,600
o	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	pasangan	15.642	15.998	32.074	31,269	28,988
p	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	20,84	21,63	21,61	21.62	21.8
q	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	77,55	80,68	78,82	79.19	80.22
r	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	persen	86,68	79,57	78,48	84.86	85.41
s	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	persen	80,04	77,48	80,11	78.86	81.68
t	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	persen	75,42	75,19	76,41	69.23	64.36
u	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri	persen	39,29	39,02	37,38	36.57	36.38
v	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100
w	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	persen	100	100	100	100	100
x	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	19,6	19,7	19,8	19.76	19.77

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
y	Persentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	20,84	21,63	21,61	21,62	21,8
z	Jumlah UPPKS yang mendapat modal	Kelompok	3	2	2	2	2
9	Urusan Perhubungan						
a	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	11,810,827	9,583,465	7,289,950	6,847,228	4.073.201
b	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	Unit	928	850	825	718	612
c	Rasio izin trayek	%	0.000140881	0.000127727	0.000114305	0.000108581	0.000099414
d	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	5.332	5.026	5.094	5.76	5,014
e	Jumlah uji KIR angkutan tidak umum	Unit	11.219	10.483	10.69	12.184	11,205
f	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	32.22%	32.41%	32.27%	32.10%	30.91%
g	Pemasangan rambu-rambu	Unit	396	512	650	797	850
h	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		-	-	-	0.002801796	0.002801796
i	Jumlah terminal	Unit	12	12	12	12	12
j	Jumlah terminal bis	Unit	3	2	2	2	2
k	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	11,810,827	9,583,465	7,289,950	6,847,228	4.073.201
l	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	Orang	11,810,827	9,583,465	7,289,950	6,847,228	4.073.201
m	Jumlah terminal dalam kondisi baik	Unit	12	11	11	9	9
n	Persentase layanan angkutan darat	%	8.83	9.29	11.48	12.88	14,23
o	Jumlah halte	Unit	14	17	17	20	21
p	Lama pengujian kelaikan kendaraan	Menit	22	28	28	28	28
q	Biaya pengujian kelaikan kendaraan	Rupiah	45.000 s/d140.000	45.000 s/d140.000	15.000 s/d 150.000	45.000 s/d140.000	45.000 s/d140.000
r	Jumlah alat uji yang berfungsi	Unit	8	10	12	12	12
s	Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas	Unit	396	512	650	817	870
t	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas	Ruas	5	17	18	29	81
u	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	Ruas	11	11	12	12	12
v	Jumlah PJU tenaga surya	Unit	28	14	14	14	32
w	Penerangan jalan umum	Unit	4.801	5.36	6.049	6.048	6,393
10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
a	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	13	17	17	17	17
b	Jumlah Stasiun Radio	Stasiun	7	7	7	7	5
c	Website Milik Pemerintah Daerah	Website	1	1	1	1	1
d	Jumlah SKPD memiliki Website	Website	63	63	63	83	112
e	Stasiun Relay TV	Stasiun	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
F	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	Persen	14.81	14.81	37.04	44.44	51.85
G	Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan Daerah melalui mass media	Jenis Media	14	8	3	4	3
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
A	Persentase pertumbuhan koperasi	Persen	3,12	1,01	1,02	1.32	1.77
B	Jumlah UMKM	UMKM	14,545	14,567	14,692	14,792	15,165
C	Jumlah UMKM yang produktif	UMKM	14,299	14,325	14,450	14,580	15,490
D	Persentase koperasi aktif	Persen	35,71	53,21	54.14	55.07	58.33
E	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	310	315	327	337	350
F	Persentase Usaha skala mikro dan kecil	Persen	87,68	99,85	99.08	99.05	99.08
G	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	Persen	-	-	-	-	-
H	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	100	100	100	100	100
I	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan permodalan	Koperasi	0	0	0	0	0
J	Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Urusan Penanaman Modal						
A	Jumlah Unit Usaha	Buah					
B	PMDN		703	691	786	847	331
C	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	milyar	703	691	786	847	331
D	PMDN		178	187.734	206.576	221,284	200
E	Daya Serap Tenaga Kerja	Orang		2591	1129	1917	2016
F	PMDN		53,219	56,129	61,762	2.117	1,823
G	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA)	PT	70	44	61	40	93
H	Lama proses perizinan	Hari	10	10	10	10	7
I	Dokumen Potensi Investasi Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
J	Pameran Produk Unggulan	kali	6	6	3	3	refocusing
K	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	2.73	5.47	10.04	7,12	(9,8)
L	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	1	1	1	1	1
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
A	Prestasi pemuda pelopor/kepramukaan	Orang	-	8	8	8	4
B	Jumlah kegiatan kepemudaan	Buah	115	125	135	194	197
C	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	Buah	80	156	156	540	540
D	Jumlah Kewirausahaan pemuda	Organisasi	52	49	112	124	128

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
E	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	Orang	21	14	4	20	17
F	Jumlah organisasi olahraga	Klub	77	81	81	81	92
G	Jumlah kegiatan olahraga	Buah	206	216	216	216	227
H	Lapangan Olahraga	Buah	1,022	1,024	1,024	1.024	1.025
I	Jumlah organisasi kepemudaan	Buah	173	227	227	230	248
J	Cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda	Persen	85	85	85	85	92
14	Urusan Statistik						
A	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	tidak	tidak	tidak	ada
B	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	ada	ada	ada	ada
C	Buku PDRB	Ada/Tidak	Ada	ada	ada	ada	
D	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	Dokumen	10	7	5	3	1
15	Urusan persandian						
A	(Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam	Persen	n/a	0	0	0	100
16	Urusan perpustakaan						
A	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	21,621	44,870	47,217	66.673	78,346
B	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	26,319	31,720	37,903	51.999	64,079
C	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	57,375	58,374	71,371	74.651	83,622
D	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	28,425	28,708	30,045	30.163	33,325
E	Mobil Perpustakaan Keliling	Buah	4	3	4	393	
F	Jumlah Perpustakaan	Buah	374	373	376	0	402
G	Jumlah Perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling	Buah	5	4	5	3	5
H	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Unit/1.000 penduduk	0.26	0.27	0.27	3	0
I	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	3	3	3	3
J	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	Orang	4	4	3	3	2
K	Indeks literasi pembangunan masyarakat	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	56.34
17	Urusan kearsipan						
A	Jumlah SDM pengelola kearsipan daerah	Orang	180	227	265	321	320
B	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	100
C	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	5	5	5	4
D	Terpeliharanya dokumen arsip daerah	SKPD	55	55	55	63	62
E	Jumlah Arsiparis	Orang	2	1	1	1	1
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan						
1	Urusan kelautan dan perikanan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Budi Daya Kolam Air Tawar (KAT)	Ha	2,366.61	2,511.32	2,493.76	2,504.76	2,504.76
b	Sawah	Ha	96.91	97.91	100.57	100.57	100.57
c	Kolam Air Deras	unit	129	129	129	129	129
d	Kolam Jaring Apung	unit	60	60	60	60	60
e	Produksi Ikan Kolam	Ton	49,526.15	61,577.16	76,658.06	92,968.74	94,158.11
f	Produksi Ikan Sawah	Ton	178.9	222.43	276.90	335.54	328.88
g	Produksi Ikan Jaring Apung	Ton	815.39	1,013.79	1,262.08	1,529.32	1,469.89
h	Produksi Ikan Kolam Air Deras	Ton	1,370.29	1,703.72	2,120.98	2,570.08	2,519.12
i	Poduksi ikan tangkap	Ton	511.24	635.26	790.85	793.18	805
j	Produksi sektor perikanan	Ton	51,890.73	64,517.10	81,108.87	98,196.86	99,281.00
k	Konsumsi ikan	kg/kapita/th	17.72	18.11	18.62	18.82	18.86
2	Urusan Pariwisata						
a	Jumlah obyek Wisata	Buah	33	133	143	144	147
b	Akomodasi Wisata						
	a. Jumlah Hotel	Buah	16	16	16	16	16
	-Jumlah Kamar	Buah	305	330	330	337	351
	-Jumlah Tempat Tidur	Buah	512	510	510	555	351
	b. Jumlah Tamu WNI	Orang	47,211	53,734	43,904	44,561	35,134
	c. Jumlah Tamu WNA	Orang	0	0	0	3	2
	d. Jumlah Hotel Non Berbintang	Buah	16	16	16	16	16
	e. Jumlah Kamar Hotel Non Berbintang	Buah	305	330	330	337	351
c	Kunjungan wisatawan	Orang	640,941	410,970	506,151	697,782	616,643
d	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	Orang	200	125	250	400	450
	Urusan Kebudayaan						
	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	Orang	21	14	4	20	17
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	n/a	n/a	n/a	0.537	0.557
3	Urusan Pertanian						
	Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura						
A	Produksi Padi	Ton	530,496	526,745	472,106	448.799	461,378
B	Produksi Jagung	Ton	36,022	26,739	44,838	35.98	45,433
C	Produksi Kacang Kedelai	Ton	1,245	1,830	3,214	1.063	45
D	Produksi Ubi Kayu	Ton	50,426	42,354	61,468	55.824	32,788
E	Produksi Cabai Besar	Ton	4,203	4,077	6,163	4.806	3,011

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
F	Produksi Tomat	Ton	1,270	1,006	1,304	1.893	776
G	Produksi Duku	Ton	873	71	4,081	2.827	839
H	Produksi Manggis	Ton	1,601	111	3,667	3.594	1,807
I	Produksi Pisang	Ton	213,971	174,208	105,642	71.599	92,800
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura							
A	Produktivitas padi	Ku/Ha	66.00	64.39	66.47	66.82	65.53
B	Produktivitas jagung	Ku/Ha	72.16	65.54	68.11	69.58	71.48
C	Produktivitas kedelai	Ku/Ha	14.89	16.55	15.44	17.20	11.30
D	Produktivitas cabai besar	Ku/Ha	95.74	94.59	120.36	91.03	101.36
E	Produktivitas pisang	Kg/Rumpun	30.02	35.00	29.00	22.00	25.00
F	Produktivitas manggis	Kg/Pohon	30.19	31.00	49.00	40.00	31.00
G	Produktivitas cabai rawit	Ku/Ha	69.22	70.32	90.98	82.42	106.98
H	Jumlah Penyuluh Pertanian	Orang	106	125	71	168	162
I	Jumlah Penyuluh yang terlatih	Orang	125	125	71	40	75
J	Komoditi hortikultura	Ton	278,050	226,083	207,127	161,226	152,912
K	Kehilangan hasil panen (losses)	Persen	11	10	10	8	8
L	Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16,802	16,802	18,190	27.572	27,962
M	Luas lahan sawah baru	ha	70	79	0	0	0
Komoditi Perkebunan							
A	Produksi kelapa	ton	19,998.02	19,703.93	19,703.93	19,940.43	17,224.83
B	Produksi kakao	Ton	350.09	354.7	350.11	292.70	191.89
C	Produksi cengkeh	Ton	60.36	59.82	58.32	60.32	60.82
D	Produksi the	Ton	346	83.04	83.04	80.04	76.82
E	Produksi kopi	Ton	668.15	766.78	710.64	874.42	949.79
Komoditi Peternakan							
Jumlah Ternak							
A	- Sapi	ekor	9,978	10,081	10,188	10.284	10,266
B	- Kerbau	Ekor	2,795	2,823	2,853	2.883	2,854
C	- Domba	Ekor	175,323	177,093	178,882	199.394	197,912
D	- Kambing	Ekor	122,060	123,293	124,526	137.654	136,524
Jumlah Rumah Potong Hewan							
A	- RPH Pemerintah	unit	3	3	3	3	3
B	- RPH Swasta	Unit	1	1	1	1	1
Produksi Daging Ternak							
		Unit	1,982,524	2,005,276	2,025,475	1,594,251	1,672,566

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	- Sapi		1,143,743	1,156,359	1,167,963	1,180,368	1,219,115
B	- Kerbau	Kg	59,281	60,074	60,698	61,353	61,945
C	- Domba	Kg	446,275	451,626	456,146	195,716	218,161
D	- Kambing	Kg	333,225	337,217	340,668	156,813	173,344
	Jumlah unggas	Kg	90,472,662	91,389,195	92,356,915	107,272,208	109,643,446
A	- Ayam Buras	ekor	1,458,226	1,472,954	1,488,426	1,503,459	1,500,452
B	- Ayam Ras Petelur	Ekor	1,218,861	1,231,415	1,244,605	2,078,350	2,262,488
C	- Ayam Ras Pedaging	Ekor	87,632,852	88,519,663	89,451,279	103,515,195	105,705,477
D	- Itik	Ekor	162,723	165,163	172,605	175,204	175,029
	Produksi Daging Unggas	Ekor	117,657,653	118,849,101	120,104,110	122,310,754	128,371,529
A	- Ayam Buras	kg	1,497,506	1,512,631	1,528,522	1,543,958	1,540,870
B	- Ayam Ras (pedaging + petelur)	Kg	116,033,096	117,207,513	118,441,268	120,630,000	126,694,000
C	- Itik	Kg	127,051	128,957	134,320	136,396	136,659
	Produksi Telur	Kg	13,161,529	13,301,912	13,477,552	43,412,138	49,599,522
A	- Ayam Buras	Kg	894,307	903,339	912,829	3,224,607	3,218,157
B	- Ayam Ras Petelur	Kg	11,203,295	11,318,686	11,439,924	39,042,000	45,281,000
C	- Itik	Kg	1,063,927	1,079,887	1,124,799	1,145,531	1,100,365
D	- Produksi Susu	Kg	235,777	238,359	244,172	236,068	171,953
	Jumlah ternak yang masuk Kab. Ciamis	Ekor	11,797	11,445	12,539	12,412	8,028
A	- Sapi (potong + perah)	Ekor	5,856	5,909	7,213	7,232	6,132
B	- Kerbau	Ekor	440	358	360	360	97
C	- Kuda	Ekor	14	14	14	10	3
D	- Domba	Ekor	3,233	3,041	2,917	2,815	863
E	- Kambing	Ekor	2,254	2,123	2,035	1,995	933
	Jumlah ternak yang keluar Kab. Ciamis	Ekor	48,586	49,257	62,503	62,897	73,342
A	- Sapi (potong + perah)	ekor	3,026	3,054	3,497	3,486	2,479
B	- Kerbau	Ekor	415	339	338	338	30
C	- Domba	Ekor	32,998	33,498	40,163	40,437	42,421
D	- Kambing	Ekor	12,132	12,352	18,490	18,615	28,396
	Jumlah unggas yang keluar Kab. Ciamis	Ekor	76,911,288	77,245,417	77,363,042	77,123,071	77,222,871
A	- Ayam Buras		9,485	7,195	7,941	6,817	3,817
B	- Ayam Ras (pedaging + petelur)	Ekor	76,768,511	77,097,972	77,215,795	76,968,416	77,175,496
C	- Itik	Ekor	133,292	140,250	139,306	147,838	43,558
D	Jumlah produksi sektor peternakan	Ekor	119,640.18	120,854.38	122,129.59	122,247.69	132,172,128.71

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
E	Jumlah ternak yang di IB	ekor	1,529	2,152	2,360	1.661	1,397
F	Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	Kelompok	22	35	35	36	42
4	Urusan Pengawasan						
A	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	96,67	95,75	93.33	90.32	93.1
B	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,18	0,55	0.43	0.54	0.00
C	Jumlah temuan BPK RI	Jumlah Temuan	9	15	12	13	9
D	Jumlah entitas yang diperiksa	Entitas	293	326	334	240	241
E	Jumlah APIP/Pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek	Orang	30	19	31	48	31
F	Jumlah SOP, DMA,DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Dokumen	3	6	11	9	4
G	- SOP	Dokumen	2	7	10	9	3
h	- Kebijakan pengawasan	Dokumen	1	1	1	1	1
i	Level Maturitas SPIP	Level	1	1	1	3	3
j	Nilai SAKIP	Kategori	CC	B	B	B	B
5	Urusan Kepegawaian						
	Persentase PNS berijazah S1, S2, S3	Orang	68.26	58.65	60.02	60.71	74.05
	Urusan Pendidikan dan Pelatihan						
	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat perjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan Non PNS	Orang	2663	165	237	529	274
6	Urusan Keuangan						
	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0.36	1.83	0.27	0.25	3.29
	Persentase SILPA terhadap Pengeluaran	Persen	0.35	1.87	0.26	0.27	3.46
	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	6.02	3.49	0.97	13.12	8.17
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	36	34	37.32	31.88	31.52
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	13	15	14.61	27.97	15.07
	Persentase Belanja langsung dengan Belanja tidak langsung	Persen	62.78	56.62	54.22	60.92	61.96
	Persentase Belanja langsung terhadap Total APBD	Persen	37.22	36.15	35.16	34.47	36.44
	Persentase Belanja tidak langsung terhadap Total APBD	Persen	62.78	63.85	64.84	56.58	58.8
	Bagi Hasil Kabupaten dan desa	Rupiah	5,950,000,000	6,195,717,564	6,828,909,000	3,423,742,000	4,176,655,488
	Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa	Persen	0,24	0,23	0,26	0,12	0,15
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	8.63	8.64	9.11	8.122	9.6
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.003	0.0011	0.001	0.03	0.05
	Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi dan Pajak	26	26	26	26	26
	Jumlah Retribusi	Retribusi	15	15	15	15	15
	Jumlah Pajak	Pajak	11	11	11	11	11
	Persentase Pajak Daerah	Persen	110.45	115.23	106.25	109.8	100.3
	Persentase Retribusi Daerah	Persen	96.14	88.13	99.05	109.3	99.18
	Penatausahaan Aset yang Berkualitas	Persen	85	94	94	95	95
	Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	93.84	93.08	87.49	85.50	85.50
	Meningkatnya APBD	Rupiah	2,372,854,213,035	2,582,166,044,870	2,573,443,559,792	2,951,167,251,683	2,790,162,692,913
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	62,78	56,62	54,22	60.90	61.96
7	Urusan Perdagangan						
a	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$umus : Ekspor-impor *	U\$	93,451	231.178,94	264.905,64	264,905.64	9.146.355,45
b	Cakupan bina usaha informal (PKL)	PKL	25	25	27	27	27
c	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	Kelompok	5	5	9	5	5
d	Inspeksi Produk	Kali	108	108	108	108	108
e	Jumlah Sarana Prasarana PKL dan Asongan	lokasi	-	1	1	1	1
f	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	20	20	33.3	33.4	33.4
8	Urusan perindustrian						
a	Pertumbuhan Industri	Persen	3.98	3.98	1.53	1.32	3.10
b	Jumlah industri kecil & rumah tangga	Buah	9,890	10,118	10,404	10,543	10.863
c	Jumlah kelompok pengrajin yang dibina (kelompok)	Kelompok	9	5	13	9	9
d	Pameran produksi industri	Kali	5	6	2	7	-
e	Jumlah Produk yang telah dilindungi oleh HAKI	Produk	10	10	10	14	14
f	Jumlah Komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat	Jenis	1	1	3	3	3
g	Jenis komoditi industri	Jenis	135	135	136	136	139
h	Jumlah Usaha Skala Mikro	Unit	12418	14065	14185	14237	14.610
i	Jumlah Usaha Skala Kecil	Unit	309	367	367	415	415
j	Jumlah Usaha Skala Menengah	Unit	121	135	140	140	140
k	Jumlah Sentra Industri	Jenis Komoditi	30	30	31	31	35
l	Jumlah IKM yang memiliki hak paten	IKM	10	10	10	10	14
m	Jumlah IKM	Unit	9909	10,127	10,415	10,555	10,883
n	Jumlah Kluster Industri	Kluster	1	1	1	2	2
o	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	-	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Urusan Transmigrasi						
A	Transmigrasi yang difasilitasi Pemkab	KK/Jiwa	4	0	5	0	0
b	Pelatihan Calon Transmigran	Kecamatan	5	2	5	0	0
10	Urusan Perencanaan						
a	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
e	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	94	89.38	91.57
f	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100
g	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4	4	4	3	4
h	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	Dokumen	2	3	3	4	6
i	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	2	2	3	3	2
j	Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	Dokumen	1	1	3	1	10
k	Aparat perencana yang terlatih	Orang	69	69	55	50	42
l	Jumlah dokumen penanggulangan bencana	Dokumen	4	4	4	4	4
m	Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan Tanah	Kecamatan	0	0	0	0	0
n	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	Kali	n/a	1	2	3	1
o	Jumlah dokumen pengembangan data	Dokumen	n/a	1	1	1	1
p	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	Kali	n/a	12	12	12	12
11	Urusan Penelitian dan Pengembangan						
a	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100
b	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	n/a	n/a	n/a	60	16,67
c	Penerapan SIDA						
	-Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	n/a	n/a	n/a	71,43	57,14
	-Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100
12	Urusan Sekretariat Daerah						
	Meningkatnya fasilitasi persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab	Lokasi	12	18	26	35	47
13	Urusan Sekretariat DPRD						
	(Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.2.11	Potensi Perindustrian & Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan)							
a	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)							
	a. Industri Besar		0	0	0	0	0	0
	b. Industri Menengah	unit	4	4	5	6	13	
	- Tenaga kerja	orang	920	920	1005	1367	2898	
	- Nilai Investasi	Rp	2,679,120,000	2,679,120,000	26,700,000,000	27,700,000,000	73,200,000	
	c. Industri Kecil formal	unit	937	956	1000	1025	1132	
	- Tenaga kerja	orang	11,766	11802	13370	13695	14170	
	- Nilai Investasi	Rp	38,762,788,000	39,212,163,000	45,422,966,000	48,912,603,000	54,563,278,000	
	d. Industri Kecil Informal	unit	5,372	5526	5755	5865	5952	
	- Tenaga kerja	orang	15,644	15979	16571	16902	16973	
	- Nilai Investasi	Rp	9,175,966,000	9,638,966,000	10,632,966,000	11,713,966,000	11,921,966,000	
b	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)							
	a. Industri Besar		0	0	0	0	0	
	b. Industri Menengah	unit	6	6	6	6	7	
	- Tenaga kerja	orang	162	162	174	174	138	
	- Nilai Investasi	Rp	1,759,748,000	1,759,748,000	17,100,000,000	17,100,000,000	29,726,500,000	
	c. Industri Kecil formal	unit	361	374	387	391	486	
	- Tenaga kerja	orang	4,203	4311	4450	4572	4680	
	- Nilai Investasi	Rp	7,955,663,000	8,615,663,000	11,235,411,000	11,537,911,000	12,534,411,000	
	d. Industri Kecil Informal	unit	3,229	3,261	3,262	3,262	3,293	
	- Tenaga kerja	orang	12,289	12,369	12,379	12,379	12,415	
	- Nilai Investasi	Rp	3,256,694,000	3,346,694,000	3,396,694,000	3,396,694,000	3,436,694,000	
c	Jumlah Pasar							
	a. Pasar Pemda	kec.	4	4	4	4	5	
	-Kios/Los	unit	2.772 / 648	2.772 / 648	2.772 / 648	2772/648	2792/678	
	-Pedagang	pedagang	3,352	3,352	3,352	3,352	3,382	
	b. Pasar Desa	unit	48	48	48	48	48	
	- Pedagang	pedagang	4,331	4,331	4,331	4,331	4,331	
d	Pasar modern							
	- Mini market	unit	83	80	85	85	85	
	- Supermarket	unit	3	4	5	6	6	
e	Jumlah Perusahaan Perdagangan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	- Perdagangan Besar (PB)	unit	0	0	0	2	2
	- Perdagangan Menengah (PM)	unit	104	53	56	33	36
	- Perdagangan Kecil (PK)	unit	641	499	543	483	498
	- Perdagangan Mikro	unit	25	129	242	327	327
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
a	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita						
	Total Pengeluaran Rumah Tangga	Milyar Rp	17,078.94	18,530.50	n/a	n/a	n/a
	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB		69.64	69.81	69,61	69,01	69,00
b	Nilai tukar petani						
	Indeks yang Diterima Petani (It)		131.88	141.57	149.14	153,85	n/a
	Indeks yang Dibayar Petani (Ib)		124.88	126.4	132.12	136,08	n/a
	NTP		105.61	112.01	112.76	112	113
c	Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan)						
	Konsumsi Per Kapita Sebulan	Rp	642,949	802,447	944,298	1,010,335	1,021,571
	- Konsumsi Non Makanan	Rp	286,981	344,227	412,026	446,952	450,761
	- Konsumsi Makanan	Rp	355.968	458.220	532.272	563,383	570,810
	Rasio		80,62	75,12	77,41	79,33	78,96
2.4.2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur						
a	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan;		-	-	-	0.002801796	0.003050053
b	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum;	Orang	11.810.827	9.583.465	7.289.950	6,847,228	4,073,201
c	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun;	Orang	11,810,827	9,583,465	7,289,950	6,847,228	4,073,201
d	Ketaatan Terhadap RTRW;	persen		85	85	85	85
e	Luas Wilayah Produktif;	Hektar (ribu)	102.362,06	102.362,06	102.362,06	114.554	114.457,3
	Luas wilayah budidaya	Hektar (ribu)	140.563.06	140.563,06	140.563,06	144.008	130.381,96
	Luas wilayah produktif	Hektar (ribu)	102.362.06	102.362,06	102.362,06	114.554	114.457,30
	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	%	72,80	72,80	72,80	80	87,7
	Luas wilayah industri	hektar	381.98	381.98	381.98	381.98	451.12
	Luas wilayah kebanjiran	hektar	26.052	26.052	26.052	26.052	26.052
	Luas wilayah perkotaan	hektar(ribu)	19,205	19205	19205	599,235	31,496.28
f	Luas Wilayah Industri;	hektar	381.98	381.98	381.98	381.98	451.12
g	Luas Wilayah Kebanjiran;	hektar	26.052	26.052	26.052	26.052	26.052

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
h	Luas Wilayah Kekeringan;						
i	Luas Wilayah Perkotaan;	hektar(ribu)	19.205	19.205	19.205	599.235	31.496.28
j	Persentase Rumah Tangga (Rt) Yang Menggunakan Air Bersih Di Perkotaan	Persen		44.83	54.34	46.64	
K	Persentase Rumah Tangga (Rt) Yang Menggunakan Air Bersih Di Perdesaan	Persen		17.91	18.3	18.374	
l	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Dan	Persentase	82.17	96.78	97.02		
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi						
a	Angka Kriminalitas;						
	Jumlah kasus Narkoba	Kasus	17	21	19	n/a	n/a
	Jumlah kasus Pembunuhan	Kasus	0	4	2	n/a	n/a
	Jumlah Kejahatan Seksual	Kasus	20	13	0	n/a	n/a
	Jumlah kasus Penganiayaan	Kasus	38	27	30	n/a	n/a
	Jumlah kasus Pencurian	Kasus	273	194	209	n/a	n/a
	Jumlah kasus Penipuan	Kasus	147	116	79	n/a	n/a
	Jumlah kasus Pemalsuan uang	Kasus	0	0	0	n/a	n/a
	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	Kasus	495	375	339	276	n/a
	Angka Kriminalitas (8)/(9)	Persen	0,035	0,027	0,024		
b	Jumlah Demonstrasi;			24	19	17	4
c	Lama Proses Perijinan;	Hari	10	10	10	10	7
d	Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah;		26	26	26	26	26
e	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha; Dan	Buah	1	1	1	1	1
f	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	Desa	7	59	68		
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia						
a	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)						
	SD/Sederajat	Jlwa	334,683	587.183	583.762	578.706	573,692
	SMP/Sederajat	Jlwa	212,887	213.89	214.837	215.302	216,249
	SMA/Sederajat	Jlwa	149,194	150.926	152.206	154.765	159,008
	D-I/D-II Sederajat	Jlwa	6,460	6.232	6.055	5.889	5,718
	D-III/Sederajat	Jlwa	8,711	8.744	8.858	9.03	9,211
	D-IV/Sederajat dan S-1	Jlwa	26,326	27.779	29.247	30.98	32,613
	S-2	Jlwa	1,802	1.912	2.005	2.116	2,189
	S-3	Jlwa	154	151	159	165	173
b	Rasio Ketergantungan						
	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	Jiwa	273.502	268.869	262.757	305.441	261.726
	Jumlah Penduduk usia >64 tahun	Jiwa	158.822	161.865	172.562	182.012	189.617

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	Jiwa	432.324	430.734	435.319	473.941	451.343
	Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 tahun	Jiwa	966.022	970.689	973.188	974.389	978.919
	Rasio ketergantungan	Persen	0,45	0,44	0,45	0,46	0,46

Sumber: Bappeda (Data Diolah)

2.10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.77
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI
SPM PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	86,28	91,09	Persen	Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)				
	Sekolah Dasar (SD/MI)	- Jumlah Warga Negara Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	93,22	95,02	Persen	
	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	- Jumlah Warga Negara Usia 13 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	88,58	85,32	Persen	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,79	2,79	Persen	
SPM KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	95,92	92,88	Persen	Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	97,62	95,21	Persen	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	109,33	96,98	Persen	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI
4	Pelayanan kesehatan balita	- Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	99,22	95,88	Persen	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	- Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	96,32	75,92	Persen	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	- Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	48,34	15,39	Persen	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	- Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	58,11	42,49	Persen	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	- Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	41,84	23,15	Persen	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	- Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	42,98	18,79	Persen	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	- Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	79,94	79,50	Persen	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	- Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	45,29	47,48	Persen	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	- Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	54,50	89,72	Persen	
SPM PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	77,35	89,77	Persen	Pekerjaan Umum
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79,54	79,10	Persen	
SPM PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	Persen	Perumahan Rakyat
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	100	Persen	
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	%	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,35	93,94	Persen	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI
3	Pelayanan informasi rawan bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	1,76	3,04	Persen	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,06	3,56	Persen	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75,00	53,05	Persen	
SPM SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	- Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	31,4	33,34	Persen	Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	- Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	78,39	52,08	Persen	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia diluar panti	- Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	72	111	Persen	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	- Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	14	86,85	Persen	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	Persen	

Sumber: Sekretariat Daerah (Data Diolah)

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut memuat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah	Belanja Operasi	Penerimaan Pembiayaan
➤ Pajak Daerah	➤ B. Pegawai	➤ SILPA
➤ Retribusi Daerah	➤ B. Barang & Jasa	➤ Pencairan Dana Cadangan
➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	➤ B. Bunga	➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
➤ Lain –lain PAD yg Sah	➤ B. Subsidi	➤ Penerimaan Pinjaman Daerah
Pendapatan Transfer	➤ B. Hibah	➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
➤ Transfer Pemerintah Pusat	➤ B. Bantuan Sosial	➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
➤ Transfer Antar Daerah	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	➤ B. M. Tanah	➤ Pembentukan Dana Cadangan
➤ Hibah	➤ B. M. Peralatan & Mesin	➤ Penyertaan Modal Daerah
➤ Dana Darurat	➤ B. M. Gedung & Bangunan	➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
➤ Lain-Lain Pendapatan	➤ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	➤ Pemberian Pinjaman Daerah
	Belanja Tidak Terduga	➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
	Belanja Transfer	
	➤ B. Bagi Hasil	
	➤ B. Bantuan Keuangan	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan

masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

Gambaran pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang sudah disesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana uraian berikut ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap : 1) penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah; serta 2) pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Ciamis

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan %
	2016	2017	2018	2019	2020 (un audited)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	54.483.343.101,00	61.723.256.810,00	66.586.825.750,00	70.481.801.268,00	64.966.701.051,00	6,56
Pendapatan Retribusi Daerah	15.770.601.671,00	17.336.050.741,56	8.307.077.599,00	10.417.537.847,88	8.110.809.967,00	(18,37)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.501.875.937,00	3.672.522.161,00	3.983.637.549,00	3.444.500.119,00	3.676.875.983,00	2,61
Lain-lain PAD yang Sah	131.003.614.110,60	140.344.190.196,00	155.733.129.317,00	179.936.529.028,64	177.437.937.019,16	7,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	204.759.434.819,60	223.076.019.908,56	234.610.670.215,00	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16	6,47
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
Dana Bagi Hasil Pajak	53.757.014.103,00	47.118.173.010,00	40.362.675.200,00	30.851.002.240,00	48.009.720.582,00	2,25
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	20.088.440.795,00	26.899.242.252,00	24.333.314.822,00	24.325.666.380,00	38.094.200.052,00	6,40
Dana Alokasi Umum	1.203.476.252.000,00	1.182.335.044.000,00	1.156.616.512.412,00	1.212.593.846.191,00	1.112.349.718.000,00	(0,91)
Dana Alokasi Khusus	392.350.546.400,00	458.200.018.318,00	406.235.912.431,00	525.684.724.493,00	430.646.331.128,00	(5,09)
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan	1.669.672.253.298,00	1.714.552.477.580,00	1.627.548.414.865,00	1.793.455.239.304,00	1.629.099.969.762,00	(1,26)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA						
Dana Insentif Daerah	6.243.578.000,00	54.300.368.000,00	25.750.000.000,00	20.410.087.000,00	32.046.038.000,00	28,09
Dana Desa	167.842.952.000,00	213.818.690.000,00	217.285.506.000,00	254.518.375.800,00	260.240.548.000,00	15,39
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya	174.086.530.000,00	268.119.058.000,00	243.035.506.000,00	274.928.462.800,00	292.286.586.000,00	19,52
TRANSFER ANTAR DAERAH - PEMERINTAH PROVINSI						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	102.881.726.955,00	110.568.504.539,00	116.228.963.438,00	124.171.550.133,00	115.879.317.000,00	2,22
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	212.334.095.983,00	152.491.904.842,00	240.196.907.391,00	377.798.831.182,00	204.206.707.634,00	(10,41)
Jumlah Transfer Antar Daerah - Pemerintah Provinsi	315.215.822.938,00	263.060.409.381,00	356.425.870.829,00	501.970.381.315,00	320.086.024.634,00	(4,39)
Jumlah Pendapatan Transfer	2.158.974.606.236,00	2.245.731.944.961,00	2.227.009.791.694,00	2.570.354.083.419,00	2.241.472.580.396,00	0,79

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan %
	2016	2017	2018	2019	2020 (un audited)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
Pendapatan Hibah	9.120.171.979,00	113.358.080.000,00	111.988.960.000,00	116.532.800.000,00	124.567.805.014,00	35,64
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.120.171.979,00	113.358.080.000,00	111.988.960.000,00	116.532.800.000,00	124.567.805.014,00	35,64
JUMLAH PENDAPATAN	2.372.854.213.034,60	2.582.166.044.869,56	2.573.609.421.909,00	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16	2,26
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	1.114.677.891.248,00	1.076.967.925.376,00	1.167.699.550.523,00	1.106.301.199.874,00	1.019.980.756.757,00	(2,57)
Belanja Barang	364.730.494.839,00	459.261.919.131,00	472.340.879.588,00	564.064.246.741,00	606.474.135.846,00	7,25
Bunga	-	1.030.165.684,00	465.833.334,00	-	-	(4,23)
Subsidi	16.988.040.000,00	15.289.200.000,00	-	-	-	1,78
Hibah	69.179.266.200,00	118.093.363.200,00	109.742.836.000,00	78.296.043.000,00	88.975.619.900,00	7,45
Bantuan Sosial	4.341.000.000,00	4.613.500.000,00	4.813.500.000,00	7.671.250.000,00	32.057.000.000,00	28,03
Jumlah Belanja Operasi	1.569.916.692.287,00	1.675.256.073.391,00	1.755.062.599.445,00	1.756.332.739.615,00	1.747.487.512.503,00	1,49
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	2.227.951.489,00	3.102.214.000,00	1.285.506.600,00	5.509.844.030,00	7.528.738.062,00	(32,87)
Belanja Peralatan dan Mesin	46.929.202.309,00	60.796.748.097,00	67.529.655.436,00	77.746.440.501,00	119.193.660.017,00	(3,28)
Belanja Gedung dan Bangunan	173.911.926.720,00	138.811.210.669,00	129.019.045.803,00	170.944.095.718,00	101.745.576.531,00	(11,29)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.001.181.395,00	220.706.546.451,00	214.461.211.025,00	208.157.849.789,00	147.506.526.166,00	(13,13)
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	30.078.899.255,00	57.958.602.729,00	40.825.855.686,00	21,23
Belanja Aset Lainnya	26.683.037.361,00	28.754.739.593,00	-	-	-	16,05
Jumlah Belanja Modal	549.753.299.274,00	452.171.458.810,00	442.374.318.119,00	520.316.832.767,00	416.800.356.462,00	(4,65)
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.885.958.000,00	6.195.717.564,00	6.828.909.000,00	3.427.646.147,00	4.176.655.488,00	(11,18)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	335.250.722.387,00	392.434.214.256,00	398.649.642.118,00	412.557.794.569,00	497.851.149.613,00	15,12
Jumlah Belanja Transfer	341.136.680.387,00	398.629.931.820,00	405.478.551.118,00	415.985.440.716,00	502.027.805.101,00	14,85
JUMLAH BELANJA	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00	2,73
SURPLUS/ (DEFISIT)	(87.952.458.913,40)	56.108.580.848,56	(29.306.046.773,00)	258.532.238.584,52	(46.082.964.635,84)	278,08

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan %
	2016	2017	2018	2019	2020 (un audited)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Penggunaan SiLPA	115.584.468.595,00	8.645.264.189,60	47.311.037.288,16	7.121.270.115,16	245.707.413.260,68	(330,85)
Pencairan Dana Cadangan	-	12.500.000.000,00	-	-	-	20,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	51.540.496.987,00	25.000.000.000,00	6.965.700.700,00	6.455.458.500,00	(54,59)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16	252.162.871.760,68	(82,04)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.330.171.979,00	6.490.000.000,00	4.400.000.000,00	5.500.000.000,00	4.580.000.000,00	(12,21)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	630.684.473,00	52.187.691.629,00	25.669.161.400,00	7.367.964.789,00	6.755.566.525,00	(50,90)
Pembayaran Pengembalian Penerimaan	25.889.040,00	-	-	-	-	20,00
Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	22.805.613.108,00	5.814.559.000,00	14.043.831.350,00	111.027.133.652,00	(9,25)
Pembayaran Ganti Rugi	-	-	-	-	961.100.000,00	20,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.986.745.492,00	81.483.304.737,00	35.883.720.400,00	26.911.796.139,00	123.323.800.177,00	8,18
PEMBIAYAAN NETTO	96.597.723.103,00	(8.797.543.560,40)	36.427.316.888	(12.824.825.323,84)	128.839.071.583,68	353,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	8.645.264.189,60	47.311.037.288,16	7.121.270.115,16	245.707.413.260,68	82.756.106.947,84	(363,88)

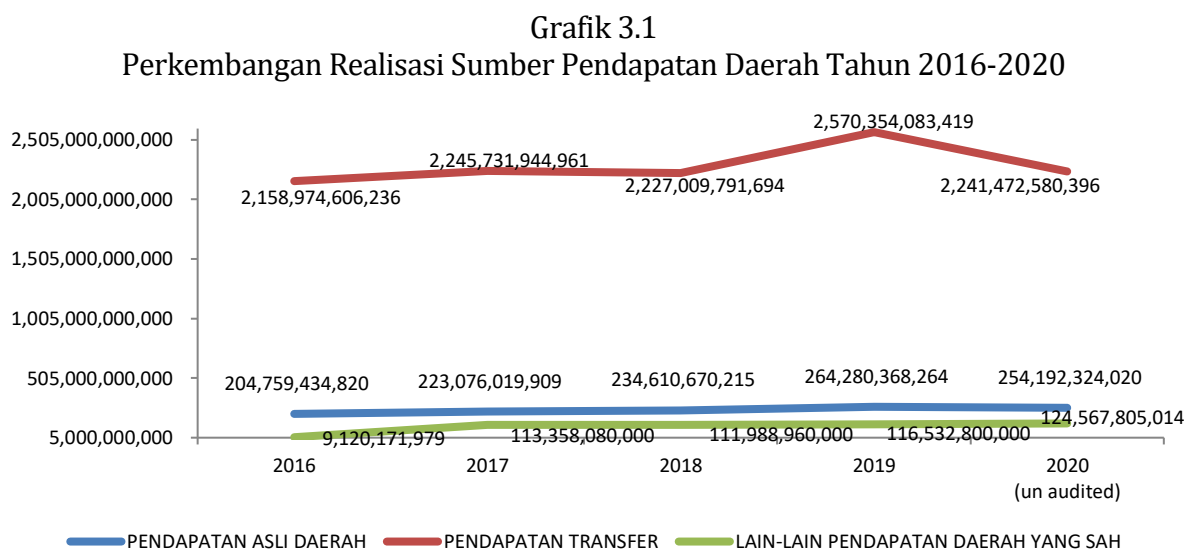
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Ciamis dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan persentase rata-rata pertumbuhan 2,26%. Adapun apabila dianalisis berdasarkan sumber pendapatan paling besar berasal dari Dana Transfer, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79%. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendapatan terbesar, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap pemerintah pusat dari segi pendapatan masih sangat besar. Sumber lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,47%,

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,64%.

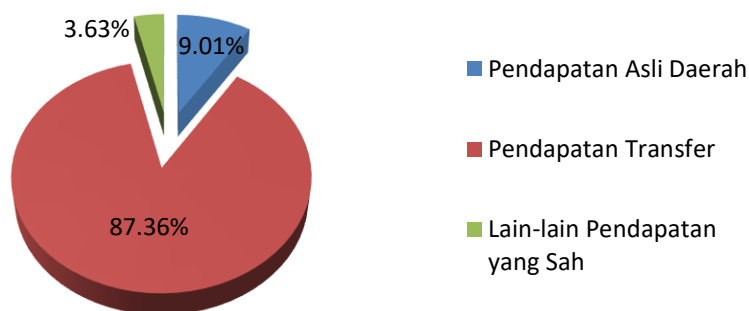
Perkembangan realisasi dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

Berikut ini disajikan gambar rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Grafik 3.2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020



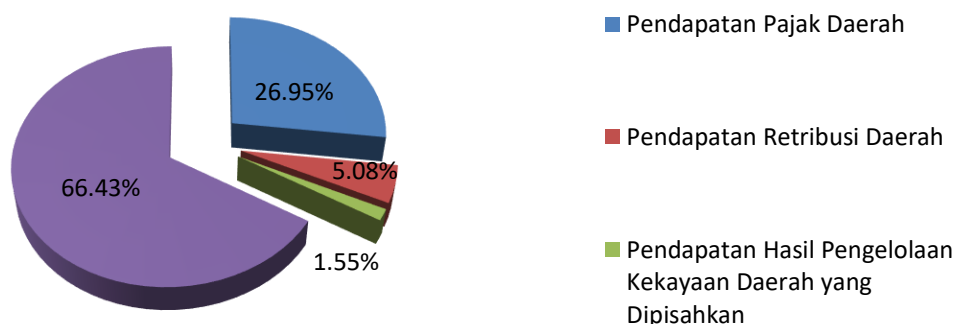
Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Pendapatan Transfer yaitu rata-rata sebesar 87,36%, Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 9,01%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 3,63%.

Rincian dari Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 66,43. Sisanya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 26,95%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 5,08%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1,55%.

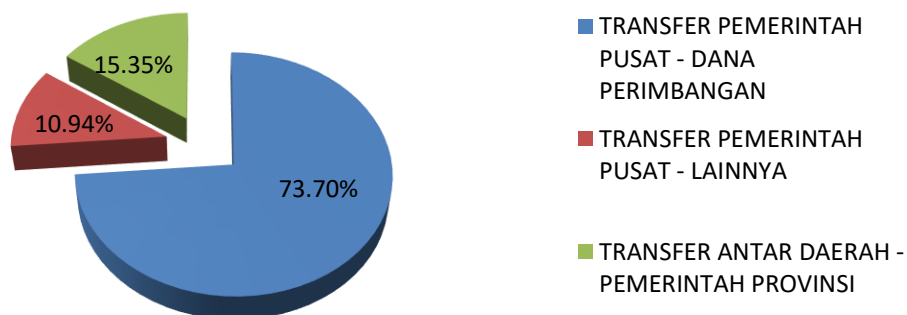
Grafik 3.3
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020



2) Pendapatan Transfer

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Transfer tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yaitu sebesar 73,70%. Sisanya terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar 10,94%, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 15,35%.

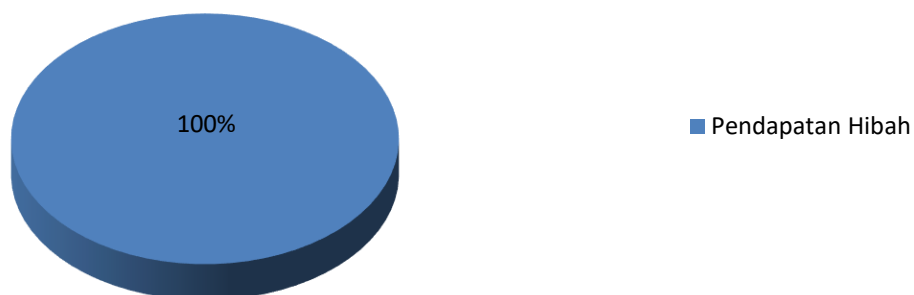
Grafik 3.4
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer
Tahun 2016-2020



3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu berasal dari pendapatan hibah sebesar 100%.

Grafik 3.5
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2016-2020



b. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga diuraikan kinerja APBD dari sisi realisasi belanja daerah. Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi yang terdiri atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal yang terdiri atas jenis Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga yang terdiri atas jenis Belanja Tidak Terduga; dan
- 4) Belanja Transfer yang terdiri atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,73%. Belanja Transfer mengalami kenaikan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,85%. Komponen Belanja Transfer terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,12%.

Sedangkan dari komponen Belanja Operasi dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49%. Komponen Belanja Operasi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu pada Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,03%, kenaikan tersebut karena adanya kenaikan realisasi yang cukup signifikan di tahun 2020 sebesar Rp24.385.750.000,00 yaitu untuk jaring pengaman sosial/*social safety net* dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi *Covid-19* tahun 2020.

Pada kurun waktu tahun 2016-2020 tidak ada realisasi Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk Belanja Modal mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan (4,65%). Adapun gambaran perkembangan realisasi kemampuan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6
Perkembangan Realisasi Kemampuan Belanja Daerah



c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk Pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan data pembiayaan pada Tabel 3.1 diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan neto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 353,81%. Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar (82,04%), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,18%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Ciamis serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertum- buan %
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	9.842.236.305,60	47.311.047.288,16	7.121.270.115,16	245.710.863.758,68	82.756.106.947,84	(336,93)
Kas Daerah	4.637.243.450,60	39.350.540.488,16	2.347.176.794,16	227.110.477.605,84	65.282.381.423,84	(726,08)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	618.500,00	-	-	-	20,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.657.636,00	10.000,00	-	3.450.498,00	-	(3.468,87)
Kas di BLUD	3.998.747.261,00	7.184.244.444,00	3.551.075.882,00	11.683.464.510,84	15.073.417.141,00	(16,07)
Kas di Bendahara Dana Kapitasi	9.273.478,00	-	-	-	-	(21.384,36)
Kas di Kas Lainnya-Kas di Bendahara BOS	1.195.314.480,00	775.633.856,00	1.223.017.439,00	6.913.471.144,00	2.400.308.383,00	(46,30)
PIUTANG	66.340.387.240,01	39.249.719.711,21	51.324.324.920,96	65.038.735.039,40	13.552.912.308,50	(67,24)
Piutang Pajak	7.196.233.204,40	9.243.206.293,40	11.330.854.675,40	12.999.912.382,40	16.093.606.308,90	18,47
<i>Penyisihan</i>	<i>(1.853.507.970,66)</i>	<i>(1.944.560.540,95)</i>	<i>(2.369.726.207,00)</i>	<i>(3.288.438.115,00)</i>	<i>(5.248.232.063,40)</i>	23,36
Piutang Retribusi	1.957.278.615,60	5.390.186.743,14	3.088.136.903,00	3.352.877.903,00	3.392.520.903,00	6,15
<i>Penyisihan</i>	<i>(386.889.930,26)</i>	<i>(1.845.499.175,00)</i>	<i>(2.658.026.933,00)</i>	<i>(3.220.507.403,00)</i>	<i>(3.353.076.118,00)</i>	45,86
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.159.263.316,24	26.160.119.437,70	49.251.211.321,12	62.429.379.122,00	8.017.118.441,00	(112,28)
<i>Penyisihan</i>	<i>(3.756.599.053,83)</i>	<i>(3.979.372.279,31)</i>	<i>(13.404.137.313,56)</i>	<i>(20.379.925.973,00)</i>	<i>(5.369.316.093,00)</i>	(25,87)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum- buhan %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil	32.823.373.000,00	-	-	8.428.443.031,00	-	40,00
<i>Penyisihan</i>	<i>(164.116.865,00)</i>	-	-	<i>(42.142.215,00)</i>	-	40,00
Piutang Dana Bagi Hasil	5.353.402.548,00	6.229.201.953,00	6.085.637.382,00	4.761.918.701,00	-	4,06
<i>Penyisihan</i>	<i>(26.767.012,74)</i>	<i>(31.146.009,77)</i>	<i>(30.428.187,00)</i>	<i>(23.809.594,00)</i>	-	4,06
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.237.000,00	53.637.000,00	52.737.000,00	53.872.000,00	56.747.000,00	0,17
<i>Penyisihan</i>	<i>(35.556.995,00)</i>	<i>(33.291.295,00)</i>	<i>(32.675.220,00)</i>	<i>(32.844.800,00)</i>	<i>(36.456.070,00)</i>	(0,03)
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	22.304.559,00	22.304.559,00	22.304.559,00	22.304.559,00	22.304.559,00	-
<i>Penyisihan</i>	<i>(22.304.559,00)</i>	<i>(22.304.559,00)</i>	<i>(22.304.559,00)</i>	<i>(22.304.559,00)</i>	<i>(22.304.559,00)</i>	0,67
Bagian Lancar Piutang TGR	507.166.300,33	410.185.233,00	1.526.978.295,00	1.485.642.936,00	1.476.452.027,00	9,59
<i>Penyisihan</i>	<i>(489.128.917,08)</i>	<i>(402.947.649,00)</i>	<i>(1.516.236.795,00)</i>	<i>(1.485.642.936,00)</i>	<i>(1.476.452.027,00)</i>	10,79
Piutang Tagihan Kelebihan JKKJKM	-	-	-	-	-	-
<i>Penyisihan</i>	-	-	-	-	-	-
PIUTANG LAIN-LAIN	91.006.500,00	95.883.575,00	45.956.925,00	127.177.050,00	116.354.000,00	(82,60)
Piutang Sewa	93.630.000,00	99.805.000,00	49.115.000,00	136.550.000,00	137.125.000,00	9,65
<i>Penyisihan</i>	<i>(2.623.500,00)</i>	<i>(3.921.425,00)</i>	<i>(3.158.075,00)</i>	<i>(9.372.950,00)</i>	<i>(20.771.000,00)</i>	45,34
Asuransi dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Talangan BI pada BPR/BKPD/LPK-BBKU	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana DPM-LUEP	797.618.372,00	523.681.905,00	446.119.982,00	405.029.077,00	348.210.896,00	(19,51)
<i>Penyisihan</i>	<i>(797.618.372,00)</i>	<i>(523.681.905,00)</i>	<i>(446.119.982,00)</i>	<i>(405.029.077,00)</i>	<i>(348.210.896,00)</i>	(9,37)
Piutang Dana Dakabalarea	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Talangan Raskin	-	-	-	-	-	-
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-	30.000.000,00	-	96.337.500,00	132.555.494,00	45,46
Beban sewa dibayar dimuka	-	30.000.000,00	-	96.337.500,00	132.555.494,00	45,46
PERSEDIAAN	16.301.865.193,47	22.235.715.753,34	27.396.811.156,92	86.264.683.744,20	70.067.634.939,56	3,90

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum- buan %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Persediaan Habis Pakai	462.023.831,00	558.135.523,00	1.034.386.072,00	1.788.111.790,66	3.019.489.282,24	(63,91)
Persediaan Tak Habis Pakai	-	-	566.524.240,00	95.659.575,00	-	(78,45)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	15.839.841.362,47	21.677.580.230,34	25.795.900.844,92	84.380.912.378,54	67.048.145.657,32	5,36
Jumlah Aset Lancar	92.575.495.239,08	108.922.366.327,71	85.888.363.118,04	397.237.797.092,28	166.625.563.689,90	(30,57)
INVESTASIJANGKAPANJANG						
INVESTASI NON PERMANEN	-	-	-	-	-	-
Investas Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
INVESTASI PERMANEN	65.785.189.599,81	72.705.641.199,01	71.538.479.314,93	67.755.468.755,37	69.688.552.585,65	4,31
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.785.189.599,81	72.705.641.199,01	71.538.479.314,93	67.755.468.755,37	69.688.552.585,65	4,31
Jumlah Investasi Jangka Panjang	65.785.189.599,81	72.705.641.199,01	71.538.479.314,93	67.755.468.755,37	69.688.552.585,65	4,31
ASET TETAP	2.948.849.888.731,00	2.555.913.910.845,41	2.894.181.934.084,13	3.280.495.250.629,65	3.480.851.651.372,84	7,25
Tanah	267.410.467.159,96	260.424.368.559,96	261.609.111.559,96	296.632.267.539,96	302.696.486.527,96	2,97
Gedung dan Bangunan	1.359.568.779.383,97	1.395.034.096.569,40	688.055.223.680,57	721.919.956.144,84	857.515.078.363,15	(13,28)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.993.788.527.620,00	2.199.293.405.561,00	1.520.941.627.568,42	1.675.849.654.473,19	1.761.630.532.641,92	(1,00)
Peralatan dan Mesin	577.419.020.293,37	620.277.879.332,42	2.446.193.269.094,41	2.748.853.055.761,01	2.929.876.048.958,01	22,23
Aset Tetap Lainnya	132.631.509.794,95	135.201.761.243,21	152.418.271.700,41	153.284.446.363,24	162.100.983.582,39	7,47
Konstruksi dalam Pengerjaan	45.215.713.100,00	43.941.668.850,00	40.007.589.850,00	40.122.921.350,41	48.453.540.919,41	17,15
<i>Penyusutan</i>	<i>(1.427.184.128.621,25)</i>	<i>(2.098.259.269.270,58)</i>	<i>(2.215.043.159.369,64)</i>	<i>(2.356.167.051.003,00)</i>	<i>(2.581.421.019.620,00)</i>	10,15
Jumlah Aset Tetap	2.948.849.888.731,00	2.555.913.910.845,41	2.894.181.934.084,13	3.280.495.250.629,65	3.480.851.651.372,84	7,25
DANA CADANGAN	12.531.522.710,00	10.831.501,00	10.941.831,00	-	-	(23.102,82)
Dana Cadangan	12.531.522.710,00	10.831.501,00	10.941.831,00	-	-	(23.102,82)
Jumlah Dana Cadangan	12.531.522.710,00	10.831.501,00	10.941.831,00	-	-	(23.102,82)
ASET LAINNYA	24.249.866.587,17	19.119.700.794,36	10.579.919.248,71	6.571.452.222,33	2.354.765.388,47	(62,44)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum- buhan %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
<i>Penyisihan</i>	-	-	-	-	-	-
Bagian Jangka Panjang Piutang TGR	1.114.843.699,67	1.110.927.033,00	-	-	-	(2,65)
<i>Penyisihan</i>	-	-	-	-	-	-
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	83.870.000,00	25.190.000,00	28.150.000,00	81.775.000,00	5.650.000,00	(285,22)
<i>Penyisihan</i>	-	-	-	-	-	-
Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	60.480.000,00	47.040.000,00	32.480.000,00	17.680.000,00	5.200.000,00	(83,87)
<i>Penyisihan</i>	-	-	-	-	-	-
Piutang BPR/BKPD/LPKBBKU	5.470.672.591,41	5.409.032.311,41	5.390.802.364,41	5.376.018.066,41	5.374.800.602,41	(0,87)
<i>Penyisihan</i>	(5.470.672.591,41)	(5.409.032.311,41)	(5.390.802.364,41)	(5.376.018.066,41)	(5.374.800.602,41)	(0,87)
Piutang Dakabalarea	427.119.062,00	5.864.966,00	4.592.239,00	1.813.279,00	995.098,00	(1.500,42)
<i>Penyisihan</i>	(427.119.062,00)	(5.864.966,00)	(4.592.239,00)	(1.813.279,00)	(995.098,00)	(1.500,42)
Aset Tidak Berwujud	21.283.043.891,97	22.599.026.891,97	24.880.230.185,97	26.282.960.697,33	22.172.700.662,47	12,88
<i>Amortisasi</i>	(5.257.258.937,26)	(9.528.432.715,26)	(14.364.760.937,26)	(19.810.963.475,00)	(19.828.785.274,00)	37,04
Aset Lain-lain	34.869.950.498,46	32.073.506.001,97	31.074.494.960,96	118.731.921.094,92	115.120.889.845,34	10,53
<i>Penyusutan</i>	(27.905.062.565,67)	(27.207.556.417,33)	(31.070.674.960,96)	(118.731.921.094,92)	(115.120.889.845,34)	14,94
Jumlah Aset Lainnya	24.249.866.587,17	19.119.700.794,36	10.579.919.248,71	6.571.452.222,33	2.354.765.388,47	(62,44)
JUMLAH ASET	3.143.991.962.867,06	2.756.672.450.667,48	3.062.199.637.596,81	3.752.059.968.699,63	3.719.520.533.036,86	6,60
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.737.192.136,36	74.126.489.918,76	78.633.162.781,11	171.977.346.611,87	63.055.824.632,25	(18,71)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	1.657.636,00	10.000,00	-	3.450.498,00	-	(3.255,27)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Utang Belanja	41.532.996.255,00	30.679.095.291,96	61.677.089.499,96	170.997.739.595,72	49.589.844.725,10	(14,36)
Penerimaan Diterima Dimuka	188.566.212,21	430.073.829,65	363.877.583,00	676.048.493,00	673.460.879,00	(14,12)
Utang kepada PTAskes/BPJS	43.523.628.633,00	42.523.649.397,00	16.078.169.809,00	-	12.675.662.228,00	(13,81)
Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU	490.343.400,15	493.661.400,15	514.025.889,15	300.108.025,15	116.856.800,15	(50,29)
Utang Bank Garansi	Z	-	-	-	-	-
Utang Lainnya	-	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.105.849.672,85	3.612.188.272,85	3.100.162.383,85	1.740.863.050,18	1.624.006.250,18	(25,48)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum- buhan %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Utang Dalam Negeri	4.105.849.672,85	3.612.188.272,85	3.100.162.383,85	1.740.863.050,18	1.624.006.250,18	(25,48)
Jumlah Kewajiban	89.843.041.809,21	77.738.678.191,61	81.733.325.164,96	173.718.209.662,05	64.679.830.882,43	(18,72)
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	-
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Lancar	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Dana yang harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	3.054.148.921.057,85	2.678.933.772.475,87	2.980.466.312.431,85	3.578.341.759.037,58	3.654.840.702.154,43	6,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.143.991.962.867,06	2.756.672.450.667,48	3.062.199.637.596,81	3.752.059.968.699,63	3.719.520.533.036,86	6,60

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

1) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami tren penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Penurunan signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada komponen Piutang Lain-lain. Investasi tren pertumbuhan yang meningkat pada komponen piutang.

2) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar (18,72%), dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek sebesar (18,71%), sedangkan kewajiban jangka panjang mengalami penurunan rata-rata sebesar (25,48%).

3) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Ciamis selama tahun 2016-2020 naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,82%. Berdasarkan dari neraca Kabupaten Ciamis periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar (current ratio)	1,03	1,40	1,05	2,29	2,58
2	Rasio cepat (quick ratio)	0,85	1,12	0,72	1,79	1,49
3	Rasio total hutang terhadap total asset	2,86	2,82	2,67	4,63	1,74
4	Rasio hutang terhadap modal	2,94	2,90	2,74	4,85	1,77

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini:

A. Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 1,03 dan tahun 2020 sebesar 2,58.

B. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick* rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 0,85 serta periode tahun 2020 quick rasio sebesar 1,49 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

C. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 2,86 dan pada tahun 2020 sebesar 1,74 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 2,94 serta periode tahun 2020 sebesar 1,77 Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Ciamis, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD

Selain pendanaan dari APBD Kabupaten Ciamis, pembangunan di daerah Kabupaten Ciamis juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Kabupaten Ciamis, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Ciamis selain bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, juga memperoleh dukungan dari APBN. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.4
Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama)
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Tugas Pembantuan (Rp)			Urusan Bersama (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2016	31.739.227.000,00	24.447.462.732,00	77,03	-
2	2017	22.177.770.000,00	12.228.822,380,00	55,14	-
3	2018	-	-	-	-
4	2019	-	-	-	-
5	2020	9.802.527.000,00	9.752.743.585,00	99,49	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Ciamis, 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN di Kabupaten Ciamis pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sangat fluktuatif dan cenderung menurun, bahkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Kabupaten Ciamis tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disebabkan tidak adanya Dana Urusan Bersama yang disalurkan ke Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari APBN Tahun 2016, paling besar digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan nilai pagu anggaran Rp 27,94 Miliar untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan. Selain itu juga digunakan untuk Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan nilai pagu anggaran Rp 1,92 Miliar untuk penyediaan benih bibit dan peningkatan produksi ternak.

Pada Tahun 2017, dana Tugas Pembantuan paling besar digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dan Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan nilai pagu anggaran Rp 15,23 Miliar. Selain itu juga digunakan untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri untuk pembangunan pasar rakyat yang direvitalisasi dengan nilai pagu anggaran Rp 6 Miliar.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa dana Transfer yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.5
Perkembangan Pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan)
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	215.993.816.675	212.334.095.983	98,31
2	2017	165.915.047.200	152.491.904.842	91,91
3	2018	243.362.748.200	240.196.907.391	98,70
4	2019	390.206.310.600	377.798.831.182	96,82
5	2020	208.384.274.234	204.206.707.634	98,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan) di Kabupaten Ciamis pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pendanaan terkecil pada tahun 2017 dan penerimaan pendanaan terbesar pada tahun 2019, namun demikian realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif tinggi dengan rata-rata penyerapan realisasi sebesar 96,75%.

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Ciamis yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel 3.6
Perkembangan Pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Realisasi Dana PKBL	Realisasi Dana TJSL	Jumlah
1	2016	289.238.723	*)	289.238.723
2	2017	337.822.734	*)	337.822.734
3	2018	335.930.395	*)	335.930.395
4	2019	249.700.000	1.970.655.718	2.220.355.718
5	2020	105.000.000	1.958.454.525	2.063.452.525

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, 2021, diolah

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Ciamis yang bersumber dari PKBL dan TJSJ berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan terutama pada tahun 2019 meningkat signifikan dengan adanya tambahan dana TJSJ sehingga jumlah dana PKBL dan TJSJ yang direalisasikan dari sebesar Rp335.930.395,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.220.355.718,00 pada tahun 2019. Sumber pendanaan PKBL dan TJSJ yang diterima Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah dari Bank Jabar Banten dan Bank Indonesia Tasikmalaya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan cara:

- a. Memantapkan kelembagaan.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan, OPD Penghasil, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- d. Mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sistem yang terintegrasi.
- f. Mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- g. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Adapun upaya-upaya pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Ciamis ditempuh melalui:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- c. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan, OPD Penghasil, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- e. Mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- f. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- g. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah ditempuh dengan:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan.

2. Kebijakan Belanja

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu:

- a. Prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah.
- b. Prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.
- c. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2020) mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,73 persen. Kebijakan Belanja Daerah tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliputi:

- a. Program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 dan periode tahun pertama RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024;
- b. Pemenuhan realisasi Janji Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014-2019.
- c. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan), yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 adalah bersumber dari SiLPA tahun 2015.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pembayaran pinjaman daerah. Kebijakan pembiayaan adalah:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelum (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2. Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan;
4. Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta Rakyat) dengan skema memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah;
5. Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis;
6. Dana cadangan daerah untuk pelaksanaan Pemilukada serentak;

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Ciamis bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ciamis pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Ciamis, yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			RATA-RATA %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI (Un Audited)	%	
Belanja Daerah	2.647.585.765.822	2.460.806.671.948	92,95	2.633.973.059.575	2.526.057.464.021	95,90	2.628.316.861.793	2.602.915.468.682	99,03	2.974.005.508.872	2.692.635.013.098	90,54	2.790.162.692.913	2.666.315.674.066	95,56	94,80
BELANJA OPERASI	1.717.215.751.118	1.569.167.729.087	91,38	1.748.756.912.098	1.674.507.110.191	95,75	1.747.808.326.866	1.753.610.863.445	100,33	1.882.959.635.348	1.754.867.096.615	93,20	1.849.580.448.023	1.745.925.142.603	94,40	95,01
Belanja pegawai	1.321.271.656.317	1.195.159.427.503	90,46	1.224.067.768.108	1.175.438.475.552	96,03	1.216.621.951.722	1.240.938.263.510	102,00	1.245.547.013.799	1.193.029.119.629	95,78	1.190.840.513.481	1.133.956.625.450	95,22	95,90
Belanja barang dan jasa	304.644.804.801	284.248.958.584	93,31	383.381.247.307	360.791.368.955	94,11	415.370.941.810	399.102.166.601	96,08	533.874.503.149	477.336.326.986	89,41	535.971.734.542	492.498.267.153	91,89	92,96
Belanja bunga	-	-	-	1.393.096.683	1.030.165.684	73,95	465.833.334	465.833.334	100,00	-	-	-	-	-	-	86,97
Belanja subsidi	16.988.090.000	16.988.040.000	100,00	15.500.000.000	15.289.200.000	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,32
Belanja hibah	69.785.200.000	68.430.303.000	98,06	119.344.800.000	117.344.400.000	98,32	110.190.600.000	108.291.100.000	98,28	95.408.368.400	76.830.400.000	80,53	89.042.600.000	87.413.250.000	98,17	94,67
Belanja bantuan sosial	4.526.000.000	4.341.000.000	95,91	5.070.000.000	4.613.500.000	91,00	5.159.000.000	4.813.500.000	93,30	8.129.750.000	7.671.250.000	94,36	33.725.600.000	32.057.000.000	95,05	93,92
BELANJA MODAL	585.177.129.419	549.753.299.274	93,95	481.045.653.039	452.171.458.810	94,00	469.187.662.261	442.374.318.119	94,29	641.438.720.424	520.316.832.767	81,12	434.140.664.240	416.800.356.462	96,01	91,87
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.250.125.350	-	-	3.000.000.000	-	-	3.856.666.666	-	-	10.000.000.000	-	-	2.500.000.000	-	-	-
BELANJA TRANSFER	342.942.759.935	341.885.643.587	99,69	401.170.494.438	399.378.895.020	99,55	407.464.206.000	406.930.287.118	99,87	439.607.153.100	417.451.083.716	94,96	503.941.580.650	503.590.175.001	99,93	98,80
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahandesa	6.832.988.335	5.885.958.000	86,14	7.100.000.000	6.195.717.564	87,26	6.900.000.000	6.828.909.000	98,97	4.600.000.000	3.427.646.147	74,51	4.253.948.000	4.176.655.488	98,18	89,01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	336.109.771.600	335.999.685.587	99,97	394.070.494.438	393.183.177.456	99,77	400.564.206.000	400.101.378.118	99,88	435.007.153.100	414.023.437.569	95,18	499.687.632.650	499.413.519.513	99,95	98,95
Jumlah Belanja	2.647.585.765.822	2.460.806.671.948	92,95	2.633.973.059.575	2.526.057.464.021	95,90	2.628.316.861.793	2.602.915.468.682	99,03	2.974.005.508.872	2.692.635.013.098	90,54	2.790.162.692.913	2.666.315.674.066	95,56	94,80

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.4 rata-rata persentase Anggaran Belanja terhadap Realisasi Belanja dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 94,80% yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,01%, Belanja Modal sebesar 91,87%, Belanja Transfer sebesar 98,80% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0% karena belum ada realisasi.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ciamis ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020 (un Audited)	Rata-Rata Pertum- buan (%)
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	1.114.677.891.248,00	1.076.967.925.376,00	1.167.699.550.523,00	1.106.301.199.874,00	1.019.980.756.757,00	(2,57)
Belanja Barang	364.730.494.839,00	459.261.919.131,00	472.340.879.588,00	564.064.246.741,00	606.474.135.846,00	7,25
Bunga	-	1.030.165.684,00	465.833.334,00	-	-	(4,23)
Subsidi	16.988.040.000,00	15.289.200.000,00	-	-	-	1,78
Hibah	69.179.266.200,00	118.093.363.200,00	109.742.836.000,00	78.296.043.000,00	88.975.619.900,00	7,45
Bantuan Sosial	4.341.000.000,00	4.613.500.000,00	4.813.500.000,00	7.671.250.000,00	32.057.000.000,00	28,03
Jumlah Belanja Operasi	1.569.916.692.287,00	1.675.256.073.391,00	1.755.062.599.445,00	1.756.332.739.615,00	1.747.487.512.503,00	1,49
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	2.227.951.489,00	3.102.214.000,00	1.285.506.600,00	5.509.844.030,00	7.528.738.062,00	(32,87)
Belanja Peralatan dan Mesin	46.929.202.309,00	60.796.748.097,00	67.529.655.436,00	77.746.440.501,00	119.193.660.017,00	(3,28)
Belanja Gedung dan Bangunan	173.911.926.720,00	138.811.210.669,00	129.019.045.803,00	170.944.095.718,00	101.745.576.531,00	(11,29)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.001.181.395,00	220.706.546.451,00	214.461.211.025,00	208.157.849.789,00	147.506.526.166,00	(13,13)
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	30.078.899.255,00	57.958.602.729,00	40.825.855.686,00	21,23
Belanja Aset Lainnya	26.683.037.361,00	28.754.739.593,00	-	-	-	16,05
Jumlah Belanja Modal	549.753.299.274,00	452.171.458.810,00	442.374.318.119,00	520.316.832.767,00	416.800.356.462,00	(4,65)
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
BELANJA TRANSFER						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020 (un Audited)	Rata-Rata Pertum- buan (%)
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.885.958.000,00	6.195.717.564,00	6.828.909.000,00	3.427.646.147,00	4.176.655.488,00	(11,18)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa	335.250.722.387,00	392.434.214.256,00	398.649.642.118,00	412.557.794.569,00	497.851.149.613,00	15,12
Jumlah Belanja Transfer	341.136.680.387,00	398.629.931.820,00	405.478.551.118,00	415.985.440.716,00	502.027.805.101,00	14,85
JUMLAH BELANJA	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00	2,73

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2016	1.114.677.891.248	2.479.793.417.440	44,95
2	2017	1.076.967.925.376	2.607.540.768.758	41,30
3	2018	1.167.699.550.523	2.638.799.189.082	44,25
4	2019	1.106.301.199.874	2.719.546.809.237	40,68
5	2020	1.019.980.756.757	2.789.639.474.243	36,56

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah fluktuatif dari waktu ke waktu. Tahun 2016 persentasenya sebesar 44,95% dan tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan menjadi sebesar 36,56%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk porsi belanja pembangunan ke depan lebih ditingkatkan.

c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan %
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Operasi	1.114.677.891.248	1.076.967.925.376	1.167.699.550.523	1.155.054.362.611	1.105.102.357.036	(4,47)
1	Belanja Pegawai	1.114.677.891.248	1.076.967.925.376	1.167.699.550.523	1.155.054.362.611	1.105.102.357.036	(4,47)
B	Belanja Transfer	341.136.680.387	398.629.931.820	405.478.551.118	443.107.153.100	485.094.513.650	71,74
1	Belanja Bagi Hasil	5.885.958.000	6.195.717.564	6.828.909.000	8.100.000.000	8.100.000.000	41,11
2	Belanja Bantuan Keuangan	335.250.722.387	392.434.214.256	398.649.642.118	435.007.153.100	476.994.513.650	72,25
C	Pengeluaran Pembiayaan	8.330.171.979	6.490.000.000	4.400.000.000	10.921.830.191	5.500.000.000	(23,95)
1	Penyertaan Modal	8.330.171.979	6.490.000.000	4.400.000.000	10.921.830.191	5.500.000.000	(23,95)
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C)	1.464.144.743.614	1.482.087.857.196	1.577.578.101.641	1.609.083.345.902	1.595.696.870.686	15,06

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2016-2020
Kabupaten Ciamis

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya	115.584.468.595,00	8.645.264.189,60	47.311.037.288,16	7.121.270.115,16	245.707.413.260,68
2	Pencairan dana cadangan	-	12.500.000.000,00	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	51.540.496.987,00	25.000.000.000,00	6.965.700.700,00	6.455.458.500,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (penerimaan dana bergulir)	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16	252.162.871.760,68

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021

Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yaitu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Periode Tahun 2016-2020
Kabupaten Ciamis

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	152.279.649.068,00	100,00	8.645.264.187,00	100,00	47.311.047.288,00	100,00	7.121.270.115,00	100,00	245.707.413.260,00	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	8.466.820.024,00	97,94	-	-	3.551.075.882,00	49,87	9.801.223.059,00	3,99
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	10.960.506.800,00	23,17	1.223.017.439,00	17,17	3.000.000.000,00	1,22
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	178.444.163,00	2,06	36.350.540.488,00	76,83	2.347.176.794,00	32,96	232.906.190.201,00	94,79
6	Kegiatan lanjutan	152.279.649.068,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 berdasarkan rata-rata pertumbuhan sebaran pendapatan periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	64.966.701.051,00	67.175.000.000	69.190.250.000	71.265.957.000	73.403.936.000	3,01
Pendapatan Retribusi Daerah	8.110.809.967,00	9.358.558.500	9.629.391.000	9.918.273.000	10.215.821.000	5,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.676.875.983,00	3.700.000.000	3.811.000.000	3.925.330.000	4.043.090.000	2,34
Lain-lain PAD yang Sah	177.437.937.019,16	172.941.441.500	178.139.609.000	183.483.797.000	188.988.311.000	1,54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	254.192.324.020,16	253.175.000.000	260.770.250.000	268.593.357.000	276.651.158.000	2,08
PENDAPATAN TRANSFER						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.921.386.555.762,00	1.955.031.818.000	2.052.783.408.360	2.155.422.578.618	2.263.193.707.899	4,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.086.024.634,00	129.813.381.000	342.092.056.234	346.103.289.234	350.234.859.234	-20,55
Total Pendapatan Transfer	2.241.472.580.396,00	2.084.845.199.000	2.394.875.464.594	2.501.525.867.852	2.613.428.567.133	3,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	124.567.805.014,0	-	128.300.176.393	132.149.181.684	136.113.657.135	26,46
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	124.567.805.014,0	-	128.300.176.393	132.149.181.684	136.113.657.135	26,46
JUMLAH PENDAPATAN	2.620.232.709.430,16	2.338.020.199.000	2.783.945.890.987	2.902.268.406.536	3.026.193.382.268	3,03
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	1.019.980.756.757,00	1.010.760.994.392	1.102.696.575.992	1.135.777.473.272	1.169.850.797.470	3,31
Belanja Barang dan Jasa	606.474.135.846,00	582.736.386.143	564.457.059.932	603.611.759.730	621.720.112.522	0,52
Bunga	-	-	-	-	-	0,00
Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
Hibah	88.975.619.900,00	101.948.608.400	96.669.821.000	93.769.727.000	90.956.636.000	0,27
Bantuan Sosial	32.057.000.000,00	7.340.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-82,12
Jumlah Belanja Operasi	1.747.487.512.503,00	1.702.785.988.935	1.771.823.456.924	1.841.158.960.002	1.890.527.545.992	1,91

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	7.528.738.062,00	4.555.600.000	6.735.882.760	6.937.959.243	7.146.098.020	-6,77
Belanja Peralatan dan Mesin	119.193.660.017,00	56.089.841.940	149.883.857.027	154.380.372.738	159.011.783.920	-11,03
Belanja Gedung dan Bangunan	101.745.576.531,00	34.891.930.025	69.025.891.150	108.186.855.864	111.432.461.540	-25,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.506.526.166,00	101.365.832.500	286.709.028.126	295.310.298.969	324.975.589.264	7,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	40.825.855.686,00	1.059.300.000	1.082.324.000	1.114.793.720	1.148.237.532	-936,52
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	416.800.356.462,00	197.962.504.465	513.436.983.063	565.930.280.534	603.714.170.276	-8,39
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	25,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	25,00
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.176.655.488,00	8.100.000.000	8.343.000.000	8.593.290.000	8.851.088.000	14,29
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	497.851.149.613,00	465.153.455.600	482.140.851.000	496.605.076.000	511.503.228.000	0,58
Jumlah Belanja Transfer	502.027.805.101,00	473.253.455.600	490.483.851.000	505.198.366.000	520.354.316.000	0,81
JUMLAH BELANJA	2.666.315.674.066,00	2.384.001.949.000	2.785.744.290.987	2.922.287.606.536	3.024.596.032.268	2,66
SURPLUS/DEFISIT	(46.082.964.636)	-45.981.750.000	-1.798.400.000	-20.019.200.000	1.597.350.000	-253,19
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
SILPA Tahun Sebelumnya	245.707.413.260,68	20.000.000.000	18.000.000.000	16.200.000.000	14.600.000.000	-290,43
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000	-	25,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.455.458.500,00	50.000.000.000	-	-	-	21,77
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau	-	-	-	-	-	0,00
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	252.162.871.760,68	70.000.000.000	18.000.000.000	31.200.000.000	14.600.000.000	-155,13
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	518.250.000	701.600.000	680.800.000	697.350.000	31,36
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.580.000.000,00	13.500.000.000	-	10.500.000.000	10.500.000.000	41,52
Pembayaran Pokok Utang	6.755.566.525,00	-	10.500.000.000	-	-	25,00
Pembayaran Ganti Rugi	961.100.000,00	-	-	-	-	0,00
Pembayaran Utang Pihak Ketiga	111.027.133.652,00	-	-	-	-	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	25,00
Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	-	-	0,00
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	123.323.800.177,00	24.018.250.000	16.201.600.000	11.180.800.000	16.197.350.000	-118,91
PEMBIAYAAN NETO	128.839.071.583,68	45.981.750.000	1.798.400.000	20.019.200.000	-1.597.350.000	-298,18

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	82.756.106.947,84	-	-	-	-	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama periode 2019-2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. Upaya perbaikan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik terus dioptimalkan melalui proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	7.121.270.115	245.707.413.261	20.000.000.000	18.000.000.000	16.200.000.000	14.600.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2019 sampai dengan 2024 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2014-2018. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2019 sampai dengan periode Tahun 2024 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja Operasi	1.019.980.756.757,00	1.010.760.994.392	1.102.696.575.992	1.135.777.473.272	1.169.850.797.470
1	Belanja Pegawai	1.019.980.756.757,00	1.010.760.994.392	1.102.696.575.992	1.135.777.473.272	1.169.850.797.470

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
B	Belanja Transfer	502.027.805.101	473.253.455.600	490.483.851.000	505.198.366.000	520.354.316.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.176.655.488,00	8.100.000.000	8.343.000.000	8.593.290.000	8.851.088.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	497.851.149.613,00	465.153.455.600	482.140.851.000	496.605.076.000	511.503.228.000
C	Pengeluaran Pembiayaan	4.580.000.000	13.500.000.000	-	10.500.000.000	10.500.000.000
1	Penyertaan Modal	4.580.000.000,00	13.500.000.000	-	10.500.000.000	10.500.000.000
D	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C)	1.526.588.561.858	1.497.514.449.992	1.593.180.426.992	1.651.475.839.272	1.700.705.113.470

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta Belanja Tidak Langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2019-2024 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Ciamis, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13

Tabel 3.16
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi				
		Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	Pendapatan	2.620.232.709.430,16	2.338.020.199.000	2.783.945.890.987	2.902.268.406.536	3.026.193.382.268
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda)	-	-	-	15.000.000.000	-
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	245.707.413.260,68	20.000.000.000	18.000.000.000	16.200.000.000	14.600.000.000
	Total Penerimaan	2.865.940.122.690,84	2.358.020.199.000,00	2.801.945.890.987,00	2.933.468.406.536,00	3.040.793.382.268,00
	Dikurangi :					
4	Belanja Pegawai	1.019.980.756.757,00	1.010.760.994.392	1.102.696.575.992	1.135.777.473.272	1.169.850.797.470
5	Belanja Hibah	88.975.619.900,00	101.948.608.400	96.669.821.000	93.769.727.000	90.956.636.000
6	Belanja Bantuan Sosial	32.057.000.000,00	7.340.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
7	Pengeluaran Pembiayaan	123.323.800.177,00	24.018.250.000	16.201.600.000	11.180.800.000	16.197.350.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.601.602.945.856,84	1.213.952.346.208,00	1.578.377.893.995,00	1.684.740.406.264,00	1.755.788.598.798,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama

sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam peraturan tersebut ini, prioritas anggaran diarahkan untuk Prioritas I secara lebih efisien dan Prioritas II lebih dialokasikan bagi program unggulan daerah untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sedangkan prioritas III dialokasikan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan bobot untuk membiayai prioritas II lebih besar.

Penggunaan kapasitas keuangan Daerah tahun 2020 dan rencana penggunaan kapasitas keuangan Daerah tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2024 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta 8 (delapan) prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut:
 1. Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
 2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
 3. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
 4. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua.
 5. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
 6. Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 7. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni dan budaya.
 8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi.

b. Prioritas II, dialokasikan untuk pemenuhan Program Unggulan Daerah atau janji Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, dan urusan wajib yang tidak termasuk dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Daerah, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024

Uraian	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil kemampuan keuangan	1.601.602.945.856,84	1.213.952.346.208,00	1.578.377.893.995,00	1.684.740.406.264,00	1.755.788.598.798,00
Prioritas I (60%)	960.961.767.514,10	728.371.407.724,80	947.026.736.397,00	1.010.844.243.758,40	1.053.473.159.278,80
Prioritas II (40%)	640.641.178.342,74	485.580.938.483,20	631.351.157.598,00	673.896.162.505,60	702.315.439.519,20

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021

3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Ciamis dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pihak lain.

Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa bantuan keuangan kepada APBD Kabupaten atau langsung ke desa, sedangkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Selain APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Ciamis yang lainnya berasal dari pihak lain (swasta) dengan mensinergikan penyelenggaraan Program TJSJ dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur dengan program pembangunan di Kabupaten Ciamis.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Permasalahan Daerah

A. Pemetaan Permasalahan Daerah

Berdasarkan data pencapaian indikator makro daerah, pencapaian sasaran RPJMD dan pencapaian program di setiap urusan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Bab II, memberikan gambaran sasaran dan program yang telah atau belum mencapai kinerja yang ditargetkan sebagai bahan analisa permasalahan di masa lalu. Selain itu, pada bab II juga disajikan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ciamis tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah, untuk penentuan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan daerah yang telah diintegrasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah KLHS untuk bahan penentuan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Daerah

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Kualitas Pembangunan Manusia Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indikator IPM, pada Tahun 2020 baru mencapai 70,49 point. Dalam 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan yang semakin meningkat, tetapi laju peningkatannya hanya mencapai rata-rata sekitar 0,51% per tahun, dan capaiannya masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan.	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, baik formal maupun informal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.- Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket B, dan Paket C) belum optimal.- Masih rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> • Bila dilihat dari komponen pembentuk IPM : Indeks Pendidikan pada tahun 2020 mencapai 64,72 dengan laju peningkatan dalam 5 tahun terakhir rata-rata sekitar 0,41% per tahun, Indeks Kesehatan pada tahun 2020 mencapai 79,74 dengan laju peningkatannya rata-rata sekitar 0,36% per tahun, Indeks Pengeluaran (Daya Beli) pada tahun 2020 mencapai 67,55 dengan laju peningkatan rata-rata sekitar 0,91% per tahun. • Target APK SD/MI/ sederajat belum tercapai (2019 103,6%; gap 10,49%). Target APK SMP/MTs/ sederajat belum tercapai (2019 99,95%; gap 6,99%). Target RLS belum tercapai (2019 7,69 tahun; gap 1,11 tahun). • Tingkat Prevalensi malnutrisi belum tercapai (2019 4%; target menurun). Target persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif belum tercapai (2019 58,1%, target menurun). • Target Angka Kematian Neonatal (AKN) belum tercapai (2019 7,5; target menurun). • Target Angka Kematian Bayi (AKB) belum tercapai (2019 2,4; gap 2,38). Target prevalensi tekanan darah tinggi belum tercapai (2019 36,1%; gap 11,8%). Target prevalensi obesitas belum tercapai (2019 28,2%; gap 12,8%). • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak 67,02% (2019), sanitasi 63,52% (2019) • Masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan mengakses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. - Perlunya jaminan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya, setara dan berkualitas. - Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula. - Pencegahan kematian bayi baru lahir dan balita belum optimal. - Masih terjadinya kematian dini akibat penyakit tidak menular, perlu pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat (PHBS).
2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Selama tahun 2016-2019 perekonomian daerah mengalami pertumbuhan masing-masing 5,99% (2016), 5,21% (2017), 5,44% (2018), 5,38% (2019) atau mencapai rata-rata pertumbuhan sekitar 5,50% per tahun. Namun pada tahun 2020 sebagai akibat dari dampak covid 19 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis mengalami kontraksi menjadi -0,14 %. • Disisi lain pertumbuhan ekonomi dimaksud belum dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Angka kemiskinan tahun 2016 8,42%, tahun 2017 8,20%, tahun 2018 7,22%, tahun 2019 6,65% dan tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi rakyat (ekonomi kerakyatan) berdasarkan potensi yang tersedia dimana usaha-usaha ekonomi tersebut secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. - Program-program pembangunan ekonomi selama ini tidak fokus, tidak tuntas dan tanggung sehingga kurang dapat mengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. - Sinergitas dalam pembangunan ekonomi sangat lemah (antar sektor, antar sumberdaya, antar wilayah).

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
	<p>akibat <i>covid-19</i> tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,22%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 6,95%, tahun 2017 5,17%, tahun 2018 4,60%, tahun 2019 5,10%, dan tahun 2020 5,66%, demikian pula terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sementara itu Nilai Tukar Petani juga masih relatif rendah (tahun 2019 NTP 113,07) dan kesenjangan ekonomi masih cukup lebar (Indeks Gini tahun 2016 0,33 menjadi 0,33 pada tahun 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur belum memadai. - Sarana dan prasarana perekonomian belum dimanfaatkan secara optimal.
<p>3. Masalah Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan masih tinggi (capaian 2019 6,65%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi (capaian 2019 5,16%) • Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum tercapai (capaian 2019 89,12%; gap 10,88%). • Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi (capaian 2019 73,06%; gap 26,94%) • Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (nilai 2019 39 Miliar; target menurun) • Target prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan belum tercapai (2019 25,2%; gap 16,7%). • Target prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan belum tercapai (2019 58,1%; target menurun) 	<ul style="list-style-type: none"> - Piramida penduduk untuk jumlah penduduk usia > 65 tahun tinggi. - Penanganan kemiskinan dan pengangguran tidak terkoordinasi dengan baik. - Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. - Ketersediaan data kemiskinan kurang akurat. - Pemanfaatan data kemiskinan dalam intervensi program masih rendah. - Akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap pangan yang bergizi masih rendah
<p>4. Menurunnya kontribusi kategori lapangan usaha utama PDRB (pertanian, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya persentase tenaga kerja formal (capaian 2019 33,04) • Belum optimalnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB dan belum optimalnya jumlah wisatawan mancanegara • Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry • Belum optimalnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB • Selama tahun 2014-2018 PAD menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,64% per tahun tetapi masih terlalu rendah; • Proporsi PAD terhadap APBD baru mencapai 9,01%, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih tinggi • Jumlah investasi (PMDN) selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dengan nilai investasi Rp.151,038 M (2014), 173,275 M 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; - Belum optimalnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal; - Akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan integrasi ke dalam rantai nilai pasar masih rendah; - Sistem pemungutan PAD belum efektif dan efisien. Sumber-sumber PAD relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. Data potensi beberapa sumber PAD belum akurat.

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
	(2015), 178 M (2016), 187,734 M (2017), 206,576 M (2018) atau hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 8,20% per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya promosi investasi dan Daya saing investasi masih rendah. - Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). - Data potensi dan peluang investasi belum tersedia secara akurat.
5. Kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya konflik pemetaan ruang • Sampah/limbah belum dikelola dengan baik • Banjir di perkotaan • Ruang Terbuka Hijau / Jalur Hijau Kota kurang terpelihara • Belum optimalnya proporsis tutupan hutan (tahun 2019 12,33%) dan rehabilitasi lahan kritis • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak (2019 67,02%), sanitasi (2019 63,52%), air limbah (komunal), kualitas air baku, sistem informasi air baku (2019 6 wilayah sungai), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai/danau (2019 4). Masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS • Belum optimalnya penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga penanganan sampah perkotaan (2019 67,71%) • Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (2019 25.261 juta) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan masih rendah. - Pengelolaan kawasan pertumbuhan belum dilakukan dengan baik. - Kurangnya pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota khususnya di Pusat-pusat kegiatan ekonomi. Manajemen persampahan/ limbah masih belum optimal. Pengelolaan RTH/Jalur Hijau belum baik. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kota yang tertib, bersih dan asri masih rendah/penataan kawasan kumuh. - Perlunya mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang secara aman; - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan. - Mengurangi jumlah kematian dan kerugian ekonomi relatif yang disebabkan oleh bencana; Mengurangi dampak lingkungan perkotaan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, air dan lahan
6. Pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah belum tumbuh dan berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ekonomi dari Pusat-pusat Kegiatan Lokal belum signifikan. • Kawasan-kawasan strategis Kabupaten (Kawasan Agropolitan, Kawasan Lumbung Padi, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dll) belum berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan yang akan berdampak terhadap perkembangan daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan masih rendah. - Pengelolaan kawasan pertumbuhan belum dilakukan dengan baik. - Sarana dan Prasarana Perkotaan belum memadai (drainase, PJU, TPU, <i>Traffic Light</i>, dll).
7. Kesetaraan Gender, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Anak, peran pemuda, serta pengembangan olahraga, seni dan	<ul style="list-style-type: none"> • Target proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB belum tercapai (2019 0,76%; gap 65,24%) • Target jumlah kebijakan yang responsive gender belum tercapai (2019 2 kebijakan; gap 14 kebijakan) • Target proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk KB, informasi dan pendidikan - Masih terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan - Pencegahan perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
budaya	berstatus hidup bersama belum tercapai (2019 1,41; tujuan menurun) <ul style="list-style-type: none"> • Target proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen belum tercapai (2019 8,08%; target menurun). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan partisipasi penuh dan efektif bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat masih rendah.
8. Pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal • Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat • BUMDes belum didayagunakan secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa • Desa Mandiri pada tahun 2018 baru mencapai 3 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemda melalui OPD terkait selain OPD yang membidangi desa. - Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah masih lemah (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian). - Kapasitas Pemerintah Desa masih rendah. - Kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kemandirian khususnya dalam ekonomi masih rendah.
9. Tata kelola Pemerintahan Daerah belum efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2020 IKM 84,00) • Target jumlah kasus kejahatan pembunuhan belum tercapai (2019 2,06; target menurun). Target proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan (2019 0,00029; gap 0,00027) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi birokrasi belum optimal - Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat belum dilaksanakan sepenuhnya - Masih adanya aparatur yang kurang profesional - Koordinasi antar Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik - Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah belum terintegrasi - Masih terbatasnya SDM aparatur pengawasan - Manajemen organisasi perangkat daerah masih belum optimal - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. - Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum dilaksanakan secara optimal. - Kualitas dan ketersediaan data masih relatif rendah.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih Rendahnya RLS;
- b. Tenaga pendidik PNS semakin berkurang karena adanya guru yang memasuki masa pensiun, sedangkan pengangkatan guru PNS tidak ada (moratorium CPNS);
- c. Sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai;
- d. Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD) masih rendah.

2. Urusan Kesehatan

- a. Terbatasnya layanan spesialisik di sarana layanan rujukan;
- b. Masih terdapat kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi meskipun secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun;
- c. Terjadinya kasus *Multidrug Resistance (MDR)* pada penderita TB paru;
- d. Keterbatasan Ruang Rawat Inap (Kelas I dan II) bagi pasien umum/peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS, sehingga banyak pasien yang menunggu di IGD dan pindah ke RS Swasta;
- e. Rasio Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan untuk profesi dokter gigi, apoteker, nutrisionis, sanitarian dan promosi kesehatan masih belum memenuhi standar;
- f. Keterbatasan SDM tenaga medis spesialisik dan tenaga fungsional kesehatan (RSUD);
- g. Kualitas sarana pelayanan dasar (Aspek Fisik) Puskesmas dan Pustu di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- h. Meningkatnya Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) atau munculnya penyakit lain, kejadian luar biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian;
- i. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Ciamis, hal ini antara lain disebabkan:
 - Terbatasnya tenaga medis spesialis;
 - Terbatasnya tenaga paramedis/perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih ada ruas-ruas jalan yang belum selesai diperbaiki/ditingkatkan strukturnya;
- b. Terjadinya pendangkalan dan kerusakan tebing sungai sehingga menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, sementara untuk penanganan sungai di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy;
- c. Masih adanya saluran irigasi yang rusak;
- d. Masih adanya kendaraan yang melalui jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman tidak sesuai dengan kekuatan konstruksi jalan yang dibangun;
- e. Belum tersedianya masterplan pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Ciamis;

- f. Belum semua Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang telah ada dalam RTRW disusun rencana rincinya.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi;
- b. Belum terdapatnya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi;
- b. Intensitas penyelenggaraan diklat teknis PNS masih sedikit;
- c. Penertiban/penanganan masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan OPD terkait di wilayah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal;
- d. Kegiatan penanganan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) masih belum maksimal penanganannya;
- e. Sumber daya aparatur PNS di Satpol PP masih kurang sehingga pelaksanaan patroli petugas Pol-PP di 27 Kecamatan wilayah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal;
- f. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah masih kurang;
- g. Kegiatan sistem keamanan lingkungan di masyarakat banyak yang vakum/tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- h. Belum adanya koordinasi antar Kominda di lintas kabupaten;
- i. Unit layanan penanggulangan kebakaran belum dapat sepenuhnya menjangkau seluruh luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

6. Urusan Sosial

- a. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di masyarakat;
- b. Pemberdayaan masyarakat miskin masih sangat rendah;
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar:

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masyarakat;

- b. Sarana dan prasarana Kursus Latihan Kerja (KLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja di Kabupaten Ciamis mengalami rusak berat;
- c. Tenaga instruktur pelatihan keterampilan kerja masih kurang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;
- b. Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Belum memiliki Tenaga Ahli (Psikolog) dan Sarana Prasarana untuk penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Belum optimalnya pengembangan KLA, PUG, PEKKA dan FAD;
- e. Masih rendahnya cakupan OPD yang mempunyai Renstra responsif *gender*.

3. Urusan Pangan

- a. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;
- b. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan;
- c. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
- d. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu.

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan adalah kurang optimalnya pengelolaan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Ciamis, termasuk penertiban sertifikatnya.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan tetapi belum melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan;
- b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- c. Belum optimalnya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah;
- d. Meningkatnya biaya operasional pelayanan persampahan yang disebabkan oleh penutupan TPA Handapherang.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Database kependudukan belum akurat karena laporan peristiwa kependudukan seperti lahir mati pindah datang tidak berjalan optimal;
- b. KTP-elektronik belum berfungsi sebagaimana mestinya karena belum tersedianya *card reader* (pembaca kartu) di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. Aplikasi SIAK belum berfungsi optimal sehingga berpengaruh terhadap akurasi data penduduk, kondisi ini antara lain dapat dilihat dari: Aplikasi SIAK belum dapat digunakan untuk mengolah data kependudukan secara langsung sesuai permintaan dinas lain yang membutuhkan, perlu penambahan aplikasi khusus;
- d. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan masih belum memadai, karena perangkat pelayanan *KTP-el* yang pengadaannya dari Kemendagri sudah banyak yang tidak berfungsi;
- e. Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi;
- f. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kinerja BUMDes belum optimal;
- b. Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal;
- c. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat belum optimal;
- e. Infrastruktur perdesaan belum memadai.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya partisipasi pria dalam ber-KB, dengan tingkat capaian baru mencapai 2.929 akseptor atau sebesar 1,64%;
- b. Masih tingginya Angka Drop Out Peserta KB sebesar 10,80%;
- c. Masih rendahnya angka kesertaan Pria ber KB;
- d. Masih rendahnya jumlah peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi jangka Panjang sebesar 21,38% dari jumlah total peserta KB aktif;
- e. Masih kurangnya kreativitas dan inovasi dari kelompok UPPKS yang dapat menambah modal kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan;
- f. Masih kurangnya partisipasi keluarga dalam kegiatan kelompok BKB, BKR dan BKL;

- g. Masih ada keluarga yang belum optimal dalam menjalankan delapan fungsi keluarga;
- h. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lintas sektor di wilayah Kampung KB;

9. Urusan Perhubungan

- a. Masih banyaknya ruas-ruas Jalan Kabupaten yang belum dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- b. Masih banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum dilengkapi dengan Alat Pengukur Pemakaian (APP);
- c. Kurangnya fasilitas angkutan orang di Kabupaten Ciamis;
- d. Dibutuhkannya aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan *online* yang merupakan perkembangan kemajuan IT;
- e. Isu keselamatan jalan, kampanye keselamatan jalan masih kurang gencar.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Minimnya sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Masih adanya koperasi yang kondisinya tidak sehat, hal tersebut karena para pengurus dan anggota masih ada yang belum menguasai tentang manajemen pengelolaan koperasi, pendirian koperasi tidak didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi anggota atau kesamaan kegiatan usaha anggota, sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan usaha yang seharusnya memiliki kepentingan langsung dengan kepentingan ekonomi atau kegiatan usaha anggotanya;
- c. Masih banyak koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya;
- d. Belum optimalnya penataan pemanfaatan fasilitas akses layanan perbankan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- e. Belum optimalnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya promosi dan regulasi investasi daerah sehingga investasi daerah masih rendah;
- b. Belum optimalnya data potensi investasi daerah;
- c. Belum mempunyai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengembangan organisasi kepemudaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik masih belum optimal;
- b. Masalah sosial di kalangan pemuda seperti NAPZA, HIV masih cukup tinggi;
- c. Wawasan kebangsaan pemuda masih kurang;
- d. Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan mutu prestasi olahraga belum optimal;
- f. Pembinaan olahraga prestasi belum optimal;
- g. Peningkatan mutu SDM tenaga keolahragaan masih kurang.

14. Urusan Statistik

Kebijakan pembangunan harus berbasis data. Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data dan analisis statistik daerah.

15. Urusan Persandian

- a. Kurangnya sumber daya manusia bidang persandian, baik dari sisi jumlah maupun kualitas;
- b. Pengelolaan alat persandian yang kurang/tidak optimal;
- c. Sering terjadi gangguan dalam keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah.

16. Urusan Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan seni budaya daerah sebagai kekayaan budaya;
- b. Kurangnya tim ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan nilai budaya, cagar budaya dan permuseuman sehingga pengembangan potensi masih belum tergali secara optimal;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya tentang pemajuan kebudayaan;
- d. Belum optimalnya pemeliharaan kawasan situs dan cagar budaya;

- e. Belum terfasilitasinya kesejahteraan juru kunci dan juru pelihara Situs di Kabupaten Ciamis;
- f. Belum optimalnya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM sejarah dan nilai budaya.

17. Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang Perpustakaan;
- b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai.
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- d. Masih kurangnya koleksi judul dan jumlah buku pada perpustakaan desa;
- e. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai.

18. Urusan Kearsipan

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan belum memadai;
- b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk mengkonsumsi ikan masih perlu ditingkatkan;
- b. Ketersediaan induk dan pakan yang berkualitas masih kurang;
- c. Keterampilan pembudidaya belum optimal dan belum berorientasi bisnis;
- d. Terbatasnya ketersediaan benih ikan;
- e. Belum optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembibitan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Udang Galah (BBUG).

2. Urusan Pariwisata

- a. Kunjungan wisatawan belum optimal;
- b. Belum optimalnya penataan Obyek Wisata dan promosi wisata serta adanya persaingan usaha dalam hal daya tarik wisata.

3. Urusan Pertanian

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;
- b. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal;

- c. Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;
- d. Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- e. Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis;
- f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;
- g. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal;
- i. Kurang diminatinya usaha pembibitan ternak oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah akseptor IB;
- j. Lahan pangangan milik pemerintah desa dan lahan penggembalaan lain sebagai sumber pakan ternak banyak yang beralih fungsi;
- k. Kurangnya minat peternak dalam usaha pembibitan sapi potong, karena dianggap jaminan keberlangsungan usahanya rendah;
- l. Ancaman penyakit hewan menular strategis cukup tinggi karena anomali cuaca dan letak Kabupaten Ciamis sebagai daerah lintasan ternak;
- m. Pengembangan ayam bukan ras belum optimal;
- n. Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan.

4. Urusan Kehutanan

- a. Ketersediaan penyuluh kehutanan belum proporsional dalam memenuhi wilayah kerjanya dibanding dengan jumlah wilayah potensial pengembangan komoditas kehutanan serta belum optimalnya kualitas penyuluh yang tersedia;
- b. Masih terdapatnya lahan kritis;
- c. Belum adanya TAHURA.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah rumah tangga yang sudah memiliki sambungan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga) yang belum mencapai 100%.

6. Urusan Perdagangan

- a. Belum tersedianya Tenaga Ahli Penera, Peralatan dan Bangunan Kemetrolgian Legal, sehingga pelayanan kemetrolgian belum dapat dilakukan secara optimal;

- b. Pola tata niaga dan manajemen usaha yang masih sederhana dan belum merupakan satu kesatuan sistem tata niaga yang baik karena masih belum banyak jalinan kerjasama yang baik diantara para pelaku usaha;
- c. Kurangnya informasi pasar, potensi investasi, pelayanan perdagangan dan kemetrolagian, sehingga pelaku usaha perdagangan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya;
- d. Belum optimalnya penataan pasar tradisional;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas akses layanan perbankan oleh pelaku usaha perdagangan kecil;
- f. Masih terdapat pasar modern yang belum melakukan kemitraan dengan para pedagang kecil sehingga menimbulkan persaingan yang kurang sehat.

7. Urusan Perindustrian

- a. Keterbatasan modal kerja, sarana mesin dan peralatan produksi yang kurang memadai, teknologi yang digunakan masih sederhana, kemasan produk masih sederhana dan kurang menarik, daya saing produk rendah, selain itu masih banyak IKM yang belum memiliki izin dan legalitas usaha sehingga tidak dapat bersaing dalam pemasaran produk-produknya;
- b. Kemampuan SDM pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menjalankan usahanya masih rendah, terutama dalam penguasaan manajemen usaha, produksi, keuangan, pemasaran maupun kewirausahaan;
- c. Akses pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap layanan perbankan relatif rendah.

8. Urusan Transmigrasi

Kuota transmigran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sedikit, dan tidak ada peminat.

D. Penunjang Pemerintahan

1. Pengawasan

Belum terpenuhinya jumlah aparatur pengawasan yang ideal sesuai Keputusan Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Perencanaan

- a. Ketersediaan dan akurasi basis data pembangunan masih belum memadai;
- b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan antar OPD;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional perencana;
- d. Realisasi pelaksanaan rencana masih rendah.

3. Keuangan

- a. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
- b. Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar Pajak dan Retribusi;
- c. Belum optimalnya sistem pengelolaan aset terutama pada SKPD yang memiliki rentang kendali yang luas;
- d. Masih ada beberapa peraturan tingkat atas yang belum sinkron sehingga menyulitkan pada tahapan implementasi;
- e. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi secara optimal.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan;
- b. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang ada belum sesuai ketentuan LAN RI;
- c. Belum seluruh PNS memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Profesionalisme aparatur masih relatif rendah.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum terpenuhinya tenaga fungsional peneliti;
- b. Penelitian/kajian yang berkaitan dengan pembangunan masih sedikit.

E. Pendukung

1. Sekretariat Daerah

- a. Reformasi birokrasi belum optimal;
- b. Fungsi koordinasi masih lemah.

2. Sekretariat DPRD

Adanya Rancangan Peraturan Daerah yang tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan baru di atasnya sehingga perlu penyesuaian/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi belum optimal;
- b. Pemahaman dan implementasi nasionalisme dan jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda cenderung menurun;
- c. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam bidang politik.

G. Kewilayahan

Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Hal ini karena analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam pembangunan daerahnya.

4.2.1. Isu Global

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda pembangunan dunia *Millenium Development Goals (MDGs)* yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.

Gambar 4.1
Sustainable Development Goals (SDGs)



Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan kedalam 70 sasaran yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Dan sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan yang juga merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

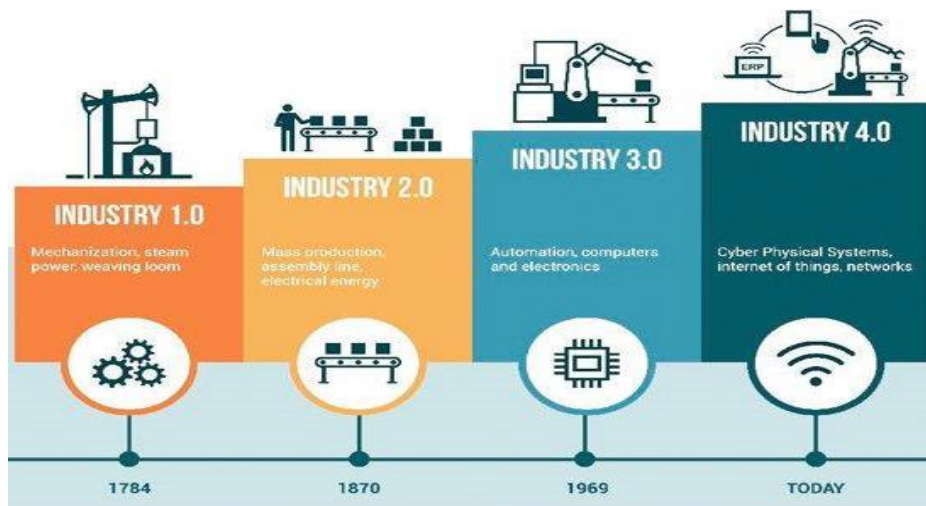
Gambar 4.2
Pondasi Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)			
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
1. Tanpa Kemiskinan	7. Energi bersih dan Terjangkau	6. Air bersih dan sanitasi yang layak	16. Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang tangguh
2. Tanpa Tanpa Kelaparan	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11. Kota dan Permukiman yang layak	
13. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan	
4. Pendidikan Berkualitas	10. Berkurangnya Kesenjangan	13. Penanganan perubahan iklim	
5. Kesenjangan Gender	17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	14. Ekosistem Laut	
		15. Ekosistem Darat	

B. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri dunia berkembang dari masa kemasa, diawali dengan revolusi industri generasi pertama (1.0) ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, revolusi industri generasi kedua (2.0), melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, revolusi industri generasi ketiga (3.0), ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Dan saat ini kita memasuki era digital yakni revolusi industri generasi keempat (4.0), menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Gambar 4.3
Perkembangan Revolusi Industri



Implementasi Revolusi Industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, bahkan juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Langkah dasar yang harus disiapkan yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dan sesuai dengan permintaan pasar industri. Dengan penerapan Revolusi Industri 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi dan informasi dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet. Dampak penerapan konsep Revolusi Industri 4.0 antara lain mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, mengurangi waktu dan biaya produksi, meminimalkan kesalahan kerja dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.

Gambar 4.4
Making Indonesia 4.0



Kementerian Perindustrian telah merancang *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi.

C. ASEAN Economic Community (AEC)

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), berawal dari perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana pada konferensi tersebut menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara-negara ASEAN yakni *ASEAN Vision 2020*, dimana tujuan dari visi ini menjadikan

kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, dimana kawasan ASEAN menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Tujuan utama dari terbentuknya MEA adalah:

1. Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN, dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal dan investasi, sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN.
2. ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi (kompetisi ekonomi), perlindungan konsumen, HAKI, perpajakan, aktivitas *e-commerce* serta pengembangan infrastruktur.
3. Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM).
4. Serta mengintegrasikan ekonomi pada kawasan Asia Tenggara dengan ekonomi global dimana tujuan meningkatkan peran ASEAN dalam kebijakan global, sehingga menjadi sisi positif bagi negara-negara ASEAN, dikarenakan masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

Gambar 4.5
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)



D. Pandemi Covid-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan bagian dari pandemi penyakit korona virus 2019 (Covid-19). Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Menurut WHO, data per tanggal 5 Desember 2020, sebanyak 65.267.767 jiwa yang telah terinfeksi virus dan mengakibatkan 1.513.179 jiwa yang meninggal. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan seperti ini luar biasa dampaknya pada semua sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Pada tanggal 5 Nopember 2020, BPS menyampaikan bahwa Indonesia resmi resesi, karena dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%, dan pada kuartal III-2020 minus 3,49%. Kondisi ini mengharuskan semua *stakeholder* pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bergotong-royong, bersinergi dan berkolaborasi secara bersama-sama didalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

4.2.2. Isu Kebijakan Nasional

A. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR". RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

B. RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”, yang dilakukan melalui 9 Misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2) Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 4.6
Agenda Pembangunan



4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat 2018-2023

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih yaitu Muhamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah **“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gambar 4.7
Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023

**Terwujudnya
Jawa Barat Juara
Lahir Batin dengan
Inovasi dan
Kolaborasi.**

Visi dan Misi

MISI	
01	Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara.
02	Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif Melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara.
03	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan Melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistic juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.
04	Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil Melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara.
05	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, apbd juara, asn juara, dan bumd juara.

Sedangkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial.
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan.
5. Reformasi Birokrasi.

4.2.4. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dokumen yang menjadi sumber kajian literatur seperti dokumen Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037, dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2015, yang kemudian dilakukan penelaahan isu hasil ketercapaian indikator TPB Kabupaten Ciamis.

Dari hasil analisis penapisan isu pembangunan berkelanjutan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang berasal dari hasil analisis gap ketercapaian indikator TPB menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak mencapai target. Berdasarkan hasil olah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS, maka beberapa rekomendasi TPB dalam dokumen KLHS adalah sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
4. TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Layak
5. TPB 15 : Ekosistem Daratan

Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan

dengan upaya tambahan pencapaian target TPB. Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) isu strategis hasil KLHS.

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan

Skenario proyeksi TPB 1 tanpa kemiskinan merupakan bagian dalam proses memberantas kemiskinan, penerapan perlindungan social, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Beberapa kebijakan yang pro dan fokus terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis telah menjadi perhatian utama dalam arah kebijakan dalam rekomendasi hasil telaah KLHS. Untuk itu, berikut akan disajikan isu strategis dan rekomendasi TPB 1 untuk Kabupaten Ciamis.

Tabel 4.2
Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
1	Target Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional belum tercapai (capaian 2020 7,62%, gap 1,62%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan lapangan kerja serta pemerataan lapangan kerja 2. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja 3. Mendukung dan mengembangkan kegiatan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi kegiatan, memberikan pembinaan dan pelatihan kompetensi, serta pendampingan baik dalam pengembangan sistem, produksi, pemasaran produk, dan keuangan 4. Membantu pengembangan digitalisasi koperasi dan UMKM 5. Meningkatkan upaya kemitraan dan kemudahan perizinan untuk koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah 6. Peningkatan peserta jaminan sosial dan bantuan sosial pada masyarakat miskin 7. Pengendalian dan penetapan harga 8. Pengendalian penduduk dengan pembinaan keluarga berencana terutama pada keluarga dengan pendapatan rendah 9. Memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan 10. Peningkatan penyediaan data SDGs serta pembuatan sistem data SDGs terpadu 11. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, serta pengembangan pemuda dan masyarakat miskin 12. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, serta rehabilitasi penyandang disabilitas
	Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan sanitasi dan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga dapat mencapai ODF. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
	belum tercapai (capaian	
	2019 89,12%; gap 10,88%).	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi untuk mencapai ODF/ Stop BABS salah satunya dengan skema pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengembangan sanitasi - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs <p>2. Meningkatkan cakupan dan pelayanan air minum beserta pengelolaan sumber air berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pembangunan sistem penyediaan air minum serta pemeliharaan sarana pengelolaan dan penyediaan air - Perencanaan infrastruktur penyediaan air - Perlindungan dan pengelolaan sumber air sehingga dapat mencapai kondisi berkelanjutan - Perlindungan daerah sumber air, tangkapan air, daerah aliran sungai, dan daerah-daerah vital bagi sumber air - Peningkatan RTH sebagai daerah tangkapan air - Mendorong penggunaan air permukaan dan perlindungan air tanah - Pengelolaan dan pemantauan kualitas sumber air dan air permukaan - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengadaan dan pengelolaan air - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs
	Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi (capaian 2019 73,06%; gap 26,94%)	
	Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (nilai 2019 39 milyar, target menurun)	

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

2. TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia. Hal ini merupakan bentuk salah satu tujuan manusia hidup di dunia. Setiap tahun, pertambahan jumlah manusia semakin tinggi. Bonus demografi yang diprediksi akan semakin besar, khususnya bidang Kesehatan. Untuk itu, penduduk yang sehat dan sejahtera dapat berkontribusi dalam membangun peradaban. Berikut ini akan disajikan isu strategis dan rekomendasi kebijakan mengenai kehidupan sehat dan sejahtera di Kabupaten Ciamis berdasarkan rekomendasi KLHS

Tabel 4.3
Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
3	<ul style="list-style-type: none"> • Target Angka Kematian Neonatal (AKN) belum tercapai (capaian 2019 7,5; target menurun). • Target Angka Kematian Bayi (AKB) belum tercapai (capaian 2019 2,4; gap 2,38). • Target prevalensi tekanan darah tinggi belum tercapai (capaian 2019 36,1%; gap 11,8). • Target Prevalensi obesitas belum tercapai (capaian 2019 28,2%; gap 12,8%). • Target proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB belum tercapai (capaian 2019 0,76%; gap 65,24%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan baik infrastruktur, sarana, prasarana kesehatan maupun peningkatan SDM secara umum maupun sebagai bentuk penanganan pandemi Covid 19. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan pengembangan fasilitas kesehatan - Pemerataan serta peningkatan jumlah dan kualitas SDM - Peningkatan cakupan dan jumlah peserta jaminan kesehatan 2. Penganan Covid 19. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Penataan ruang dalam mencegah dan menanggulangi dampak Covid 19 - Mendorong adanya adaptasi perilaku terhadap kondisi pandemi - Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Covid 19, salah satunya dengan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat dengan optimalisasi dana desa dalam penanganan Covid 19 3. Mendorong penurunan jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kondisi infrastruktur serta sarana prasarana lalu lintas - Memantau kelayakan kendaraan bermotor - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

3. TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih dan sanitasi layak tentu akan Kesehatan dan perlindungan bagi penduduk. Selain itu, air bersih dan sanitasi layak meliputi air ledeng, keran umum, terminal air, penampungan air hujan, sumur bor, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Untuk itu, beberapa isu strategis dan rekomendasi berkaitan dengan TPB 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
6	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak 67,02% (2019), sanitasi 63,52% (2019) • Sistem informasi air baku (6 Wilayah sungai, 2019) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan sanitasi dan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga dapat mencapai ODF. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai/danau (capaian 4, 2019) <p>Juga masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS</p>	<p>untuk mencapai ODF/ Stop BABS salah satunya dengan skema pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengembangan sanitasi - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs <p>2. Meningkatkan cakupan dan pelayanan air minum beserta pengelolaan sumber air berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pembangunan sistem penyediaan air minum serta pemeliharaan sarana pengelolaan dan penyediaan air - Perencanaan infrastruktur penyediaan air - Perlindungan dan pengelolaan sumber air sehingga dapat mencapai kondisi berkelanjutan - Perlindungan daerah sumber air, tangkapan air, daerah aliran sungai, dan daerah-daerah vital bagi sumber air - Peningkatan RTH sebagai daerah tangkapan air - Mendorong penggunaan air permukaan dan perlindungan air tanah - Pengelolaan dan pemantauan kualitas sumber air dan air permukaan - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengadaan dan pengelolaan air - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

4. TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Perkotaan merupakan Kawasan peradaban manusia di masa depan. Lebih dari setengah penduduk di Indonesia bermukim di daerah perkotaan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2030 diproyeksikan lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini yang kemudian akan menjadi tantangan dan peluang bagi daerah perkotaan untuk menata dan memperbaiki struktur tata kotanya. Untuk itu, Kabupaten Ciamis perlu menjawab tantangan dan peluang ini menjadi strategi yang perlu dioptimalkan.

Tabel 4.5
Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
11	<p>Masih tingginya Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Rp.25.261.129.509 (2019)</p> <p>Belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani 8,93% (2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Melakukan upaya mitigasi juga pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana 3. Melakukan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4. Penyediaan pelayanan kesehatan untuk kejadian luar biasa dan/atau bencana

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
		5. Pengelolaan sampah dengan memperhatikan 5 aspek pengelolaan persampahan 6. Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

5. TPB 15 Ekosistem Daratan

Ekosistem daratan merupakan salah satu aspek dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Didalamnya meliputi; melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Tabel 4.6
Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 15 Ekosistem Daratan

TPB	Gap/Isu	Rekomendasi
15	Belum meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi (0,077% Tahun 2019) dan belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati (2019)	1. Melakukan perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan LH melalui RPPLH, KLHS, Pengelolaan KEHATI, pembinaan pengawasan terhadap usaha/izin lingkungan, penyelesaian pengaduan masyarakat bidang LH, pengawasan sarana pertanian pengelolaan sumberdaya genetik, dan pengendalian-pemanfaatan ruang. 2. Penikatan partisipasi masyarakat dengan pengoptimalan dana desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup 3. Pengadaan kegiatan/program yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas data, salah satunya data SDGs

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan diatas, maka dilakukan integrasi ke dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasian/adaptasi hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

- a. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Perubahan RPJMD.

- b. Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk dalam Bab II Rancangan Perubahan RPJMD.
- c. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB.
- d. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Rancangan Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan diatas.
- e. Program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan kegiatan yang mendukungnya terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait. Dalam dokumen RPJMD hanya memuat sampai tingkat program, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU).
- g. Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Rancangan Perubahan RPJMD.
- h. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke dalam RPJMD, namun akan diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.

4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ciamis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu : (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; (4) Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; (5) dan KLHS Perubahan RPJMD.

A. RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20

tahun. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam kampanye periodisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematis dan terarah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis, yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Ciamis. RPJPD Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi dirumuskan sebagai tindak lanjut hasil analisis terhadap isu-isu strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD). Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah **“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”**

Pernyataan Visi pembangunan Kabupaten Ciamis di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan Iman dan Taqwa bermakna bahwa “Keimanan dan Ketaqwaan” (yakni: berkeyakinan kuat bahwa tiada TUHAN kecuali ALLOH dalam menjalani hidup dan kehidupan selalu berpegang pada ajaran agama secara konsekuen) harus melandasi dan menjiwai seluruh perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Maju bermakna suatu kondisi yang dicapai untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, dilihat dari indikator sosial (pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial), indikator ekonomi (pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kualitas, pendapatan perkapita, daya beli) dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mandiri bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan potensi yang ada di daerah, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong peran serta

stakeholder dalam pembangunan. Demikian pula masyarakat dapat memberdayakan potensi dirinya sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan berperan aktif sebagai mitra pemerintah.

Sejahtera bermakna suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;** Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, keterampilan, sikap mental aparatur dan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal dan informal, sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilandasi Iman dan Taqwa serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didukung oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. **Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;** Terselenggaranya fasilitasi, regulasi, dan supervisi dari pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, adil dan bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif, dan efisien dengan dukungan masyarakat secara luas dan didorong dengan semangat kebersamaan dan kesalehan sosial, mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. **Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;** Sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga penggalan, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang diikuti dengan upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

4. **Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah;** Upaya untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, industri dan pertambangan yang didukung infrastruktur dan pusat kajian yang memadai, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli secara merata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2019-2024) diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan melalui penciptaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya saing, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
2. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya beli masyarakat.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.
6. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana alam.

B. RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis

kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 saat ini sedang direvisi karena terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar yaitu pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Isu strategis yang tercantum dalam Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

1. Isu Ekternal

Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis memperhatikan juga kebijakan terkait, baik di tingkat nasional maupun regional Provinsi Jawa Barat. Untuk kebijakan nasional, kebijakan yang dikaji terdiri atas RTRWN, dan RTR Pulau Jawa. Sedangkan untuk kebijakan regional adalah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang disusun pada tahun 2017 yang sampai saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian akhir dan belum berkekuatan hukum (Peraturan Daerah).

2. Isu Internal

a. Status Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya

- 1) Gunung Syawal
- 2) Wilayah sungai (WS) Citanduy
- 3) Lahan
- 4) Air
- 5) Persampahan

b. Tekanan terhadap lingkungan

- 1) Pertumbuhan penduduk
- 2) Permukiman
- 3) Pertanian
- 4) Peternakan
- 5) Perindustrian
- 6) Infrastruktur
 - Rencana Megaproyek Bendungan Matenggeng

- Rencana Bendungan Leuwikeris
- 7) Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan
 - 8) Kebencanaan
 - Gerakan Tanah/Longsor
 - Banjir
 - 9) Persampahan
 - 10) Alih Fungsi Lahan

C. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, dan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis; maka ditetapkan 6 (enam) isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Keselarasan Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dengan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Nasional digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN					
Nomor Isu	P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	Nomor Isu	P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Nomor Isu/Arahan	RPJMN Tahun 2020-2024
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1	Pembangunan Sumber Daya Manusia
2	Pertumbuhan Ekonomi	4	Produktivitas dan daya saing	5	Transformasi Ekonomi

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN					
Nomor Isu	P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	Nomor Isu	P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Nomor Isu/ Arahan	RPJMN Tahun 2020-2024
	dan Pemerataan Kesejahteraan		ekonomi yang berkelanjutan		
3	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial	2	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	5	Transformasi Ekonomi
4	Peningkatan Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	2	Pembangunan Infrastruktur
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	2	Pembangunan Infrastruktur
6	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	5	Reformasi Birokrasi	3	Penyederhanaan Regulasi
				4	Penyederhanaan Birokrasi

Keenam Isu Strategis Daerah Kabupaten Ciamis diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Ciamis mampu bersaing secara regional, nasional dan global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait pengembangan SDM antara lain masih rendahnya layanan dan kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh capaian APK untuk Pendidikan dasar khususnya tingkat SMP belum mencapai 100 persen, dan APM Pendidikan Dasar tingkat SD dan SMP yang belum mencapai 100 persen. Selain peningkatan layanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar sekolah. Selain itu, masalah tata kelola juga terjadi seperti adanya sekolah yang terakreditasi C dan belum terakreditasi, masih rendahnya mutu Pendidikan, tata kelola Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, serta masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan layanan dan mutu Pendidikan, permasalahan kesehatan di Kabupaten Ciamis pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, capaian kinerja beberapa indikator urusan kesehatan diantaranya presentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita

Gizi Kurang, Angka Kematian Ibu/100.000 KH, dan akses air bersih yang berfluktuasi; pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, serta jumlah ruang rawat inap yang masih kurang. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang disiplin dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, dan *stunting*.

Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis masih rendah, karena kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi *Covid-19* dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan dampak pandemi *Covid-19*. Dalam kondisi pandemi *Covid-19* perlu penyesuaian dengan pola kehidupan baru/Adaptasi Kebiasaan Baru dalam berbagai aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, saat ini pemberdayaan perempuan dan peran pemuda di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumah tangga dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan. Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan di desa diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, lingkungan, pemberdayaan dan pemerintahan di desa. Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Ciamis sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan dan pemuda di Kabupaten Ciamis.

2. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung melambat, terlebih dengan adanya pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020, yang semakin berdampak buruk terhadap perekonomian di seluruh belahan dunia termasuk Kabupaten Ciamis, Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi, walaupun kondisi di Kabupaten Ciamis masih lebih baik dibanding kondisi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, perekonomian di Kabupaten Ciamis dihadapkan pada beberapa masalah, diantaranya :

- a) Pada sektor KUKM dan penanaman modal terjadi permasalahan belum berkembangnya KUKM khususnya akses modal KUKM terhadap perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk KUKM belum optimal, belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, seiring perubahan perilaku masyarakat dalam situasi dan pasca pandemi *Covid-19*, serta masih rendahnya investasi;
- b) Pada sektor pariwisata terjadi permasalahan belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata, belum optimalnya promosi pariwisata, serta kelembagaan dan profesionalitas sumber daya pengelola destinasi wisata yang masih kurang;
- c) Pada sektor pertanian terjadi permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar, SDM petani masih terbatas dan terus berkurang, regenerasi petani rendah dan usia petani di Kabupaten Ciamis didominasi diatas usia produktif, teknologi digital belum banyak digunakan; jumlah Gudang penyimpanan hasil panen masih minim, belum tersedianya pusat distribusi produk pertanian daerah, serta rendahnya kualitas infrastruktur irigasi.
- d) Pada sektor perikanan dan kelautan terjadi permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, ketersediaan induk, benih dan pakan berkualitas masih kurang, keterampilan pembudidaya ikan belum optimal dan belum berorientasi bisnis, belum optimalnya fungsi BBI, OPR dan BBUG.
- e) Pada sektor pangan terjadi permasalahan yang ditandai dengan ketersediaan dan keanekaragaman bahan lokal belum optimal, pola konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, belum terpenuhinya CPPD dan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi pangan tertentu.

- f) Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB, hal tersebut diantaranya disebabkan kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal asal Ciamis masih kurang, dan belum meratanya penerapan standar pokok dan teknologi informasi dalam perdagangan.
- g) Pada sektor industri terjadi permasalahan yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri, terlebih pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di Ciamis akibat biaya ekonomi yang relatif tinggi (biaya operasional dan biaya distribusi). Di Ciamis belum ada industri besar, yang ada baru industri kecil dan menengah dengan lokasi tersebar, dan ada belum ditunjang infrastruktur pendukung yang memadai termasuk belum adanya Kawasan industri yang terintegrasi. Peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadai dan meratanya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

3. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan selalu menjadi isu global yang tidak pernah hilang dari muka bumi, dan menjadi salah satu perhatian Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis pun untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Pada periode tahun 2016-2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang cukup baik yaitu mengalami penurunan, namun karena adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan adanya pandemi *Covid-19*, maka jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis kembali meningkat, dan hal ini terjadi di seluruh daerah.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis cenderung fluktuatif, dimana tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan semakin bertambah dengan adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Penyebab lain adalah keterbatasan kesempatan kerja baru serta

kurangnya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, banyaknya korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik dari luar maupun dalam daerah yang belum memiliki pekerjaan baru, serta kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor pemicu bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Ciamis.

Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, belum optimalnya penanganan PPKS, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah

Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan dan pengembangan wilayah. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2020, jalan kabupaten sepanjang 848,296 km, tidak ada jalan tanah dan batu, semua jalan sudah diaspal, hanya setiap tahun kondisinya masih ada yang mengalami rusak berat. Terkait dengan kemantapan jalan kewenangan kabupaten, pada tahun 2016 sebanyak 66,787 persen jalan yang berada dalam kondisi mantap dari sepanjang 848,296 km jalan yang ada. Sekitar 33,217 persen atau sepanjang 281,743 km dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Kondisi jalan kewenangan kabuapten yang rusak tersebut telah menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Ciamis dan dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten perlu mendapat prioritas dari pemerintah Kabupaten Ciamis, begitu pula dengan akses jalan menuju destinasi wisata. Namun demikian, panjang jalan yang mengalami rusak berat dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2019 cenderung menurun, kecuali pada tahun 2020 kembali meningkat disebabkan adanya *refocusing* anggaran yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap penurunan pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa perlu dibarengi dengan terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata. Sistem transportasi publik yang mantap dan merata, harus dengan dibarengi oleh ketersediaan fasilitas lalu lintas yang dapat mendorong aksesibilitas antar wilayah dan distribusi barang/jasa.

Selanjutnya, di bidang permukiman, terdapat daerah permukiman yang termasuk dalam daerah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan wilayah permukiman tidak layak huni dapat dilakukan melalui bantuan/fasilitas perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi, dan sebagainya.

Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur permukiman melalui pembangunan penerangan jalan umum, pembangunan gedung/pos keamanan, pembangunan ruang terbuka hijau/zona kreatif di lokasi-lokasi tertentu perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kreatifitas warga.

Upaya menjaga ketersediaan sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri juga perlu terus ditingkatkan, seperti peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi, penataan Kawasan sempadan sungai dan penyediaan air baku permukiman.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan daya saing daerah.

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan bencana

Pembangunan dalam pelaksanaannya seringkali mengorbankan lingkungan, karena peningkatan usaha pembangunan akan diiringi dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam. Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis

pada beberapa tahun terakhir menjadi indikator rusaknya lingkungan hidup wilayah tersebut. Berbagai hasil pengukuran pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan lingkungan hidup selalu tertinggal dibanding pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pembangunan lingkungan hidup agar dapat berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. TPB di Indonesia bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, TPB diterjemahkan ke dalam 4 pilar (pembangunan sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola). Dalam isu TPB Prioritas, tiga dari lima isu TPB Prioritas termasuk ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan, yaitu Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, serta TPB 15 Ekosistem Daratan.

Peningkatan kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur harus tetap menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi antara Kawasan lindung dan Kawasan budidaya, sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain sulitnya penanganan pencemaran dari sumber pencemaran pelaku UMKM, sulitnya pengendalian perubahan alih fungsi lahan, dan meningkatnya sumber emisi bergerak dan tidak bergerak.

6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Perubahan paradigma ilmu administrasi dari *Old Public Administration* menjadi *New Public Management* membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-

prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja birokrasi yang ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan. Pemerintah didorong untuk menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis antara lain : perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur; belum optimalnya pengelolaan kekayaan/asset pemerintah daerah dan pengelolaan asset/kekayaan daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; belum optimalnya kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat, provinsi dan desa/kelurahan; serta masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada Pemerintahan Desa antara lain: keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi *Covid-19*. Sejak kemunculannya di Indonesia dan ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, selain masalah kesehatan dan kematian, pandemi *Covid-19* telah menyebabkan timbulnya permasalahan lain diantaranya permasalahan sosial, ekonomi, keuangan daerah dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi *Covid-19* (*refocusing* dan realokasi anggaran). Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholders pembangunan, inovasi yang tepat sesuai perubahan dan perkembangan yang terjadi.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah:

“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Mantapnya Kemandirian Ekonomi : Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua : Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

5.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi

Gambar 5.1
Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024



RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu :

1. Karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan dilintasi arus regional penumpang dan barang dari dan ke Jawa Tengah;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Modal sosial budaya masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan mempercepat proses pembangunan;
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan menangani isu strategis Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran Daerah yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan kuantitatif, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yakni adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi dampak pandemi ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* melanda berbagai negara termasuk Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis. Kondisi perekonomian Indonesia yang diindikasikan oleh beberapa indikator makro mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP Tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021, yang berbeda angkanya dengan target indikator makro yang telah ditetapkan di RPJMN Tahun 2020-2024.

Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -3,49 persen (y-on-y). Walau demikian, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05 persen (q-to-q). Indikator

makro lainnya, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak *Covid-19*, terdiri dari pengangguran karena *Covid-19* (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena *Covid-19* (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena *Covid-19* (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *Covid-19* (24,03 juta orang).

Pandemi *Covid-19* juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Sejalan dengan kondisi nasional, beberapa indikator makro Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan sejak merebaknya *Covid-19* di Indonesia. Ekonomi Provinsi Jawa Barat triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -4,08 persen (*y-on-y*) menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang besarnya 5,15 persen. Ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan III ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen (*q-to-q*) dari triwulan sebelumnya.

Dalam setahun terakhir, TPT di Provinsi Jawa Barat naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020 dari 8,04 pada tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja sebanyak 21,68 juta orang, berkurang 0,38 juta orang dari Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 4,79 persen, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 4,82 persen. Terdapat 6,36 juta orang yang terdampak *Covid-19* atau 16,96 persen. Angka ini terdiri dari pengangguran karena *Covid-19* (0,70 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena *Covid-19* (0,16 juta orang), sementara tidak bekerja karena *Covid-19* (0,40 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *Covid-19* (5,10 juta orang).

Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja, yaitu kemiskinan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,30 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Ketimpangan pendapatan

masyarakat yang ditunjukkan dengan indeks gini mengalami peningkatan yakni dari 0,398 pada tahun lalu menjadi 0,403 pada Maret 2020.

Sementara itu, kondisi di Kabupaten Ciamis secara umum tidak jauh berbeda dengan kondisi Nasional dan regional Provinsi Jawa Barat. Adanya pandemi *Covid-19* berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam delapan bulan terakhir, berdasarkan data sampai bulan Agustus tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis mencapai 7,62 persen, lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan tahun lalu berdasarkan data bulan Desember 2019 mencapai 6,65 persen. Selain itu, indikator makro daerah yang juga menunjukkan penurunan kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka yang berdasarkan data bulan Agustus 2020 (data sangat sementara) mencapai 5,66 persen, lebih tinggi daripada TPT tahun lalu berdasarkan data bulan Desember 2019 mencapai 5,10 persen.

Namun demikian untuk capaian IPM, berdasarkan data sementara bulan Januari 2021, IPM Kabupaten Ciamis mencapai 70,49 (data sangat sementara), meningkat 0,10 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 70,39. Usia Harapan Hidup mencapai 71,83 (data sangat sementara), meningkat 0,26 poin dibanding tahun 2019 yang mencapai 71,57. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat masing-masing untuk AHLS pada tahun 2020 mencapai 14,06 tahun meningkat 0,27 tahun dibanding tahun 2019 sebesar 13,79 tahun; dan untuk RLS tahun 2020 mencapai 7,70 tahun meningkat sangat tipis yaitu 0,01 tahun dibandingkan tahun 2019 mencapai 7,69. Sedangkan untuk Pengeluaran per kapita mencapai Rp9.288.000,00; terjadi penurunan sebesar Rp269,00 dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp9.557.000,00.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi *Covid-19*, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penyesuaian dalam target antar tahun rencana atau antar komponen penyusun dalam suatu indikator. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional, Provinsi Jawa Barat dan kemampuan Kabupaten Ciamis dengan adanya pandemi *Covid-19*. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta ahli dari BPS, Komite Perencana dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan publikasi BPS.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024

NO	INDIKATOR (SATUAN)	KONDISI AWAL		REALISASI 2020	TARGET RPJMD					TARGET PERUBAHAN RPJMD				
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	69,63	70,39	70,49	70,16	70,62	71,01	71,42	71,82	70,38	70,66	71,62	72,02	72,62
1.a	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,6	7,69	7,70	7,75	7,81	7,88	7,96	8,05	7,70	7,75	7,88	7,96	8,05
1.b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,67	13,79	14,06	13,8	13,92	13,95	14	14,03	13,96	14,13	14,48	14,69	14,95
1.c	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,32	71,57	71,83	71,57	71,82	72,07	72,32	72,57	71,83	71,87	71,99	72,13	72,30
1.d	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.190	9.557	9.288	9.275	9.414	9.552	9.691	9.830	9.272	9.303	9.659	9.691	9.830
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,22	6,65	7,62	7	6,8	6,5	6	5,5	7,64	7,53	6,38	6,06	5,98
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6	5,10	5,66	4,55	4,5	4,46	4,41	4,27	5,67	5,24	4,81	4,72	4,63
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,38	-0,14	5,53	5,64	5,75	5,87	6	1,65	3,41	4,60	4,71	5,65
5	Indeks Gini (Poin)	0,309	0,354	0,336	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,35	0,335	0,335	0,334	0,333

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kabupaten Ciamis, Tahun 2021

Dari 5 (lima) indikator makro tersebut mengalami penyesuaian sampai dengan Tahun 2024. IPM, Persentase Kemiskinan, TPT, dan LPE Tahun 2020 sampai dengan 2023

target kinerja untuk Kabupaten Ciamis sudah diarahkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang secara umum sudah sejalan dengan arahan target Perubahan Provinsi Jawa Barat. Perbandingan arahan target indikator makro RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk Kabupaten Ciamis dengan hasil proyeksi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan Target Indikator Makro Kabupaten Ciamis Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (sampai dengan tahun 2023)

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL		REALI -SASI	TARGET KABUPATEN CIAMIS DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023				TARGET PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,87	69,63	70,39	70,38	70,62	71,09	72,13	70,38	70,66	71,62	72,02
1.a	Rata Rata Lama Sekolah	7,59	7,60	7,69	7,70	7,72	7,74	7,76	7,70	7,75	7,88	7,96
1.b	Harapan Lama Sekolah	13,66	13,67	13,79	13,96	14,12	14,48	14,69	13,96	14,13	14,48	14,69
1.c	Angka Harapan Hidup	71,07	71,32	71,57	71,83	71,87	71,99	72,13	71,83	71,87	71,99	72,13
1.d	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	8.658	9.190	9.557	9.272	9.303	9.334	9.365	9.272	9.303	9.659	9.691
2	Persentase Kemiskinan	8,20	7,22	6,65	7,64	7,53	7,38	7,01	7,64	7,53	6,38	6,06
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,17	4,60	5,10	5,67	5,24	4,72	4,81	5,67	5,24	4,81	4,72
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,21	5,44	5,38	1,65	3,41	4,73	5,04	1,65	3,41	4,60	4,71

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kabupaten Ciamis, Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ada perbedaan dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, untuk tahun 2020 sampai dengan 2023. Adanya perbedaan ini disebabkan diantaranya perbedaan waktu penetapan, dimana pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 bersamaan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dengan penetapan target kinerja indikator makro menyesuaikan dengan sasaran Nasional

dan Provinsi Jawa Barat yang diarahkan untuk Kabupaten Ciamis pada Rancangan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Untuk itu dilakukan penyesuaian proyeksi target indikator-indikator makro tersebut dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai bentuk respon dan adaptasi perencanaan berdasarkan kondisi riil dalam periode pandemi *Covid-19*. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021 yang berbeda angkanya dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Program pembangunan Kabupaten Ciamis dipastikan mendukung pencapaian target Provinsi Jawa Barat target nasional.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD mengalami penyesuaian berupa penggunaan beberapa indikator makro sebagai indikator tujuan dan/atau sasaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan indikator makro tersebut tepat digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan/atau sasaran. Indikator tujuan dan sasaran pada masing-masing misi yang disertai target per tahun disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA														
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda	1 Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	70,39	70,38	70,66	71,62	72,02	72,62	72,62	
				1 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1 Indeks Pendidikan	Nilai	63,94	64,44	65,08	66,49	67,34	68,36	68,36	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
				2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	1 Indeks Kesehatan	Nilai	79,34	79,74	79,80	79,98	80,20	80,46	80,46	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
				3 Meningkatkan daya beli masyarakat	1 Indeks Pengeluaran per Kapita	Nilai	68,75	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61	69,61	Dinas Pertanian dan KP, Dinas Peternakan dan Perikanan, DKUKMP
				4 Meningkatkan Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat	1 Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	53,70	55,70	58,83	60,83	63,33	65,33	65,33	Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				5 Meningkatkan keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	63,67	63,77	63,87	63,97	64,07	64,17	64,17	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah	1 Terpenuhinya Infrastruktur yang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Mutu	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
				1 Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	76,955	77,862	79,447	80,654	81,94	83,149	83,149	Dinas PUPRP
					2 Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai	89,135	93,716	93,750	95,163	96,393	96,736	96,736	Dinas Perhubungan
				2 Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata	1 Persentase rumah layak huni	Persen	68,31	68,73	68,78	68,84	68,89	68,95	68,95	Dinas PRKPLH

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024			
3	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal	1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			Persen	5,38	1,65	3,41	4,60	4,71	5,65	5,65			
				1 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)	Persen	5,06	-0,58	5,72	5,70	5,68	5,67	5,67	Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan		
					2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,84	-2,62	5,83	5,95	6,06	6,17	6,17	Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan		
					3 Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persen	2,45	2,55	2,75	3	3,25	3,5	3,5	Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan		
					4 Spending of money	Miliar Rupiah	243	260	278	295	313	330	330	Dinas Pariwisata		
					5 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,87	1,66	2,68	2,77	2,86	2,94	2,94	Dinas Peternakan dan Perikanan		
					6 Nilai Tukar Petani	Nilai	112,78	112,00	112,20	112,40	112,60	112,80	112,80	Dinas Peternakan dan Perikanan		
					7 Skor PPH (TPB2)	Nilai	89,4	89,7	90	90,6	91,2	91,8	91,8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				2 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1 Persentase peningkatan investasi	Persen	5,5	-10,04	5,5	5,5	5,5	5,5	11,96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			2 Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1)			Persen	6,65	7,64	7,53	6,38	6,06	5,98	5,98			
				1 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	1 Persentase PPKS yang mandiri	Persen	100,82	129,82	100	100	100	100	100	Dinas Sosial		
				2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (TPB 8)	Persen	5,16	5,67	5,24	4,81	4,72	4,63	4,63	Dinas Tenaga Kerja		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke-				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan		
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024			
4	Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	1 Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Air (TPB6)	Nilai	61,71	62,13	62,42	62,43	62,43	62,44	62,44	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
					2 Indeks Kualitas Udara	Nilai	78,35	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
					3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	34,57	33,34	34,59	34,60	34,61	34,62	34,62		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
					2 Indeks Risiko Bencana (TPB1)	Nilai	156,2	141,6	141	140,6	140,2	139,8	139,8			
					1 Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	3 Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72		0,72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1 Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	N/A	C	B	B	BB	BB		BB	BB
5	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	2 Opini BPK(TPB16)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
					3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Seluruh Perangkat Daerah		
					4 Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke-				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
					5 Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2,35	2,64	2,64	2,8	2,9	3	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
					6 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	52,25	58	65	70	75	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2 Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	1 Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	67,5	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	77,50	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	1 Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	1 Indeks Desa Membangun			Nilai	0,688	0,713	0,742	0,745	0,748	0,75	0,75	
				1 Meningkatnya kemandirian desa	1 Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10)	Persen	166,67	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35	19,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Kabupaten Ciamis, namun seluruh sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkungannya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja telah mempertimbangkan aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perumusan sasaran dan tujuan telah mencerminkan 17 indikator TPB. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah dilaksanakan juga untuk mewujudkan keseimbangan pencapaian TPB yang meliputi pilar pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis, dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

- **Sasaran nasional 1:** “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif”, dan “Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat”, dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya daya beli masyarakat”, dan “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”.
- **Sasaran nasional 2:** “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”, dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”, dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu, “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”, dan “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja”.
- **Sasaran nasional 3:** “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa

Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera” memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri”; “Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”; dan “Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”, dan “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”.

- **Sasaran nasional 4:** “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan *gender* dan perlindungan anak”, dan “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan” dan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”.
- **Sasaran nasional 5:** “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat “Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial”.
- **Sasaran nasional 6:** “Terpenuhinya layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”, dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan” dan “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan”.
- **Sasaran nasional 7:** “Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan *gender* dan perlindungan anak”, dan “Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat” dan “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan”.

- **Sasaran nasional 8:** “Terwujudnya pengentasan kemiskinan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat”, dan “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial”.
- **Sasaran nasional 9:** “Meningkatnya produktivitas dan daya saing” didukung oleh sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan”.
- **Sasaran nasional 10:** “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat”.
- **Sasaran nasional 11:** “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat”.
- **Sasaran nasional 12:** “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”.
- **Sasaran nasional 13:** “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”.

- **Sasaran nasional 14:** “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”, dan “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dan “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan”.
- **Sasaran nasional 15:** “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan”.
- **Sasaran nasional 16:** “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik”, dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata” dan “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata”.
- **Sasaran nasional 17:** “Meningkatnya konektivitas wilayah” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”; dan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”.
- **Sasaran nasional 18:** “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”.

- **Sasaran nasional 19:** “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”.
- **Sasaran nasional 20:** “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”.
- **Sasaran nasional 21:** “Peningkatan kualitas lingkungan hidup” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.
- **Sasaran nasional 22:** “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana”, dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya kapasitas terhadap bencana” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.
- **Sasaran nasional 23:** “Pembangunan rendah karbon” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.
- **Sasaran nasional 24:** “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik” memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran

pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial”; “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”; dan “Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif”. dan didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”, serta “Meningkatnya kemandirian Desa”.

Keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis, dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis

Sasaran RPJMN		Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S3	Meningkatnya daya beli masyarakat
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S8	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
S2	Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S9	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S11	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri.	S8	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S9	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan		
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S5	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S14	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sasaran RPJMN		Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S10	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
S6	Terpenuhinya layanan dasar	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S1	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional	S5	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S10	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri		
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S1	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S15	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S15	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S15	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S5	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran RPJMN		Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S1	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	S6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S7	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S14	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas
S21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
S22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S13	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
S23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran RPJMN		Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis	
S24	Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan public	S8	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	S15	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S14	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	S16	Meningkatnya kemandirian desa

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2021

5.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Prioritas Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Visi dan Misi. Dengan memperhatikan konsideran hukum latar belakang dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dampak pandemi Covid-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Ciamis, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:

1. Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
4. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni dan budaya.
8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diatas akan menghasilkan percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan infrastruktur dan kawasan ekonomi rakyat, dan pengembangan potensi budaya dan pariwisata unggulan lokal yang diharapkan mampu meningkatkan

stabilitas perekonomian daerah. Rangkaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI perubahan RPJMD ini.

Selain 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah diatas, prioritas pembangunan daerah lainnya yaitu 11 (sebelas) Program Prioritas Kepala Daerah yang merupakan janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada saat kampanye. Sebelas Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:

1. Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
2. Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA.
4. Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.
5. Penataan Kawasan ekonomi rakyat.
6. Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.
7. Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu.
8. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
9. Penataan Ruang Publik.
10. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).
11. Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Prioritas Pembangunan Nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP), serta Prioritas Kabupaten (PK) dan Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Ciamis, terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memiliki kaitan dan saling

mendukung dengan PP Jawa Barat yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 5.5
Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional

Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Barat		Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis		Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3	Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis Inovasi	PK2	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat	PKD5	Penataan Kawasan ekonomi rakyat
				PK3	Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja	PKD2	Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah
		PP4	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PK5	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.	PKD4	Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah
						PKD8	Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP7	Gerakan Membangun Desa	PK6	Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa	PKD6	Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi
				PK8	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		
		PP8	Subsidi Gratis	PK1	Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat	PKD7	Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Akses Pendidikan Untuk Semua	PK4	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua	PKD3	Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA
						PKD10	Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI)
		PP2	Desentralisasi Pelayanan Kesehatan	PK1	Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat	PKD7	Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu
						PKD1	Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan

Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Barat		Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis		Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP5	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	PK7	Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan budaya dan olahraga	PKD11	Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan
				PK4	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua		
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP6	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK5	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	PKD6	Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi
						PKD9	Penataan Ruang Publik
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP6	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK5	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	PKD9	Penataan Ruang Publik
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	PP9	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PK8	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		

Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah tersebut kemudian dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.6
Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Kebijakan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah		Arahan Kebijakan		
	Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis	Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis			
1	PK1-Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat	1	PKD7-Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
			2	Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat	
		2	PKD1 - Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan	1	Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya kesehatan
2	PK2-Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan	1	PKD5 - Penataan Kawasan ekonomi rakyat	1	Meningkatkan produksi dan produktivitas, pemasaran, dan nilai tambah komoditi unggulan daerah yang berkualitas

No.	Prioritas Pembangunan Daerah		Arahan Kebijakan		
	Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis	Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis			
	pangan dan peningkatan daya beli masyarakat		2	Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak	
			3	Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan	
			4	Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	
			5	Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	
			6	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen	
			7	Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan ekspor	
			8	Mendukung, mengembangkan dan memfasilitasi koperasi, dan pelaku UMKM	
			9	Mengembangkan digitalisasi koperasi dan UMKM	
			10	Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, memperkuat kelembagaan, serta kemudahan perizinan	
			11	Meningkatkan promosi peluang investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan lokal daerah, dan kerjasama investasi	
			3	PK3 - Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja	1
2	Peningkatan perlindungan, pemberdayaan serta rehabilitasi penyandang disabilitas				
3	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial				
4	Peningkatan kualitas perencanaan dan daya saing SDM tenaga kerja				
5	Meningkatkan kerjasama lokus transmigrasi dan penyiapan calon transmigran				
4	PK4 - Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua	1	PKD 11 - Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan	1	Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan, serta pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penyelenggaraan pendidikan
				2	Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
				3	PKD10-Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah		Arahan Kebijakan		
	Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis	Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis			
5	PK5-Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.	1	PKD8-Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	1	Meningkatkan keunggulan dan daya tarik destinasi pariwisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata
				2	Meningkatkan promosi pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
		2	PKD6-Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi	1	Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
				2	Mengembangkan sentra dan kluster industri unggulan yang berwawasan lingkungan
		3	PKD9-Penataan Ruang Publik	1	Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang
				2	Meningkatkan tata kelola pertanahan
				3	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman
				4	Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan
				5	Melakukan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
				6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung, berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam
				7	Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8	Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan				
9	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
6	PK6-Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa	1	PKD5-Penataan Kawasan ekonomi rakyat	1	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Desa, serta kerjasama antar Desa
				2	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
7	PK7-Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan budaya dan olahraga			1	Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender
				2	Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini, serta meningkatkan kualitas perlindungan anak
				3	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
				4	Penguatan sistem pembinaan prestasi olahraga

No.	Prioritas Pembangunan Daerah		Arahan Kebijakan	
	Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis	Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis		
			5	Meningkatkan kapasitas kepramukaan
			6	Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya dalam melestarikan budaya lokal
8	PK8-Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		1	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
			2	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> , meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik
			3	Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
			4	Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target dan solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, serta mengakomodir rekomendasi hasil KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA				
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda	1.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1 Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan	1 Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan, serta pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penyelenggaraan pendidikan 2 Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, Mengembangkan muatan lokal, pendidikan karakter dan <i>life skill</i> 3 Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 4 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital
		1.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	1 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, serta meningkatkan keman-dirian masyarakat dalam PHBS dan kesehatan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan 2 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat 3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya kesehatan
		1.1.3 Meningkatkan daya beli masyarakat	1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mampu mengakses kebutuhan konsumsinya 2 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas, pemasaran, dan nilai tambah komoditi unggulan daerah yang berkualitas 2 Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak 1 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1.4 Meningkatkan Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat	1 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 2 Meningkatkan pelestarian budaya lokal	1 Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif 2 Penguatan sistem pembinaan prestasi olahraga 3 Meningkatkan kapasitas kepramukaan 1 Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya dalam melestarikan budaya lokal
		1.5 Meningkatkan keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	1 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1 Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini, serta meningkatkan kualitas perlindungan anak
MISI II : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah				
2.1	Terpenuhinya Infrastrukturnya yang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah	2.1.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata	1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi secara merata	1 Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang kawasan pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 2 Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 3 Meningkatkan pelayanan angkutan umum
			2 Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan Sumber Daya Air	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air dan jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian 2 Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air, pengelolaan layanan air untuk domestik, industri
			3 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Lahan	1 Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang 2 Meningkatkan tata kelola pertanahan
			2.1.2 Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata	1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI III : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan				
3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal	3.1.1 Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian	1 Meningkatkan daya saing industri pengolahan berbahan baku lokal	1 Mengembangkan sentra dan kluster industri unggulan yang berwawasan lingkungan
			2 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan	1 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen
				2 Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan ekspor
			3 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM dan UMKM	1 Meningkatkan upaya kemitraan dan kemudahan perizinan untuk koperasi, dan pelaku UMKM
			4 Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM, dan UMKM	1 Mendukung, mengembangkan dan memfasilitasi koperasi, dan pelaku UMKM
				2 Mengembangkan digitalisasi koperasi dan UMKM
			5 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik pariwisata	1 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik destinasi pariwisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata
2 Meningkatkan promosi pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi				
6 Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	1 Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan			
	2 Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan			
	3 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan teknologi			
7 Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	1 Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan			

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3.1.2 Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	1 Mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi	1 Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, memperkuat kelembagaan, serta kemudahan perizinan
			2 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	1 Meningkatkan promosi peluang investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan lokal daerah, dan kerjasama investasi
		3.1.3 Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	1 Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh	1 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, pengembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				2 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan serta rehabilitasi penyandang disabilitas
3.1.4 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	1 Mendorong peningkatan lapangan kerja serta pemerataan lapangan kerja	3 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial		
		1 Peningkatan kualitas perencanaan dan daya saing SDM tenaga kerja		
				2 Meningkatkan kerjasama lokus transmigrasi dan penyiapan calon transmigran
MISI IV : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				
4.1	Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	4.1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam	1 Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan
			2 Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	2 Melakukan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
				1 Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		4.1.2 Meningkatkan kapasitas terhadap bencana	1 Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan upaya penanggulangan bencana	2 Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
				3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				1 Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana
MISI V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
5.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	5.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1 Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan reformasi birokrasi	1 Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
				2 Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> , meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik
		5.1.2 Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	1 Mengoptimalkan peran <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
				2 Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
MISI VI : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa				
6.1	Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	6.1.1 Meningkatnya kemandirian desa	1 Mewujudkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/ lingkungan Desa	1 Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Desa, serta kerjasama antar Desa
				2 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada tabel 6.2:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis Selama Periode Tahun 2019-2024

Arah Kebijakan				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Menata ulang pembangunan ekonomi melalui penguatan sinergitas antar sektor pembangunan, antar sumberdaya, antar kawasan dan antar pelaku ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan (Sentra) yang berbasis potensi unggulan (komoditas unggulan) sesuai dengan tata ruang wilayah yang didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, serta birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya unggulan lokal secara optimal.	Meningkatkan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan guna mewujudkan kawasan yang tumbuh dan berkembang, produktif dan berdaya saing yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas, kualitas dan nilai tambah serta hasil produksi komoditas unggulan, yang didukung dengan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi khususnya investasi sektor riil yang memanfaatkan bahan baku lokal/potensi unggulan lainnya yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat.	Memantapkan kawasan-kawasan pertumbuhan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan didukung dengan pembangunan daerah-daerah bawahannya, sehingga dapat berkembang secara luas, dengan dukungan investasi, kemitraan antar pelaku usaha yang harmonis, terjalannya kerjasama dengan daerah lain, serta sinergitas dengan desa dalam rangka pembangunan ekonomi perdesaan.	Memantapkan pengembangan ekonomi secara luas dan menyeluruh dengan memperkuat sinergitas dengan desa yang di dukung dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai keunggulan dan daya saing daerah.	Memantapkan dan memelihara keunggulan-keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua.

6.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah

a. Kebijakan Struktur Ruang

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan atau beberapa kecamatan terdekat. Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Untuk itu, setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat di Kabupaten Ciamis disusun dengan kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- Kawasan perkotaan yang perlu didorong dengan tujuan tertentu.

b. Kebijakan Pola Ruang

Rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Ciamis terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan Peruntukan lindung terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan Perlindungan setempat;
3. Kawasan konservasi;
4. Kawasan lindung geologi;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan cagar budaya;
7. Kawasan lindung lainnya.

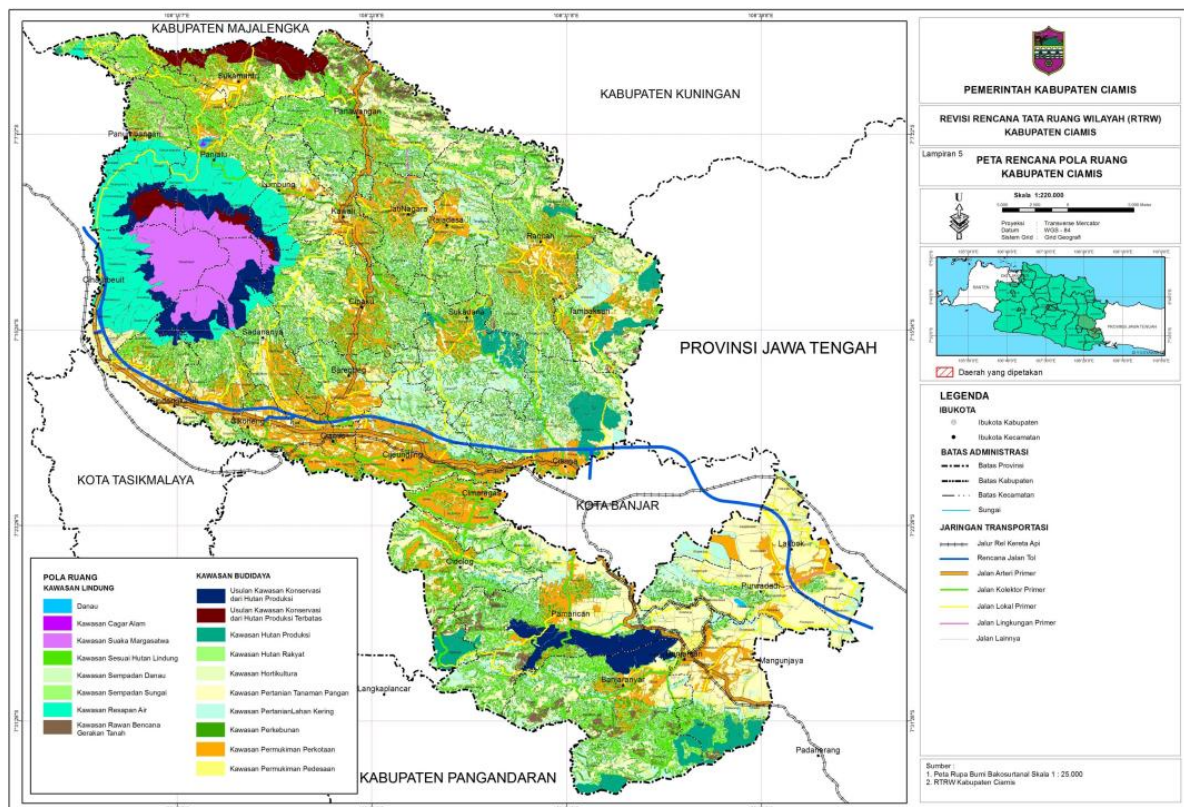
Sedangkan kawasan peruntukan budidaya Kabupaten Ciamis meliputi :

1. Kawasan hutan produksi;
2. Kawasan hutan rakyat;

3. Kawasan pertanian;
4. Kawasan perikanan;
5. Kawasan pertambangan dan energy;
6. Kawasan peruntukan industry;
7. Kawasan pariwisata;
8. Kawasan permukiman;
9. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pola ruang di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis

c. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

1. KSK berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
2. KSK berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya
3. KSK berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung.

Konsep pengembangan KSK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Konsep Pengembangan KSK di Kabupaten Ciamis

No	Kepentingan	Kawasan Strategis	Tipologi	Fungsi	Arahan Konsep Pengembangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga	Kawasan yang membentuk pola linier dan/atau pengelompokan pusat kegiatan yang potensial dikembangkan.	Menjadi Kawasan Etalase Kabupaten Ciamis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian segementasi fungsi koridor kawasan • Penetapan dan penataan pusat kegiatan yang akan dikembangkan • Pengembangan infrastruktur pendukung yang sesuai • Pengendalian kegiatan yang tidak sesuai • Pengembangan kegiatan pada simpul- simpul perbatasan yang berdaya saing eksternal • Penataan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berkarakter
2	Pertumbuhan Ekonomi	KSK Wisata Panjalu dan Wisata Leuwikeris	Kawasan regional bernilai ekonomi tinggi/ unggul	Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi trigger bagi kawasan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan wisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis kemampuan lahan dan mitigasi bencana • Pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata • Penataan dan penetapan zona – zona kegiatan ekonomi yang dipengaruhi dan mendukung kegiatan wisata
3	Perkotaan Strategis	KSK Perkotaan kawali dan KSK Perkotaan Banjarsari	Kawasan Perkotaan yang berperan tinggi dalam mendorong pertumbuhan wilayah	Pengembangan perkotaan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Ciamis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang mampu melayani secara optimal sesuai dengan wilayah pelayanan • Pengembangan kawasan perkotaan yang tertata.
4	Pertumbuhan Ekonomi	KSK Agropolitan meliputi: 1. Kecamatan Sukamantri; 2. Kecamatan Panumbangan; 3. Kecamatan Panjalu; 4. Kecamatan Cihaurbeuti; dan 5. Kecamatan Lumbung.	Kawasan regional bernilai ekonomi tinggi/ unggul	Kawasan peruntukan lahan agrobisnis berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan yang terpadu dan terintegrasi • Penataan zona komoditi pertanian sesuai dengan karakteristik lahan, daya dukung dan memperhatikan kendala/limitasi • Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar mengenai usaha sektor pertanian dan pengolahannya
5	Pertumbuhan Ekonomi	KSK Lumbung Padi meliputi: 1. Kecamatan Lakbok; 2. Kecamatan Purwadadi; 3. Kecamatan	Kawasan regional untuk ketahanan pangan	Kawasan peruntukan lahan pangan berorientasi ekspor dengan kendala bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dan pengelolaan jaringan irigasi pada lahan sawah yang terkena bencana banjir • Pembangunan embung di sekitar Kecamatan Pamarican dalam upaya mengatasi bencana banjir

No	Kepentingan	Kawasan Strategis	Tipologi	Fungsi	Arahan Konsep Pengembangan
		Banjarsari; dan 4. Kecamatan Pamarican;		banjir	kawasan bawahnya <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian pangan yang terpadu dan terintegrasi • Penataan lahan peruntukan sawah • Penetapan insentif dan disinsentif pada zonasi untuk lahan pangan • Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar mengenai usaha sektor pertanian pangan
6	Pertumbuhan Ekonomi	KSK Simpul- Simpul Perbatasan Strategis dengan Kabupaten dan Kota Sekitar, yaitu Perkotaan Cisaga, Perkotaan Sindangkasih, Perkotaan Rajadesa.	Kawasan penyangga	Penyangga pergerakan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan infrastruktur pada kawasan perbatasan • Pengembangan kegiatan yang berdaya saing
7	Sosial Budaya	KSK Kampung Adat Tambaksari	Kawasan pelestarian adat dan budaya	Pelestarian adat dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal dan tidak memberikan dampak negatif pada nilai-nilai budaya • Pelestarian adat dan budaya serta benda-benda peninggalan sejarah • Penataan dan perluasan zona kampung adat
8	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSK Gunung Sawal, Gunung Geger Bentang, Gunung Madati	Kawasan Perlindungan Potensial Berkembang	Pengendali kegiatan potensial yang mengancam kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap kawasan resapan air dan hulu sungai • Pengembangan kegiatan agribisnis yang berwawasan lingkungan • Peningkatan perlindungan kawasan secara ketat

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis

6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Berikut disampaikan tabel program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia																
	Tujuan:																
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,39	70,38		70,66		71,62		72,02		72,62		72,62		
	Sasaran:																
1.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	63,94	64,44		65,08		66,49		67,34		68,36		68,36		DISDIK
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	79,34	79,74		79,80		79,98		80,20		80,46		80,46		DINKES; RSUD
1.1.3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran per Kapita	Nilai	68,75	67,83		67,93		68,08		69,18		69,61		69,61		DISTAN-KP; DISNAKKAN; DKUKMP
1.1.4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	53,70	55,70		58,83		60,83		63,33		65,33		65,33		DISBUDPORA

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	63,67	63,77		63,87		63,97		64,07		64,17		64,17		Dinas P2KBP3A
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	63,94	64,45		64,97		66,02		66,67		67,47		67,47		DISDIK
	Program: Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD/MI Paket A (%) (TPB4)	Persen	103,6	102,4	117.047.374.600	102,1	164.305.647.570	101,8	494.922.399.000	101,5	433.732.357.700	101,2	376.422.186.145	100	376.422.186.145	DISDIK
		Persentase APM SD/MI Paket A (%) (TPB1)	Persen	99,07	99,3		99,35		99,45		99,5		99,6		99,65		
		Persentase APK SMP/MTs/Paket B (%) (TPB4)	Persen	99,95	100		100		100		100		100		100		
		Persentase APM SMP/MTs/Paket B (%) (TPB1)	Persen	93,75	96,1		96,7		97,01		97,4		98,01		98,3		
		Persentase APK Paud formal (usia 5-6 tahun) (TPB4)	Persen	89,2	90,01		90,6		92,1		93,2		93,5		94		
		Persentase APM PAUD formal (usia 5-6 tahun) (TPB4)	Persen	75,2	77,2		78,1		79,2		80,1		81,2		82,5		
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang melakukan pengembangan kurikulum	Persen	n/a	n/a	-	-	-	65	650.000.000	70	675.000.000	75	700.000.000	80	700.000.000	DISDIK
		Persentase pendidikan dasar yang melakukan	Persen	n/a	n/a	-	-	-	60		75		80		90		DISDIK

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	pengembangan kurikulum Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK	Persen	75	76	4.127.055.000	80	8.377.387.000	82	20.585.600.000	83	21.757.800.000	85	22.104.054.000	88	22.104.054.000	DISDIK
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Persen	82	83		84		86		88		90		91		
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Persen	85	86		87		88		89		90		92		
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	Persen	75	78		80		81		83		85		87		
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan akreditasi perpustakaan	Persen	100	100	582.700.000	100	1.050.088.200	100	1.637.752.800	100	2.292.853.920	100	3.292.483.320	100	3.292.483.320	Dinas PERPUSIP
	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	79,34	79,74		79,8		79,98		80,2		80,46		80,46		DINKES; RSUD

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program:																	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	93,5	100	99.870.951.796	100	97.545.000.000	100	83.220.000.000	100	85.640.000.000	100	100.715.000.000	100	100.610.000.000	DINKES
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Persen	100	100	18.840.968.100	100	20.040.000.000	100	49.800.761.500	100	58.365.000.000	100	23.805.000.000	100	23.805.000.000	RSUD
		Tingkat Akreditasi	Persen	100	100	1.774.765.000	100	1.776.727.500	100	1.128.736.000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000	RSUD
		Persentase pemenuhan database kesehatan	Persen	100	100	29.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	RSUD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	orang	13 Dokter Spesialis	13 Dokter Spesialis	1.006.200.000	13 Dokter Spesialis	1.500.000.000	13 Dokter Spesialis	1.888.000.000	14 Dokter Spesialis	2.500.000.000	15 Dokter Spesialis	3.000.000.000	15 Dokter Spesialis	3.000.000.000	RSUD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Aspek Legalitas Pengelola Obat, Makanan dan Alat Kesehatan	Persen	100	100	282.000.000	100	335.000.000	100	330.000.000	100	370.000.000	100	415.000.000	100	280.000.000	DINKES
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	27	27	65.000.000	24	81.250.000	51,5	90.000.000	64,8	105.000.000	83,7	120.000.000	90	135.000.000	DINKES
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	28,3	27,9	180.000.000	30	210.000.000	35	240.000.000	40	270.000.000	45	300.000.000	50	330.000.000	DINKES
Sasaran:																	
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran per Kapita	Nilai	68,75	67,83		67,93		68,03		68,13		68,23		68,23		DISTAN-KP; DISNAKKAN; DKUKMP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program:																	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	Persen	0	5	142.769.000	5	591.000.000	5	620.550.000	5	651.577.000	5	684.155.000	25	2.690.051.000	DISNAKKAN
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok taniyang meningkat kapasitasnya	Persen	3	3	1.674.917.000	3,3	6.530.000.000	3,6	5.161.665.000	3,8	5.200.000.000	4	5.440.000.000	4	24.006.582.000	DISTAN-KP
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	Persen	100	100	2.858.504.576	100	1.040.800.000	100	1.242.840.000	100	1.304.981.000	100	1.370.228.000	100	7.817.353.576	DISNAKKAN
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pengawasan stabilisasi harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Ciamis		100	100	120.000.000	100	142.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	DKUKMP
Sasaran:																	
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	53,70	55,70		58,83		60,83		63,33		65,33		65,33		DISBUDBORA
Program:																	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	933.613.500	100	2.758.500.000	100	3.258.500.000	100	2.958.500.000	100	2.958.500.000	100	12.867.613.500	DISBUDPORA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	39,47	42,11	3.655.606.926	44,74	28.293.928.000	60,53	181.518.928.000	60,53	116.095.000.000	60,53	34.595.000.000	60,53	364.159.462.926	DISBUDPORA
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase sumber daya kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persen	0,05	0,08	104.999.999	0,09	1.200.000.000	0,11	27.200.000.000	0,12	1.250.000.000	0,13	1.200.000.000	0,13	30.954.999.999	DISBUDPORA

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/dikembangkan	Persen	92,86	95,36	623.047.640	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	9.299.047.640	DISBUDPORA
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan	Persen	50	50	114.015.000	50	6.087.744.000	50	1.749.744.000	50	1.810.000.000	100	6.148.000.000	100	15.909.503.000	DISBUDPORA
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Persen	22,46	22,46	643.704.000	22,50	12.239.000.000	23,77	1.339.000.000	25,00	1.255.000.000	26,19	1.255.000.000	26,19	16.731.704.000	DISBUDPORA
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	Persen	N/A	9,09	573.944.000	9,09	260.000.000	9,09	260.000.000	9,09	1.160.000.000	9,09	260.000.000	9,09	2.513.944.000	DISBUDPORA
	Sasaran: Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	63,67	63,77		63,87		63,97		64,07		64,17		64,17		Dinas P2KBP3A
	Program:																
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Persen	40,74	55,56	485.000.000	66,67	405.553.000	81,48	592.987.500	92,59	548.346.875	100	577.370.877	100	2.609.258.252	Dinas P2KBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani (TPB5)	Persen	100	100	150.000.000	100	157.500.000	100	210.682.500	100	216.321.875	100	223.662.969	100	1.087.490.000	Dinas P2KBP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala)	Persen	3,7	3,7	100.000.000	3,7	105.000.000	3,7	110.250.000	3,7	115.762.500	3,7	121.550.625	3,7	552.563.125	Dinas P2KBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan yang telah	Persen	6,79	6,79	75.000.000	7,17	78.750.000	7,55	241.500.000	7,92	122.250.000	8,3	132.000.000	8,3	528.750.000	Dinas P2KBP3A

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak															
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani	Persen	100	100	202.000.000	100	218.843.750	100	241.500.000	100	243.500.000	100	260.500.000	100	1.166.343.750	Dinas P2KBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Angka rata-rata usia pernikahan pertama perempuan dibawah 19 tahun	Tahun	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	364.651.875	100	1.657.689.375	Dinas P2KBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	75,9	76,1	10.812.526.250	76,2	11.377.182.250	76,3	11.973.503.863	76,4	12.597.529.056	76,5	13.250.136.133	76,5	59.148.852.552	Dinas P2KBP3A
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera yang naik kelas ke Keluarga Sejahtera 1	Persen	2	2	550.000.000	2	577.500.000	2	606.375.000	2	636.693.750	2	668.528.438	2	3.039.097.188	Dinas P2KBP3A
2	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah																
	Tujuan:																
	Terpenuhinya Infrastruktur yang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Mutu	N/A	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
	Sasaran:																
	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	76,955	77,862		79,447		80,654		81,94		83,149		83,149		Dinas PUPRP
		Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai	89,135	93,716		93,750		95,163		96,393		96,736		96,736		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan	Persentase rumah layak huni	Persen	68,31	68,73		68,78		68,84		68,89		68,95		68,95		Dinas PRKPLH

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kawasan Permukiman Secara Merata																
	Sasaran:																
	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	76,955	77,862		79,447		80,654		81,94		83,149		83,149		Dinas PUPRP
	Program:																
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap menjadi mantap	Persen	0,89	1,22	121.895.885.050	1,09	394.500.000.000	1,01	880.825.000.000	1,3	924.866.250.000	1,22	971.109.562.500	5,84	3.293.196.697 .550	Dinas PUPRP
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi sedang menjadi baik	Persen	0,73	1,2	27.022.281.500	1,5	94.050.000.000	1,3	162.888.511.000	1,4	171.032.936.550	1,1	179.584.583.378	6,5	634.578.312.428	Dinas PUPRP
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak (SPM)	Persen	89,62	90,12	2.313.224.000	90,62	15.250.000.000	91,12	39.142.580.000	91,62	41.099.709.000	92,12	43.154.694.450	92,12	140.960.207.450	Dinas PUPRP
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	Persen	37,94	46,09	3.612.952.950	47	350.000.000	48	1.229.402.500	49	1.290.872.625	50	1.355.416.256	50	7.838.644.331	Dinas PUPRP
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	51,852	51,852	523.605.000	55,556	2.695.000.000	59,259	2.420.600.000	62,963	2.541.630.000	66,667	2.668.711.500	66,667	10.849.546.500	Dinas PUPRP
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa tanah garapan yang dimediasi	Persen	100	100	17.320.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	640.195.000	Dinas PUPRP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Usulan penggunaan tanah yang dikaji	Persen	100	100	71.860.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	183.750.000	100	192.937.500	100	798.547.500	Dinas PUPRP
	Sasaran:																
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata	Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai	89,135	93,716		93,75		95,163		96,393		96,736		96,736		Dinas Perhubungan
	Program:																
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan	Persen	43,51	47,71	49.258.280.195	49,14	7.905.972.000	54,2	77.319.600.000	58,75	8.475.000.000	64,97	13.835.000.000	64,97	156.793.852.195	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	69,41	63,06		63,52		67,37		68,76		69,02		69,02		Dinas Perhubungan
	Sasaran:																
	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman secara merata	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	68,31	68,73		68,78		68,84		68,89		68,95		68,95		Dinas PRKPLH
	Program:																
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintahan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Persen	-	-	-	1,61	200.000.000	3,23	210.000.000	4,84	220.500.000	6,45	231.525.000	6,45	862.025.000	Dinas PUPRP
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi sedang menjadi baik	Persen	1,73	1,613	16.018.264.000	4,839	22.018.264.000	3,226	167.510.960.000	3,226	175.886.508.000	3,226	184.680.833.400	16,13	566.114.829.400	Dinas PUPRP
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Persen	57,6	57,6	110.000.000	100	135.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	875.500.000	Dinas PUPRP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	24,18	10,32	1.431.362.800	6,05	1.007.976.000	6,05	7.662.535.000	6,05	14.164.788.500	6,05	15.581.267.350	0	15.581.267.350	Dinas PRKPLH

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana/relokasi program Kabupaten/Kota yang ditangani (SPM)	Persen	100	100	26.238.409.800	100	183.000.000	100	2.675.000.000	100	3.080.000.000	100	3.388.000.000	100	3.388.000.000	Dinas PRKPLH
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni yang tepat sasaran	Persen	0,13	0,13	381.881.334	0,13	2.497.072.000	0,13	3.020.770.000	0,13	2.800.000.000	0,13	3.080.000.000	00,13	3.080.000.000	Dinas PRKPLH
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU yang ditingkatkan	Persen	71,43	71,43	1.047.514.000	71,43	13.792.517.000	71,43	13.228.907.000	71,43	15.435.000.000	71,43	16.978.500.000	71,43	16.978.500.000	Dinas PRKPLH
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Persen	100	100	50.902.500	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	282.952.500	Dinas Sosial
		Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang direhabilitasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
3	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal																
	Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,38	1,65		3,41		4,60		4,71		5,65		5,65		

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Keunggulan Lokal																	
		Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1)	Persen	6,65	7,64		7,53		6,38		6,06		5,98		5,98		
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)	Persen	5,06	-0,58		5,72		5,70		5,68		5,67		5,67		Dinas KUKMP
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,84	-2,62		5,83		5,95		6,06		6,17		6,17		Dinas KUKMP
		Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persen	2,45	2,55		2,75		3		3,25		3,5		3,5		Dinas KUKMP
		Spending of money	Miliar Rupiah	243	260		278		295		313		330		330		Dinas Pariwisata
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,87	1,66		2,68		2,77		2,86		2,94		2,94		DISNAKKAN
		Nilai Tukar Petani	Nilai	112,78	112,00		112,20		112,40		112,60		112,80		112,80		DISNAKKAN
		Skor PPH (TPB2)	Nilai	89,4	89,7	337.800.000	90	830.000.000	90,6	1.460.322.400	91,2	1.680.000.000	91,8	1.780.000.000	91,8	6.088.122.400	DISTAN-KP
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,5	-10,04		5,5		5,5		5,5		5,5		11,96		Dinas PMPTSP
	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	100,82	129,82		100		100		100		100		100		Dinas Sosial

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan:																	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,38	1,65		3,41		4,60		4,71		5,65		5,65		
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)	Persen	5,06	-0,58		2,64		3,66		4,5		5,1		5,1		
Program:																	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM	Persen	0,01	n/a	-	0,03	742.562.000	0,03	850.000.000	0,04	895.000.000	0,04	1.000.000.000	0,04	1.000.000.000	Dinas KUKMP
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	Persen	n/a	0,1	-	0,1	75.000.000	0,2	100.000.000	0,2	125.000.000	0,3	150.000.000	0,3	150.000.000	Dinas KUKMP
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,84	-2,62		4,2		4,41		5,28		5,61		5,61		Dinas KUKMP
Program:																	

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan	Persen	100	100	1.620.000.000	100	5.300.574.000	100	20.515.000.000	100	12.200.000.000	100	13.200.000.000	100	13.200.000.000	Dinas KUKMP
		Persentase peningkatan kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas KUKMP
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	38,84	53,57	120.000.000	55	131.000.000	60	200.000.000	70	180.000.000	80	225.000.000	75	225.000.000	Dinas KUKMP
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai Pemasaran Produk Dalam Negeri	Juta Rupiah	200	200	320.000.000	300	645.000.000	400	750.000.000	600	800.000.000	600	850.000.000	600	850.000.000	Dinas KUKMP
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	14,358 jt	9,146 jt	150.000.000	9,5 jt	190.000.000	9,8 jt	400.000.000	10 jt	825.000.000	10,3 jt	1.700.000.000	10,3 jt	1.700.000.000	Dinas KUKMP
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persen	2,45	2,55		2,75		3		3,25		3,5		3,5		Dinas KUKMP
Program:																	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	57,86	56,57	81.000.000	56,57	81.000.000	56,84	150.000.000	57,45	165.000.000	58,55	180.000.000	58,55	180.000.000	Dinas KUKMP
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/ USP Koperasi yang sehat	Persen	n/a	46,87	39.975.000	46,87	40.000.000	46,95	50.000.000	47,25	65.000.000	48	80.000.000	47,5	80.000.000	Dinas KUKMP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	n/a	42,85	200.000.000	42,85	170.000.000	43,25	200.000.000	43,25	215.000.000	43,5	230.000.000	43,5	230.000.000	Dinas KUKMP
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	n/a	85,71	160.000.000	85,71	127.000.000	85,95	150.000.000	85,95	165.000.000	86	180.000.000	86	180.000.000	Dinas KUKMP
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat usahanya	Persen	2,45	2,55	350.000.000	2,75	600.000.000	3	540.000.000	3,25	690.000.000	3,5	720.000.000	3,5	720.000.000	Dinas KUKMP
	Sasaran:																
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	<i>Spending of money</i>	Miliar Rupiah	243	260		278		295		313		330		330		Dinas Pariwisata
	Program:																
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Persen	0	0	-	0	-	20	1.500.000.000	40	3.000.000.000	40	3.000.000.000	100	7.500.000.000	Dinas Pariwisata
		Persentase Destinasi Pariwisata yang	Persen	100	100	3.085.552.798	100	5.562.427.300	100	7.799.590.165	100	263.779.340.000	100	206.414.340.000	100	2.186.648.200.000	Dinas Pariwisata

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		meningkat kunjungannya															
	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan	Persen	100	100	960.000.000	100	930.844.000	100	2.000.000.000	100	2.290.000.000	100	2.600.000.000	100	8.780.844.000	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Persentase Ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi sarana dan prasarananya	Persen	0	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.200.000.000	100	4.500.000.000	100	5.800.000.000	100	5.800.000.000	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	Persen	100	100	375.000.000	100	400.000.000	100	585.000.000	100	690.000.000	100	745.000.000	100	2.795.000.000	Dinas Pariwisata
	Sasaran:																
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensi perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,87	1,66		0,41		0,9		1,09		1,7		1,7		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	98,197	24.029, 10	778.428.510	24.509, 60	2.512.000.000	24.999, 80	3.637.300.000	25.499, 80	3.652.864.000	26.009, 80	3.693.207.000	26.009, 80	14.273.799.510	DISNAKKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	784,36 9	785,50 0	30.395.000	785,50 0	28.600.000	785,65 4	25.000.000	785,65 9	25.000.000	785,700	25.000.000	785,700	133.995.000	DISNAKKAN
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	1	1,5	629.295.376	1,5	5.259.935.000	1,5	6.022.931.750	1,5	5.799.078.000	1,5	6.089.031.000	7,5	23.800.271.126	DISNAKKAN
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Pertanian	Persen	170	180	7.560.000.000	190	4.170.000.000	200	14.736.428.910	210	16.100.000.000	220	17.500.000.000	220	60.066.428.910	DISTAN-KP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	20	20	560.000.000	20	2.000.000.000	20	3.500.000.000	20	3.675.000.000	20	3.858.750.000	100	13.593.750.000	DISNAKKAN
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	Persen	85	86	137.500.000	87	150.000.000	88	172.295.000	89	200.000.000	90	300.000.000	90	959.795.000	DISTAN-KP
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	Persen	100	100	2.858.504.576	100	1.040.800.000	100	1.242.840.000	100	1.304.981.000	100	1.370.228.000	100	7.817.353.576	DISNAKKAN
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,78	100,12		100,25		103,39		104		104,25		104,25		
Program:																	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Lokasi Perikanan Tangkapyang Diawasi	Lokasi	4	4	0	4	28.600.000	4	30.000.000	4	32.500.000	4	35.000.000	20	126.100.000	DISNAKKAN
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	Persen	0	5	142.769.000	5	591.000.000	5	620.550.000	5	651.577.000	5	684.155.000	25	2.690.051.000	DISNAKKAN
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	Persen	100	100	2.858.504.576	100	1.040.800.000	100	1.242.840.000	100	1.304.981.000	100	1.370.228.000	100	7.817.353.576	DISNAKKAN

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Persen	3	3	1.674.917.000	3,3	6.530.000.000	3,6	5.161.665.000	3,8	5.200.000.000	4	5.440.000.000	4	24.006.582.000	DISTAN-KP
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	85	86	60.000.000	87	70.000.000	88	248.864.700	89	250.000.000	90	300.000.000	90	928.864.700	DISTAN-KP
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian	kw/Ha	65,5	65,5	785.750.000	65,7	800.000.000	65,9	804.035.980	66,1	900.000.000	66,3	960.000.000	66,3	4.249.785.980	DISTAN-KP
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	1	1,5	629.295.376	1,5	5.259.935.000	1,5	6.022.931.750	1,5	5.799.078.000	1,5	6.089.031.000	7,5	23.800.271.126	DISNAKKAN
Sasaran:																	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensi perekonomian daerah	Skor PPH (TPB2)	Nilai	89,4	89,7	337.800.000	90	830.000.000	90,6	1.460.322.400	91,20	1.680.000.000	91,8	1.780.000.000	91,8	6.088.122.400	
Program:																	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase angka kecukupan energi	Persen	100	100	415.000.000	100	850.000.000	100	2.845.170.600	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100	10.310.170.600	DISTAN-KP
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi	kcal / kap / hr	2400	2400	337.800.000	2400	830.000.000	2400	1.460.322.400	2400	1.680.000.000	2400	1.780.000.000	2400	6.088.122.400	DISTAN-KP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ketersediaan protein	gr / kap/ hr	63	63		63		63		63		63		63		DISTAN-KP
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan yang dibina	Persen	n/a	n/a	n/a	65	55.000.000	67	327.095.000	69	365.000.000	70	430.000.000	70	1.177.095.000	DISTAN-KP
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengujian sampel pangan segar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73	104.550.000	74	110.000.000	75	170.000.000	75	384.550.000	DISTAN-KP
	Sasaran:																
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,5	-10,04		5,5		5,5		5,5		5,5		11,96		
	Program:																
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor	Persen	100	100	70.000.000	100	571.000.000	100	350.000.000	100	520.000.000	100	676.000.000	100	2.187.000.000	Dinas PMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	100	185.412.000	100	745.180.000	100	1.140.000.000	100	2.652.000.000	100	3.447.600.000	100	8.170.192.000	Dinas PMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu	Persen	75	86	590.000.000	86	638.864.000	91	1.135.454.600	95	6.066.181.960	100	7.622.036.548	100	16.052.537.108	Dinas PMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang di kendalikan	Persen	70	75	340.000.000	75	372.462.000	82	600.000.000	90	1.440.000.000	100	1.740.000.000	100	4.492.462.000	Dinas PMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terintegrasi Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	0	75	53.149.000	80	80.000.000	85	104.000.000	90	135.200.000	90	372.349.000	Dinas PMPTSP

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan:																	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal	Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1)	Persen	6,65	7,64		7,53		6,38		6,06		5,98		5,98		
Sasaran:																	
	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	100,82	129,82		100		100		100		100		100		
Program:																	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	Persen	100	100	-	100	85.000.000	100	93.500.000	100	102.850.000	100	113.135.000	100	701.971.000	Dinas Sosial
		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persen	100	100	307.486.000	100	999.396.000	100	1.109.335.600	100	1.212.669.160	100	1.326.006.076	100	4.647.406.836	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran yang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	Persen	n/a	n/a	n/a	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	232.050.000	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi	Persen	100	100	114.990.000	100	652.815.000	100	682.190.750	100	731.009.788	100	783.740.727	100	2.771.140.889	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial (TPB)	Persen	86	100	3.342.900.000	100	4.370.195.000	100	4.580.195.000	100	4.953.340.000	100	4.124.295.000	100	18.028.025.000	Dinas Sosial

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1)															
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	78,39	100	25.000.000	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	373.075.000	Dinas Sosial
		Persentase validitas data fakir miskin	Persen	85	100	213.429.000	100		100	509.026.500	100	509.026.500	100	509.026.500	100	5.955.553.500	Dinas Sosial
Sasaran:																	
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (TPB 8)	Persen	5,16	5,67		5,24		4,81		4,72		4,63		4,63		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Persen	0	0	-	0	-	100	700.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	60	2.600.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		0,88	2.150.000.000	1,20	3.560.000.000	1,20	7.950.000.000	1,20	8.450.000.000	1,20	8.450.000.000	1,20	30.560.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	1932,81	2048,1 4		2001,03		2115,51		2217,31		2345,26		2345,26	-	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	8,94	8,95	720.000.000	8,96	765.000.000	8,97	1.950.000.000	8,98	855.000.000	8,99	900.000.000	8,99	5.190.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Indeks Hubungan Industrial	Nilai	80	82	640.000.000	84	715.000.000	86	750.000.000	88	1.145.000.000	90	1.315.000.000	86	4.565.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	0	0	-	60	340.000.000	60	375.000.000	60	380.000.000	60	395.000.000	60	1.490.000.000	Dinas Tenaga Kerja
4	Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan																
Tujuan:																	
	Terpenuhinya Kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	55,21	62,41		62,42		62,43		62,43		62,44		62,44		

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	(IKLH)		156,2	141,6		141		140,6		140,2		139,8		139,8		
	Sasaran:																
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (TPB6)	Nilai	59,60	59,68		59,69		59,71		59,73		59,75		59,75		Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,99	79,99		79,99		79,99		79,99		79,99		79,99		Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	34,57	34,58		34,59		34,60		34,61		34,62		34,62		Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP
	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,62	0,64		0,66		0,68		0,7		0,72		0,72		BPBD
	Tujuan:																
	Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	55,21	62,41		62,42		62,43		62,43		62,44		62,44		
	Sasaran:																
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (TPB6)	Nilai	59,60	59,68		59,69		59,71		59,73		59,75		59,75		Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,99	79,99		79,99		79,99		79,99		79,99		79,99		Dinas PRKPLH;

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	34,57	34,58		34,59		34,60		34,61		34,62		34,62		Dinas PUPRP Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP
Program:																	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen mengenai Lingkungan Hidup yang ditetapkan	Persen	100	100	160.447.350	100	941.901.650	100	2.259.055.000	100	1.080.000.000	100	1.188.000.000	100	1.188.000.000	Dinas PRKPLH
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Perlindungan Kualitas Lingkungan	Persen	75	75	1.129.567.250	75	2.108.091.300	75	4.325.913.900	75	2.330.000.000	75	2.563.000.000	75	2.563.000.000	Dinas PRKPLH
		Persentase Mata Air yang dilindungi	Persen	18,52	11,11		11,11		11,11		11,11		11,11		11,11		Dinas PRKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH/RTP yang dibangun	Persen	100	100	3.152.786.500	100	5.182.458.400	100	5.182.458.400	100	5.800.000.000	100	6.380.000.000	100	6.380.000.000	Dinas PRKPLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Dokumen Rekomendasi Lingkungan yang difasilitasi	Persen	100	100	51.865.000	100	48.500.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	181.500.000	Dinas PRKPLH
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat (Pelestari Lingkungan Hidup) yang berprestasi	Persen	20	20	113.176.000	20	97.500.000	20	97.500.000	20	107.250.000	20	117.975.000	20	117.975.000	Dinas PRKPLH

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Meningkatkan Kesadarannya Terhadap Lingkungan Hidup	Persen	100	100	41.082.150	100	180.037.500	100	381.350.000	100	199.000.000	100	218.900.000	100	218.900.000	Dinas PRKPLH
		Persentase masyarakat/keompok peduli lingkungan	Persen	9,38			9,38		9,38		9,38		9,38		9,38	Dinas PRKPLH	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Titik Pantau Adipura yang Meningkatkan Kondisinya	Persen	30	30	115.812.900	30	251.900.000	30	251.900.000	30	277.090.000	30	304.799.000	30	304.799.000	Dinas PRKPLH
		Persentase Sekolah yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Sekolah Adiwiyata	Persen	20	20		20		20		20		20		20	Dinas PRKPLH	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan /Usaha yang mengelola Limbah dengan Baik	Persen	20	20	37.480.000	20	70.575.000	20	70.575.000	20	80.000.000	20	88.000.000	20	88.000.000	Dinas PRKPLH
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Dinas PRKPLH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (penanganan sampah)	Persen	27,32	27,32	12.019.625.701	30,5	8.196.331.500	32,5	13.750.000.000	34,5	14.800.000.000	36,5	16.280.000.000	36,5	16.280.000.000	Dinas PRKPLH
		Persentase Penurunan Timbulnya Sampah (pengurangan sampah)	Persen	48,03	49		49,97		51,97		53,97		55,97		55,97	Dinas PRKPLH	

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan dalam kondisi baik	Persen	100	100	800.000.000	100	2.000.000.000	100	2.462.400.000	100	2.585.520.000	100	2.714.796.000	100	10.562.716.000	Dinas PUPRP
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang berakses sanitasi (SPM)	Persen	72,98	74,43	2.899.880.000	75,88	7.250.000.000	77,33	5.399.648.000	78,78	5.669.630.400	80,23	5.953.111.920	80,23	27.172.270.320	Dinas PUPRP
	Tujuan:																
	Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (TPB1)	Nilai	156,2	141,6		141		140,6		140,2		139,8		139,8		
	Sasaran:																
	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,62	0,64		0,66		0,68		0,7		0,72		0,72		BPBD
	Program:																
	Program Penanggulangan Bencana					1.858.782,800		5.139.340,700		5.425.000.000		5.423.500.000		5.550.500.000		23.397.123,500	BPBD
		Presentase destana yang meningkat kapasitasnya (SPM)	Persen	n/a	n/a	1.858.782.800	26,32	5.139.340.700	26,32	5.123.541.500	52,63	5.123.000.000	78,95	5.850.500.000	100	21.236.382.200	BPBD
		Persentase evakuasi korban bencana yang tertangani (SPM)	Persen	75	53,05		28		31		34		37		37		BPBD

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penanganan kerusakan fisik pasca bencana sesuai dengan jitupasna	Persen	n/a	50		55		60		65		70		70		BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah (SPM)	Persen	93,23	94	5.067.704.250	94,5	5.630.782.500	95	6.256.425.000	95,5	6.882.067.500	96	7.570.274.250	96	31.407.253.500	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	776.400.000	100	1.076.400.000	100	1.142.720.000	100	1.213.606.000	100	12.89.411.300	100	5.498.537.300	Dinas Sosial
5	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien																
	Tujuan:																
	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	C		B		B		BB		BB		BB		

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien																
	Sasaran:																
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	B	B		B		BB		BB		A		A		BAPPEDA
		Opini BPK(TPB16)	Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Dinas DUKCAPIL; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Seluruh Kecamatan; Seluruh Perangkat Daerah; BPKD
		Maturitas SPIP	Level	2	3		3		3		3		3		3		Inspektorat; Dinas PERPUSIP
		Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2,35	2,64		2,64		2,8		2,9		3		3		Dinas KOMINFO
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	52,25		58		65		70		75		75		BKPSDM; BAPPEDA
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	67,5	67,5		69		70,5		72		73,5		73,5		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sasaran:																
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	Hasil Evaluasi AKIP(TPB16)	Predikat	B	B		B		BB		BB		A		A		

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas																	
Program:																	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten	Persen	100	100	1.204.678.000	100	1.563.008.700	100	1.239.100.000	100	1.899.750.000	100	2.222.425.000	100	8.128.961.700	BAPPEDA	
	- dokumen perencanaan: 5 dokumen														100		
	- Dokumen pengendalian dan evaluasi: 3														14		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas	Persen	90	100	1.180.437.693	100	2.181.353.300	100	2.890.000.000	100	3.083.500.000	100	3.406.600.000	100	12.741.890.993	BAPPEDA	
	1. Keselarasan antar dokumen perencanaan																
	2. sesuai dengan regulasi																
	3. Tepat waktu																
Sasaran:																	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan	Opini BPK(TPB16)	Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Publik yang Berkualitas																	
Program:																	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan	Persen	100	100	3.995.816.470	100	4.206.122.600	100	4.256.122.600	100	4.586.296.000	100	4.815.610.800	100	21.859.968.470	BPKD	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	7.178.244.270	100	7.556.046.600	100	8.156.046.600	100	8.971.650.800	100	9.420.233.340	100	41.282.221.610	BPKD	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5	5	6.932.203.580	5	7.297.056.400	5	12.258.652.400	5	13.332.878.900	5	13.999.522.845	5	53.820.314.125	BPKD	
Sasaran:																	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	96,11	93	6.647.055.000	96	2.829.009.400	97	4.259.400.000	98	4.779.400.000	99	4.887.400.000	99	23.402.264.400	Dinas DUKCAPIL	
	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	Persen	100	100		100		100		100		100		100			

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	54,27	52,00	136.409.000	54	570.895.250	56	2.136.000.000	58	1.590.000.000	60	1.683.000.000	62	6.116.304.250	Dinas DUKCAPIL
		Cakupan penerbitan akta kematian	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	Persen	100	100	149.626.000	100	1.576.976.600	100	2.025.000.000	100	1.021.846.600	100	1027846600	100	5.801.295.800	Dinas DUKCAPIL
		Persentase database kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang dikelola	Persen	100	100	124.882.000	100	127.782.700	100	175.000.000	100	190.000.000	100	205.000.000	100	617.869.700	Dinas DUKCAPIL
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.940.965.367	100	50.690.813.800	100	55.859.895.180	100	61.535.884.698	100	68.069.473.168	100	239.097.032.213	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	Persen	100	100	1.066.108.850	100	1.738.811.000	100	1.912.692.100	100	2.103.961.310	100	2.314.357.441	100	9.135.930.701	Sekretariat Daerah

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	Persen	100	100	6.897.467.500	100	7.745.952.000	100	8.532.142.000	100	8.532.142.000	100	9.007.642.064	100	40.715.345.564		Sekretariat DPRD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Seluruh Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam Pembangunan Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Seluruh Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Seluruh Kecamatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B		B		BB		BB		A		A		A	Seluruh Perangkat Daerah
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	Seluruh Perangkat Daerah

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Seluruh Perangkat Daerah
		Level Maturitas SPIP	Level	2	3		3		3		3		3		3		Sekretariat Daerah
Sasaran:																	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Maturitas SPIP	Level	3	3		3		3		3		3		3		
Program:																	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai	Persen	90,32	93,1	642.530.000	93,2	5.900.390.000	93,3	6.195.409.500	93,4	6.505.179.975	93,5	6.830.438.974	93,5	7.171.960.922	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan Predikat SAKIP nya	Persen	10	10	5.249.691.000	36	141.500.000	64	148.575.000	82	156.003.750	100	163.803.938	100	171.994.134	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi maturitas SPIP	Persen	35	53	55.760.000	100	240.794.400	100	252.834.120	100	265.475.826	100	278.749.617	100	292.687.098	Inspektorat
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	Persen	100	100	56.350.000	100	210.550.000	100	315.607.600	100	441.850.640	100	662.775.960	100	662.775.960	Dinas PERPUSIP
Sasaran:																	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2,35	2,64		2,64		2,8		2,9		3		3		

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program:																	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks aspek layanan publik berbasis elektronik	Nilai	2,14	2,5	282.310.000	2,5	247.867.554	2,6	1.010.700.000	2,75	1.050.000.000	2,8	1.100.000.000	2,8	3.784.882.554	Dinas KOMINFO
		Indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Nilai	2,17	3,14		3		3,1		3,25		3,5		3,5		
	Program Aplikasi Informatika	Indeks aspek perencanaan strategis SPBE	Nilai	3	1,5	3.163.216.000	3	4.509.244.080	3,25	11.275.000.000	3,4	7.375.000.000	3,5	8.500.000.000	3,5	34.822.460.080	Dinas KOMINFO
		Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	Nilai	2	1,67		2,25		2,3		2,5		2,7		2,7		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks penerapan manajemen SPBE	Nilai	n/a	n/a	240.985.000	1,5	210.327.200	1,6	1.255.000.000	1,75	1.395.000.000	1,9	1.520.000.000	1,9	4.621.312.200	Dinas KOMINFO
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks aspek audit TIK	Nilai	n/a	n/a	111.460.000	0,6	215.959.400	0,8	380.000.000	1	400.000.000	1,2	450.000.000	1,2	1.557.419.400	Dinas KOMINFO
	Sasaran:																
	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	52,25		58		65		70		75		75		
	Program:																
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Pendidikannya	Persen	0,52	0,58	2.725.000.000	0,61	2.876.900.000	0,63	3.006.927.000	0,68	3.121.691.810	0,71	3.265.866.264	0,71	3.265.866.264	BKPSDM
		Persentase PNS dengan kinerja baik dan sangat baik	Persen	99,81	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86		99,86		BKPSDM

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase PNS yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	Persen	99,81	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86		99,86		BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang bersertifikat diklat/workshop/seminar/magang/kursus	Persen	100	100	4.066.755.000	100	4.066.755.000	100	4.088.845.800	100	4.101.958.524	100	4.115.464.630	100	4.115.464.630	BKPSDM
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	443.998.000	100	459.394.000	100	1.544.500.000	100	1.673.950.000	100	1.610.345.000	100	3.923.265.500	BAPPEDA
	Sasaran: Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	67,5	67,5		70		72,5		75		77,5		77,5		
	Program: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; rasio linmas per 100 orang penduduk; persentase peningkatan kualitas teknis Satpol PP	Persen	0,4	0,5	4.651.874.950	0,5	6.182.351.800	0,5	9.000.725.000	0,5	8.060.655.200	0,5	8.901.720.450	0,5	36.797.327.400	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	380.365.000	100	197.349.400	100	800.000.000	100	1.040.000.000	100	1.352.000.000	100	63.111.439.092	Badan KESBANGPOL
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui	Presentase Peningkatan Hak Pilih Masyarakat	Persen	100	100	359.253.000	100	2.217.357.800	100	2.465.066.800	100	3.204.586.840	100	4.165.962.892	100	4.165.962.892	Badan KESBANGPOL

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan ormas, LSM dan parpol	Persen	100	100	418.882.000	100	1.672.880.000	100	535.500.000	100	696.150.000	100	904.995.000	100	904.995.000	Badan KESBANGPOL
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	100		100	144.585.800	100	793.165.000	100	1.031.114.500	100	1.340.448.850	100	1.340.448.850	Badan KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	100	100	597.877.000	100	750.000.000	100	1.522.953.600	100	1.979.839.680	100	2.573.791.584	100	2.573.791.584	Badan KESBANGPOL
6	Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa																
	Tujuan:																
	Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,688	0,713			0,742		0,745		0,748		0,75		0,75	
	Sasaran:																
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10)	Persen	166,67	137,50			136,84		15,56		19,23		19,35		19,35	DPMD

No.	Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program:																	
	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Persen	42	43	58.310.000	44	49.250.000	47	107.000.000	48	122.600.000	50	141.000.000	50	419.850.000	DPMD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Persen	0	0,78	12.640.000	1,55	42.008.000	2,71	148.000.000	3,88	175.000.000	5,04	213.000.000	5,04	578.008.000	DPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen	100	100	1.355.200.360	100	6.079.805.400	100	8.076.000.000	100	9.400.000.000	100	10.565.000.000	100	34.120.805.400	DPMD
		Persentase Bumdes yang Berkembang	Persen	74,42	74,81		75,19		75,58		75,97		76,36		76,36		
		Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	Persen	100	100	1.968.863.000	100	2.820.770.000	100	3.355.000.000	100	3.493.150.000	100	4.016.780.000	100	13.685.700.000	DPMD
		Persentase desa yang memanfaatkan TTG	Persen	5,04	6,59		7,36		8,14		8,91		9,69		9,69		DPMD

Prioritas pembangunan daerah merupakan sebuah amanat yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya. Selain program unggulan, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis dan proyek strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM sebagai bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis, dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.5
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD
Kabupaten Ciamis

NO	JENIS PELAYANAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI	
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	Pendidikan
			2	APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	
			3	Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun	
			4	Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan	
			5	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	
2	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	APK SD/MI Paket A	Pendidikan
			2	APM SD/MI Paket A	
			3	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Paket A ke SMP/MTs/Paket B	
			4	Angka Putus Sekolah SD/MI	
			5	APK SMP/MTs/Paket B	
			6	APM SMP/MTs/Paket B	
			7	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	
			8	Jumlah SMP Terakreditasi A	
			9	Angka Putus Sekolah SMP	
3	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	1	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin	Pendidikan
			2	Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase)	
			3	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi	
			4	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan	Program pengendalian	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal	Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI
		Program	pengendalian			
	Penderita Hipertensi	penyakit			(SPM) Pengendalian Penyakit	
9	Penderita Diabetes Militus	Program penyakit	pengendalian	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit	Kesehatan
10	Pelayan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program penyakit	pengendalian	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit	Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program penyakit	pengendalian	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit	Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat Peningkatan atau Promotif dan Pencegahan atau Preventif	Program penyakit	pengendalian	1	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit	Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM						
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan	1	Persentase penduduk berakses air minum	Pekerjaan Umum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan	1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Pekerjaan Umum
SPM PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Perumahan	Pengembangan	1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Perumahan Rakyat
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1	Persentase Patroli Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		1	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan		1	Rasio petugas Linmas	
		Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik		1	Terpeliharanya Kantibmas Selama	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan	1	Jumlah Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				1	Persentase Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap ancaman bencana	
				1	Persentase kejadian bencana yang tertangani	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					

NO	JENIS PELAYANAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) respon time rate	Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase penyandangdisabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(SPM)	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase lanjut usiaterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(SPM)	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Hasil Analisis

6.4. Rencana Proyek Strategis

Proyek strategis Nasional dan Provinsi secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis. Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya adalah pembangunan bendungan Leuwikeris dan pembangunan bendungan Matenggeng, sedangkan yang menjadi Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Ciamis; reaktivasi jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang; pembangunan *Command Center*; pengembangan wisata Situ Wangi Kawali; penataan alun-alun; pembangunan *Creative Center*; pembangunan pusat budaya; dan revitalisasi pasar.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Ciamis untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2024 berjumlah 132 program, yang merupakan pelaksanaan dari 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 urusan pemerintahan pilihan, 2 unsur pendukung, 1 unsur pengawas, 1 kewilayahan, 1 pemerintahan umum dan 1 penunjang urusan. Program perangkat daerah Kabupaten Ciamis disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024
Kabupaten Ciamis

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	64.966.701.051,00	67.175.000.000	69.190.250.000	71.265.957.000	73.403.936.000	3,01
Pendapatan Retribusi Daerah	8.110.809.967,00	9.358.558.500	9.629.391.000	9.918.273.000	10.215.821.000	5,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.676.875.983,00	3.700.000.000	3.811.000.000	3.925.330.000	4.043.090.000	2,34
Lain-lain PAD yang Sah	177.437.937.019,16	172.941.441.500	178.139.609.000	183.483.797.000	188.988.311.000	1,54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	254.192.324.020,16	253.175.000.000	260.770.250.000	268.593.357.000	276.651.158.000	2,08
PENDAPATAN TRANSFER						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.921.386.555.762,00	1.955.031.818.000	2.052.783.408.360	2.155.422.578.618	2.263.193.707.899	4,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.086.024.634,00	129.813.381.000	342.092.056.234	346.103.289.234	350.234.859.234	-20,55
Total Pendapatan Transfer	2.241.472.580.396,00	2.084.845.199.000	2.394.875.464.594	2.501.525.867.852	2.613.428.567.133	3,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	124.567.805.014,0	-	128.300.176.393	132.149.181.684	136.113.657.135	26,46
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	124.567.805.014,0	-	128.300.176.393	132.149.181.684	136.113.657.135	26,46
JUMLAH PENDAPATAN	2.620.232.709.430,16	2.338.020.199.000	2.783.945.890.987	2.902.268.406.536	3.026.193.382.268	3,03
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	1.019.980.756.757,00	1.010.760.994.392	1.102.696.575.992	1.135.777.473.272	1.169.850.797.470	3,31
Belanja Barang dan Jasa	606.474.135.846,00	582.736.386.143	564.457.059.932	603.611.759.730	621.720.112.522	0,52

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Bunga	-	-	-	-	-	0,00
Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
Hibah	88.975.619.900,00	101.948.608.400	96.669.821.000	93.769.727.000	90.956.636.000	0,27
Bantuan Sosial	32.057.000.000,00	7.340.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-82,12
Jumlah Belanja Operasi	1.747.487.512.503,00	1.702.785.988.935	1.771.823.456.924	1.841.158.960.002	1.890.527.545.992	1,91
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	7.528.738.062,00	4.555.600.000	6.735.882.760	6.937.959.243	7.146.098.020	-6,77
Belanja Peralatan dan Mesin	119.193.660.017,00	56.089.841.940	149.883.857.027	154.380.372.738	159.011.783.920	-11,03
Belanja Gedung dan Bangunan	101.745.576.531,00	34.891.930.025	69.025.891.150	108.186.855.864	111.432.461.540	-25,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.506.526.166,00	101.365.832.500	286.709.028.126	295.310.298.969	324.975.589.264	7,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	40.825.855.686,00	1.059.300.000	1.082.324.000	1.114.793.720	1.148.237.532	-936,52
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	416.800.356.462,00	197.962.504.465	513.436.983.063	565.930.280.534	603.714.170.276	-8,39
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	25,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	25,00
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.176.655.488,00	8.100.000.000	8.343.000.000	8.593.290.000	8.851.088.000	14,29
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	497.851.149.613,00	465.153.455.600	482.140.851.000	496.605.076.000	511.503.228.000	0,58
Jumlah Belanja Transfer	502.027.805.101,00	473.253.455.600	490.483.851.000	505.198.366.000	520.354.316.000	0,81
JUMLAH BELANJA	2.666.315.674.066,00	2.384.001.949.000	2.785.744.290.987	2.922.287.606.536	3.024.596.032.268	2,66
SURPLUS/DEFISIT	(46.082.964.636)	- 45.981.750.000	-1.798.400.000	- 20.019.200.000	1.597.350.000	-253,19

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1.1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	698.043.324.260	BB	592.755.552.297	BB	653.430.000.000	BB	654.450.000.000	A	654.875.000.000	A	654.875.000.000	Dinas Pendidikan
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	555	561		563		650		750		800		800		
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,01	86		88		90		91		92		92		
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3		3		3		3		3		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Persentase APK SD/MI Paket A	%	103,6	102,4	117.047.374.600	102,1	164.305.647.570	101,8	494.922.399.000	101,5	433.732.357.700	101,2	376.422.186.145	100	376.422.186.145	Dinas Pendidikan
		2 Persentase APM SD/MI Paket A	%	99,07	99,3		99,35		99,45		99,5		99,6		99,65		
		3 Persentase APK SMP/MTs/Paket B	%	99,95	100		100		100		100		100		100		
		4 Persentase APM SMP/MTs/Paket B	%	93,75	96,1		96,7		97,01		97,4		98,01		98,3		
		5 Persentase APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	89,2	90,01		90,6		92,1		93,2		93,5		94		
		6 Persentase APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	75,2	77,2		78,1		79,2		80,1		81,2		82,5		
3	Program Pengembangan Kurikulum	1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang melakukan pengembangan kurikulum	%	n/a	n/a	-	-	-	65	650.000.000	70	675.000.000	75	700.000.000	80	700.000.000	Dinas Pendidikan
		2 Persentase pendidikan dasar yang melakukan pengembangan kurikulum	%	n/a	n/a		-		60		75		80		90		Dinas Pendidikan
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK	%	75,00	76,00	4.127.055.000	80,00	8.377.387.000	82,00	20.585.600.000	83,00	21.757.800.000	85,00	22.104.054.000	88,00	22.104.054.000	Dinas Pendidikan
		2 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	%	82,00	83,00		84,00		86,00		88,00		90,00		91,00		
		3 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		92,00		
		4 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	%	75,00	78,00		80,00		81,00		83,00		85,00		87,00		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1 Dinas Kesehatan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	BB	111,145,000	BB	123,889,060	BB	148,912,500	BB	185,692,000	BB	190,670,000	BB	190,670,000	Dinas Kesehatan
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	540	550		560		580		600		650		650		Dinas Kesehatan
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.19	81.20	70,938,958,655	81.40	99,279,552,135	81.60	82,791,033,000	81.80	81,071,222,625	82.00	82,071,222,000	82.00	82,071,222,000	Dinas Kesehatan
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3		3		3		3		3		Dinas Kesehatan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	93,50	100	99.870.951.796	100	97.545.000.000	100	83.220.000.000	100	85.640.000.000	100	100.715.000.000	100	100.610.000.000	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	27	27	65.000.000	24	81.250.000	51,50	90.000.000	64,80	105.000.000	83,70	120.000.000	90	135.000.000	Dinas Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase aspek legalitas pengelola obat, makanan dan alat kesehatan	%	100	100	282.000.000	100	335.000.000	100	330.000.000	100	370.000.000	100	415.000.000	100	280.000.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	28,30	27,90	180.000.000	30	210.000.000	35	240.000.000	40	270.000.000	45	300.000.000	50	330.000.000	Dinas Kesehatan
2 Rumah Sakit Umum Daerah																	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	%	100	100	18.840.968.100	100	20.040.000.000	100	49.800.761.500	100	58.365.000.000	100	23.805.000.000	100	23.805.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
		2 Tingkat Akreditasi		100	100	1.774.765.000	100	1.776.727.500	100	1.128.736.000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000	
		3 Persentase pemenuhan database kesehatan		100	100	29.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kualitas SDM		13 Dokter Spesialis	13 Dokter Spesialis	1.006.200.000	13 Dokter Spesialis	1.500.000.000	13 Dokter Spesialis	1.888.000.000	14 Dokter Spesialis	2.500.000.000	15 Dokter Spesialis	3.000.000.000	15 Dokter Spesialis	3.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	165.173.876.500	BB	541.495.000.000	BB	568.819.750.000	BB	596.985.112.500	BB	626.834.368.125	BB	626.834.368.125	DPUPRP
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	580	582	165.173.876.500	584	541.495.000.000	586	568.819.750.000	588	596.985.112.500	590	626.834.368.125	590	626.834.368.125	DPUPRP
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,86	79,9	165.173.876.500	80,42	541.495.000.000	80,94	568.819.750.000	81,46	596.985.112.500	82	626.834.368.125	82	626.834.368.125	DPUPRP
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	165.173.876.500	3	541.495.000.000	3	568.819.750.000	3	596.985.112.500	3	626.834.368.125	3	626.834.368.125	DPUPRP
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap menjadi mantap	%	0,89	1,22	121.895.885.050	1,09	394.500.000.000	1,01	880.825.000.000	1,30	924.866.250.000	1,22	971.109.562.500	5,84	3.293.196.697.550	DPUPRP
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi sedang menjadi baik	%	0,73	1,20	27.022.281.500	1,50	94.050.000.000	1,30	162.888.511.000	1,40	171.032.936.550	1,10	179.584.583.378	6,50	634.578.312.428	DPUPRP
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	89,62	90,12	2.313.224.000	90,62	15.250.000.000	91,12	39.142.580.000	91,62	41.099.709.000	92,12	43.154.694.450	92,12	140.960.207.450	DPUPRP
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan dalam kondisi baik	%	100	100	800.000.000	100	2.000.000.000	100	2.462.400.000	100	2.585.520.000	100	2.714.796.000	100	10.562.716.000	DPUPRP
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang berakses sanitasi	%	72,98	74,43	2.899.880.000	75,88	7.250.000.000	77,33	5.399.648.000	78,78	5.669.630.400	80,23	5.953.111.920	80,23	27.172.270.320	DPUPRP
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	37,94	46,09	3.612.952.950	47,0	350.000.000	48,0	1.229.402.500	49	1.290.872.625	50	1.355.416.256	50	7.838.644.331	DPUPRP
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintahan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi	%	-	-	-	1,61	200.000.000	3,23	210.000.000	4,84	220.500.000	6,45	231.525.000	6,45	862.025.000	DPUPRP
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi sedang menjadi baik	%	1,73	1,613	16.018.264.000	4,839	22.018.264.000	3,226	167.510.960.000	3,226	175.886.508.000	3,226	184.680.833.400	16,13	566.114.829.400	DPUPRP
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	%	57,6	57,6	110.000.000,000	100	135.000.000,000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000,000	100	875.500.000	DPUPRP
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang	%	51,852	51,852	523.605.000	55,556	2.695.000.000	59,259	2.420.600.000	62,963	2.541.630.000	66,667	2.668.711.500	66,667	10.849.546.500	DPUPRP
1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikast	B	BB	3,726,750,700	BB	14,493,058,280	BB	15,398,128,100	BB	6,540,587,130	BB	7,194,645,843	BB	7,194,645,843	DPRKPLH
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	700	700	3,726,750,700	549.47	14,493,058,280	549.47	15,398,128,100	549.47	6,540,587,130	549.47	7,194,645,843	549.47	7,194,645,843	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	86.89	3,726,750,700	86.89	14,493,058,280	86.89	15,398,128,100	86.89	6,540,587,130	86.89	7,194,645,843	86.89	7,194,645,843	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3,726,750,700	2	14,493,058,280	2	15,398,128,100	2	6,540,587,130	2	7,194,645,843	2	7,194,645,843	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	24,18	10,32	1.431.362.800	6,05	1.007.976.000	6,05	7.662.535.000	6,05	14.164.788.500	6,05	15.581.267.350	0	15.581.267.350	DPRKPLH
3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana/relokasi program Kabupaten/Kota yang ditangani	%	100	100	26.238.409.800	100	183.000.000	100	2.675.000.000	100	3.080.000.000	100	3.388.000.000	100	3.388.000.000	DPRKPLH
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni yang tepat sasaran		0,13	0,13	381.881.334	0,13	2.497.072.000	0,13	3.020.770.000	0,13	2.800.000.000	0,13	3.080.000.000	0,13	3.080.000.000	DPRKPLH
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU yang ditingkatkan	%	71,43	71,43	1.047.514.000	71,43	13.792.517.000	71,43	13.228.907.000	71,43	15.435.000.000	71,43	16.978.500.000	71,43	16.978.500.000	DPRKPLH
1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
1 Satuan Polisi Pamong Praja																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	333,405,750	BB	998,119,575	BB	3,669,169,250	A	3,923,359,799	A	5,100,367,739	A	5,100,367,739	Satpol PP
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	600	620.00	5,679,221,850	640.00	6,310,246,500	660.00	7,011,385,680.00	680.00	7,712,523,500	700.00	8,483,775,850	700.00	35,197,152,700	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76,54	76,7		77.00		78.00		79.00		80		80		
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3		3		3		3		3		3		
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum; rasio linmas per 100 orang penduduk; persentase peningkatan kualitas teknis satpol pp	%	0,4	0,5	4.651.874.950	0,5	6.182.351.800	0,5	9.000.725.000	0,5	8.060.655.200	0,5	8.901.720.450	0,5	36.797.327.400	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah	%	93,23	94	5.067.704.250	94,5	5.630.782.500	95	6.256.425.000	95,5	6.882.067.500	96	7.570.274.250	96	31.407.253.500	
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	285,860,000	BB	1,567,817,300	BB	1,758,000,000	BB	1,392,300,000	BB	1,502,100,000	BB	1,502,100,000	BPBD
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	600	600	10,500,000	600	2,921,532,000	600	2,998,470,300	600	3,072,408,600	600	3,149,993,900	600	3,149,993,900	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.41	82.41	1,744,000,000	82.50	704,382,000	82.55	778,500,000	82.60	884,500,000	82.70	973,350,000	82.70	973,350,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	18,000,000	3	12,000,000	3	28,000,000	3	31,500,000	3	35,000,000	3	35,000,000	
2	Program Penanggulangan Bencana	Presentase destana yang meningkat kapasitasnya	%	n/a	n/a	1.858.782.800	26,32	5.139.340.700	26,32	5.123.541.500	52,63	5.123.000.000	78,95	5.850.500.000	100,00	21.236.382.200	BPBD
		Persentase evakuasi korban bencana yang tertangani	%	0,75	53,05		28,00		31,00		34,00		37,00		37,00		BPBD
		Persentase penanganan kerusakan fisik pasca bencana sesuai dengan jtipasna	%	n/a	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		BPBD
1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	7,200,000	BB	32,158,000	BB	56,640,000	BB	55,621,125	BB	58,402,181	BB	58,402,181	Dinas Sosial
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	500	650	298,800,000	650	2,595,577,929	650	2,740,148,000	650	3,566,836,025	650	3,920,124,164	650	3,920,124,164	Dinas Sosial
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.67	86.3	560,623,250	86.3	1,108,023,648	90	606,140,000	90	2,330,453,464	90	2,467,836,721	90	2,467,836,721	Dinas Sosial
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	866,623,250	3	3,735,759,577	3	3,402,928,000	3	5,952,910,614	3	6,446,363,066	3	6,446,363,066	Dinas Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	-	100	85.000.000	100	93.500.000	100	102.850.000	100	113.135.000	100	701.971.000	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial	%	100	100	307.486.000	100	999.396.000	100	1.109.335.600	100	1.212.669.160	100	1.326.006.076	100	4.647.406.836	Dinas Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran yang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	%	n/a	n/a	n/a	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	232.050.000	Dinas Sosial
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi	%	100	100	114.990.000	100	652.815.000	100	682.190.750	100	731.009.788	100	783.740.727	100	2.771.140.889	Dinas Sosial
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	86	100	3.342.900.000	100	4.370.195.000	100	4.580.195.000	100	4.953.340.000	100	4.124.295.000	100	18.028.025.000	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	78,39	100	25.000.000	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	373.075.000	Dinas Sosial
		Persentase validitas data fakir miskin	%	85	100	213.429.000	100	509.026.500	100	509.026.500	100	509.026.500	100	509.026.500	100	5.955.553.500	Dinas Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	776.400.000	100	1.076.400.000	100	1.142.720.000	100	1.213.606.000	100	1.289.411.300	100	5.498.537.300	Dinas Sosial
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	50.902.500	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	282.952.500	Dinas Sosial
		Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	282.050.000	
2 Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	-	BB	1.845.000.000	BB	1.990.000.000	BB	12.905.000.000	BB	13.500.000.000	BB	14.000.000.000	BB	44.240.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	-	698		716,54		717		718		719		719		
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	88,88		92,47		92,48		92,49		92,5		92,5		
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	-	3		2		3		3		3		3		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	%	-	-	0	-	0	100	700.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	60	2.600.000.000	Dinas Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%		0,88	2.150.000.000	1,20	3.560.000.000	1,20	7.950.000.000	1,20	8.450.000.000	1,20	8.450.000.000	1,20	30.560.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/org	1.932,81	2.048,14		2.024,48		2.115,51		2.217,31		2.345,26		2.345,26	-	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	8,94	8,95	720.000.000	8,96	765.000.000	8,97	1.950.000.000	8,98	855.000.000	8,99	900.000.000	8,99	5.190.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Indeks Hubungan Industrial	%	80	82	640.000.000	84	715.000.000	86	750.000.000	88	1.145.000.000	90	1.315.000.000	86	4.565.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	A	A	1.019.523.200	A	7.906.127.000	A	8.157.197.992	A	8.408.268.984	A	8.667.067.708	A	8.667.067.708	Dinas P2KBP3A
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	820	825		827		828		829		830		830		Dinas P2KBP3A
		3 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3		4		4		4		4		Dinas P2KBP3A
		4 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	76		77		78		79		80		80		Dinas P2KBP3A
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender	%	40,74	55,56	485.000.000	66,67	405.553.000	81,48	592.987.500	92,59	548.346.875	100	577.370.877	100	2.609.258.252	
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani	%	100	100	150.000.000	100	157.500.000	100	210.682.500	100	216.321.875	100	223.662.969	100	1.087.490.000	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala)	%	3,70	3,70	100.000.000	3,70	105.000.000	3,70	110.250.000	3,70	115.762.500	3,70	121.550.625	3,70	552.563.125	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	%	6,79	6,79	75.000.000	7,17	78.750.000	7,55	241.500.000	7,92	122.250.000	8,30	132.000.000	8,30	528.750.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani	%	100	100	202.000.000	100	218.843.750	100	241.500.000	100	243.500.000	100	260.500.000	100	1.166.343.750	
2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	181.000.000	BB	570.304.000	BB	593.800.000	BB	614.000.000	A	614.000.000	A	614.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	650	650	162.170.16.311	660	16.105.470.000	758,6	16.622.364.340	770	18.262.954.947	780	18.262.954.947	780	18.262.954.947	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,54	82,66	904.077.500	83,21	702.052.200	83,74	2.568.203.250	84,39	2.711.400.000	84,99	2.856.500.000	84,99	2.856.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4 Levael Maturitas SPIP	Nilai	3	3	385.366.250	3	300.091.730	3	657.326.500	3	690.000.000	4	706.000.000	4	706.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	100	100	415.000.000	100	850.000.000	100	2.845.170.600	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100	10.310.170.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi	kcal/kap/hr	2400	2400	337.800.000	2400	830.000.000	2400	1.460.322.400	2400	1.680.000.000	2400	1.780.000.000	2400	6.088.122.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein	gr/kap/hr	63	63		63		63		63		63		63		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
																	Ketahanan Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan yang dibina	%	n/a	n/a	n/a	65	55.000.000	67	327.095.000	69	365.000.000	70	430.000.000	70	1.177.095.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengujian sampel pangan segar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73	104.550.000	74	110.000.000	75	170.000.000	75	384.550.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																	
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Dinas PUPRP)																	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa tanah garapan yang dimediasi	%	100	100	17.320.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	640.195.000	Dinas PUPRP
2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Usulan penggunaan tanah yang dikaji	%	100	100	71.860.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	183.750.000	100	192.937.500	100	798.547.500	Dinas PUPRP
2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)																	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen mengenai Lingkungan Hidup yang ditetapkan	%	100	100	160.447.350	100	941.901.650	100	2.259.055.000	100	1.080.000.000	100	1.188.000.000	100	1.188.000.000	DPRKPLH
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Perlindungan Kualitas Lingkungan	%	75	75	1.129.567.250	75	2.108.091.300	75	4.325.913.900	75	2.330.000.000	75	2.563.000.000	75	2.563.000.000	DPRKPLH
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Mata Air yang dilindungi	%	18,52	11,11		11,11	11,11		11,11		11,11		11,11			DPRKPLH
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH/RTP yang dibangun	%	100	100	3.152.786.500	100	5.182.458.400	100	5.182.458.400	100	5.800.000.000	100	6.380.000.000	100	6.380.000.000	DPRKPLH
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase Dokumen Rekomendasi Lingkungan yang difasilitasi	%	100	100	51.865.000	100	48.500.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	181.500.000	DPRKPLH

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
5	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat (Pelestari Lingkungan Hidup) yang berprestasi	%	20	20	113.176.000	20	97.500.000	20	97.500.000	20	107.250.000	20	117.975.000	20	117.975.000	DPRKPLH
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Meningkatkan Kesadarannya Terhadap Lingkungan Hidup	%	100	100	41.082.150	100	180.037.500	100	381.350.000	100	199.000.000	100	218.900.000	100	218.900.000	DPRKPLH
		Persentase masyarakat/kelompok peduli lingkungan	%	9,38			9,38		9,38		9,38		9,38		9,38	DPRKPLH	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Sekolah Adiwiyata	%	20			20		20		20		20		20	DPRKPLH	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100			100		100		100		100		100	DPRKPLH	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (penanganan sampah)	%	27,32	27,32	12.019.625.701	30,5	8.196.331.500	32,5	13.750.000.000	34,5	14.800.000.000	36,5	16.280.000.000	36,5	16.280.000.000	DPRKPLH
		Persentase Penurunan Timbulnya Sampah (pengurangan sampah)	%	48,03	49		49,97		51,97		53,97		55,97		55,97	DPRKPLH	
		Persentase Titik Pantau Adipura yang Meningkatkan Kondisinya	%	30	30	115.812.900	30	251.900.000	30	251.900.000	30	277.090.000	30	304.799.000	30	304.799.000	DPRKPLH

2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	1,680,303,675	BB	7,213,891,207	BB	8,694,447,450	BB	29,408,936,600	A	14,518,000,000	A	61,515,578,932	Dinas Dukcapil
2	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	765	766		767		768		769		770		770		Dinas Dukcapil
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,72	80.25		80.50		80.75		81		81.25		81.25		Dinas Dukcapil
4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	2		3		3		3		3		3		Dinas Dukcapil

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Program Pendaftaran Penduduk	1 Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	%	96,11	93	6.647.055.000	96	2.829.009.400	97	4.259.400.000	98	4.779.400.000	99	4.887.400.000	99	23.402.264.400	Dinas Dukcapil
		2 Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pencatatan Sipil	1 cakupan penerbitan akta kelahiran	%	54,27	52,00	136.409.000	54	570.895.250	56	2.136.000.000	58	1.590.000.000	60	1.683.000.000	62	6.116.304.250	Dinas Dukcapil
		2 cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah data kependudukan diolah secara elektronik jumlah unit kerja yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	149.626.000	100	1.576.976.600	100	2.025.000.000	100	1.021.846.600	100	1027846600	100	5.801.295.800	Dinas Dukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	persentase data profil kependudukan yang dikelola	%	100	100	124.882.000	100	127.782.700	100	175.000.000	100	190.000.000	100	205.000.000	100	617.869.700	Dinas Dukcapil
2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	46.088.000	BB	73.020.000	BB	83.973.000	BB	96.485.000	BB	110.957.750	BB	110.957.750	DPMD
		2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	758,5	765	2,919,250,328	780	3,165,517,000	795	3,640,347,000	798	4,186,458,000	800	4,814,426,700	800	4,814,426,700	DPMD
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,81	82,36	304050250	83,25	335376000	84,72	565610000	85,25	8632968000	88,35	8730061500	88,35	8730061500	DPMD
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	444,490,331	3	522,439,000	3	601,385,000	3	693,040,000	3	796,996,000	3	796,996,000	DPMD
2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	42	43	58.310.000	44	49.250.000	47	107.000.000	48	122.600.000	50	141.000.000	50	419.850.000	DPMD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	%	0	0,78	12.640.000	1,55	42.008.000	2,71	148.000.000	3,88	175.000.000	5,04	213.000.000	5,04	578.008.000	DPMD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	%	100	100	1.355.200.360	100	6.079.805.400	100	8.076.000.000	100	9.400.000.000	100	10.565.000.000	100	34.120.805.400	DPMD
		Persentase Bumdes yang Berkembang	%	74,42	74,81		75,19		75,58		75,97		76,36		76,36		DPMD
		Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		DPMD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	%	100	100	1.968.863.000	100	2.820.770.000	100	3.355.000.000	100	3.493.150.000	100	4.016.780.000	100	13.685.700.000	DPMD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020 Target	2020 Rp.	2021 Target	2021 Rp.	2022 Target	2022 Rp.	2023 Target	2023 Rp.	2024 Target	2024 Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Desa yang memanfaatkan TTG	%	5,04	6,59	7,36	8,14	8,91	9,69	9,69						DPMD	
2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																	
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A)																	
1	Program Pengendalian Penduduk	Umur rata-rata pernikahan pertama perempuan	Tahun	19,76	19,77	300.000.000	19,78	315.000.000	19,79	330.750.000	19,80	347.287.500	19,81	364.651.875	19,81	1.657.689.375	Dinas P2KBP3A
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	75,9	76,1	10.812.526.250	76,2	11.377.182.250	76,3	11.973.503.863	76,4	12.597.529.056	76,5	13.250.136.133	76,5	59.148.852.552	Dinas P2KBP3A
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera yang naik kelas ke Keluarga Sejahtera 1	%	2,00	2,00	550.000.000	2,00	577.500.000	2,00	606.375.000	2,00	636.693.750	2,00	668.528.438	2,00	3.039.097.188	
2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	BB	65.500.000	BB	10.081.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	Dishub
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	950	836	7.272.760.608	758	6.867.446.245	750	7.410.967.000	775	8.010.000.000	800	8.010.000.000	800	8.010.000.000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	84,31	17.891.928.332	79,52	19.616.710.167	85,4	17.679.330.700	85,45	20.435.000.000	85,5	22.574.000.000	85,5	22.574.000.000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	65.500.000	2,85	10.081.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan	%	43,51	47,71	49.258.280.195	49,14	7.905.972.000	54,2	77.319.600.000	58,75	8.475.000.000	64,97	13.835.000.000	64,97	156.793.852.195	Dishub
		2 Persentase Layanan Angkutan Darat	%	69,41	63,06		63,52		67,37		68,76		69,02		69,02		Dishub
2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.						
Dinas Komunikasi dan Informatika																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	3.869.488.280	B	3.819.302.766	BB	18.026.420.000	BB	15.151.000.000	A	7.888.500.000	A	48.754.711.046	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	594	695			818,34		830		840		850		850	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,36	83,36			84		84,5		85		85,5		85,5	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3			3		3		4		3		3	
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1 Nilai indeks aspek layanan publik berbasis elektronik	Nilai	2,14	2,50	282.310.000	2,50	247.867.554	2,60	1.104.705.000	2,75	1.050.000.000	2,80	1.100.000.000	2,80	3.784.882.554	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Nilai indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Nilai	2,17	3,14			3,00		3,10		3,25		3,50		3,50	
3	Program Aplikasi Informatika	1 Indeks aspek perencanaan strategis SPBE	Nilai	3,00	1,50	3.163.216.000	3,00	4.509.244.080	3,25	11.275.000.000	3,40	7.375.000.000	3,50	8.500.000.000	3,50	34.822.460.080	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	Nilai	2,00	1,67			2,25		2,30		2,50		2,70		2,70	
2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Nilai Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	1.099.783.000	BB	7.269.503.000	BB	11.400.000.000	A	11.915.500.000	A	12.080.500.000	A	12.080.500.000	Dinas KUKMP
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	539	539			539		539		539		539		539	Dinas KUKMP
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,25	80,25			80,25		80,25		80,25		80,25		80,25	Dinas KUKMP
		4 Level Maturasi SPIP	Nilai	3	3			3		3		3		3		3	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	57,86	56,57	81.000.000	56,57	81.000.000	56,84	150.000.000	57,45	165.000.000	58,55	180.000.000	58,55	180.000.000	Dinas KUKMP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	%	n/a	46,87	39.975.000	46,87	40.000.000	46,95	50.000.000	47,25	65.000.000	48	80.000.000	47,50	80.000.000	Dinas KUKMP
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	n/a	42,85	200.000.000	42,85	170.000.000	43,25	200.000.000	43,25	215.000.000	43,5	230.000.000	43,5	230.000.000	Dinas KUKMP
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	n/a	85,71	160.000.000	85,71	127.000.000	85,95	150.000.000	85,95	165.000.000	86,00	180.000.000	86	180.000.000	Dinas KUKMP
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat usahanya	%	2,45	2,55	350.000.000	2,75	600.000.000	3,00	540.000.000	3,25	690.000.000	3,50	720.000.000	3,50	720.000.000	Dinas KUKMP
2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	4.571.500.000	B	4.669.000.000	BB	4.928.925.000	BB	5.197.721.250	A	5.500.832.313	A	24.867.978.563	DPMPTSP
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	500	500		600		700		800		800		800		
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,5	84,83		85,73		86,63		87,53		88,43		88,34		
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3		3		3		4		4		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor	%	100	100	70.000.000	100	571.000.000	100	350.000.000	100	520.000.000	100	676.000.000	100	2.187.000.000	DPMPTSP
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	100	100	185.412.000	100	745.180.000	100	1.140.000.000	100	2.652.000.000	100	3.447.600.000	100	8.170.192.000	DPMPTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu	%	75	86	590.000.000	86	638.864.000	91	1.135.454.600	95	6.066.181.960	100	7.622.036.548	100	16.052.537.108	DPMPTSP
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang di kendalikan	%	70	75	340.000.000	75	372.462.000	82	600.000.000	90	1.440.000.000	100	1.740.000.000	100	4.492.462.000	DPMPTSP
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terintegrasi Sistem Informasi Penanaman Modal	%	n/a	n/a	0	75	53.149.000	80	80.000.000	85	104.000.000	90	135.200.000	90	372.349.000	DPMPTSP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																	
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	27.510.000	B	47.450.000	B	47.450.000	BB	49.000.000	BB	49.000.000	BB	49.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	696	696	3.412.831.324	661	3.332.348.146	715	3.778.737.720	3.825.000.720	725	3.825.000.720	725	3.825.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	74,21	83,40	1.275.545.401	85,35	2.543.452.673	84	4.248.079.500	84,5	4.273.714.000	85	4.212.714.000	85	4.212.714.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	921.559.880	2	1.512.136.800	3	1.512.131.400	3	1.545.956.000	3	1.545.956.000	3	1.545.956.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	933.613.500	100	2.758.500.000	100	3.258.500.000	100	2.958.500.000	100	2.958.500.000	100	12.867.613.500	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase sumber daya kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	%	0,05	0,08	104.999.999	0,09	1.200.000.000	0,11	27.200.000.000	0,12	1.250.000.000	0,13	1.200.000.000	0,13	30.954.999.999	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	39,47	42,11	3.655.606.926	44,74	28.293.928.000	60,53	181.518.928.000	60,53	116.095.000.000	60,53	34.595.000.000	60,53	364.159.462.926	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika																	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks penerapan manajemen SPBE	Nilai	n/a	n/a	240.985.000	1,50	210.327.200	1,60	1.255.000.000	1,75	1.395.000.000	1,90	1.520.000.000	1,90	4.621.312.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika																	
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks aspek audit TIK	Nilai	n/a	n/a	111.460.000	0,60	215.959.400	0,80	380.000.000	1,00	400.000.000	1,20	450.000.000	1,20	1.557.419.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga																	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/dikembangkan	%	92,86	95,36	623.047.640	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	2.169.000.000	100,00	9.299.047.640	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan	%	50	50	114.015.000	50	6.087.744.000	50	1.749.744.000	50	1.810.000.000	100	6.148.000.000	100	15.909.503.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	22,46	22,46	643.704.000	22,50	12.239.000.000	23,77	1.339.000.000	25,00	1.255.000.000	26,19	1.255.000.000	26,19	16.731.704.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	%	n/a	9,09	573.944.000	9,09	260.000.000	9,09	260.000.000	9,09	1.160.000.000	9,09	260.000.000	9,09	2.513.944.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	2.911.689.586	B	8.873.686.342	BB	8.766.082.470	BB	11.197.101.069	BB	14.682.592.950	BB	14.682.592.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Predikat	550	676	2.911.689.586	677	8.873.686.342	678	8.766.082.470	679	11.197.101.069	680	14.682.592.950	680	14.682.592.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	80	2.911.689.586	81	8.873.686.342	82	8.766.082.470	83	11.197.101.069	84	14.682.592.950	84	14.682.592.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2,5	2,6	2.911.689.586	2,7	8.873.686.342	2,8	8.766.082.470	2,9	11.197.101.069	3	14.682.592.950	3	14.682.592.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan akreditasi perpustakaan	%	100	100	582.700.000	100	1.050.088.200	100	1.637.752.800	100	2.292.853.920	100	3.292.483.320	100	3.292.483.320	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																	
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	%	100	100	56.350.000	100	210.550.000	100	315.607.600	100	441.850.640	100	662.775.960	100	662.775.960	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
3 Pemerintahan Pilihan																	
3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan																	
Dinas Peternakan dan Perikanan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	36.705.000	BB	50.000.000	BB	52.500.000	BB	55.123.000	BB	57.880.000	BB	57.880.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	449	600	1600000	650	1000000	700	1050000	750	1102400	800	1157500	800	1157500	Dinas Peternakan dan Perikanan
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,38	84,55	723.799.173	84,55	1.579.233.800	85	11.573.194.100	85,55	1.651.848.000	86	1.734.435.000	86	1.734.435.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	8000000	3	20000000	3	21000000	3	22050000	3	23152000	3	23152000	Dinas Peternakan dan Perikanan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	784,369	785,500	30.395.000	785,500	28.600.000	785,654	25.000.000	785,659	25.000.000	785,700	25.000.000	785,700	133.995.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	98,197	24.029,10	778.428.510	24.509,60	2.512.000.000	24.999,80	3.637.300.000	25.499,80	3.652.864.000	26.009,80	3.693.207.000	26.009,80	14.273.799.510	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Lokasi Perikanan Tangkap yang Diawasi	Lokasi	4	4	0	4	28.600.000	4	30.000.000	4	32.500.000	4	35.000.000	20,00	126.100.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	%	0	5	142.769.000	5	591.000.000	5	620.550.000	5	651.577.000	5	684.155.000	25,00	2.690.051.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Pariwisata																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	BB	34.750.000	BB	13.841.500	BB	15.617.165	BB	17.605.104	BB	17.605.104	BB	17.605.104	Dinas Pariwisata
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	550	600	2.330.060.298	600	4.194.380.800	650	4.510.000.000	650	5.015.000.000	650	5.545.809.478,50	650	5.545.809.478,50	Dinas Pariwisata
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,35	79,65	3.085.552.798	79,9	5.562.427.300	80,12	7.990.590.165	80,65	7.321.831.945	80,75	7.321.831.945	80,75	7.321.831.945	Dinas Pariwisata
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	329.510.500	3	385.285.000	3	515.000.000	3	670.000.000	3	609.899.412,50	3	609.899.412,50	Dinas Pariwisata
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1 Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	0	0	0	0	0	20	1.500.000.000	40	3.000.000.000	40	3.000.000.000	100	7.500.000.000	Dinas Pariwisata
		2 Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungannya	%	100	100	3.085.552.798	100	5.562.427.300	100	7.799.590.165	100	263.779.340.000	100	206.414.340.000	100	2.186.648.200.000	Dinas Pariwisata
3	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan	%	100	100	960.000.000	100	930.844.000	100	2.000.000.000	100	2.290.000.000	100	2.600.000.000	100	8.780.844.000	Dinas Pariwisata
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Persentase Ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi sarana dan prasarananya	%	0	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.200.000.000	100	4.500.000.000	100	5.800.000.000	100	5.800.000.000	Dinas Pariwisata
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	100	100	375.000.000	100	400.000.000	100	585.000.000	100	690.000.000	100	745.000.000	100	2.795.000.000	Dinas Pariwisata
3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian (kw/Ha)	kw/ha	65,5	65,5	785.750.000	65,7	800.000.000	65,9	804.035.980	66,1	900.000.000	66,3	960.000.000	66,3	4.249.785.980	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Pertanaman	Persen	170	180	7.560.000.000	190	4.170.000.000	200	14.736.428.910	210	16.100.000.000	220	17.500.000.000	220	60.066.428.910	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	85	86	137.500.000	87	150.000.000	88	172.295.000	89	200.000.000	90	300.000.000	90	959.795.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	85	86	60.000.000	87	70.000.000	88	248.864.700	89	250.000.000	90	300.000.000	90	928.864.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok taniyang meningkat kapasitasnya	%	3	3	1.674.917.000	3,30	6.530.000.000	3,60	5.161.665.000	3,80	5.200.000.000	4	5.440.000.000	4	24.006.582.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 Dinas Peternakan dan Perikanan																	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	1	1,50	629.295.376	1,50	5.259.935.000	1,50	6.022.931.750	1,50	5.799.078.000	1,50	6.089.031.000	7,5	23.800.271.126	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian Yang Dibangun	%	20	20	560.000.000	20	2.000.000.000	20	3.500.000.000	20	3.675.000.000	20	3.858.750.000	100	13.593.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	%	100	100	2.858.504.576	100	1.040.800.000	100	1.242.840.000	100	1.304.981.000	100	1.370.228.000	100	7.817.353.576	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP)																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Persentase peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan	%	100	100	1.620.000.000	100	5.300.574.000	100	20.515.000.000	100	12.200.000.000	100	13.200.000.000	100	13.200.000.000	Dinas KUKMP
		2 Persentase peningkatan kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas KUKMP
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pengawasan stabilisasi harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Ciamis	%	100	100	120.000.000	100	142.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas KUKMP
3	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	14,358 jt	9,146 jt	150.000.000	9,5 jt	190.000.000	9,8 jt	400.000.000	10 jt	825.000.000	10,3 jt	1.700.000.000	10,3 jt	1.700.000.000	Dinas KUKMP
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	38,84	53,57	120.000.000	55,00	131.000.000	60,00	200.000.000	70,00	180.000.000	80,00	225.000.000	75	225.000.000	Dinas KUKMP
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai Pemasaran Produk Dalam Negeri	Juta Rupiah	200	200	320.000.000	300	645.000.000	400	750.000.000	600	800.000.000	600	850.000.000	600	850.000.000	Dinas KUKMP
3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP)																	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,01	n/a	-	0,03	742.562.000	0,03	850.000.000	0,04	895.000.000	0,04	1.000.000.000	0,04	1.000.000.000	Dinas KUKMP
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	%	n/a	0,1	0	0,10	75.000.000	0,20	100.000.000	0,20	125.000.000	0,30	150.000.000	0,3	150.000.000	Dinas KUKMP
3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja																	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan		-	-	-	60	340.000.000	60	375.000.000	60	380.000.000	60	395.000.000	60	1.490.000.000	Dinas Tenaga Kerja
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4.1. Sekretariat Daerah																	
Sekretariat Daerah																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	62,487,000	BB	199,829,000	BB	219,811,900	BB	241,793,090	A	265,972,399	A	989,893,389	Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	655.5	700	19,945,983,437	725	22,641,734,500	750	23,736,416,510	775	27,953,399,429	800	30,748,739,352	800	105,080,289,791	Sekretariat Daerah
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	80	2,251,708,300	81	1,816,274,500	82	3,167,393,390	83	1,640,791,460	84	1,804,870,606	84	10,681,038,256	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	15,386,078,530	3	15,380,350,400	3	18,418,385,440	3	20,260,223,985	3	22,286,246,402	3	91,731,284,757	
		1	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100	100	2.940.965.367	100	50.690.813.800	100	55.859.895.180	100	61.535.884.698	100	68.069.473.168	100	239.097.032.213	
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2	Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		3	Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100		100		
		1	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	%	100	100	1.066.108.850	100	1.738.811.000	100	1.912.692.100	100	2.103.961.310	100	2.314.357.441	100	9.135.930.701	
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2	Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		3	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100		100		100		100		100		100		
4.2. Sekretariat DPRD																		
Sekretariat DPRD																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	20.000.000.000	B	21.004.677.000	B	23.104.144.700	B	25.413.014.671	BB	27.952.771.637	BB	27.952.71.637	Sekretariat DPRD
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	616	616,5		621		626		631		635		635		
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81,56		81,91		82,20		82,68		83,48		83,48		
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3		2		3		3		3		3		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	100	100	6.897.467.500	100	7.745.952.000	100	8.532.142.000	100	8.532.142.000	100	9.007.642.064	100	40.715.345.564	Sekretariat DPRD	
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
5.1. Perencanaan																	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	5,600,000	BB	15,370,000	BB	43,900,000	A	49,800,000	A	61,780,000	A	61,780,000	Bappeda
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	800	800	5,452,257,014	810	6,020,481,000	820	6,510,625,000	830	7,162,000,000	840	7,878,200,000	840	7,878,200,000	Bappeda
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76.54	77	2,277,945,500	82	2,744,366,000	82,46	2,760,234,000	82,93	3,036,257,400	83,38	3,339,883,140	83,38	3,339,883,140	Bappeda
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	13,010,000	3	11,450,000	3	42,000,000	3	46,200,000	3	50,820,000	3	50,820,000	Bappeda
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten - dokumen perencanaan: 5 dokumen - Dokumen pengendalian dan evaluasi: 3	%	100	100	1.204.678.000	100	1.563.008.700	100	1.239.100.000	100	1.899.750.000	100	2.222.425.000	100	8.128.961.700	Bappeda
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas 1. Keselarasan antar dokumen perencanaan 2. sesuai dengan regulasi 3. Tepat waktu	%	90,00	100	1.180.437.693	100	2.181.353.300	100	2.890.000.000	100	3.083.500.000	100	3.406.600.000	100	12.741.890.993	Bappeda
5.2. Keuangan																	
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	1.159.503.500	BB	1.220.530.000	BB	1.220.530.000	BB	1.352.583.000	A	1.420.212.150	A	1.450.000	BPKD
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	760	765	81.713.693.084	770	86.014.413.773	775	90.527.176.603	780	95.066.081.433	785	99.818.385.505	790	99.900.000.000	BPKD
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	88,31	19.081.519.025	88,75	19.586.614.600	89,00	19.586.614	89,25	20.585.818.000	90,25	21.615.108.900	90,25	21.800.000.000	BPKD
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	1.010.258.500	3	1.063.430.000	3	1.063.430.000	3	1.179.773.000	3	1.238.761.650	3	1.250.000.000	BPKD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan	%	100	100	3.995.816.470	100	4.206.122.600	100	4.256.122.600	100	4.586.296.000	100	4.815.610.800	100	21.859.968.470	BPKD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	7.178.244.270	100	7.556.046.600	100	8.156.046.600	100	8.971.650.800	100	9.420.233.340	100	41.282.221.610	BPKD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	5	5	6.932.203.580	5	7.297.056.400	5	12.258.652.400	5	13.332.878.900	5	13.999.522.845	5	53.820.314.125	BPKD
5.3. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	10,362,529,600	BB	15,039,637,800	BB	12,509,942,400	BB	11,713,642,400	BB	12,460,142,400	BB	12,460,142,400	BKPSDM
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	660	660		831	831		831	831	831	831	831	831		BKPSDM
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.21	86.21		87.21	88.21		88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21		BKPSDM
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3	3		3	3	3	3	3	3		BKPSDM
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang meningkat kualifikasi Pendidikannya	%	0,52	0,58	2.725.000.000	0,61	2.876.900.000	0,63	3.006.927.000	0,68	3.121.691.810	0,71	3.265.866.264	0,71	3.265.866.264	BKPSDM
		Persentase PNS dengan kinerja baik dan sangat baik	%	99,81	99,82		99,83	99,84		99,85	99,85	99,86	99,86	99,86	99,86		BKPSDM
		Persentase PNS yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	%	99,81	99,82		99,83	99,84		99,85	99,85	99,86	99,86	99,86	99,86		BKPSDM
5.4. Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)																	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang bersertifikat diklat/ workshop/seminar/magang/ kursus	%	100	100	4.066.755.000	100	4.066.755.000	100	4.088.845.800	100	4.101.958.524	100	4.115.464.630	100	4.115.464.630	BKPSDM
5.5. Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)																	
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	443.998.000	100	459.394.000	100	1.544.500.000	100	1.473.950.000	100	1.610.345.000	100	3.923.256.500	Bappeda
6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan																	
6.1. Inspektorat Daerah																	
Inspektorat																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	122,000,000	BB	141,500,000	BB	155,650,000	BB	171,215,000	A	179,000,000	A	179,000,000	Inspektorat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	806	808	18,680,000	810	8,370,647,395	812	820,634,200	814	9,312,464,045	816	10,095,331,700	816	10,095,331,700	Inspektorat
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83.06	97	543566200	88	297,713,900	89	642,233,900	90	753,636,620	92	780,677,000	92	780,677,000	Inspektorat
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	n/a	3	55760000	3	76,125,000	3	106,593,000	3	122,507,550	3	128,000,000	3	55760000	Inspektorat
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai	%	90,32	93,1	642.530.000	93,20	5.900.390.000	93,30	6.195.409.500	93,40	6.505.179.975	93,50	6.830.438.974	93,50	7.171.960.922	Inspektorat	
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkat Predikat SAKIP nya	%	10	10	5.249.691.000	36	141.500.000	64	148.575.000	82	156.003.750	100	163.803.938	100	171.994.134	Inspektorat	
3	Program Perumurusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi maturitas SPIP	%	35	53	55.760.000	100	240.794.400	100	252.834.120	100	265.475.826	100	278.749.617	100	292.687.098	Inspektorat	
7 Unsur Kewilayahan																		
7.1. Kecamatan																		
1	Kecamatan Ciamis																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	7,128,179,620.00	B	745,656,800.00	BB	820,222,480.00	BB	902,244,728.00	A	992,469,201.00	A	992,469,201.00	Kecamatan Ciamis
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	5,788,822,612.00	610	5,067,807,000.00	625	5,674,587,700.00	650	7,342,046,470.00	675	8,076,251,117.00	675	8,076,251,117.00	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,93	78.93	2,458,319,500.00	80.93	3,212,863,200.00	81.93	3,534,149,520.00	82.93	3,887,564,472.00	82.93	4,276,320,919.00	82.93	4,276,320,919.00	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,070,000.00	3	4,090,000.00	3	4,499,000.00	3	4,948,900.00	3	5,443,790.00	3	5,443,790.00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	1.425.650.000	100	1.682.171.500	100	1.850.388.650	100	2.035.427.515	100	2.238.970.267	100	9.232.607.932	Kecamatan Ciamis	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	3.479.916.310	100	355.400.000	100	390.940.000	100	430.034.000	100	473.037.400	100	5.129.327.710	Kecamatan Ciamis	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	168.347.000	100	34.856.800	100	38.342.480	100	42.176.728	100	46.394.401	100	330.117.409	Kecamatan Ciamis	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Kecamatan Baregbeg																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	450,000	B	700,000	BB	900,000	BB	1,500,000	A	2,500,000	A	2,500,000	Kecamatan Baregbeg
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	655	670	1,304,308,312	680	1,443,181,000	700	1,443,581,000	735	1,444,781,000	740	1,446,781,000	740	1,446,781,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,75	85.85	141,344,365	86.50	144,222,500	88.05	405,969,000	89.10	443,190,000	90.75	507,090,000	90.75	507,090,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,800,000	3	3,600,000	3	4,750,000	3	10,150,000	3	17,150,000	3	17,150,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	5.300.000	100	10.255.000	100	16.450.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	77.005.000	Kecamatan Baregbeg
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	8.348.000	100	4.105.000	100	27.250.000	100	35.260.000	100	41.086.000	100	116.049.000	Kecamatan Baregbeg
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	44.660.000	100	44.865.000	100	65.290.000	100	86.170.000	100	91.803.000	100	332.788.000	Kecamatan Baregbeg
3	Kecamatan Sadananya																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	770,000	B	11,070,000	BB	11,100,000	BB	11,500,000	A	12,500,000	A	2,500,000	Kecamatan Sadananya
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,616,613,580	610	1,771,366,000	625	1,657,808,000	650	1,872,456,000	675	1,893,276,000	740	1,446,781,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	82.74	12,180,000	82.78	12,600,000	83,45	13,500,000	84,48	15,000,000	85,50	16,500,000	90.75	507,090,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	5,270,000	3	6,470,000	3	6,600,000	3	9,000,000	3	15,650,000	3	15,650,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	12.180.000	100	12.600.000	100	13.500.000	100	15.000.000	100	16.500.000	100	69.780.000	Kecamatan Sadananya
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	53.200.000	100	59.600.000	100	9.900.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	148.700.000	Kecamatan Sadananya
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	42.890.000	100	39.262.500	100	30.000.000	100	37.800.000	100	44.000.000	100	193.952.500	Kecamatan Sadananya

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4	Kecamatan Cikoneng																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	101,240,000	B	42,701,800	BB	47,126,000	BB	51,720,000	A	56,692,000	A	56,692,000	Kecamatan Cikoneng
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	396	600	2,590,000	610	1,608,459,600	625	1,685,120,000	650	1,763,741,000	675	1,849,813,000	675	1,849,813,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,48	82,48	126,430,000	83,48	162,361,100	84,48	174,334,000	85,48	191,316,000	86,48	205,950,000	86,48	205,950,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,720,000	3	1,240,000	3	3,200,000	3	3,200,000	3	3,200,000	3	3,200,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	3.800.000	100	21.600.000	100	24.000.000	100	26.136.000	100	28.750.000	100	104.286.000	Kecamatan Cikoneng
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	50.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	100	12.050.000	100	13.255.000	100	91.305.000	Kecamatan Cikoneng
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	50.780.000	100	27.000.000	100	24.200.000	100	26.670.000	100	29.337.000	100	157.987.000	Kecamatan Cikoneng
5	Kecamatan Sindangkasih																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	10,300,000	B	10,300,000	B	10,600,000	BB	10,900,000	A	12,500,000	A	12,500,000	Kecamatan Sindangkasih
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	600	600	1,688,924,215	610	1,642,214,000	625	1,686,299,350	650	1,728,481,083	675	1,644,944,000	675	1,644,944,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,65	82,65	111,510,000	82,70	126,320,000	82,72	141,018,000	82,79	142,035,600	82,81	164,798,000	82,81	164,798,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3,600,000	3	1,500,000	3	1,750,000	3	2,000,000	3	2,500,000	3	2,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	3.000.000	100	2.040.000	100	1.200.000	100	3.000.000	100	3.500.000	100	12.740.000	Kecamatan Sindangkasih
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	9.900.000	100	7.340.000	100	9.600.000	100	10.500.000	100	13.200.000	100	50.540.000	Kecamatan Sindangkasih
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	169.070.000	100	16.400.000	100	5.400.000	100	6.000.000	100	12.800.000	100	209.670.000	Kecamatan Sindangkasih

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
6 Kecamatan Cijeungjing																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	61,415,250	B	50,820,000	BB	57,920,000	BB	66,750,000	A	75,750,000	A	75,750,000	Kecamatan Cijeungjing
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,297,997,995	610	1,432,499,000	625	1,448,335,000	650	1,465,000,000	675	1,554,000,000	675	1,554,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,70	84.20	216,596,803	84.25	147,139,000	84.30	134,980,000	84.35	167,198,000	84.4	188,774,000	84.4	188,774,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,608,750	3	2,890,000	3	4,000,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	12.600.000	100	12.600.000	100	13.200.000	100	13.800.000	100	14.400.000	100	66.600.000	Kecamatan Cijeungjing
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	15.195.000	100	4.950.000	100	16.500.000	100	18.000.000	100	19.500.000	100	74.145.000	Kecamatan Cijeungjing
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	43.040.250	100	34.440.000	100	27.700.000	100	29.500.000	100	31.500.000	100	166.180.250	Kecamatan Cijeungjing
7 Kecamatan Cimaragas																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	BB	2,450,000	BB	13,160,000	BB	13,320,000	BB	13,475,000	A	13,400,000	A	13,400,000	Kecamatan Cimaragas
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,530,532,266	625	1,636,608,000	628	1,657,808,000	632	1,673,900,000	635	1,753,000,000	635	1,753,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,70	82.28	2,000,000	83.65	12,000,000	84.59	24,000,000	85.87	25,000,000	86.78	14,000,000	86.78	14,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	7,250,000	3	5,360,000	3	5,580,000	3	5,800,000	3	6,000,000	3	6,000,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	2.000.000	100	12.000.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	14.000.000	100	9.514.714.266	Kecamatan Cimaragas
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	11.500.000	100	16.150.000	100	10.750.000	100	46.400.000	Kecamatan Cimaragas
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	161.770.000	100	24.050.000	100	15.500.000	100	18.600.000	100	12.000.000	100	231.920.000	Kecamatan Cimaragas
8 Kecamatan Cidolog																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	-	B	240,000	BB	15,252,000	BB	10,264,600	A	15,277,900	A	15,277,900	Kecamatan Cidolog

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,580,330,016	610	1,699,323,000	625	1,784,289,150	650	1,873,504,008	675	1,967,179,723	675	1,967,179,723	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,78	82.74	113,260,100	83.64	123,089,000	83.78	161,268,500	84.23	139,834,000	84.56	147,582,000	84.56	147,582,000	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	13,890,000	3	9,920,000	3	10,418,000	3	10,957,000	3	11,513,000	3	11,513,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	16.800.000	100	36.000.000	100	43.200.000	100	50.400.000	100	57.600.000	100	204.000.000	Kecamatan Cidolog	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	18.050.000	100	10.295.000	100	10.810.000	100	11.345.000	100	11.950.000	100	62.450.000	Kecamatan Cidolog	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	28.180.000	100	19.400.000	100	9.450.000	100	9.900.000	100	10.500.000	100	77.430.000	Kecamatan Cidolog	
9 Kecamatan Cihaurbeuti																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	-	BB	525,000	BB	13,250,000	BB	5,750,000	A	15,750,000	A	20,750,000	A	20,750,000	Kecamatan Cihaurbeuti	
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,601,620,578	610	1,759,472,000	620	2,150,328,000	630	2,356,648,000	640	2,500,987,000	640	2,500,987,000	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,64	76,70	104,452,268	77	132,058,000	78	113,325,000	79	97,225,000	80	101,500,000	80	101,500,000	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,050,000	3	1,750,000	3	3,430,000	3	4,190,000	3	6,750,000	3	6,750,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	250.000	100	3.500.000	100	6.950.000	100	11.500.000	100	15.000.000	100	37.200.000	Kecamatan Cihaurbeuti	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	26.220.300	100	12.100.000	100	12.025.000	100	23.400.000	100	27.900.000	100	101.645.300	Kecamatan Cihaurbeuti	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	179.565.800	100	7.500.000	100	11.700.000	100	22.300.000	100	24.800.000	100	245.865.800	Kecamatan Cihaurbeuti	
10 Kecamatan Panumbangan																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	2,067,108,924	B	1,754,951	BB	1,833,872,500	BB	1,893,665	A	1,997,500	A	1,997,500	Kecamatan Panumbangan	
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	2,067,108,924	610	1,754,951	625	1,833,872,500	650	1,893,665	675	1,997,500	675	1,997,500	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,48	82.48	2,067,108,924	83.48	1,754,951	84.48	1,833,872,500	85.48	1,893,665	86.48	1,997,500	86.48	1,997,500	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,067,108,924	3	1,754,951	3	1,833,872,500	3	1,893,665	3	1,997,500	3	1,997,500	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	7.000.000	100	12.000.000	100	24.000.000	100	30.000.000	100	20.000.000	100	93.000.000	Kecamatan Panumbangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	28.469.500	100	18.710.000	100	23.850.000	100	30.000.000	100	22.500.000	100	123.529.500	Kecamatan Panumbangan
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	318.060.000	100	26.000.000	100	31.850.000	100	40.000.000	100	30.000.000	100	445.910.000	Kecamatan Panumbangan
11 Kecamatan Panjalu																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	0	B	10,560,000	BB	12,920,000	BB	18,600,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Panjalu
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,545,103,426	625	1,590,188,000	650	1,567,747,000	675	1,674,250,000	700	1,755,000,000	700	1,755,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82,61	7,250,000	82,78	12,000,000	82,8	18,000,000	82,84	18,000,000	82,89	18,000,000	82,89	18,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,750,000	3	3,150,000	3	4,000,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	7.250.000	100	12.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	73.250.000	Kecamatan Panjalu
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	9.300.000	100	6.000.000	100	18.025.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	70.325.000	Kecamatan Panjalu
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	25.560.000	100	27.955.000	100	26.500.000	100	28.000.000	100	30.500.000	100	138.515.000	Kecamatan Panjalu
12 Kecamatan Sukamantri																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	-	B	1,160,500	BB	18,220,000	BB	18,600,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Sukamantri
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,388,297,785	610	1,539,322,000	625	153,002,000	650	1,674,250,000	675	1,755,000,000	675	1,755,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,2	81,4	158,120,000	81,82	141,858,500	82,78	257,811,000	82,86	255,500,000	82,89	256,000,000	82,89	256,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	-	3	2,840,000	3	5,580,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	7.907.500	100	10.800.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	24.000.000	100	78.707.500	Kecamatan Sukamantri

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	5.050.000	100	13.000.000	100	10.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	57.050.000	Kecamatan Sukamantri
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	169.770.000	100	23.000.000	100	16.230.000	100	28.500.000	100	30.500.000	100	268.000.000	Kecamatan Sukamantri
13 Kecamatan Kawali																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	80,000	B	1,100,000	BB	12,920,000	BB	18,600,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Kawali
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,114,414,800	625	1,852,329,000	650	1,967,747,000	675	2,014,250,000	700	2,115,000,000	700	2,115,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,06	82,61	50,950,000	82,78	50,200,000	82,8	50,500,000	82,84	51,000,000	82,89	51,500,000	82,89	51,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	4,680,000	3	2,750,000	3	4,000,000	3	5,500,000	3	7,500,000	A	24,250,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	50.950.000	100	50.200.000	100	50.500.000	100	51.000.000	100	51.500.000	100	254.150.000	Kecamatan Kawali
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	15.725.000	100	13.250.000	100	18.025.000	100	19.000.000	100	23.500.000	100	89.500.000	Kecamatan Kawali
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	31.830.000	100	23.000.000	100	26.500.000	100	28.500.000	100	30.500.000	100	140.330.000	Kecamatan Kawali
14 Kecamatan Lumbang																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	530,000	B	12,660,000	BB	12,920,000	BB	18,600,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Lumbang
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,705,337,194	610	1,617,164,000	625	1,767,747,000	650	1,874,250,000	675	1,955,000,000	675	1,955,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,70	82,74	125,104,600	82,78	147,312,000	82,80	186,158,000	82,84	215,500,000	82,89	235,000,000	82,89	235,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,045,000	3	2,840,000	3	4,000,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	2.150.000	100	14.400.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	70.550.000	Kecamatan Lumbang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	10.000.000	100	9.443.500	100	18.025.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	74.468.500	Kecamatan Lumbang
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	28.790.000	100	21.200.000	100	20.000.096	100	28.500.000	100	30.500.000	100	128.990.096	Kecamatan Lumbang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
15 Kecamatan Panawangan																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	5,250,000	B	5,500,000	BB	8,800,000	BB	9,320,000	A	11,750,000	A	11,750,000	Kecamatan Panawangan
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	600	600	1,439,296,900	610	1,490,734,000	625	1,786,446,000	650	1,566,887,700	675	1,754,000,000	675	1,754,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,70	82,74	121,545,000	82,76	142,944,100	82,78	205,936,650	82,84	201,234,000	82,85	216,500,000	82,85	216,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	4,220,000	3	2,340,000	3	5,080,000	3	5,345,000	3	7,000,000	3	7,000,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	3.600.000	100	12.000.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	18.000.000	100	82.600.000	Kecamatan Panawangan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	24.975.000	100	12.750.000	100	27.950.000	100	30.100.000	100	19.000.000	100	114.775.000	Kecamatan Panawangan
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	190.080.000	100	34.956.000	100	45.080.500	100	47.350.000	100	30.500.000	100	347.966.500	Kecamatan Panawangan
16 Kecamatan Cipaku																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	1,000,000	B	1,100,000	BB	13,200,000	BB	18,600,000	A	24,500,000	A	24,500,000	Kecamatan Cipaku
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	600	600	2,041,330,348	625	1,870,106,000	650	2,003,800,000	675	2,204,250,000	700	2,505,000,000	700	2,505,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,58	89,60	2,167,766,348	89,65	2,000,450,000	89,70	2,178,300,000	89,75	2,411,850,000	90,00	2,762,000,000	90,00	2,762,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,000,000	3	3,200,000	3	5,500,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	2.223.245.348	100	2.064.906.000	100	2.259.800.000	100	2.502.350.000	100	2.850.500.000	100	11.900.801.348	Kecamatan Cipaku
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	19.000.000	100	9.131.000	100	21.000.000	100	22.500.000	100	24.000.000	100	95.631.000	Kecamatan Cipaku
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	31.480.000	100	19.325.000	100	24.500.000	100	26.500.000	100	28.500.000	100	130.305.000	Kecamatan Cipaku
17 Kecamatan Jatinagara																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	2,400,000	B	7,660,000	BB	17,240,000	BB	18,964,000	A	20,860,000	A	20,860,000	Kecamatan Jatinagara

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,354,194,483	610	1,540,584,000	625	1,541,549,000	650	1,695,703,900	675	1,865,274,290	675	1,865,274,290	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82,74	123,705,219	82,78	110,625,000	82,80	132,912,500	82,84	146,203,750	82,89	160,824,125	82,89	160,824,125	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	10,700,000	3	5,492,000	3	5,720,000	3	6,292,000	3	6,775,000	3	6,775,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	6.120.000	100	9.550.000	1	6.000.000	1	6.600.000	1	11.800.000	100	40.070.000	Kecamatan Jatinagara	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	19.841.000	100	13.798.000	1	8.100.000	1	8.910.000	1	9.801.000	100	60.450.000	Kecamatan Jatinagara	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	31.110.000	100	23.250.000	1	13.997.500	1	15.397.250	1	15.600.000	100	99.354.750	Kecamatan Jatinagara	
18	Kecamatan Rajadesa																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	220,000	B	11,220,000	BB	11,240,000	BB	16,860,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Rajadesa	
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,662,312,637	610	1,782,119,000	625	1,799,285,004	650	1,982,441,504	675	1,805,000,000	675	1,805,000,000	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72,55	79,25	141,502,300	83,25	167,543,000	84,67	160,957,500	85,00	217,600,000	86,5	213,487,045	86,5	213,487,045	
		4	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	7,720,000	3	2,860,000	3	2,860,000	3	4,290,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	16.360.000	100	6.550.000	100	6.550.000	100	16.375.000	100	18.000.000	100	63.835.000	Kecamatan Rajadesa	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	18.443.500	100	10.300.000	100	9.800.000	100	15.450.000	100	19.000.000	100	72.993.500	Kecamatan Rajadesa	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	30.399.000	100	19.625.000	100	10.567.500	100	18.437.500	100	37.500.000	100	116.529.000	Kecamatan Rajadesa	
19	Kecamatan Rancrah																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	-	B	625,000	B	11,720,000	BB	11,720,000	BB	16,800,000	A	17,100,000	A	17,100,000	Kecamatan Rancrah	
		2	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,560,951,999	610	1,642,926,000	625	1,644,725,220	650	1,645,005,220	675	1,646,216,220	675	1,646,216,220	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	83,70	360,865,000	83,72	159,642,200	83,75	180,264,600	83,78	189,550,000	83,79	211,550,000	83,79	211,550,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,700,000	3	2,840,800	3	2,879,000	3	3,050,000	3	3,950,000	3	3,950,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	4.760.000	100	15.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	100	58.760.000	Kecamatan Rancah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	11.000.000	100	13.595.000	1	24.430.000	1	25.000.000	1	24.000.000	100	98.025.000	Kecamatan Rancah
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	24.480.000	100	29.750.000	1	40.173.500	1	41.000.000	1	43.000.000	100	178.403.500	Kecamatan Rancah
20 Kecamatan Tambaksari																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	1,000,000	B	11,680,000	BB	11,220,000	BB	18,600,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Tambaksari
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	610	1,441,296,900	620	1,491,134,000	630	1,539,851,700	640	1,674,250,000	650	1,755,000,000	650	1,755,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,70	82,74	91,688,732	82,78	116,680,200	82,8	141,974,500	82,84	182,000,000	82,89	205,000,000	82,89	205,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,000,000	3	2,860,000	3	3,080,000	3	5,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	1.875.945.632	100	1.673.045.200	100	1.759.817.200	100	1.944.850.000	100	2.054.250.000	100	9.307.908.032	Kecamatan Tambaksari
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	24.800.000	100	15.391.000	100	15.300.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	92.491.000	Kecamatan Tambaksari
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	311.460.000	100	29.300.000	100	24.391.000	100	28.500.000	100	30.500.000	100	424.151.000	Kecamatan Tambaksari
21 Kecamatan Cisaga																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	16,825,000	B	42,260,000	BB	61,300,000	BB	77,680,000	A	94,680,000	A	94,680,000	Kecamatan Cisaga
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,647,956,350	625	1,637,898,000	650	1,649,106,350	675	1,673,750,000	680	1,755,000,000	680	1,755,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,68	82,70	108,985,000	82,73	122,827,500	82,78	192,000,000	82,80	219,000,000	82,85	248,500,000	82,85	248,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,825,000	3	3,380,000	3	9,800,000	3	10,180,000	3	12,750,000	3	12,750,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	16.900.000	100	24.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	148.900.000	Kecamatan Cisaga
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	8.000.000	100	5.540.000	100	17.500.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	68.040.000	Kecamatan Cisaga
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	207.810.000	100	29.065.000	100	42.000.000	100	45.500.000	100	49.500.000	100	373.875.000	Kecamatan Cisaga
22 Kecamatan Sukadana																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	-	BB	845,000	BB	11,180,000	BB	11,300,000	BB	16,500,000	A	16,600,000	A	16,600,000	Kecamatan Sukadana
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,572,437,147	610	1,688,308,000	625	1,774,450,000	650	1,823,400,000	675	1,913,600,000	675	1,913,600,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,51	82,74	162,350,000	82,78	128,192,000	82,80	134,850,000	82,84	144,700,000	82,89	148,500,000	82,89	148,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	4,595,000	3	2,840,000	3	3,750,000	3	4,300,000	3	4,600,000	3	4,600,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	4.800.000	100	6.550.000	100	8.500.000	100	8.700.000	100	9.000.000	100	37.550.000	Kecamatan Sukadana
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	11.820.000	100	13.500.000	100	12.000.000	100	12.600.000	100	13.500.000	100	63.420.000	Kecamatan Sukadana
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	24.880.000	100	23.000.000	100	19.500.000	100	20.300.000	100	21.500.000	100	109.180.000	Kecamatan Sukadana
23 Kecamatan Lakbok																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	530,000	B	2,660,000	BB	2,680,000	BB	4,560,000	A	4,250,000	A	4,250,000	Kecamatan Lakbok
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,440,356,900	610	1,490,894,000	625	1,582,462,400	650	1,779,890,000	675	1,606,000,000	675	1,606,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82,74	125,645,000	82,78	158,444,100	82,8	159,150,750	82,84	175,850,000	82,89	292,500,000	82,89	292,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	4,720,000	3	2,840,000	3	2,800,000	3	7,800,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	3.600.000	100	12.000.000	100	14.950.000	100	15.750.000	100	10.000.000	100	56.300.000	Kecamatan Lakbok
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	24.975.000	100	12.750.000	1	16.448.000	100	19.550.000	100	27.000.000	100	100.723.000	Kecamatan Lakbok

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	198.640.000	100	40.612.000	1	28.850.000	100	23.000.000	100	43.500.000	100	334.602.000	Kecamatan Lakbok
24 Kecamatan Purwadadi																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	545,000	B	7,118,600	BB	14,000,000	BB	19,500,000	A	24,750,000	A	24,750,000	Kecamatan Purwadadi
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	772	600	1,547,213,360	610	1,527,086,000	625	181,197,000	650	1,874,700,000	675	1,956,000,000	675	1,956,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	82.74	22,615,000	82.78	21,400,000	82.8	70,000,000	82.84	70,000,000	82.89	70,000,000	82.89	70,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3,790,000	3	5,290,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	2.029.053.360	100	1.748.184.500	100	2.153.931.000	100	2.279.700.000	100	2.381.750.000	100	10.592.618.860	Kecamatan Purwadadi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	21.938.000	100	13.886.000	100	21.200.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	94.024.000	Kecamatan Purwadadi
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	308.060.000	100	24.200.000	100	26.450.000	100	28.500.000	100	30.500.000	100	417.710.000	Kecamatan Purwadadi
25 Kecamatan Pamarican																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	530,000	B	12,660,000	BB	18,220,000	BB	18,475,000	A	24,250,000	A	24,250,000	Kecamatan Pamarican
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,440,356,900	610	1,490,894,000	625	1,494,074,000	650	1,569,197,700	675	1,755,000,000	675	1,755,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82.74	122,045,000	82.78	143,444,100	82.8	206,436,650	82.84	201,734,000	82.89	217,000,000	82.89	217,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	4,720,000	3	2,840,000	3	5,580,000	3	5,845,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	1.786.306.900	100	1.706.994.100	100	1.801.681.650	100	1.897.701.700	100	2.071.250.000	100	9.263.934.350	Kecamatan Pamarican
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	24.975.000	100	10.200.000	100	19.125.000	100	30.100.000	100	19.000.000	100	103.400.000	Kecamatan Pamarican
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	190.080.000	100	34.956.000	100	34.246.000	100	47.350.000	100	30.500.000	100	337.132.000	Kecamatan Pamarican
26 Kecamatan Banjarsari																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	120,000	B	1,160,000	BB	2,000,000	BB	3,000,000	A	4,250,000	A	4,250,000	Kecamatan Banjarsari
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,291,289,127	610	1,384,903,400	625	1,385,451,000	650	1,403,000,000	675	1,605,000,000	675	1,605,000,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82,71	364,797,500	82,74	175,237,600	82,8	208,910,000	82,84	226,500,000	82,89	282,500,000	82,89	282,500,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,380,000	3	1,920,000	3	10,000,000	3	11,500,000	3	7,500,000	3	7,500,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	1.859.319.127	100	1.599.571.000	100	1.666.861.000	100	1.709.000.000	100	1.971.250.000	100	8.806.001.127	Kecamatan Banjarsari
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	20.790.000	100	15.950.000	1	22.600.000	100	24.500.000	100	27.000.000	100	110.840.000	Kecamatan Banjarsari
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	174.942.500	100	18.000.000	1	30.400.000	100	32.000.000	100	35.000.000	100	290.342.500	Kecamatan Banjarsari
27 Kecamatan Banjarny																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	BB	2,245,000	BB	600,000	A	4,321,000	A	4,052,000	A	8,600,000	A	8,600,000	Kecamatan Banjarany
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	-	600	1,525,399,065	610	1,525,396,000	625	1,526,810,000	650	1,551,706,000	675	1,651,850,000	675	1,651,850,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,71	82,72	65,640,000	82,76	78,190,000	82,80	111,774,200	82,84	110,184,000	82,88	114,258,000	82,88	114,258,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3	2,345,000	3	800,000	3	6,008,000	3	5,664,000	3	6,300,000	3	6,300,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	%	100	100	1.957.208.265	100	1.723.711.000	100	1.724.680.000	100	1.762.795.000	100	1.895.950.000	100	9.064.344.265	Kecamatan Banjarany
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	%	100	100	16.595.000	100	24.688.000	100	16.625.000	100	19.000.000	100	23.500.000	100	100.408.000	Kecamatan Banjarany
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	29.380.000	100	25.650.000	100	14.625.000	100	16.000.000	100	22.500.000	100	108.155.000	Kecamatan Banjarany
8 Unsur Pemerintahan Umum																	
8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	20,000,000	BB	22,000,000	BB	24,000,000	BB	26,000,000	BB	38,000,000	BB	38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	660	583	509,400,000	585	560,340,000	587	611,280,000	589	662,220,000	590	713,160,000	590	713,160,000	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,05	72,60	500,000,000	77	850,000,000	78	1,000,000,000	79	1,150,000,000	80	1,300,000,000	80	1,300,000,000	
		4 Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	260,000,000	3	8,448,660,000	3	312,720,000	3	338,780,000	3	364,840,000	3	364,840,000	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis yang ditindaklanjuti	%	100	100	380.365.000	100	197.349.400	100	800.000.000	100	1.040.000.000	100	1.352.000.000	100	1.352.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Hak Pilih Masyarakat	%	100	100	359.253.000	100	2.217.357.800	100	2.465.066.800	100	3.204.586.840	100	4.165.962.892	100	4.165.962.892	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan ormas, LSM dan parpol	%	100	100	418.882.000	100	1.672.880.000	100	535.500.000	100	696.150.000	100	904.995.000	100	904.995.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100		100	144.585.800	100	793.165.000	100	1.031.114.500	100	1.340.448.850	100	1.340.448.850	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	100	100	597.877.000	100	750.000.000	100	1.522.953.600	100	1.979.839.680	100	2.573.791.584	100	2.573.791.584	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bappeda, 2021

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut IKU Daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran sebagai tolak ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis periode 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung memberikan mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD,

disajikan pada Tabel 8.2. Sementara Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program disajikan pada Tabel 8.3. Pemilihan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja Dearah selanjutnya disajikan dalam tabel 8.2 dan tabel 8.3 sebagai berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pendidikan	Nilai	63,31	63,94	64,44	65,08	66,49	67,34	68,36	68,36
2	Indeks Kesehatan	Nilai	78,95	79,34	79,74	79,80	79,98	80,20	80,46	80,46
3	Indeks Pengeluaran	Nilai	67,55	68,75	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61	69,61
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	63,04	63,67	63,77	63,87	63,97	64,07	64,17	64,17
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai		76.955	77.862	79.447	80.654	81.940	83.149	83.149
6	Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai	100	89.135	93.716	93,750	95,163	96.393	96,736	96,736
7	Persentase rumah layak huni	Persen	89,75	68,31	68,73	68,78	68,84	68,89	68,95	68,95
8	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)	Persen	7,14	5,06	-0,58	5,72	5,70	5,68	5,67	5,67
9	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,99	5,84	-2,62	5,83	5,95	6,06	6,17	6,17
10	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,67	2,87	1,66	2,68	2,77	2,86	2,94	2,94
11	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,76	112,78	112,00	112,20	112,40	112,60	112,80	112,80
12	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	10	5,50	-10,04	5,50	5,50	5,50	5,50	11,96
13	Presentasi PPKS yang mandiri	Persen		100,82	129,82	100	100	100	100	100
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,6	5,16	5,67	5,24	4,81	4,72	4,63	4,63
15	Indeks Kualitas air (TPB6)	Nilai		59,60	59,68	59,69	59,70	59,73	59,75	59,75
16	Indeks Kualitas Udara	Nilai		78,35	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai		34,57	34,58	34,59	34,60	34,61	34,62	34,62
18	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai		0.62	0.64	0.66	0.68	0.7	0.72	0.72
19	Hasil Evaluasi AKIP(TPB16)	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	A	A
20	Opini BPK(TPB9)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
22	Persentase Peningkatan Desa Mandiri(TPB10)	Persen		166,67	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35	19,35

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,63	70,39	70,38	70,66	71,62	72,02	72,62	72,62
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,60	7,69	7,70	7,75	7,88	7,96	8,05	8,05
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67	13,79	13,96	14,13	14,48	14,69	14,95	14,95
4.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,32	71,57	71,83	71,87	71,99	72,13	72,30	72,30
5.	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan	(Ribu Rupiah)	9.190	9.557	9.272	9.303	9.659	9.691	9.830	9.830
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,44	5,38	1,65	3,41	4,60	4,71	5,65	5,65
7.	Persentase penduduk miskin	Persen	7,22	6,65	7,64	7,53	6,38	6,06	5,98	5,98
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB8)	Persen	4,6	5,16	5,67	5,24	4,81	4,72	4,63	4,63
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,85	66,85	66,86	66,87	66,88	66,89	66,90	66,90
10.	Indeks Gini (TPB10)	Nilai	0,309	0,354	0,35	0,335	0,335	0,334	0,333	0,333
11.	Laju inflasi	Persen	3,04	1,49	3,04	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02
12.	PDRB AdHB per kapita (TPB8)	Rp	22.953.871	27.713.440	25.874.244	27.081.071	28.336.810	29.580.207	30.718.442	30.718.442
13.	Persentase balita gizi buruk (TPB2)	Persen	1,34	1,34	1,44	1,04	0,94	0,84	0,74	0,74
14.	Persentase kasus stunting (TPB2)	Persen	9,2	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,6
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1.	Nilai tukar petani	Nilai	112,76	112,78	112,00	112,20	112,40	112,60	112,80	112,80
2.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	25,96	26,35	29,84	30,23	30,62	31,00	31,39	31,39
3.	Rasio ketergantungan	Persen	44,28	43	43,31	41,88	40,84	39,85	39,08	39,08
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1. Pendidikan										
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Indikator SPM)	Persen	n/a	86,20	92,17	93,57	94,97	96,37	97,77	97,77
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Indikator SPM)	Persen	n/a	93,00	96,65	96,7	97,6	98,5	99,4	99,4
1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Indikator SPM)	Persen	n/a	88,58	93,36	93,41	95,01	96,61	98,21	98,21
1.4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	Persen	n/a	71,10	80,76	80,81	82,11	83,41	84,71	84,71

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Indikator SPM)									
2.	Kesehatan									
2.1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk (Indikator SPM)	-	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi (Indikator SPM)	Persen	33,33	50,00	80,00	66,66	83,33	100	100	100
2.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Indikator SPM)	Persen	87,52	85,92	100	100	100	100	100	100
2.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Indikator SPM)	Persen	91,95	97,62	100	100	100	100	100	100
2.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Indikator SPM)	Persen	102,52	109,33	100	100	100	100	100	100
2.6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Indikator SPM)	Persen	90,64	99,22	100	100	100	100	100	100
2.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	107,99	96,32	100	100	100	100	100	100
2.8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	43,80	48,34	100	100	100	100	100	100
2.9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	46,34	58,11	100	100	100	100	100	100
2.10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	32,29	41,84	100	100	100	100	100	100
2.11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	33,92	42,98	100	100	100	100	100	100
2.12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	70,45	79,94	100	100	100	100	100	100
2.13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	77,72	45,29	100	100	100	100	100	100
2.14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	75	54,50	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Hektar	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89
3.2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Hektar	8265,22	8265,22	8265,22	8765,22	9265,22	9765,22	10265,22	10765,22

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	89,67	89,67	90,12	90,62	91,12	91,62	92,12	92,12
3.4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada program pengolahan air limbah domestik
3.5.	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	70,83	71,72	72,22	73,31	74,32	75,62	76,84	76,84
3.7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	80	110	110	120	130	140	150	150 Orang (tenaga bersertifikat yang ada di DPUPRP Ciamis)
3.8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0 (tidak terjadi kecelakaan konstruksi)
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten(TPB2)	Persen	0,23	0,23	100	100	100	100	100	100
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	89,75	89,75	90	92	94	95	96	96
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	42.977	41.742	40.284	40.084	39.884	39.684	39.484	39.484
4.5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Perumahan	7	7	7	5	5	5	5	7
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Per 10.000 Penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	n/a	1,76	3,4	4	4,5	5	5,5	5,5
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	n/a	1,6	3,5	4,5	5,5	6	6,5	6,5
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	n/a	75	53	28	31	34	37	37
5.6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	82,34	93,94	100	100	100	100	100	100
5.7.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Persen	75,71	96,6	77,77	76,47	75	73,33	71,42	71,42
6. Sosial										
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM, TPB1)	Persen	99,97	100	100	100	100	100	100	100
6.2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	74,65	75	80	81	82	83	84	84
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1. Tenaga Kerja										
1.1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	n/a	0	0	0	20	25	30	30
1.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	n/a	63,47	64	64,5	65	65,5	70	70
1.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	n/a	3	54,3	54	54	54	54	54
1.5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	Kasus	n/a	14,71	23,48	20	20	20	20	20
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD(TPB5)	Persen	2,45	2,88	3,47	4,06	4,65	5,24	5,83	5,83
2.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten(TPB5)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	-	0,002	0,003	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	100.000 penduduk perempuan) (TPB5)									
3.	Pangan									
3.1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	13,74	14,45	17,86	18	18,3	18,6	19	19
4.	Pertanahan									
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	76	76	100	100	100	100	100	100
4.3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Lingkungan Hidup									
5.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Nilai		55,21	62,41	62,42	62,43	62,43	62,44	62,44
5.27	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	m3	n/a	n/a	158.161,44	158.161,44	158.161,44	158.161,44	158.161,44	158.161,44
5.28	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	usaha/kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	89	93	95,4	96	97	97	98	98
6.2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	n/a	8,89	10,56	15	20	25	30	30
6.3.	Kepemilikan akta kelahiran(TPB1)	Persen	47,84	54,27	55,38	54	56	58	60	60
6.4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	16,88	40,74	0	0	0	0	0	0

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri(TPB10)	Persen	1,88	4,12	11,11	30,82	53,76	66,27	82,19	82,19
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> (TPB3)	Orang	2,055	2,050	2,05	2,045	2,04	2,035	2,03	2,03
8.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>) (TPB5)	Persen	75,9	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5	76,6	76,6
8.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (TPB5)	Persen	12,47	12,06	11,86	11,33	10,88	10,49	10,16	10,16
9.	Perhubungan									
9.1.	Rasio konektivitas Kabupaten	Persen	n/a	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,83
9.2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Persen	n/a	0,17	0,17	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10.	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	n/a	0	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	n/a	50	50	60	70	80	90	90
10.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	n/a	57,86	56,57	56,57	56,84	57,45	58,55	58,55
11.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	n/a	2,45	2,55	2,75	3,00	3,25	3,50	3,50
12.	Penanaman Modal									
12.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Persen	n/a	7,12	-9,80	3,63	5,50	5,50	5,50	5,50
13.	Kepemudaan dan Olah Raga									
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	20	20,30	20,31	20,40	20,50	20,60	20,70	20,70
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	40	47,50	47,69	47,70	47,71	47,72	47,73	47,73
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	1	7	2	3	4	3	3	15
14.	Statistik									
14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
14.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15.	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persandian									
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	n/a	n/a	11,54	19,23	19,23	23,08	26,92	100
16.	Kebudayaan									
16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	22,46	22,46	22,46	22,50	22,60	22,70	22,80	22,80
17.	Perpustakaan									
17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	n/a	n/a	74,64	74,65	74,66	74,67	74,68	74,68
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	n/a	n/a	56,34	56,35	56,36	56,37	56,38	56,38
18.	Kearsipan									
18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	n/a	n/a	75,18	75,19	75,2	75,21	75,22	75,22
18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	n/a	n/a	66,41	66,42	66,43	66,44	66,45	66,45
Layanan Urusan Pilihan										
1.	Kelautan dan Perikanan									
1.1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten	Ton	n/a	98.196.860	24.059,10	24.059,10	25.030,70	25.531,63	26.042,58	26.042,58
2.	Pariwisata									
2.1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (TPB8)	Persen	n/a	0,5	1	0,5	0,25	0,1	0,1	0,1
2.2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Persen	n/a	1,9	1,6	1,35	1,13	0,93	0,78	0,78
2.3.	Tingkat hunian akomodasi	Persen	n/a	19,8	54,22	60	66	72,6	79	79
2.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	n/a							
2.5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	n/a	790.050.400,00	450.133.000,00	472.639.650,00	496.271.632,50	521.085.214,13	547.139.474,84	547.139.474,84
3.	Pertanian									
3.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (TPB2)	Ku/Ha	66,47	65,5	65,5	65,7	65,9	66,1	66,3	66,3
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0	0	0	25	50	75	100	100
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral									

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5. Perdagangan										
5.1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	n/a	85,00	88,35	88,5	88,85	89,00	89,15	89,15
5.2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	n/a	92,62	93,94	94,00	94,00	95,00	97,00	97,00
5.3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	Persen	n/a	38,84	53,57	55,00	60,00	70,00	80,00	80,00
6. Perindustrian										
6.1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Persen	n/a	1,34	3,11	3,50	3,60	3,94	4,00	4,00
6.2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	n/a	0,40	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,00
6.3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	n/a	100	73,08	74,12	74,4	74,64	75,00	75,00
6.4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Penunjang Urusan										
1. Perencanaan dan Keuangan										
1.1.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	11,57	10,40	12,00	15,00	19,00	22,00	25,00	25,00
1.2.	Rasio PAD	Persen	9,12	11,17	9,70	12,70	15,70	18,70	21,70	21,70
1.3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	3	3	3	3	3	3	3
1.4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1	1	3	3	3	3	3	3
1.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	Persen	n/a	4,00	2,95	25,06	22,99	22,34	21,70	21,70
1.6.	Opini Laporan Keuangan (TPB16)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Pengadaan										

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	n/a	43,00	16,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	34,74	46,23	31,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3. Kepegawaian										
3.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	135,16	145,15	169,73	170,00	170,80	170,82	170,83	170,83
3.2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	6,74	9,65	9,06	10,00	10,50	11,00	12,00	12,00
3.3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	95,35	96,49	96,08	96,09	96,10	97,00	100,00	100,00
4. Manajemen Keuangan										
4.1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	1,12	10	6	8,6	11,2	13,8	16,4	16,4
4.2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	0,54	9	16	18	20	22	24	24
4.3.	Managemen Aset		4	4	4	4	4	4	4	4
4.4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	0,32	11	4	3,5	3	2,5	2	2
5. Transparansi dan Partisipasi Publik										
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disajikan sebagaimana di bawah ini.

9.1 Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan sampai dengan tahun 2024. Untuk itu sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu adanya perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; serta dampak bencana pandemi *Covid-19*. Dampak dari kedua hal tersebut perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1 Masa Transisi Tahun 2021

Pada tahun 2021, dilakukan penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2020. Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran Rancangan Akhir

Perubahan RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat *outcome* tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai respon dari terjadinya pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan-peraturan yang baru tersebut pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan, sedangkan pada dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019 dan tahun 2020; serta rencana tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022, 2023 dan 2024 yang targetnya disesuaikan dengan capaian tahun 2020.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD

Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2025 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005 - 2025, Rancangan RKP Tahun 2025, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2025, dan hal-hal penting lainnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi nasional akibat pandemi *Covid-19* menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi *Covid-19* dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2020. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019 dan 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2022, 2023 sampai dengan Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022 sampai dengan 2024.

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan dalam rangka menanggapi dampak pandemi *Covid-19*, serta mengakomodir perubahan-perubahan permasalahan dan isu strategis serta prioritas Daerah. Sejalan dengan prioritas Nasional dan Provinsi, prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis dalam dua tahun ke depan akan lebih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai sekarang.
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Selanjutnya Perubahan Renstra tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD Kabupaten Ciamis secara periodik.
10. Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk Triwulan 1, 2, 3 dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk Triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

11. Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJM Desa dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengharapkan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Visi Kabupaten Ciamis yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”**.

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001